

MEMBANGUN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA INDONESIA MELALUI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL

**(Studi Di Desa Wukirsari, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta)**

DISERTASI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Doctor



Oleh:

SUSETYA HERAWATI
NIM: 127030200012005

**PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
MINAT ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

DISERTASI

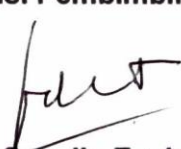
**MEMBANGUN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA INDONESIA
MELALUI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL
(Studi di Desa Wukisari, Kabupaten Bantul,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Oleh :

SUSETYA HERAWATI

Dipertahankan di depan penguji
Pada Tanggal : 10 Juli 2017
dan dinyatakan lulus memenuhi syarat akademik
Sebagai Disertasi Doktor

Komisi Pembimbing,


Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS
Promotor


Dr. Bambang Santoso Haryono, MS
Ko - Promotor 1


Dr. Riyanto, M.Hum
Ko - Promotor 2

Malang,

Universitas Brawijaya
Fakultas Ilmu Administrasi
Dekan,


Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS.
NIP. 19610905 198601 1 002



IDENTITAS TIM PENGUJI DISERTASI

Judul Disertasi : **MEMBANGUN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
INDONESIA MELALUI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL**
(Studi di Desa Wukirsari, Kabupaten Bantul, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta)

Nama Mahasiswa : **SUSETYA HERAWATI**

NIM : 127030200012005

Program : Doktor Ilmu Administrasi

Minat : Ilmu Administrasi Publik

KOMISI PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr Soesilo Zauhar, MS

Ko-Promotor 1 : Dr. Bambang Santoso MS,

Ko-Promotor 2 : Dr. Riyanto, M.Hum,

TIM DOSEN PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. Sumartono, MS

Dosen Penguji 2 : Dr. Makmur, MS

Dosen Penguji 3 : Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si.

Dosen Penguji 4 : Dr. Irwan Noor, MA

Dosen Penguji 5 : Prof. Dr. P. Israwan Setyoko, MS

Dosen Penguji 6 : Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA.

Tanggal Ujian : 10 Juli 2017

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah DISERTASI ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia DISERTASI ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang,

Mahasiswa,



Nama : SUSETYA HERAWATI

NIM : 127030200012005

Program Doktor Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya



Motto:

Jangan pernah ragu untuk membuat lompatan dalam kehidupan

Karena

Setiap lompatan kehidupan itu, kita sedang melakukan perubahan

Tuhan akan memberikan jalan dari setiap perubahan yang kita lakukan

Karya ilmiah ini aku persembahkan kepada :

Almararhum Ayahku Wagiyo, dan Ibuku Tercinta Hj. Sri Rahayu Ningsih .

Suamiku tercinta, yang telah memberikan cerita dalam perjalanan hidupku baik dalam suka dan duka, Ir. Abrianto, MM

Putra-putraku, Darcyando GeoDewa, Saktiangga GeoJiwa, GammaPutra GeoSultan, Kalian adalah rejeki dari Alloh yang sangat luar biasa.

Jadilah anak-anak yang dapat memberikan perubahan baik bagi kehidupan bersama.

Saudara- saudaraku

Teman –teman kuliahku yang sangat spesial, terimakasih tanpa menyebutkan satu-persatu telah membantuku untuk terus bersemangat dalam menyelesaikan studi ini.

Pengurus Yayasan Suluh Nuswantara Bakti

Pengurus Pusat Keluarga Besar FKPPi

Deputi Kewirausahaan Pemuda, Kementerian Pemuda Dan Olahraga

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Dan Rekan-rekan Pengusaha Muda di Provinsi Daerah latimewa Yogyakarta,

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Susetya Herawati, ST, Msi
2. Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 20 Februari 1969
3. Jenis Kelamin : Wanita
4. Agama : Islam
5. Riwayat Pendidikan :
 - a. Program Doktor Ilmu Administrasi (PDIA) FIA Universitas Brawijaya Tahun Ajaran 2013/2014
 - b. Pasca Sarjana Manajemen Administrasi Pemerintah Daerah (MAPD) Institut Ilmu Pemerintahan , Jakarta Lulus Tahun ,2011
 - c. Sarjana Jurusan T. Perminyakan, Fakultas Teknologi Mineral UPN “Veteran” Yogyakarta Lulus Tahun 1999
 - d. SMA Negeri 2 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Lulus tahun 1987
 - e. SMP Negeri Canden Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Lulus tahun 1984
 - f. SD Negeri Kepuh Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Lulus Tahun 1981
6. Pendidikan lainnya:
 - a. Pendidikan Kader Tingkat Nasional Pusdik Adjend TNI, Bandung (2010)
 - b. LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI, Pendidikan Ketahanan Nasional Pemuda Bagi Unsur Organisasi Kepemudaan Tingkat Nasional Dan Ketua KNPI Provinsi Se Indonesia Angkatan I (2009)
 - c. China Guangxi International Youth Exchange Institue Nanning P.R.C.- Program Pertukaran Pemuda ASEAN_CHINA 2008, Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (2008)

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, yang hanya dengan Rahmad, petunjuk dan hidayah Nya, penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul Membangun Kewirausahaan Pemuda Indonesia Melalui Nilai-nilai Kearifan Lokal (Studi di Desa Wukirsari, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Penulis menyadari tanpa adanya dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, tidak akan pernah karya ilmiah ini terselesaikan dengan baik.

Karya ilmiah ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan Promotor dan ko- Promotor yang dengan kesibukannya masih meluangkan waktu untuk membimbing, mengoreksi, memberikan masukan –masukan terhadap konsep penulisan dengan sangat baik dan sangat sabar. Selain itu tidak henti-hentinya membesarkan hati penulis untuk tidak patah semangat untuk terus penulis menyelesaikan karya ilmiah ini. Dan selanjutnya ujian demi ujian yang dijalani penulis banyak sekali menuntun pada pemikiran penulis dari pertanyaan, masukan dan saran para penguji dalam menyempurnakan karya ilmiah ini. Untuk itu Penulis dengan setulus hati menyampaikan rasa hormat, dan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Prof Dr Ir Mohammad Bisri, MS selaku Rektor Universitas Brawijaya Malang beserta unsur pimpinan dan segenap jajaran fungsional, yang telah memberi kesempatan, dukungan dan fasilitas dalam studi ini.
2. Prof Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan FIA Universitas Brawijaya Malang dan segenap pimpinan beserta para dosen khususnya para dosen pengajar program S3 yang telah berkenan memberikan pengajaran dan bimbingan dengan penuh dedikasi.
3. Prof. Dr Soesilo Zauhar MS, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Administrasi kampus Jakarta Dan juga selaku Promotor yang telah memberikan bimbingan dan dukungan keperluan dan fasilitas dalam studi ini. Juga telah memberi perhatian dan bimbingan yang begitu besar. Di tengah-tengah kesibukan

fungsiional, beliau berusaha memberikan bimbingan dan dorongan yang “luar biasa”, dalam memotivasi untuk terus maju.

4. Dr. Bambang Santoso MS, selaku Ko-Promotor yang telah memberi perhatian dan bimbingan yang begitu besar. Di tengah-tengah kesibukan beliau berusaha memberikan bimbingan dan dorongan yang “luar biasa”, tentang pemahaman ilmu administrasi publik, dan terus memberikan semangat untuk segera menyelesaikan studi ini..
5. Dr. Riyanto, M.Hum, selaku Ko-Promotor yang selalu memberikan bimbingan dan pemikiran dengan penuh kesabaran, pemahaman tentang Budaya Kearifan Lokal dan perkembangannya serta terus mendorong agar segera menyelesaikan studi ini.
6. Bapak dan Ibu Penguji yang telah sangat luar biasa memberikan kritik, saran dan masukan demi sempurnanya disertasi ini : Prof . Dr. Sumartono, MS. Dr. Makmur, MS. Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si. Dr. Irwan Noor, MA. Prof. Dr. P. Israwan Setyoko, MS. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA.
7. Kementerian Pemuda dan Olahraga, melalui Asdep Kewirausahaan Pemuda yang telah membukakan akses pada daerah penelitian seluas-luasnya, juga data –data penunjang yang diberikan saat penusunan karya ilmiah ini.
8. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Badan Perencana Pembangunan Daerah, yang telah membantu dalam kegiatan saat penelitian Lapangan.
9. Kepala Staf Korem 072, Pamungkas Daerah Istimewa Yogyakarta, Bp. Kol Inf. Arkamelvi Karmani, yang bersedia menjadi fasilitator dalam pada kegiatan penelitian di Kabupaten Bantul.
10. Komando Distrik Militer 0729, Bantul, Letnan Kol Tumadi yang telah memfasilitasi tempat untuk penyelenggaraan diskusi bersama pemuda se Kabupaten Bantul Tentang Kewirausahaan Pemuda.
11. Kepala Desa Wukirsari, melalui Carik yang telah memberikan dukungan berupa data dan kemudahan pada saat kegiatan penelitian lapangan.
12. Ketua Umum KB-FKPPI Kakanda Pontjo Sutowo yang telah memberikan kesempatan untuk dapat belajar pada jenjang Doktor sebagai program pengembangan wawasan dan kaderisasi serta telah menyumbangkan materi

dan kepercayaan yang tinggi sebagai salah satu kader terpilih. Dengan harapan akan disebarkan pada anggota lainnya.

13. Ketua Yayasan Suluh Nuswantara Bakti, Bapak Iman Sunario yang telah mengijinkan hasil- hasil kebaruan dari program Yayasan Nilai Kelndonesiaan untuk dikembangkan sebagai kebaruan dari karya ilmiah ini.
14. Adik-adik pemuda wirausaha di Kabupaten Bantul.
15. Rekan-rekan staf administrasi jurusan Administrasi publik, baik yang di kampus Jakarta maupun yang di Malang, atas bantuan dan dukungannya.
16. Ibunda tercinta dan saudara-saudara ku atas segala doanya
17. Suami dan anak-anakku atas keikhlasannya dalam memberikan dukungan kelonggoran waktu, dan doa nya.

Malang, 10 Juli 2017

Susetya Herawati
NIM 127030200012005

RINGKASAN

Susetya Herawati, NIM 127030200012005 Program Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya. **MEMBANGUN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA INDONESIA MELALUI NILAI- NILAI KEARIFAN LOKAL** (Studi di Desa Wukirsari, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Promotor Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS, Ko-Promotor Dr. Bambang Santoso Haryono, MS dan Ko- Promotor Dr. Riyanto, M. Hum.

Keterarikan peneliti dalam melakukan penelitian Membangun Kewirausahaan Pemuda Indonesia Melalui Nilai-Nilai Kearifan Lokal adalah adanya Perda Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2011 Tentang RTRW dalam mengembangkan potensi wilayah dengan Slogan yang dimilikinya yaitu "*Bantul The Harmony of Natural and Culture*". Pembangunan melalui pengembangan kawasan strategis ini seakan menjawab tantangan globalisasi, memberikan dampak pada aspek kehidupan masyarakat. Penetapan Desa Wisata Budaya Wukirsari seolah memberikan jawaban akan arti pentingnya mengembangkan budaya kearifan lokal melalui kewirausahaan. Kesungguhan pemerintah dalam mendukung kewirausahaan ini dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang banyak sekali membahas tentang kewirausahaan. Tujuannya adalah menjadikan pemuda menjadi mandiri.

Dalam perkembangannya penelitian di Desa Wukirsari terdapat kesenjangan yang harus segera diatasi baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Pemuda sendiri. Kesenjangan tersebut, adanya masalah gender, ketersediaan lahan pertanian yang mulai sempit, adanya pengangguran, dan putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi dan pemuda usia produktif kurang bisa menekuni kegiatan seni produksi warisan dari nenek moyang. Dari berbagai kesenjangan tersebut hal mendasar yang harus diatasi adalah masalah budaya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nugroho (2015) bahwa dalam membangun kewirausahaan ada tiga masalah pokok yaitu: (1). Masalah budaya, (2) Masalah tatanan masyarakat dan (3) Kecakapan individu pada masyarakat itu sendiri. Kegagalan dari pembangunan karena ketiadaan konsep yang memadai bagi keberhasilannya. Adapun konsep-konsep pembangunan yang gagal menurut Joesoef (2014: 158-162) tersebut dikarenakan : (1) Konsep pembangunan yang bersifat partial dan menyendiri, (2) Konsep pembangunan yang mengabaikan aspek human dari rakyat (manusia) Indonesia. Manusia dalam kehidupannya tidak hanya butuh "*to have more*" tetapi lupa "*to be more*", berarti bahwa mereka *soft esteem* dan ingin dihargai martabatnya dengan dilibatkan, berpartisipasi dalam pemikiran dan pelaksanaan pembangunan. (3) Konsep pembangunan yang tidak dikaitkan sama sekali dengan konsep "*Nation State Building*" tetapi dengan kenaikan GNP, yang seolah olah dengan kenaikan pendapatan nasional negara-bangsa sebagai satu entitas dengan sendirinya menjadi semakin kukuh. (4) Konsep pembangunan yang mengabaikan etika masa depan yaitu etika yang harus dihayati sekarang untuk dan demi masa depan. (4) Konsep pembangunan yang tidak memanfaatkan penalaran aneka

disiplin ilmiah, jadi kerja pembangunan bersifat multidisipliner. Lebih lanjut disampaikan Swasono (2010) pembangunan yang berhasil dan lebih lagi dalam menghadapi globalisasi maka masyarakat khususnya pemuda harus lah memiliki kemandirian dalam sikap dan mindset, sikap berdikari dengan menolak ketergantungan pada pihak lain, sikap subordinasi dan menolak mental pengemis.

Untuk dapat mencapai itu semua Pemerintah Daerah tidak cukup hanya dengan *Good Governance* melalui paradigma *New Public Management* (NPM) bahwa masyarakat adalah pelanggan dan *New Public Service* (NPS) warga negara adalah *citizen*. Namun harus juga memahami perubahan yang terus dinamis. Untuk itu perlu mengkonstruksikan melalui konsep *Dynamic Governance* dimana kultur atau kearifan lokal menjadi fondasi dasar dalam pembangunan juga kapabilitas baik dari pemerintah ataupun masyarakatnya melalui tiga prinsip utama yaitu *Thinking ahead*, *thinking across* dan *thinking again*. Kultur atau kearifan lokal pada akhirnya menjadi penentu dalam proses perumusan kebijakan, menjadi bahan pertimbangan dalam mengadopsi atau mengadaptasi kebijakan baru dan sebagai katalisator. Dalam mengkonstruksi konsep *Dynamic Governance*. Ki Hadjar Dewantara menyampaikan bahwa orang Jawa akan mampu berkarya dengan baik dengan cara *Niteni*, *Niroke* dan *Nambahi*. Sejalan dengan hal itu perilaku orang Jawa diharapkan mampu melakukan *Mulat Saliro Hangroso Wani dan Bisoo Rumongso* dalam mewujudkan *Memayu Hayuning Bawono*. Sehingga budaya kearifan lokal di Desa Wukirsari yang meyakini "*Berkah ndalem*" merupakan rejeki dan anugerah dari Tuhan melalui Raja nya semakin memberikan semangat dan keyakinan yang tinggi.

Dari hal-hal tersebut diatas dalam penelitian penting melibatkan tiga aktor penting untuk keberhasilan membangun kewirausahaan pemuda yaitu Pemerintah, swasta dan pemuda itu sendiri sesuai dengan perannya masing-masing. Untuk dapat mengatasi kesenjangan yang terjadi maka penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan membangun kewirausahaan pemuda baik itu programnya, mekanisme pelaksanaannya, aktor yang terlibat dan nilai kearifan lokal yang dapat dikembangkan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat, sehingga nantinya dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk model dalam membangun kewirausahaan pemuda.

Untuk memperkuat penelitian ini, peneliti melakukan kajian melalui penelitian terdahulu, untuk melihat kebaruan yang akan ditemukan dalam penelitian ini. Juga teori- teori yang mendukung baik itu teori tentang administrasi publik, teori pembangunan, teori tentang kearifan lokal dan teori tentang kewirausahaan.

Sedangkan metode yang digunakan penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, melalui teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif Model Interaktif yang dipopulerkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang meliputi Pengkodingan data, penyajian data dan menggambarkan kesimpulan / verifikasi.

- Pentingnya membangun sinergi antar aktor melalui kolaborasi
- Pentingnya mengkonstruksikan konsep *Dynamic Governance* dalam kewirausahaan pemuda sesuai nilai-nilai kearifan lokal
- Kebijakan Bela-Beli sebagai kebijakan unggul yang ditetapkan oleh daerah sesuai budaya yang berkembang.

```

graph TD
    Globalisasi([Globalisasi]) --> UU40[UU No. 40/2009  
Tentang Kepemudaan]
    UU40 --> KebijakanKewirausahaan([Kebijakan Kewirausahaan  
Pemuda])
    KebijakanKewirausahaan --> KebijakanBelaBeli([Kebijakan Bela Beli])
    KebijakanBelaBeli --> Pelaksanaan[Pelaksanaan membangun  
kewirausahaan melalui  
nilai-nilai kearifan lokal]
    Pelaksanaan --> LembagaIndependen[Lembaga Independen]
    LembagaIndependen --> Program[Program  
Mekanisme  
Aktor  
Kearifan Lokal]
    Program --> JiwaPemuda[Jiwa Pemuda  
Berkarakter  
Berkapasitas  
Berdaya Saing]
    JiwaPemuda --> Pemuda[Pemuda  
Inovatif  
Kreatif  
Mandiri]
    
    DesaWisataBudaya[Desa Wisata Budaya] --> UU40
    UU40 --> KebijakanKewirausahaan
    
    NPM([NPM  
(Customer)]) --> NPS([NPS  
(Citizen)])
    NPS --> DynamicGovernance([Dynamic Governance  
- Kebudayaan  
- Kapabilitas])
    DynamicGovernance --> Pelaksanaan
    
    FaktorPendorong[Faktor Pendorong] --> Program
  
```

Model Kewirausahaan Pemuda Indonesia melalui Nilai-Nilai Kearifan Lokal
(Model Herawati)

Pada akhirnya penelitian ini menyatakan perlu mengkonstruksikan seluruh yang baik dalam NPM dan NPS kedalam Konsep *Dynamic Governance*, hal ini karena kearifan lokal di Desa Wukirsari menjadi fondasi yang kuat dalam menghadapi perubahan yang tidak tetap. Kearifan lokal merupakan pengalaman hidup yang menginternalisasi pemuda dalam membangun kewirausahaan yang tergalil dari daerah. Sehingga kearifan lokal perlu digali lebih dalam lagi dalam rangka penguatan karakter pemuda wirausaha. Pemerintah daerah mesti mampu membuat kebijakan yang dibutuhkan dalam membangun kewirausahaan pemuda. Adanya pembentukan lembaga independen sebagai budaya kolaborasi, untuk dapat melaksanakan membangun kewirausahaan pemuda di daerah.

Kata Kunci : Pembangunan, Pemuda Wirausaha, Kearifan lokal



SUMMARY

Susetya Herawati, NIM 127030200012005 Program Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administasi Publik, Universitas Brawijaya. **MEMBANGUN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA INDONESIA MELALUI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL** (Studi di Desa Wukirsari, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Promotor Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS, Ko-Promotor Dr. Bambang Santoso Haryono, MS dan Ko- Promotor Dr. Riyanto, M. Hum

The interest of researchers in conducting research of Building Youth Entrepreneurship Indonesia Through Local Wisdom Values is because of Perda Bantul regency no. 4 Year 2011 about RTRW in developing the potential of the region with its slogan "Bantul The Harmony of Natural and Culture". Development through the mining of this strategic area seemed to respond to the challenges of globalization, impacting on aspects of community life. Establishment of Wukirsari Cultural Tourism Village seemed to provide an answer to the importance of developing a culture of local wisdom through entrepreneurship. The seriousness of the government in supporting this entrepreneurship with the enactment of Law no. 40 Year 2009 about Youth which provides a lot of discussion about entrepreneurship. The goal is to make the youth self-sufficient.

In the development of research in Wukirsari village there are gaps that must be addressed either by the Central Government, Local Government, Private, and Youth itself. The gap, the existence of gender problems, the availability of agricultural land that began narrow, the unemployment, and drop out due to economic limitations and productive youth age less able to pursue the art production activities inheritance from the ancestors. Of the various gaps, the fundamental thing that must be addressed is a cultural issue. As stated by Nugroho (2015) that in building entrepreneurship there are three main issues namely: (1). Cultural issues, (2) Problems of community order and (3) individual skills of the community itself. Failure of development due to lack of adequate concept for its success. The concept of development that fails according to Joesoef (2014: 158-162) is due to: (1) The concept of development that is partial and aloof, (2) The concept of development that ignores the human aspect of the people (human) Indonesia. Man in his life not only needs to "to have more" but forgot to be more, meaning that they seft esteem and want to be respected by being involved, participating in the thinking and implementation of development. (3) The concept of development that is not linked at all with the concept of "Nation State Building" but with the increase of GNP, which seems to increase the national income of the nation-state as an entity by itself becomes increasingly strong. (4) The concept of development that ignores future ethics is an ethic that must be lived now for and for the future. (4) The concept of development that does not exploit the reasoning of various scientific disciplines, so the development work is multidisciplinary. Furthermore, Swasono (2010) said successful development and more in facing globalization, especially the youth community must have independence in attitude and mindset, self-reliance by

refusing dependence on others, subordination attitude and rejecting the beggar's mentality.

To be able achieving that all Local Government is not enough just with Good Governance through New Public Management paradigm (NPM) that society is customer and New Public Service (NPS) citizen is citizen. But also to be understood that the dynamic changes. For that we need to construct through Dynamic Governance concept where the culture or local wisdom becomes the basic foundation in development also capability either from government or society through three main principles that is Thinking ahead, thinking across and thinking again. Culture or local wisdom is ultimately a determinant in the policy formulation process, a consideration in adopting or adapting new policies and as a catalyst. In constructing the concept of Dynamic Governance. Ki Hadjar Dewantara said that the Javanese will be able to work well with *Niteni*, *Niroke* and *Nambahi*. In line with that, the behavior of the Javanese is expected to be able to do *Mulat Saliro Hangroso Wani* and *Bisoo Rumongso* in realizing Memayu Hayuning Bawono. So the culture of local wisdom in the village of Wukir Sari who believe "*Berkah Ndalem*" is a fortune and grace from God through his King increasingly give the spirit and high confidence. From the above mentioned points, the research involving three important actors for the success of building youth entrepreneurship, those are Government, private and youth itself in accordance with their respective roles. To be able to overcome the gaps that occur then this research focuses on the implementation of building youth entrepreneurship is the program, its implementation mechanisms, the actors involved and the value of local wisdom that can be developed, as well as the factors that support and inhibit, so that later can provide appropriate recommendations for Model in building youth entrepreneurship.

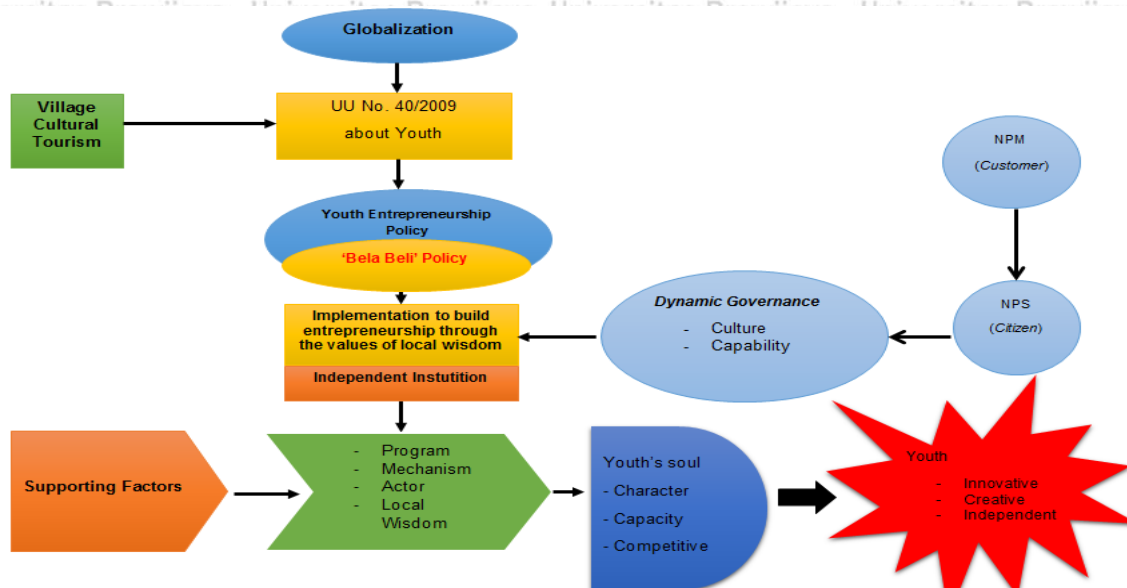
To strengthen this research, researchers conducted a study through previous research, to see the novelty that will be found in this study. Also theories that support both the theory of public administration, development theory, theories of local wisdom and the theory of entrepreneurship.

While the method used this research by using qualitative approach, through data collection techniques conducted by observation (observation) and interview. The data obtained are further processed and analyzed using qualitative methods of the Interactive Model popularized by Miles, Huberman and Saldana (2014) which include, data encoding, presentation of data and drawing conclusions / verification.

From the research result of Building Indonesian Youth Entrepreneurship through Local Wisdom Values in Wukirsari Village, Bantul Regency, this activity has been running well, but there are still some things that must be considered include:

- A. The importance of building synergy between actors through collaboration
- B. The importance of constructing the concept of Dynamic Governance in youth entrepreneurship in accordance with the values of local wisdom
- C. '*Bela-Beli*' policy as a superior policy set by the region according to the growing culture.

Model Recommendation



Picture

Model of Indonesian Youth Entrepreneurship through Local Wisdom Values
(Model Herawati)

At the end, this research states that it is necessary to construct all the good in NPM and NPS into the Dynamic Governance Concept, because local the wisdom in Wukirsari Village is a strong foundation to face the irregular changes. Local wisdom is a life experience that internalizing youth in building entrepreneurship excavated from the region. So that local wisdom needs to be dug deeper in order to strengthen the entrepreneurial youth. Local governments should be able to make the policy needed to build youth entrepreneurship. The establishment of an independent institution as a culture of collaboration, to be able to implement build youth entrepreneurship in the region

Keywords: Development, Youth Entrepreneurship, Local Wisdom

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena dengan berkat dan karunia Nya, akhirnya penulis dapat menyampaikan tulisan disertasi yang berjudul Membangun Kewirausahaan Pemuda Indonesia Melalui Nilai-nilai Budaya Kearifan Lokal (Studi di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

Disertasi ini bertujuan untuk mendiskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan : (1). Pelaksanaan program membangun kewirausahaan pemuda, (2). Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses dalam membangun kewirausahaan pemuda dan (3) Membangun model yang tepat dalam membangun kewirausahaan pemuda melalui nilai-nilai kearifan lokal.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data, pengamatan (Observasi) dan wawancara. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan Model Analisis Data dari Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang disebut dengan Analisis Data Model Interaktif, yang meliputi: kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun alur dari kegiatan analisis ini adalah pengkodean data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Peneliti sangat menyadari akan kekurangan dan keterbatasannya sebagai manusia biasa, oleh karena itu penulis mengharapkan dengan sangat saran yang membangun supaya tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Malang, 10 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
IDENTITAS TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
RINGKASAN.....	ix
SUMMARY.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB. 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	32
1.3. Tujuan Penelitian.....	32
1.4. Manfaat Penelitian.....	33
BAB. 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	35
2.1. Hasil Penelitian Terdahulu.....	35
2.2. Kewirausahaan Pemuda.....	53
2.3. Konsep Pembangunan Pemuda.....	70
2.3.1. Pembangunan Perdesaan.....	78
2.3.2. Pemberdayaan Pemuda Desa.....	83
2.3.3. Partisipasi Pemuda Dakam Pembangunan.....	92
2.3.4. Aktor Dalam Pembangunan Pemuda.....	98
2.4. Desentralisasi dalam prespektif Administrasi Publik.....	104
2.4.1. Good Governance dalam Prespektif Pemuda Wirausaha....	110

2.4.2. <i>New Public Management</i> (NPM) dan <i>New Public Service</i> (NPS).....	117
2.4.3. Dynamic Governance.....	128
2.5. Kearifan Lokal Memperkuat Pemuda Wirausaha	131
2.6. Kerangka Pikir.....	135
BAB. 3. METODE PENELITIAN.....	157
3.1. Pendekatan Penelitian.....	157
3.2. Fokus Penelitian.....	159
3.3. Lokasi dan Situs Penelitian.....	160
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	160
3.4.1. Jenis Data.....	160
3.4.2. Sumber Data.....	161
3.5. Prosedur dan Teknik Pengumpulan Data.....	164
3.6. Keabsahan Data.....	168
3.7. Analisis Data.....	170
BAB 4. DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN.....	176
4.1. Profil Kabupaten Bantul.....	176
4.1.1. Administrasi Pemerintah.....	178
4.1.2. Kabupaten Bantul Memiliki Potensi Wilayah.....	180
4.1.3. Pembinaan Batas Wilayah.....	184
4.2. Profil Desa Wukirsari : Situs Penelitian.....	185
4.2.1. Orientasi dan Batas Administrasi.....	185
4.2.2. Kondisi Fisik Wilayah	187
4.3. Data Kependudukan Desa Wukirsari.....	190
4.4. Kondisi Perekonomian dan Sosial Budaya.....	194
BAB 5. HASIL PENELITIAN.....	198
5.1. Pelaksanaan Membangun Kewirausahaan Pemuda di Desa Wukirsari Kabupaten Bantul.....	198
5.1.1. Program.....	200

DAFTAR PUSTAKA 366

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.....	58
Gambar 2.1. Alur Pengangguran Menjadi Entrepreneur.....	60
Gambar 2.3. Model Pertumbuhan Empat Tahap.....	62
Gambar 2.4. Tahapan Pertumbuhan Usaha dan Instansi.....	64
Gambar 2.5. Aktor Dalam Kebijakan Publik.....	99
Gambar 2.6. Frame Work For Dynamic System.....	130
Gambar 2.7. Kerangka Pemikiran.....	156
Gambar 3.1. <i>The Qualitative Proses of Data Analysis</i>	174
Gambar 4.1. Peta Tata Ruang Kecamatan Imogiri.....	188
Gambar 5.1. <i>Bacdrop</i> Diskusi Panel	208
Gambar 5.2. Pelaksanaan Diskusi Panel	209
Gambar 5.3. Kegiatan Pemuda pada Tatah Sungging.....	214
Gambar 5.4. Kegiatan Membatik.....	215
Gambar 5.5. Kegiatan Menyiapkan Kemasan.....	216
Gambar 5.6. Pertemuan pemuda Di RM Ingkung Kualo.....	220
Gambar 5.7. Pemuda Wirausaha Pemula.....	224
Gambar 5.8. Gazebo.....	227
Gambar 5.9. Display Batik di Sentra Industri.....	228
Gambar 5.10. Display Produk Hasil Tatah Sungging.....	228
Gambar 5.11. Tangga Menuju Makam Raja-Raja Mataram.....	241
Gambar 5.12. Pintu Pada Makam Raja-Raja Mataram.....	241
Gambar 5.13. Model Eksisting	261
Gambar 6.1. Mata Rantai yang menguatkan Kewirausahaan	270
Gambar 6.2. Tiga Pilar Inovasi.....	271
Gambar 6.3. 15 Jenis Industri kreatif di Indonesia.....	272
Gambar 6.4. Tahapan Pertumbuhan Usaha Dan Instansi terkait.....	282
Gambar 6.5. Kolaboratif antar aktor Kewirausahaan Pemuda.....	315
Gambar 6.6. Model Rekomendasi.....	362

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tabel Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 2.2. Perbandingan Karakteristik Konsep Administrasi Publik Dan Administrasi Pembangunan.....	119
Tabel 2.3. Perbandingan Prespektif Administrasi Publik (NPM dan NPS).....	125
Tabel 2.4. Perbandingan Antara Customer & Citizen.....	126
Tabel 4.1. Orbitrasi Jarak Tepuh.....	187
Tabel.4.2.JumlahPenduduk Desa Wukirsari Menurut Jenis Kelamin....	191
Tabel 4.3. Data Penduduk Menurut Usia.....	192
Tabel 4.4. Data Penduduk Menurut Struktur Pendidikan.....	193
Tabel 4.5. Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	193
Tabel 4.6. Warisan Budaya	194
Tabel 4.7. Kegiatan Budaya.....	196
Tabel 4.8. Kerajinan Industri Rumah Tangga.....	197
Tabel 5.1. Program Kegiatan Seksi Pora Kab. Bantul.....	217
Tabel.6.1.Pengukuran Keberhasilan Membangun Kewirausahaan Pemuda.....	279
Tabel.6.2.Penanggung jawab Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.....	306
Tabel 6.3. Daftar Matrik Fokus Penelitian	349

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin dapat Melakukan Penelitian Dari Pemda Bantul
2. Laporan Kegiatan Diskusi Panel Dari Kodim
3. Daftar Hadir Peserta Diskusi Panel Kewirausahaan Pemuda
4. Kerangka Pikir, Model eksisting dan Model Rekomendasi



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Indonesia sedang memperingati hari kemerdekaannya yang ke 72, dalam usia yang sudah mencapai 72 tahun ini pada kenyataannya masih tertinggal dengan beberapa negara Asean, serta belum mampu mensejahterakan dan mencerdaskan rakyatnya, sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini dapat dilihat dari *Human Development Index* (HDI) Indonesia yang masih berada pada level menengah di dunia. Berdasarkan laporan resmi UNDP pada 21 Maret 2017 yang lalu, HDI Indonesia adalah: 0.689 yang berada pada urutan 113 dari 188 negara yang diteliti. Peringkat Indonesia ini jauh di bawah Singapore, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Sedangkan angka harapan hidup (*Life expectancy at birth*) Indonesia rata-rata adalah 69.1 tahun dan rata-rata lamanya untuk sekolah (*Expected years of schooling*) adalah : 12.9 tahun.

Selanjutnya dalam percaturan dunia, daya saing Indonesia masih sangat memprihatinkan sesuai laporan *The Global Competitiveness Report 2016-2017* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* yang menempatkan daya saing Indonesia berada pada peringkat 41 dari 138 negara yang diteliti dengan skor 4,52 di bawah Singapura (peringkat 2), Malaysia (peringkat 25), dan Thailand (peringkat 34). Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perceptions Index* (CPI) Indonesia tahun 2016 seperti yang diumumkan oleh *Transparency International (TI)*, menempati urutan 90 dari 176 negara yang diukur. Kondisi tidak kuatnya daya saing ini juga karena angka kemiskinan yang masih relatif

tinggi. Berdasarkan laporan BPS yang dirilis pada September 2016 terdapat 27.764.32 atau sekitar 10.70% penduduk Indonesia berstatus miskin. Angka pengangguran pada November 2016 juga masih cukup tinggi yaitu sekitar 5,50% atau jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,02 juta.

Di sisi lain Indonesia memiliki modal budaya dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dengan keanekaragaman hayatinya. Bangsa Indonesia juga dikenal sebagai suatu bangsa yang memiliki peradaban terbuka dengan tingkat solidaritas dan kebersamaan yang tinggi. Bangsa yang berjiwa "kolektivisme" (bukan individualisme), di dalamnya terkandung budaya luhur yang telah ratusan tahun berkembang, seperti: gotong-royong, kekeluargaan, toleransi, musyawarah untuk mufakat dan masih banyak lagi. Selain itu, budaya bangsa Indonesia juga sangat beragam yang merangkum berbagai kebudayaan yang tumbuh di dalamnya dalam bentuk-bentuk kearifan lokal (*local wisdom*), ilmu pengetahuan dan teknologi, karya, keahlian, serta bentuk-bentuk kebudayaan lainnya yang bersifat unik. Selain memiliki keunggulan yang menjadi nilai luhur bangsa, menurut Koentjaraningrat (1992), bangsa Indonesia memang memiliki kelemahan atau sisi negatif dalam hal budaya, yaitu: feodal, rendah diri, malas, munafik, dan suka mencari kambing hitam.

Bangsa Indonesia memiliki Pancasila yang digali oleh para *founding fathers* dari akar budaya bangsa Indonesia serta telah ditetapkan sebagai dasar negara (*staat fundamental norm*) dan pandangan hidup bangsa (*welt anschauung*) dalam upaya menjaga keutuhan bangsa-negara maupun dalam mencapai tujuan nasional. Dalam mengekspresikan dirinya sesuai dengan ideologi Pancasila, bangsa Indonesia juga memiliki cara pandang (visi) Wawasan Nusantara yaitu visi kenegaraan sekaligus semangat yang

memandang seluruh kepulauan Indonesia beserta seluruh isi dan kandungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Wawasan Nusantara ini tumbuh dan berkembang secara bertahap, dibangun secara internal dengan mengikutsertakan seluruh kalangan bangsa Indonesia, dan secara eksternal dalam perjuangan di fora internasional khususnya di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam beberapa studi yang pernah dilakukan oleh Keesing (1974), Lindsay (2000), Huntington (2000), Hezel (2009) dan beberapa peneliti yang menguatkan temuan sebelumnya serta menegaskan bahwa kebudayaan merupakan faktor penentu keberhasilan (*determinant factor*) maju atau mundurnya suatu bangsa. Lebih lanjut UNESCO bahkan sampai memberikan kesimpulan bahwa budaya adalah peluang untuk mengembangkan, menggerakkan dan menghubungkan pembangunan berkelanjutan, "*Culture is a driver, enabler and enricher of sustainable development*" dengan argumen bahwa menempatkan budaya dalam setiap strategi pembangunan akan menjadi faktor pendorong yang kuat bagi pencapaian pembangunan.

Reformasi 1998 yang awalnya dimaksudkan untuk memperbaiki tata kehidupan berbangsa dan bernegara, justru bergerak terlalu jauh dan telah menggantikan sistem sendiri dengan sistem demokrasi liberal yang pada hakikatnya tidak sesuai dengan akar budaya bangsa. Amandemen UUD 1945 yang dilaksanakan ketika para elit bangsa ini sedang "mabuk reformasi" telah menyebabkan terjadinya perubahan mendasar pada konstitusi kita. UUD 1945 yang tadinya berorientasi pada kekuatan negara-bangsa serta konsep negara kesejahteraan yang dijiwai Pancasila, berubah menjadi UUD yang dijiwai paham individualisme-liberalisme. Konsep pembangunan pun dikembangkan dengan

berorientasi pada individu dan masyarakat warga (*civil society*) serta mekanisme pasar. Sejatinya bangsa Indonesia tidak bergolongan darah *renaissance* yang berjiwa individualisme, oleh karenanya sistem liberal tidak cocok dengan akar budaya bangsa Indonesia yang berjiwa kolektifisme. Amandemen UUD 1945 telah mengakibatkan Bangsa ini hidup dengan golongan darah lain karena dipaksakannya “tranplantasi liberal” yang telah membunuh gen ke-Indonesiaan yang mengalir dalam darah kebangsaan kita (Syahnakri, 2015). Tingkat kedewasaan para politisi kita dalam berdemokrasi pun masih rendah, maka yang mengedepan adalah, kebebasan berdemokrasi, kebebasan berpolitik, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berpolemik/berdebat tanpa mengindahkan etika, bahkan kebebasan mencaci-maki yang tiada batas.

Akibatnya, modal budaya yang dimiliki bangsa Indonesia yang seharusnya bisa menjadi pendorong (*driver*) atau faktor determinan bagi kemajuan bangsa, yang terjadi justru erosi aspek keunggulan budaya dan “promosi” pada aspek kelemahan budaya. Sebuah ironi, kini kita menyaksikan kemunduran budaya yang diwarnai dengan lunturnya Pancasila, patriotisme, nasionalisme, semangat Bhinneka Tunggal Ika, toleransi, gotong-royong, musyawarah-mufakat, dsb. Sebaliknya telah tumbuh subur budaya pecundang (*looser mentality*), mental kere (*culture of poverty*), *nerimo ing pandum*, budaya “short cut”, konsumtivisme, hedonisme, materialisme, machiavelianisme, individualisme, fanatisme sempit bahkan radikalisme. Sehingga, bangsa Indonesia yang tadinya hidup rukun, damai, penuh keramah-tamahan telah berubah drastis dalam waktu relatif singkat menjadi penuh konflik, anarkhi, tawuran, amuk massa dan sebagainya yang dapat kita saksikan hampir setiap hari di layar televisi atau mass media lainnya. Wawasan Nusantara sebagai visi

kenegaraan yang memandang Indonesia beserta seluruh isi dan kandungannya sebagai satu kesatuan yang utuh nyaris sirna.

Menurut Wibawarta (2016) mensinyalir ada lima permasalahan besar yang dihadapi bangsa Indonesia yang membuat modal dasar yang dimiliki bangsa Indonesia untuk berkembang kurang dapat dimaksimalisasi yaitu: *crisis nation character, economy gap, old mindset, corruption, dan moral hazard*. Bisa juga hal ini disebabkan karena kita memang belum secara sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan budaya dengan strategi pembangunan yang tepat.

Banyak pihak yang menyatakan bahwa bangsa ini lalai dalam membangun karakter (*character building*) yang telah dicanangkan sejak awal oleh bapak bangsa Indonesia. Akibatnya, ketahanan budaya bangsa Indonesia terkikis, bahkan kini nyaris menyentuh titik nadir. Ter-indikasi dari kenyataan bahwa banyak elit bangsa, penyelenggara negara, bahkan pimpinan lembaga tinggi negara telah dihinggap moral bobrok, korupsi, tidak berorientasi pada kepentingan bangsa-negara, hanya berorientasi pada kepentingan pribadi/golongan, bahkan sangat mungkin di antara mereka ada yang menjadi *proxy* dari para kapitalis asing. Mengingat demikian sentralnya peranan elite dan penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pembangunan karakter harus diprioritaskan untuk lapisan elite dan penyelenggara negara ini.

Sesungguhnya, dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan nasional baik rencana jangka panjang, jangka menengah, maupun rencana pembangunan tahunan, budaya telah menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang disahkan dengan Undang-Undang No. 17

tahun 2007, pembangunan bidang budaya ditempatkan sebagai misi pembangunan yang pertama.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor: 2 tahun 2015 telah meneguhkan kembali jalan ideologis pembangunan yaitu Pancasila dan Tri Sakti (berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan) serta menetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita. Agenda prioritas ke-delapan dan ke-sembilan terkait dengan pembangunan budaya. Kemudian ditindaklanjuti dengan Inpres Nomor: 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental yang meliputi lima program yaitu: 1) Program Gerakan Indonesia Tertib; 2) Program Gerakan Indonesia Bersih; 3) Program Gerakan Indonesia Melayani; 4) Program Gerakan Indonesia Mandiri; dan 5) Program Gerakan Indonesia Bersatu.

Misi pembangunan jangka panjang maupun program-program pembangunan jangka menengah bidang budaya serta agenda “Revolusi karakter bangsa” yang kemudian diikuti dengan Inpres No. 12 tahun 2016 tersebut masih perlu ditindaklanjuti dengan perumusan konsep, arah, sasaran, tahapan, dan prioritasnya berdasarkan suatu dokumen “Strategi Pembangunan Budaya Nasional” yang komprehensif dan “workable”. Sampai saat ini, pemerintah masih menempatkan pembangunan ekonomi sebagai panglima dalam pembangunan nasional dan memberikan prioritas utama kepada pembangunan yang bersifat fisik. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan yang baru saja diundangkan bisa menjadi salah satu pedoman dan landasan yuridis dalam pembangunan bidang budaya terutama pemajuan

kebudayaan. Namun sayangnya, objek dari pemajuan kebudayaan dalam undang-undang ini tidak mencakup keseluruhan aspek dari perwujudan kebudayaan yaitu dalam perwujudannya sebagai sistem nilai (*value system*), *socio cultural institution*, dan artifak.

Mencermati permasalahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dan agar modal budaya bangsa ini benar-benar dapat menjadi pendorong (*driver*) atau determinan bagi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Membangun Kewirausahaan Pemuda

Indonesia Melalui Nilai –nilai Kearifan Lokal” yang dilaksanakan di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Penelitian yang secara akademis dan praktis akan memberikan masukan yang berguna bagi pembangunan pemuda menjadi pemuda mandiri. Penelitian mengutamakan jalan kebudayaan (*cultural way*) dengan menempatkan budaya sebagai *leading sector* dalam pembangun yang bermuara pada penguatan karakter dan jatidiri bangsa yaitu Pancasila. Kalau tidak, bangsa ini khususnya pemuda bukan hanya tidak maju tapi lebih dari itu bisa menyebabkan disintegrasi bahkan keruntuhan seperti yang dialami Uni Soviet di masa lalu. Dasar filosofis dan yuridis

penelitian ini adalah alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional kita adalah: “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia*”. Amanat Pembukaan UUD 1945 ini menegaskan bahwa negara-lah yang bertanggungjawab untuk melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat Indonesia termasuk kesejahteraan spiritualnya.

Dengan melihat seluruh dimanika yang terjadi saat ini serta akan terjadinya bonus demografi seperti yang disampaikan oleh *United Nation* dalam laporan *World Population Prospect* (2011), yang menyampaikan bahwa Indonesia diperkirakan akan mendapat bonus demografi pada tahun 2020-2030 yang tentu saja akan menguntungkan dari sisi pembangunan. Pada periode tersebut jumlah usia produktif akan meningkat mencapai 180-190 juta jiwa, dan jumlah penduduk usia non produktif akan menurun hingga 82-85 Juta jiwa.

Perubahan transisi demografi ini tentu saja membawa dampak terhadap beban tanggungan pada periode tersebut dengan mencapai titik terendah yang berkisar pada 44% yang berarti setiap 100 orang usia produktif akan menanggung beban sekitar 51 orang usia tidak produktif. Maka sangat penting untuk melihat pemuda sebagai agen pembangunan yang perlu disadarkan dalam hal pentingnya budaya asli bangsa Indonesia.

Penetapan Desa Wisata Budaya di Desa Wukirsari, seolah memberikan jawaban terhadap perubahan yang begitu dinamis di dalam visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi masyarakatnya. Penduduk desa yang memiliki mata pencaharian utama bertani diajak untuk melihat segala potensi lokal yang mampu diberdayakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Sebagai Desa Wisata Budaya selain potensi alam yang dikembangkan tentu saja budaya atau kearifan lokal yang menjadi sajian wisata baik itu Sistem nilai yang terkandung dalam kearifan lokal, institusi maupun artefak. Hal ini juga sekaligus menjawab bahwa globalisasi sebagai sebuah keniscayaan yang memang harus diterima dengan cerdas oleh pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi ini.

Globalisasi dipercepat dengan sejumlah faktor pendorong seperti inovasi dibidang teknologi, deidiologi perang dingin, migrasi penduduk lintas negara, kebutuhan kerjasama antar bangsa, dan penamaman modal asing ke negara-negara yang tengah berkembang. Globalisasi juga berdampak pada aspek budaya masyarakat, terutama yang ditampilkan melalui media sosial, khususnya televisi. Apa yang terjadi di negara lain dalam waktu yang sama bisa disaksikan oleh masyarakat Indonesia. Banyak inovasi budaya karena terinspirasi oleh budaya asing, misalnya dalam dunia musik dan model busana. Yang juga fenomenal adalah kebutuhan anak muda untuk belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Mengapa Inggris? Dibanding bahasa asing lain, bahasa Inggris memiliki distingsi tersendiri, antara lain buku-buku sains paling mudah dijumpai dalam bahasa Inggris, sehingga siapapun yang ingin memasuki pergaulan global jauh akan lebih terbantu jika seseorang menguasai bahasa Inggris. Kebutuhan dan minat belajar asing lain juga meningkat, misalnya bahasa Mandarin dan Jepang. Semua ini tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Satu catatan penting, di era globalisasi Indonesia mesti aktif-kreatif agar tidak semata jadi obyek atau sasaran kekuatan asing, tetapi juga melihatnya sebagai peluang. Makanya sangat relevan apabila ekonomi Indonesia tidak lagi menggantungkan sepenuhnya pada belas kasih sumber alam yang semakin menipis, tetapi pada sumber daya insani yang kreatif-inovatif.

Dalam situasi dunia yang semakin mengglobal ini, Indonesia tidak bisa lagi membanggakan kekayaan sumber daya alamnya, untuk itu strategi yang dibutuhkan dalam menghadapinya. Menurut Rewansyah (2012:39), strategi dalam menghadapi era globalisasi yang perlu diupayakan oleh lembaga-lembaga administrasi adalah: (1). Peningkatan sumber daya manusia, (2). Peningkatan

kualitas pelayanan publik, dan (3) Peningkatan kepekaan terhadap lingkungan.

Dalam peningkatan sumberdaya manusia menyangkut peningkatan layanan pendidikan, pemeliharaan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan hidup.

Posisi pemuda Indonesia memiliki sejarah dan memori heroik sejak masa perjuangan pra-kemerdekaan yang senantiasa dikenang sampai hari ini.

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan institusionalisasi dalam bentuk negara dari deklarasi dan Sumpah

Pemuda 1928. Begitupun pada dekade berikutnya, pemuda dan mahasiswa

selalu tampil di depan setiap terjadi perubahan sosial politik nasional, misalnya

tahun 1965, 1974 dan 1998. Hanya saja setiap zaman melahirkan peluang dan

tantangan yang berbeda sehingga peran pemuda di era reformasi tidaklah sama

dengan zaman sebelumnya. Dahulu pemuda dibesarkan dalam situasi ideologis,

terutama ketika dihadapkan pada kekuatan komunisme yang anti Pancasila.

Sekarang ketika ruang kebebasan berekspresi semakin terbuka, ketika

demokrasi semakin menguat, maka gerakan demonstrasi turun ke jalan tidak

populer lagi. Orang bisa menyampaikan aspirasinya melalui partai politik, LSM

(Lembaga Swadaya Masyarakat), televisi dan sekian banyak media sosial yang

terbuka lebar, hampir-hampir tanpa sensor. Menghadapi persaingan global dan

pasar bebas, yang diperlukan oleh pemuda adalah sikap kemandirian yang

ditopang oleh ilmu pengetahuan, keterampilan hidup (*life skill*), dan semangat

patriotisme sehingga hidupnya produktif.

Pengangguran akan mudah menyeret seseorang pada tindak kejahatan.

Mungkin saja banyaknya remaja yang terjebak narkoba dan pergaulan yang tidak

sehat akibat dari tidak adanya lapangan kerja yang membuat mereka sibuk dan

produktif, di tengah – tengah gempuran gaya hidup konsumtif-hedonistik.

Padahal, derasnya pengaruh asing yang dibawa oleh gelombang globalisasi justru menuntut agar pemuda bangkit memperkuat identitas dan jati diri bangsa.

Jangan sampai generasi muda sekedar jadi generasi penikmat atau perusak, tetapi mesti tampil sebagai generasi penerus pembangun bangsa, mengisi cita-cita kemerdekaan.

Melihat gaya hidup dan pola konsumtif pemuda, khususnya di perkotaan, telah mengundang kepanikan moral kalangan pendidik dan orangtua. Orientasi hidupnya terlalu materialistik-individualistik dan meremehkan nilai-nilai penting budaya luhur bangsa serta agama. Sebagai aktor sosial pemuda disatu pihak diromantisasi oleh memori masa lalu sebagai tokoh-tokoh revolusi dan harapan orang tua (masa depan di tangan pemuda), namun dipihak lain dianggap sebagai lapisan penduduk yang rawan, kepribadianya dan karirnya belum mapan. Masa muda dianggap sebagai “usia rawan” (Mayer & Mayer, 1990) yang sarat problem serta rentan terhadap godaan eksperimentasi narkoba, seks, pakaian dan gaya hidup yang sulit diterima lingkungannya (Manderso & Liamputtong, 2002).

Kekhawatiran orang tua terhadap kehidupan remaja kota juga telah menyebabkan orangtua melarang mereka mencari kerja di kota, padahal di desa tidak tersedia lapangan kerja yang produktif dan cocok. Di pedesaan Yogyakarta, misalnya, gadis-gadis remaja mengeluh akibat pembatasan dan pengawasan yang ketat pada mereka dari keinginan untuk bermigrasi mencari kehidupan baru yang diharapkan lebih baik (Margiyantin 2009)

Banyak faktor yang turut mempengaruhi perilaku masyarakat. Di samping faktor ekonomi adalah faktor tradisi dan agama. Dalam masyarakat berkembang pandangan bahwa kehidupan moderen yang berpusat di kota merupakan pengaruh kebudayaan Barat yang tidak sejalan dengan tradisi nusantara dan

ajaran Islam. Jika ditanya apa yang dimaksud Barat, mereka tentu sulit menjelaskan. Dalam benak orangtua dan masyarakat desa, Barat itu mengingatkan pada penjajah Belanda dan adegan-adegan film kulit putih yang mereka lihat di film yang tidak sejalan dengan tradisi dan keyakinan agama mereka. Oleh karenanya, sikap orang desa pada kehidupan kota mendua. Muncul kekaguman dan kecemburuan terhadap kemajuan ekonomi dan pendidikannya, namun curiga terhadap sisi-sisi negatifnya, terutama pergaulan bebas dan bahaya narkoba. Namun pandangan ini pelan-pelan mengalami perubahan.

Selama dan setelah pemerintahan orde baru wacana normatif tentang pemuda dan media mengasumsikan adanya pengaruh negatif media masa pada generasi muda, tercermin dalam budaya mudah menyalahkan pihak lain serta berbicara seenaknya tanpa rasa salah, sebagaimana disampaikan Nilam (2004b :169). Media sosial (medsos) berdampak sangat besar terhadap moda komunikasi sosial. Bagi peneliti intelektual, kehadiran internet sangat membantu memudahkan untuk memperoleh referensi ilmiah terutama jurnal dan buku.

Tetapi bagi anak muda, medsos membuat malas membaca buku, lebih tertarik *chatting* dan *googling* tanpa sikap kritis. Kita saat ini telah disadarkan berada dalam suatu kondisi *a global networking society* akibat dari revolusi teknologi informatika dan transportasi yang mendorong lahirnya benua maya dan perjalanan lintas benua, yang kesemuanya itu melampaui batas-batas wilayah negara. Komunikasi dan kerjasama lintas bangsa dan negara semakin intens bersamaan dengan derasnya gelombang globalisasi. Dalam konteks ini sudah tentu negara-negara yang lebih dahulu maju dan kuat dari aspek ekonomi dan ilmu iptek akan tampil dominan, ekspansif dan agresif, mengalahkan negara-

negara yang baru tumbuh berkembang. Mereka yang disebut *netizen*, yaitu pengguna jejaring internet, dengan leluasa berselancar di lautan informasi yang hampir-hampir tidak mengenal batas hambatan. Perkembangan ini telah memungkinkan banjirnya informasi dan budaya asing masuk ke wilayah nusantara, dengan implikasi plus-minusnya.

Dengan majunya dunia pendidikan yang membuka peluang bagi mobilitas pendidikan anak-anak bangsa, terutama di tingkat perguruan tinggi, maka perjumpaan antar putra-putra daerah dan lintas agama semakin intens.

Kampus menjadi pusat inkubator atau penyemaian semangat dan identitas keindonesiaan. Dengan meningkatnya pernikahan lintas etnis dan budaya, maka ideologi etnisisme semakin mengendor, seiring dengan proses globalisasi yang ekstensif. Jadi, mungkin tidak salah bahwa yang sekarang tengah terjadi adalah proses glokalisasi, yaitu terjadinya dinamika pada tingkat global maupun lokal.

Dalam konteks ini maka peran negara dan jajaran pemuda menjadi sangat strategis. Salah satu agendanya adalah membangun jatidiri dan identitas bangsa, tidak cukup hanya mencari uang. Spirit kewarganegaraan (*the spirit of citizenship*) dan bangga sebagai anak bangsa mesti ditumbuhkan agar Indonesia

tidak menjadi obyek globalisasi, tetapi juga menjadi pemain atau aktor globalisasi. Kebanggaan akan muncul jika dari bumi Indonesia bermunculan pemuda-pemuda yang berprestasi dan memperoleh pengakuan dunia. Ketika para pemudanya tidak mendapatkan lapangan kerja yang layak dan Indonesia mengalami defisit dalam kompetisi global, maka sangat wajar mereka tidak bangga pada bangsa dan negaranya. Akibatnya mereka akan sangat mudah menjadi obyek dan kurban globalisasi budaya asing. Dan sangat disayangkan, persoalan yang menghadang bagi pemuda hari ini adalah langkanya lapangan

kerja sehingga menimbulkan pengangguran dan setengah pengangguran yang dalam tata kelola pemuda dipandang sebagai ancaman bagi pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Pemuda sebagai pencipta dan konsumen budaya dalam era globalisasi ekonomi dan budaya cenderung mengikuti atau terpengaruh budaya dan gaya hidup hedonistik. Sekalipun tidak memiliki pekerjaan yang mendatangkan uang berlebih, jutaan pemuda Indonesia ingin menikmati tren terbaru dalam *fashion*, musik, dan teknologi informasi dan komunikasi (ITC). Atau mereka yang berada di pelosok daerah dan miskin akses internet, mereka mendapatkan cara mengungkapkan selera muda dengan mengandalkan globalisasi murah misalnya tampil dengan *fashion* bermerek khas global tapi palsu, seperti pakaian bermerek palsu atau CD bajakan.

Nasib petani di pedesaan cukup memprihatinkan, jumlah keluarga semakin banyak, luas lahan tanah semakin menyempit karena bermunculan bangunan baru, penghasilan tidak bertambah, sementara gaya hidup para pemudanya ikut-ikutan orang kota dengan biaya tinggi. Misalnya biaya pendidikan, pakaian, ongkos kesehatan, kendaraan motor dan lain sebagainya. Yang paling fenomenal adalah pengguna telepon genggam yang semakin meluas bagi anak-anak muda pedesaan pada hal memerlukan uang pulsa untuk biaya komunikasi yang tidak penting. Mungkin mereka lebih tertarik pada gaya hidup baru. Kondisi ini tentu saja menciptakan benturan budaya antara tradisi lokal dan pengaruh budaya konsumtif yang datang dari kota. Ketika mental hedonisme telah menguat pada seseorang, sementara tidak ada sumber penghasilan yang cukup, maka mudah sekali terjebak pada tindak kejahatan yang diharapkan mendatangkan uang secara cepat dan banyak, seperti pencurian atau pengedar narkoba.

Dalam proses transformasi hubungan sosial, ekonomi dan politik dalam membangun peran aktif pemuda, pada sektor ekonomi hendaknya terjadi pertumbuhan dan pemerataan dengan pemahaman bersama untuk benar-benar mampu melakukan sebuah transformasi. Hambatan yang terjadi adalah pada kualitas pemuda yang merupakan faktor kunci penyebab kurang optimumnya pembangunan. Hal ini karena tenaga kerja yang tergolong pemuda tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia. Menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7.244.956 jiwa (Agustus 2012) dan jumlah tersebut akan sangat potensial apabila dapat dibina dan diberdayakan sebagai tenaga yang efektif, dan merupakan modal pembangunan yang besar dan sangat menguntungkan sebagai input dalam proses pembangunan segala bidang.

Seperti halnya di negara-negara lain, pemuda di Indonesia cenderung terbuka secara spasial (Ansell 2005:83) karena kaum muda laki-laki dan perempuan kreatif mengadopsi, meramu, menafsirkan dan menolak budaya populer Barat dan budaya Islam lalu menciptakan budaya hibrida (Nilan 2006).

Pemuda-pemuda daerah pedesaan tidak hanya berusaha menghubungkan diri dengan berbagai tren dalam budaya populer global, tetapi juga mengambil inspirasi dari perkembangan terbaru dalam bahasa, mode, musik dan gaya hidup yang berasal dari pusat-pusat urban di Jawa seperti Jakarta, Bandung dan Yogyakarta. Namun sejauh apa kebebasan pemuda dalam menciptakan identitas dan gaya hidupnya harus dipahami dalam konteks hubungan dengan kelompok-kelompok perkembangan lainnya yaitu perkembangan sosial, ekonomi, politik yang lebih luas dalam masyarakat Indonesia.

Trend globalisasi telah menimbulkan gerak paradoksal, yaitu menguatnya identitas lokal yang berakar pada kebangkitan sentimen etnis dan agama. Secara psikologis, ketika seseorang terseret masuk pada orbit globalisasi, dia akan merasa terancam identitas dirinya sehingga mendatangkan rasa tidak aman (*insecure*). Gejala ini juga terlihat pada para perantau, baik di dalam maupun di luar negeri, mereka akan merasa senang dan nyaman ketika berjumpa teman sederaahnya. Mereka berbicara dengan bahasa yang sama, dan ingin mempertahankan simbol-simbol kedaerahan yang sama. Identitas kelompok etnis ini akan semakin menguat ketika bercampur dengan semangat dan kepercayaan agama yang sama. Dalam konteks global kebangkitan *ethno-religion* ini telah mendorong lahirnya negara-negara baru, misalnya di Asia Tengah, pecahan dari Uni Soviet. Atau Eropah Tenggara pecahan dari Yugoslavia. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan oleh kaum muda adalah perkembangan dunia kehidupan kita sudah sangat berubah

Pelaksanaan desentralisasi oleh pemerintah lokal adalah untuk menyelenggarakan kebijakan pembangunan daerah. Desentralisasi dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan pemerintah lokal dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan luas selain itu juga berfungsi dalam mengorganisasikan tata pemerintahan agar memudahkan dalam mengawasi organisasi pada tingkat dibawahnya. Desentralisasi memiliki dampak positif dalam menciptakan demokratisasi kebijakan publik yang dilaksanakan di tingkat lokal. Oleh karena itu sangat penting kewenangan pengambilan keputusan dilaksanakan atas dasar prinsip desentralisasi hal ini karena dipandang desentralisasi sebagai cara terbaik dalam melahirkan kebijakan publik yang sesuai dengan kepentingan lokalitas, hal ini juga akan memperkuat relasi antara

state dan *citizen*. Implementasi desentralisasi menuntut pemerintah lebih bertanggungjawab dalam memajukan daerahnya, termasuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas di depan konstituennya.

Dalam penelitian membangun kewirausahaan pemuda melalui kearifan lokal paradigma administrasi publik adalah paradigma *New Public Management* (NPM) yang dipopulerkan oleh Osborne dan Gaebler (1992) dan Vigado (2002), dan paradigma yang dipopulerkan oleh Denhardt (2003), yaitu administrasi *New Public Service* (NPS) yang mendasari konsep *Governance* dan *Good Governance*, serta bagaimana melibatkan peran masyarakat dalam pembangunan. Namun dalam perkembangan dunia yang begitu cepat dan dinamis *Good Governance* saja tidaklah cukup. Dalam hal ini *Good Governance* memerlukan konsep *Dynamic Governance* yang memiliki fondasi dasar yaitu kultur atau budaya dan kapabilitas yaitu sumberdaya manusia yang berkualitas. *Dynamic System* menjadi kunci sukses di dunia yang mengalami globalisasi dan kemajuan teknologi tak kenal lelah. Jika lembaga dapat berkembang, menanamkan budaya dan kemampuan yang memungkinkan belajar dan berubah terus menerus, kontribusi mereka sebesar kemajuan sosio-negara dan kemakmuran ekonomi akan sangat besar.

Dalam *Dynamic Governance* ada dua hal yang menjadi dasar yang kuat bagi kemajuan dalam menghadapi setiap perubahan yang pertama adalah Budaya yang meliputi : integritas, meritokrasi, pasar, pragmatisme, multi rasialisme, dan yang kedua adalah kemampuan yang dinamis meliputi : *thinking ahead*, *thinking again* dan *thinking across*. Meletakkan budaya sebagai fondasi utama dalam menghadapi dinamika perubahan dalam budaya Jawa yang sarat dengan filosofi budaya yang kuat tentu saja ada yang dapat disandingkan untuk

memotivasi dalam pembangunan, seperti dalam huruf jawa , simbol simbol dan paribasan lainnya. Bahkan pahlawan pendidikan Ki Hajar Dewantara (1939) pernah memberikan formula 3N untuk mendidikan anak-anak bangsa. Yaitu: *Niteni, Niroke dan Nambahi*. *Niteni* adalah kebiasaan untuk melihat hal-hal yang baik dari pihak lain atau bangsa lain, selanjutnya *Niroke* yaitu semangat untuk meniru keunggulan bangsa lain dan *Nambahi* yaitu semangat untuk terus berinovasi memperkaya karya bangsa lain, agar bangsa Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Pemuda adalah subyek dan sekaligus juga obyek, sesungguhnya mereka adalah aset dan subyek pembangunan kalau saja memiliki ketrampilan dan lapangan kerja yang bagus.

Penelitian di Desa Wukirsari, Kabupaten Bantul ini adalah untuk melihat kemampuan masyarakat desa Wukirsari dalam melaksanakan kewirausahaan pemuda sebagai bagian penting dalam pembangunan khususnya pembangunan ekonomi. Ketertarikan pada penelitian kewirausahaan di desa Wukirsari ini adalah karena adanya Perda Kabupaten Bantul No. 4 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, potensi pengembangan kawasan di Kabupaten Bantul. Adapun potensi yang dikembangkan berdasarkan Perda tersebut adalah Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Strategis Sosio-Kultural dan pengembangan Kawasan Strategis Lingkungan Hidup. Dan desa Wukirsari kecamatan Imogiri merupakan Sub wilayah Pengembangan (SWP) VI hirarki II dengan arah pengembangan sebagai: kawasan agribisnis, kawasan cagar budaya, kawasan cagar alam, kawasan hutan lindung dan kawasan wisata minat khusus, yang selanjutnya lebih terkenal dengan istilah sebagai Desa Wisata Budaya. Pengembangan ini dilakukan melalui intensifikasi dan diversifikasi

pertanian lahan kering dan peternakan, pengembangan perhutanan rakyat, pengembangan industri kerajinan dan pengembangan kawasan industri.

Program pengembangan yang hendak dilakukan ini masih terdapat beberapa kesenjangan yang harus menjadi prioritas utama untuk disentuh terlebih dahulu sehingga ini sangat menarik dalam penelitian yaitu adanya kesenjangan pada:

- 1) Sumberdaya manusia khususnya pada kaum perempuan, hal ini karena jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama, berbanding 50,94 % untuk penduduk pria dan 49 % untuk perempuan. Sementara pertumbuhan penduduk perempuan dalam lima tahun kedepan sebesar 1,5% sehingga dibutuhkan upaya meningkatkan peran perempuan .
- 2) Penduduk usia produktif di Desa Wukirsari mencapai 50% dengan mata pencaharian adalah petani, buruh, sementara ketersediaan lahan pertanian semakin kurang. Petani rata- rata menggarap tanah seluas 0.11 ha dengan hasil panen setiap tahun dua kali, sehingga dapat dikatakan bahwa petani di Desa Wukirsari memerlukan lahan pertanian atau perlu beralih profesi untuk menopang kebutuhan ekonominya.
- 3) Penduduk yang tidak memiliki pekerjaan sebesar 8% artinya mereka pengangguran dan membutuhkan lapangan pekerjaan baru diluar sektor pertanian karena ketersediaan lahan sudah tidak memungkinkan.
- 4) Bertambahnya anak-anak yang putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi keluarga

Sedangkan untuk kondisi kesehatan, tempat peribadatan yang mayoritas beragama Islam sangat mencukupi. Dengan demikian pemerintah desa Wukirsari perlu mengembalikan kedaulatan ekonomi masyarakat melalui terciptanya lapangan pekerjaan baru. Kewirausahaan pemuda yang merupakan usaha mikro menjadi salah satu kunci pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga dibutuhkan perhatian yang lebih karena pertumbuhannya yang cepat, namun karena skalanya kecil sangat rentan. Kerentanan ini karena usaha mikro bersifat informal (tanpa payung hukum) lentur (mudah ditinggalkan), plural (lebih dari satu aktifitas) dan otonom (interaksinya terbatas kepada sektor yang lainnya) meskipun sering menjadi sektor penyangga. (LP3ES, 2016). Dari kesenjangan yang terjadi di desa Wukirsari, peneliti melakukan penelitian dengan fokus penelitian melihat pada faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat dari program membangun kewirausahaan pemuda sebagai upaya dalam meningkatkan kebutuhan ekonomi dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki desa tersebut.

Irawan dan Suparmoko (1999) menyampaikan adanya jumlah penduduk usia kerja ini dapat menciptakan beban sosial manakala tidak ada langkah kreatif inovatif yang didukung oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini tradisi sosial sebuah masyarakat ikut berperan. Masyarakat Sumatera Barat, misalnya, memiliki tradisi yang suportif terhadap sikap kewirausahaan dan merantau. Begitupun antara budaya pantai (*coastal culture*) dan budaya pedalaman (*inland culture*) memiliki tradisi sosial yang berbeda dalam menyikapi peluang dan tantangan ekonomi. Masyarakat petani di pedalaman biasanya kurang menghargai waktu, hidup lebih santai, mengikuti siklus alam dan musim.

Ini sangat berbeda dari masyarakat industri yang justru berusaha memanipulasi

dan menaklukkan alam. Perubahan siang dan malam dan perubahan musim tidak menghalangi mereka untuk beraktivitas. Masyarakat perkotaan yang sudah masuk ke sektor industri sangat menghargai kemampuan atau keahlian individu. Jadi, pendidikan dan ketrampilan khusus sangat dihargai. Tentu ini sangat berbeda dari masyarakat petani pedesaan yang masih mengandalkan tenaga otot dan teknologi yang sangat sederhana, dengan konsekuensi secara ekonomi hasilnya juga rendah.

Bagi masyarakat desa menjadi pegawai negeri merupakan posisi yang diidealkan. Tetapi kalau anak banyak dan tidak mampu menjalani hidup sederhana, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) tidaklah cukup. Maka penting pemuda desa diajari berwirausaha agar mendatangkan penghasilan, meskipun untuk menjadi *entrepreneur* tidak mudah apalagi budaya keluarga dan lingkungannya tidak mendukung. Menurut Nugroho (2015) budaya wirausaha dan pegawai negeri memiliki perbedaan mendasar. Seorang pengusaha mesti berani ambil resiko (*risktaker*), sebuah sikap atau mental yang tidak dimiliki mereka yang bermental piyayi ataupun pegawai negeri. Beberapa ciri kehidupan PNS adalah: (1) para orang tua yang pegawai negeri memiliki kehidupan yang pasti dan berkecukupan sehingga menghendaki anak-anaknya menjadi pegawai negeri, pekerjaan diluar pegawai negeri dipandang derajatnya lebih rendah, (2) pegawai negeri memiliki pendapatan yang tetap dan aman serta memiliki pensiun saat hari tua, (3) pegawai negeri memiliki tingkat stres yang tidak tinggi. Mental PNS ini sejalan dengan budaya Jawa yang menekankan kehidupan harmoni dan tenteram, jauh dari tindakan spekulatif yang penuh resiko. Dalam budaya Jawa nilai-nilai yang sangat berpengaruh adalah budaya pewayangan. Wayang memiliki budaya yang tinggi mengajarkan banyak hal kehidupan, namun dalam

pewayangan tidak mengajarkan perdagangan atau kewirausahaan. Pemahaman orang Jawa menjadi pedagang adalah pekerjaan menipu karena membeli dan menjual kembali dengan nilai yang berbeda.

Oleh karena itu, pemuda perlu keluar dari jeratan tradisi lama yang tidak menghargai dunia perdagangan, tidak mendukung inovasi baru untuk membangun sumber ekonomi yang lebih menjanjikan diluar PNS dan pertanian.

Pemuda mesti diperkenalkan dan dilatih dengan dunia wirausaha. Ini mesti diawali dengan mengubah *mindset* mereka. Dalam bukunya *Membangun Entrepreneur Indonesia* Nugroho menyampaikan bahwa teori pembangunan dapat disetarakan dengan teori bisnis dimana keduanya bertujuan untuk dapat mensejahterakan, memajukan, dan dapat menerima tantangan dari perubahan lingkungan. Wibawarta (2014) menyampaikan bahwa, kewirausahaan adalah bagian dari kebudayaan, dan kebudayaan itu adalah perilaku, cara hidup, simbol, yang berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Lebih lanjut disampaikan bahwa Indonesia yang memiliki ribuan kebudayaan yang tumbuh dimasyarakat dan merupakan aset yang luar biasa, jika dapat mengelola kebudayaan Indonesia akan memiliki potensi yang luar biasa dalam mengembangkan kewirausahaan di Indonesia, dalam kebudayaan ada etika, perilaku, tanggungjawab, sikap mental yang sangat erat dalam melahirkan masyarakat yang kreatif dan inovatif.

Kearifan lokal adalah salah satu produk budaya yang akan membimbing pemuda memiliki watak dan jati diri yang kuat sebagai *nation state* dalam menghadapi persaingan global dan ini harus didukung dengan perangkat kebijakan yang melindungi. Pendapat Mc Clelland (dalam Nugraha, 2015) pengaruh yang kuat dalam kewirausahaan adalah mereka yang mempunyai nilai

Need for Achievement yang tinggi, mereka adalah individu-individu yang membangun produktifitas dari suatu kehidupan bersama. Lebih lanjut disampaikan bahwa negara-negara berkembang dan terbelakang tidak mempunyai populasi *entrepreneur* dalam arti *the real entrepreneur* karena tiga masalah pokok yaitu :

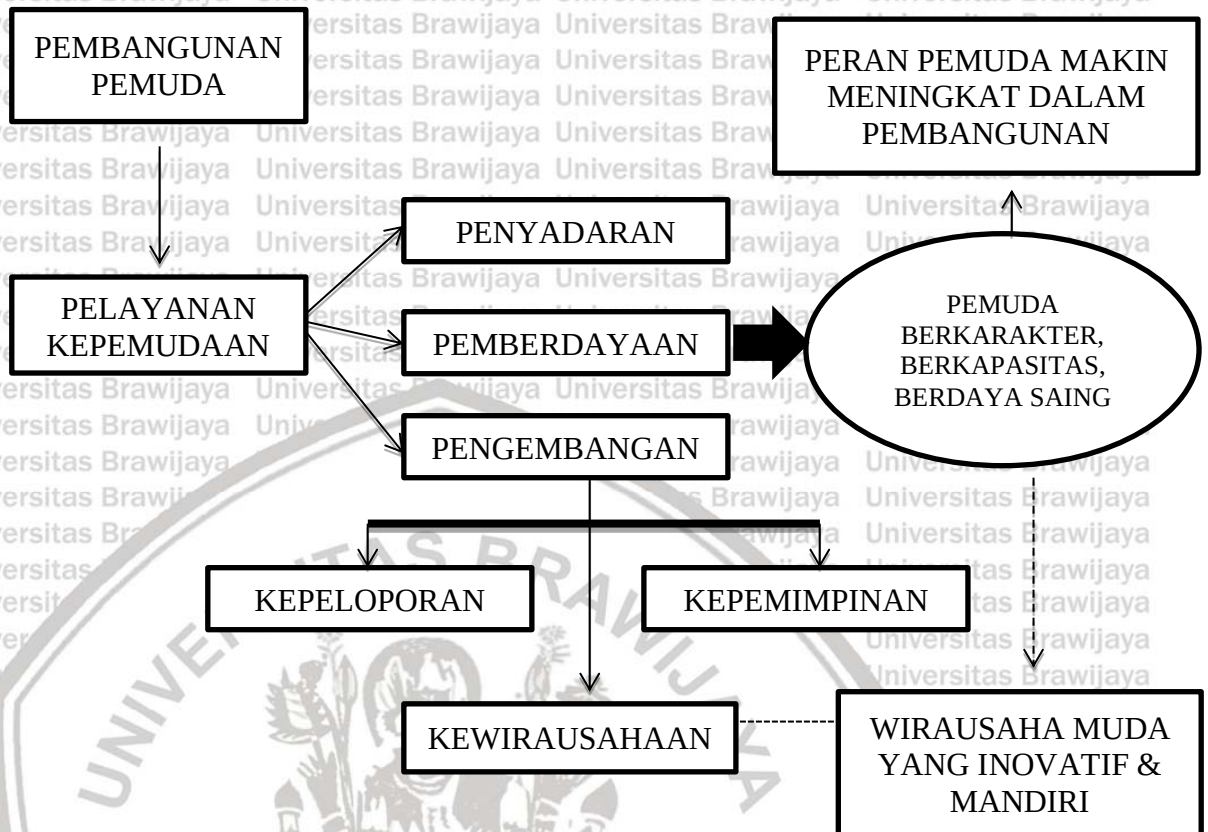
- 1) Masalah budaya, mereka menganggap budaya yang sudah ada terutama budaya tergantung pada lapangan kerja dan bukan menciptakan lapangan kerja adalah yang terbaik ataupun sudah *given*, akibatnya mereka tidak mau keluar dari kotak kebiasaan.
- 2) Masalah tatanan masyarakat. Tatanan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sebagai *entrepreneur* adalah masyarakat yang memiliki tatanan yang lebih *egaliter* atau masyarakat yang secara tertulis dan secara fakta diperlakukan sama, mempunyai hak dan kehormatan sama.
- 3) Masalah kecakapan individu pada masyarakat itu sendiri. *Entrepreneur* adalah sebuah pengetahuan dan kecakapan, dan jika dipraktekkan maka *entrepreneur* akan menjadi keterampilan dan keunggulan yang membentuk masyarakat mempunyai kemampuan tumbuh sendiri dari dalam, karena tidak tergantung pada lapangan pekerjaan, mereka adalah pencipta lapangan pekerjaan minimal untuk dirinya sendiri.

Kedudukan pemuda dalam pembangunan menemukan kejelasan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dalam Undang-Undang tersebut, pembangunan pemuda memiliki kejelasan tujuan, arah kebijakan dan strategi. Pembangunan pemuda yang menghendaki adanya perubahan sosial disamping juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi

dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Dalam perspektif ini kebijakan ekonomi dan sosial dalam proses pembangunan pemuda harus seimbang dan terpadu. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibutuhkan untuk mendorong pencapaian tujuan sosial seperti mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan, namun juga harus didukung dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, keseimbangan pembangunan daerah serta pemerataan hasil-hasilnya. Undang-Undang Kepemudaan ini berupaya meningkatkan kemandirian dan daya saing pemuda dalam peran aktifnya sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan, melalui konsep kebijakan kewirausahaan pemuda yang terbagi dalam tiga kegiatan yaitu: (1). Penyadaran dalam aspek ekonomi, (2). Pemberdayaan dalam meningkatkan keterampilan diri menuju kemandirian, (3). Pengembangan kewirausahaan sesuai minat, bakat dan potensi pemuda.

Menurut Swasono (2010) kemandirian adalah sikap atau *mindset*, sikap berdikari dengan menolak ketergantungan nasib sendiri pada pihak lain, sikap subordinasi, dan menolak mental pengemis. Kemandirian adalah kepahlawanan, percaya diri dan kebanggaan diri untuk mampu memutuskan sendiri apa yang baik bagi dirinya dan suatu prestasi diri menolak ketergantungan atau keterbelakangan. Mandiri adalah tuntutan kesetaraan. Mandiri adalah harga diri dan merubah sikap menghamba dan *minderwaardig* menjadi kedigdayaan.

Peran pemuda dalam pembangunan ekonomi jelas ditunjukkan dalam program pemerintah melalui Undang-undang Kepemudaan dimana pemuda dituntut untuk memiliki kemandirian sebagai mana gambar yang dirancangg oelh Asisten Deputi Kewirausahaan di bawah ini.



Gambar 1.1. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Sumber : Deputi Kewirausahaan Pemuda, 2014

Dalam undang-undang Kepemudaan ini juga berupaya dalam pembelajaran keterampilan hidup, kurikulum sekolah, merepresentasikan pengertian-pengertian hidup berdampingan tentang pemuda sebagai harapan dan sebagai resiko bagi bangsa dan masyarakat. Perpaduan strategi mengikutsertakan dan membatasi ini terangkum dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 yang menyertakan sebuah program untuk mendorong partisipasi pemuda dengan tujuan : "...memberikan peluang lebih besar kepada pemuda guna memperkuat jati diri dan potensinya dengan berpartisipasi dalam pembangunan". Program ini memiliki lima sasaran yaitu :

1. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam lembaga sosial kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan.

2. Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang menjamin kebebasan pemuda untuk mengorganisir dirinya secara bertanggungjawab
3. Meningkatnya jumlah kewirausahaan muda
4. Menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba oleh pemuda
5. Menurunnya angka kriminalitas.

WHO menggolongkan usia pemuda antara 10-24 tahun, sedangkan di Indonesia usia pemuda mengalami perubahan sejak ditetapkan Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Sebelumnya usia pemuda adalah 18-40 tahun. Namun sejak diterbitkannya Undang-undang Kepemudaan, usia pemuda berubah menjadi 16-30 tahun, sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 ayat (1): "Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun". Penetapan usia pemuda ini bertentangan dengan Undang-undang lain, seperti UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) dan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat(26) yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun. Jika berdasarkan kedua undang-undang tersebut maka usia pemuda di mulai pada usia 18 tahun ke atas. Sedangkan pemuda menurut definisi PBB adalah mereka yang berusia 15-24 tahun. Dalam penelitian ini nanti akan menggunakan penetapan usia pemuda sesuai UU No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, yaitu pemuda pada usia 16-30 tahun.

Dalam meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara dilakukan melalui (Pasal 8, ayat 2)

Undang-undang Kepemudaan:

- a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
- b. pendampingan pemuda;

c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan, dan

d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Strategi pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai minat, potensi pemuda dan potensi daerah, yang difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan, melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan kemitraan promosi dan bantuan akses permodalan. Kesungguhan pemerintah didalam mendukung kegiatan pemuda melalui kewirausahaan pemuda ini terlihat dalam kebijakan dari Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Pembangunan, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (PLPKP) yang merupakan amanat dari UU No. 40 Tahun 2009. Pemerintah dalam menggerakkan pemberdayaan pemuda mengharapkan pemuda mampu bekerja dan menciptakan lapangan kerja sendiri secara mandiri, kreatif, inovatif dan produktif. Mengelola sumberdaya alam untuk membangun daerahnya melalui semangat dan kegigihan untuk tidak menjadi beban dalam berkehidupan sosial. Menurut Ndraha (2003: 442) fungsi obyektif masyarakat atau pemuda adalah : (1) peningkatan sumber daya (subkultur ekonomi) seperti : membeli semurah mungkin, menjual seuntung mungkin, membuat sehemat mungkin, (2). Penciptaan keadilan dan kedamaian (subkultur pemerintah) seperti berkuasa semudah mungkin, menggunakan kekuasaan seefektif mungkin, mempertanggungjawabkan kekuasaan seformal mungkin

dan (3) kontrol terhadap kekuasaan (kontrol sosial) seperti peduli, budaya konsumeristik. *Collective behavior* ke *collective action*, *check and balance* dari ketiga subkultur tersebut terjadi secara seimbang, selaras dan serasi.

Membangun kewirausahaan pemuda Indonesia tentu tidak lepas juga pada pengembangan teknologi dan kegiatan kewirausahaan yang memanfaatkan kreatifitas para pemuda sebagai ujung tombak, dengan memperhatikan hal - hal sebagaimana disampaikan Florida (2001) yang menyampaikan bahwa keberhasilan dari membangun kewirausahaan pemuda ini tidak akan lepas dari :

1) talenta para pemuda dalam menghasilkan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki daya saing yang tinggi, sehingga diperlukan pemuda-pemuda dengan bakat khusus yang dibawa sejak lahir, sehingga menjadi pemuda yang kreatif, 2) adanya toleransi, di mana lingkungan atau daerah pemuda tinggal memiliki toleransi yang tinggi terhadap gagasan-gagasan kreatif dan kontraversial sehingga tercipta iklim yang kondusif dalam mendukung ide-ide yang berbeda, 3). teknologi, kehadiran teknologi memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat tumbuhnya ide ide kreatif dalam berwirausaha.

Dari uraian di atas penulis melakukan penelitian tentang kewirausahaan pemuda di Kabupaten Bantul dengan lokus penelitian didesa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Masyarakat desa Wukirsari ini merupakan *rural community* yaitu masyarakat yang anggotanya hidup bersama dalam lokalitas tertentu, dimana seseorang merasa dirinya menjadi bagian dari kelompok yang lain, kehidupan mereka adalah tanggungjawab bersama dan mereka mentaati atau terikat pada norma-norma yang mereka taati bersama.

Pertanian adalah mata pencaharian utama sehingga masyarakat Wukirsari adalah sebagai petani atau buruh tani. Jumlah penduduk desa Wukirsari

didominasi oleh usia produktif berjenis kelamin laki-laki dengan tingkat pendidikan paling banyak pada jenjang sekolah dasar. Dalam perkembangannya desa Wukirsari oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul telah ditetapkan sebagai desa Wisata Budaya hal ini karena daerah tersebut terdapat makam Raja-raja Mataram, penetapan ini berkaitan dengan pengembangan strategi kawasan sesuai Perda No. 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul.

Dengan penetapan desa Wisata Budaya tersebut, masyarakat di desa Wukirsari diharapkan memiliki mata pencaharian selain pertanian yang lahannya sudah kian menyempit. Mata pencaharian baru yang tercipta adalah tumbuhnya industri kreatif yang berbasis pada kearifan lokal dengan mengembangkan potensi alam yang ada di sana. Persoalannya menjadi tidak mudah karena tingkat pendidikan dan kebiasaan masyarakat di desa Wukirsari yang sangat taat pada norma dan menerima hidup melalui kepasrahan artinya menunggu tanpa keinginan daya juang dalam kreatifitas yang lebih. Kesenjangan sosial yang terjadi selain yang telah disebutkan diatas yaitu tentang jumlah penduduk usia produktif dan lahan pertanian yang mulai tidak mencukupi, serta kemungkinan putus sekolah karena faktor ekonomi, ternyata juga adanya kecenderungan para pemuda enggan menekuni warisan dari nenek moyangnya. Keengganan ini terlihat dari masyarakat di Wukirsari yang nenek moyangnya dekat dengan Kraton memang memiliki keahlian dalam tatah sunggih atau pembuatan wayang dan membatik. Keahlian ini diturunkan pada generasi keturunannya dalam keluarga yaitu diturunkan pada anak dan cucunya. Namun yang terjadi pada generasi muda Wukirsari tidak terlalu tertarik untuk menekuni kegiatan membatik dan sebagai pembuat wayang (tatah sunggih), para pemuda lebih tertarik sebagai pedagang saja sehingga pembatik atau penatah wayang umumnya para

orangtua atau yang sudah berusia lanjut. Sementara batik dan tatah sungging sebagai produk lokal yang telah mampu menarik minat para wisatawan asing.

Disinilah letak permasalahannya, perlu adanya kesadaran pemuda Wukirsari untuk melestarikan warisan lokal tersebut. Kesadaran ini dapat dibangun melalui penyadaran dengan menumbuhkan industri kreatif. Dibutuhkan konsistensi pemuda untuk mau mengelola dengan lebih sungguh-sungguh dan memiliki semangat belajar untuk meningkatkan keterampilan dalam menghadapi persaingan, sehingga produk warisan budaya ini mampu terus berkembang bahkan menembus pasar dalam dan luar negeri.

Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan kesadaran pemuda melalui pendekatan dan sosialisasi serta pembinaan, pelatihan, pembiayaan dan pemasaran, sehingga pemuda merasa diperhatikan dan dibutuhkan oleh pemerintah untuk bersama-sama membangun daerahnya. Jika hal ini berhasil maka pendapatan daerah dapat meningkat dan juga mengatasi pengangguran bagi pemuda. Selain itu keterlibatan swasta untuk memberikan dukungan baik itu akses pasar atau pembinaan yang selanjutnya dijadikan mitra akan menjadikan pemuda bersemangat karena memiliki kepastian pendapatan untuk kehidupannya. Hal inilah yang membawa peneliti begitu tertarik dalam melakukan penelitian, sebuah kearifan lokal dalam kehidupan keseharian baik dari kebiasaan dan hasil produksi mampu menumbuhkan pergerakan ekonomi dalam mensejahterakan.

Sementara disisi lain masyarakat di Desa Wukirsari, dengan penetapan sebagai Desa Wisata Budaya telah menjalankan program kegiatan pengembangan dalam rangka meningkatkan pendapatan guna mendukung pariwisata, dengan mengembangkan program partisipatif PRA (*Partisipatory*

Rural Appraisal). Kemampuan dan kepedulian masyarakat Desa Wukirsari dalam mempertahankan kearifan lokal sebagai potensi yang dikembangkan, sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam mempertahankan, meluaskan dan mengembangkan sesuai perkembangan jaman tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur dari kearifan lokal. Nilai-nilai tersebut dapat membangun karakter dan sebagai identitas dalam menyikapi globalisasi.

Dari latarbelakang yang disampaikan di atas penulis menduga beberapa hal penting yang harus diteliti yaitu seberapa besar potensi kearifan lokal mampu meningkatkan kegiatan kewirausahaan pemuda untuk menumbuhkan lapangan kerja baru selain pertanian. Selanjutnya seberapa besar kesadaran pemuda memahami kearifan lokal sebagai potensi yang dapat dikembangkan dalam menghadapi globalisasi sehingga tercipta produk lokal yang mengglobal, dan sejauh mana program Desa Wisata Budaya Wukirsari mendapatkan dukungan dari pemerintah khususnya dalam menumbuhkan kesadaran pemuda agar berperan dalam pembangunan melalui kebijakan kewirausahaan. Untuk dapat mencapai hal tersebut pemuda harus memiliki semangat dan strategi yaitu: mengenali budaya sendiri, meningkatkan kemampuan individu, melalui pendidikan dan pelatihan. Pemerintah memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan, serta terciptanya lingkungan masyarakat yang mendukung setiap kegiatan pemuda wirausaha, dukungan tersebut termasuk juga dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah sebagai kekayaan lokal yang akan memiliki daya guna dan daya saing. Swasta memiliki peran untuk memberikan kesempatan dan membagikan pengalamannya bagi para wirausahawan muda untuk terus berkembang dan termotivasi.

Dan akhirnya penelitian Membangun Kewirausahaan Pemuda Indonesia Melalui Kearifan Lokal yang dilaksanakan di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan perwujudan desentralisasi yang mampu mensejahterakan masyarakatnya melalui paradigma *New Public Management* yang fokus pada kinerja dan daya saing untuk hasil yang efektif, dengan pelayanan sesuai paradigma *New Public Service* yang mana pemuda adalah *citizen* yang di "*uwongke*" sehingga perannya merupakan kesadaran utuh dalam menjaga kehidupan bersama di desa Wukirsari. Dalam menghadapi dinamisasi perubahan yang sangat cepat maka paradigma NPM dan NPS dikonstruksikan kembali dengan menggunakan konsep *Dynamic Governance* dimana budaya dan kemampuan yang dinamis menjadi kunci utama keberhasilan membangun kewirausahaan pemuda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimanakah program membangun kewirausahaan pemuda di Kabupaten Bantul melalui kearifan lokal ?
- 2) Apa sajakah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam membangun kewirausahaan pemuda di Bantul melalui kearifan lokal ?
- 3) Bagaimanakah model yang tepat dalam membangun kewirausahaan pemuda melalui kearifan lokal

1.3. Tujuan Penelitian

Relevan dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis tentang:

- 1) Pelaksanaan program membangun kewirausahaan pemuda di Desa Wukirsari, Kabupaten Bantul melalui kearifan lokal.
- 2) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses dalam membangun kewirausahaan pemuda di Desa Wukirsari, Kabupaten Bantul melalui kearifan lokal.
- 3) Membuat model yang tepat dalam membangun kewirausahaan pemuda melalui kearifan lokal

1.4. Manfaat Penelitian

A. Manfaat teoritik

Dari penelitian ini secara teoritik, diharapkan akan memberikan kontribusi pada kajian-kajian teori bidang ilmu administasi publik khususnya tentang otonomi desa dan pelayanan publik serta pemuda sebagai subkultur ekonomi yang berperan sebagai subyek dalam pembangunan daerah khususnya pada upaya menumbuhkan kesejahteraan dengan menjadi pemuda yang kreatif, inovatif dan mandiri.

B. Manfaat praktis

Diharapkan memberikan kontribusi yang baik dalam penegakan kemandirian pemuda dan selanjutnya pada kemandirian desa sehingga sosialisasi Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dan khusus pada kewirausahaan pemuda menjadi satu strategi dalam mencapai pemuda yang kreatif, inovatif dan mandiri. Hambatan atau kendala yang muncul dalam kaitan realisasi program kewirausahaan pemuda melalui nilai-nilai kearifan lokal dapat diatasi. Dan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para

praktisi pemerintahan dalam mengaplikasikan membangun
kewirausahaan pemuda Indonesia melalui nilai-nilai kearifan lokal di Desa
Wukirsari, Kabupaten Bantul.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil Penelitian terdahulu

Untuk menentukan kebaruan dalam penelitian ini, dicari dan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh negara lain seperti Afrika Selatan, Eropa, Indonesia sendiri, juga pandangan peneliti internasional yang menggunakan data beberapa negara. Penulis sangat tertarik dengan negara Afrika Selatan sehingga jurnal yang digunakan sebagai panduan penelitian terdahulu berasal dari Afrika Selatan seperti dari Nigeria, Nairobi, dan Kenya. Ketertarikan ini disebabkan oleh karena semangat dalam membangun negara Afrika Selatan khususnya dalam bidang ekonomi setelah politik Apartheid runtuh. Semangat yang sangat tinggi di Afrika Selatan dalam menumbuhkan ekonomi melalui sumber daya alam yang ada adalah dengan melakukan persaingan atau kemampuan bersaing dengan negara maju, serta meningkatkan peran penting warga minoritas dari masyarakat yang berkulit warna hitam untuk mengurangi dominasi warna kulit putih. Pertumbuhan ekonomi ini juga didukung oleh kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dunia, serta kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi dan informasi. Industri perminyakan Afrika Selatan memiliki teknologi dan informasi terbaik di dunia. Negara yang begitu miskin pada saat ini terus bertumbuh dalam mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini juga terlihat dengan begitu aktif dan fokusnya pemerintahan di Afrika Selatan memajukan wirausaha pemuda melalui beberapa penelitian untuk menumbuhkan peran pemudanya dalam membantu pertumbuhan perekonomian negaranya.

Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud adalah:

1. Saphetha Appie Gwija, Chuks Eresia-Eka, Chux Gervase Iwu, melakukan penelitian menilai dampak struktur dukungan dan inisiatif untuk kewirausahaan pemuda, menariknya dalam penelitian ini adalah adanya kebijakan pemerintah setelah jatuhnya era Apartheid di Afrika Selatan, pemerintah memperkenalkan *See National Youth Policy*, 2009, dan pengembangan inisiatif yang meliputi *Nasional Small Business Act of 1996* dengan tujuan untuk memberikan lingkungan usaha yang kondusif, khususnya bagi perempuan, orang kulit hitam dan pemuda. Namun apa yang dilakukan ini menjadi kurang memuaskan karena sebagian besar pemuda desa bermigrasi ke wilayah yang lain, kurangnya modal awal, kurang berminatnya pemuda terlibat dalam wirausaha, kurangnya kesadaran tentang dukungan struktur kewirausahaan, keterampilan yang tidak memadai dan akses pasar. Dengan banyaknya hambatan ini pemerintah berusaha melihat (a). peran apakah yang sebenarnya dibutuhkan oleh pemuda wirausaha ? (b) serta peran inisiatif seperti apakah yang tepat ?. Dalam rekomendasinya disampaikan tentang pentingnya : (1) pembentukan struktur pendukung, (2) adanya strategi pemasaran untuk menciptakan kesadaran akan kehadiran wirausaha muda, (3) serta ketepatan pelayanan yang ditawarkan pemerintah terhadap apa yang wirausaha muda butuhkan.

2. Olajire dan Comfort melakukan penelitian pendidikan kewirausahaan dan pemberdayaan pemuda dalam kontemporer di Nigeria, pengangguran kaum muda di Nigeria sangat mengkhawatirkan. Terciptanya lapangan pekerjaan sangat diharapkan untuk tumbuhnya perekonomian. Untuk itu dalam penelitian ini pendidikan kewirausahaan sebagai salah satu cara untuk menggalakkan kaum muda khususnya siswa sekolah dalam menumbuhkan pengetahuan dan keterampilan dalam bisnis sehingga ketika para siswa ini lulus dari sekolah telah memiliki bekal pengetahuan untuk melakukan wirausaha dari pada mencari pekerjaan. Dalam penelitian ini membahas konsep pendidikan kewirausahaan dan pemberdayaan, strategi pemberdayaan pemuda, dan mempromosikan kewirausahaan dikalangan pemuda. Dianjurkan bahwa konsep kewirausahaan pemuda harus diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dari sekolah tingkat dasar sampai pendidikan sekolah menengah. Diharapkan para siswa atau pemuda mampu menyerap budaya kewirausahaan di sekolah dan ketika berada di luar sekolah dapat mengatasi pengangguran.

3. H. Saban Echdar, melakukan penelitian tentang empiris model studi kewirausahaan kepentingan umum dengan menggunakan obyek Sunggumina pedagang sentral di kabupaten Gowa, dengan menggunakan sampel 90 sampel dari populasi 360 pedagang pasar. Penelitian ini berusaha menguji faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat. Dengan menggunakan analisis

regresi berganda dan pengolahan data menggunakan SPSS untuk menguji koefisien korelasinya dengan tingkat signifikan 5%. Dalam penelitian ini hipotesa yang menyatakan bahwa kapital, keluarga, lingkungan sosial dan jiwa kewirausahaan merupakan personal efek positif pada minat masyarakat berwirausaha.

4. Jacek dan Maria, melakukan penelitian tentang peran pendidikan dan kebudayaan dalam pembangunan kewirausahaan pemuda di Uni Eropa. Komisi di Eropa melalui surat kewirausahaan melakukan aksi untuk tahun 2020, yang merupakan rencana aksi pentingnya kewirausahaan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja. Dan untuk mencapai hal tersebut pada tahun 2020 melakukan strategi dengan menciptakan indikator tingkat aktifitas kewirausahaan di Uni Eropa. Dalam penelitian ini mencoba membandingkan data global dengan memantau kewirausahaan terpilih dengan sumber lainnya. Selain itu penelitian ini bertujuan mengidentifikasi peran pendidikan dan kebudayaan dalam pembangunan pemuda wirausaha di Uni Eropa, serta hambatan pendidikan dan budaya negatif mempengaruhi aspirasi kewirausahaan. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kewirausahaan di Uni Eropa melalui pendidikan dan pelatihan, dan merupakan model yang dapat menggambarkan hambatan dan penelitian tergantung pada tingkat pembangunan.

5. Lucio, Guisepppe dan Tommaso, dalam penelitian tentang mengatasi hambatan dalam proses wirausaha muda, pentingnya

program pendukung, bertujuan menyoroti aspek-aspek yang harus dipertimbangkan ketika membina kewirausahaan di kalangan pemuda. Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur sistematis studi empiris dan proyeksi dimensi seperti kemajuan dalam proses kewirausahaan, membangun kerangka teoritis.

6. Irene Wangari Mwangi, Kenneth Lawrence Wanjau, melakukan penelitian tentang peran SACCOs (Tabungan dan Kredit Koperasi) dalam perannya terhadap pertumbuhan kewirausahaan di Kenya: Kasus di Nairobi. Melalui program SACCOs ini diharapkan para pemuda dapat mengatasi persoalan pribadinya dalam pengangguran karena adanya hambatan pengalaman, sumber daya, sehingga dibuat program seperti akses kredit, inkubator bisnis, pendidikan kewirausahaan dan pelatihan bisnis, program bimbingan jaringan pasar, para pemuda calon wirausaha dapat memperoleh kapasitas dan aset yang diperlukan dalam meningkatkan peluang mereka menjalankan bisnis mereka sendiri. Hal ini karena Pemerintah merasakan bahwa kewirausahaan pemuda memberikan manfaat yang signifikan dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Dan pada tingkat lokal di Kenya kebijakan pemuda telah mengidentifikasi penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas strategis daerah.

7. Hanadi dan Michael, melakukan penelitian inkubator kewirausahaan pemuda, dengan mengeksplorasi, menyelidiki dan mengidentifikasi dimensi kewirausahaan pemuda sebagai program inkubasi bisnis. Identifikasi dilakukan berdasarkan keberhasilan

pelaksanaan studi kasus, dengan metodologi penelitian diskusi bersama lima organisasi inkubator di negara-negara berkembang.

Dan temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semangat kewirausahaan dalam program inkubator bisnis, dan bagaimana cara memimpin dalam mempertahankan inkubator tersebut. Implikasi dari penelitian ini adalah mengembangkan, menerapkan paktek terbaik untuk menciptakan generasi kewirausahaan dalam mendukung pembangunan ekonomi.

8. Lemhanas, merupakan jurnal kajian terhadap peningkatan daya saing industri di Indonesia guna menghadapi *Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA)* dalam rangka memperkokoh Ketahanan Nasional. ACFTA merupakan salah satu persetujuan multilateral yang disepakati dalam era global di mana bea masuk barang menjadi nol. Hal ini menunjukkan bahwa yang diasingkan bukan perdagangannya tapi juga yang utama adalah aspek produksinya. Negara dengan aspek pengelolaan industrinya yang kurang baik dapat dipastikan akan kalah sebelum berperang. Dengan diberlakukannya ACFTA diprediksikan akan banyak industri yang gulung tikar, dan dengan sendirinya akan meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia.

9. G.E. Ifenkwe, penelitian yang dilakukan adalah tentang memobilisasi dan pemberdayaan pemuda masyarakat berkelanjutan dan pembangunan pedesaan di Nigeria. Sebuah pendekatan dua arah untuk memanfaatkan kemampuan fisik dan intelektual muda, untuk mengatur program pendidikan yang akan

memberdayakan mereka dalam mencapai pemenuhan diri dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan partisipasi mereka dalam pembangunan pedesaan dan masyarakat. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pemuda harus mengambil peran aktif dan mereka para pemuda harus diberikan perangkat hukum sebagai pengakuan.

10. Olawale dan Lynety, penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan investigasi hambatan untuk kewirausahaan pemuda di Afrika Selatan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki hambatan keinginan pemuda melakukan wirausaha. Metode penelitian dilakukan dengan metode simple random sampling. Lima skala Likert digunakan untuk mengukur respon. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemuda menganggap kurangnya modal, kurangnya ketrampilan, kurangnya dukungan, kurangnya kesempatan pasar dan resiko sebagai hambatan utama keinginan menjadi wirausaha.

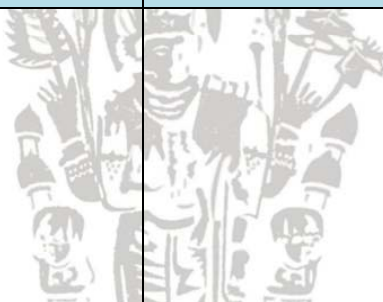
Dalam rangka menjelaskan posisi penelitian ini hubungannya dengan penelitian yang sejenis dan serumpun, berikut disampaikan dalam bentuk tabel hasil penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian dari segala aspek yang menjadi obyek penelitian ini. Hal ini perlu dilakukan untuk menentukan posisi penelitian ini dan menemukan titik singgung dalam hubungan dengan penelitian sejenis terdahulu. Berikut disajikan matrik dari penelitian terdahulu, dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1. Tabel Penelitian Terdahulu

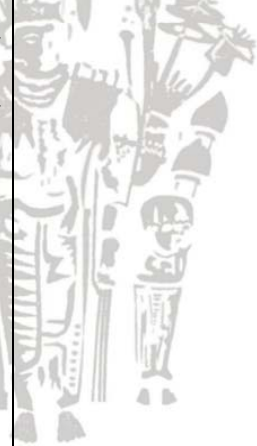
No	Penelitian Terdahulu			Kontribusi terhadap yang akan diteliti	Perbandingan dengan yang akan di teliti
	Nama peneliti, Tahun penelitian	Fokus Kajian	Hasil Penelitian		
	1	2	3	4	5
1	Saphetha Appie Gwija, Chuks Eresia-Eka, Chux Gervase Iwu <i>Assessing The Impact of support Strucures And Initiatives To Youth Entrepreneurship Development in A selected Township in Western Cape Province Of South Africa, 2014 (Mediterranean Journal of sosial Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, E-ISSN 2039-2117, ISSN 2039-9340, Vol 5 No. 1. Januari 2014)</i>	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan peran struktur dukungan pemerintah dan peran inisiatif dari kewirausahaan pemuda. Penelitian dilakukan pada 200 pemuda wirausaha	Penemuan dari penelitian ini, bahwa dukungan pemerintah, dan inisiatif dari kalangan pemuda tidak menunjukkan adanya dukungan dalam memberikan kontribusi pada pembangunan kewirausahaan pemuda di Khayelitsha. Rekomendasi dari penelitian ini bahwa pemerintah harus memperhatikan pentingnya strategi pemasaran, selain itu juga pemerintah menyadari pentingnya wirausaha muda, sehingga pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada kaum muda, seperti ketersediaan layanan informasi bisnis, dan perhatian dari masyarakat sipil.	Penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi atau wawasan. Dimana persoalan hampir sama yaitu kebutuhan akan perhatian dari pemerintah dan masyarakat akan peran penting pemuda dalam kewirausahaan. Dalam hal ini disesuaikan dengan kondisi di Indonesia maka perhatian pemerintah dan masyarakat adalah tiga aktor penting dalam mensukseskan kewirausahaan pemuda yaitu pemerintah, Swasta dan masyarakat.	Persamaan: sama-sama membutuhkan perhatian dari pemerintah dalam pelaksanaan kewirausahaan. Perbedaan : pada fokus yaitu tentang Program, Mekanisme, aktor yang terlibat, dan kearifan lokal memiliki potensi sebagai daya dorong dan daya dukung dalam mengembangkan pemuda wirausaha menjadi kreatif, inovatif dan mandiri. pemuda.

	1	2	3	4	5
					Perempuan bukan sebagai kaum minoritas namun perlu diberdayakan karena jumlahnya hampir sama dengan jumlah penduduk kaum laki-laki.
2	Olajire Adeola Adegun and Comfort Olufunke Akomolafe <i>Entrepreneurship Education And Youth Empowerment In Contemporary Nigeria</i> . 2014 (Scholarly Journal of Education Vo. 2 (5). Pp. 52-57, June 2013. Available online at http://www.scholarly-journals.com/SJE . ISSN 2315-6155@2013 Scholarly-Journals)	Pemberdayaan pemuda dalam pembangunan di Nigeria	Para pemuda akan memiliki peran yang baik dalam pembangunan nasional di Nigeria melalui pemberdayaan kewirausahaan pemuda. Pemberdayaan ini dilaksanakan melalui program pendidikan kewirausahaan. Program pendidikan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh para pemuda di Nigeria akan memberikan keyakinan dan rasa percaya diri bagi para pemuda Nigeria untuk dapat berperan aktif pada pembangunan nasional yang sedang terjadi dengan tujuan untuk dapat lebih mengglobal.	Penelitian terdahulu telah memberikan wawasan yang sama dengan penelitian yang dilakukan yaitu bagaimana meningkatkan sumberdaya manusia dalam hal ini pemuda dalam hal kemampuan dan keterampilan dalam berwirausaha, sehingga perlu disusun menjadi kurikulum yang wajib bagi sekolah. Permasalahannya di Indonesia kurikulum tentang kewirausahaan belum	Persamaan : kebutuhan pendidikan kewirausahaan . Perbedaan : Di Indonesia pendidikan kewirausahaan formal baru ada di sekolah kejuruan seperti SMK. Namun pemuda memiliki kesadarannya sendiri untuk menjadi wirausah sehingga perlu didukung dengan kebijakan publik.

	1	2	3	4	5
				dapat dilaksanakan disekolah-sekolah formal yang bersifat umum,baru dilaksanakan disekolah kejuruan.	Kebijakan yang tidak jauh dari nalar publik melalui konstruksi teori <i>Dynamic Governance</i>
3	H. Saban Echdar <i>Empirical Model Study Public Interest Entrepreneurship (Central Market Study In Sungguminasa Kabupaten (International Journal of Business and Management Invation. ISSN (Online): 2319-8028, ISSN (Print): 2319-801 X. www.ijbmi.org Volume 2 Issue 9/September. 2013/PP.42-53)</i>	Pada minat masyarakat, dan pengaruh lingkungan	Faktor yang sangat mempengaruhi minat masyarakat dalam melakukan kewirausahaan adalah : keluarga, lingkungan, pribadi dan jiwa dari pelaksana wirausaha sendiri. Hal ini tentusaja mempengaruhi konsistensi dan komitmen dalam menjalankan kewirausahaan mengingat lingkungan sosial mudah sekali berubah. Untuk itu perlu dilakukan promosi atau sosialisasi yang terus menerus dalam jangka waktu yang panjang dalam menanamkan nilai nilai tentang kewirausahaan.	Kontribusi yang dapat diterima dalam penelitian ini sangat jelas bahwa perubahan lingkungan akan sangat mempengaruhi konsistensi dalam menjalankan kewirausahaan. Untuk itu dalam penelitian ini kearifan lokal menjadi daya dorong dan daya dukung dengan setiap potensi yang ada. Mengingat kearifan lokal memiliki sifat yang sangat unik dan berbeda selain akan menumbuhkan jiwa yang menjadi semangat juga melahirkan produk yang sangat khas.	Persaman : Faktor internal yang mendukung pemuda yaitu : faktor keluarga, lingkungan dan kondisi sosial. Perbedaan: Agama menjadi satu spirit yang membangun, spiiritul tentang berkah dalem sebagai motivasi yang membangun keyakinan diri. Penetapan sebagai desa wisata budaya memberikan dampak bagi pemeliharaan atau pelestarian dalam melestarikan produk lokal unggulan.

	1	2	3	4	5
					hasil produk unggulan ini dapat menumbuhkan kecintaan pada daerah nya dengan selera akomodatif dari perkembangan lingkungan yang terjadi.
4	Jacek Jakubczak & Anna Rakowska <i>The Role of Education and culture in the development of Youth Entrepreneurship in European Union, 2013</i> <i>Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation 19-21 June 2013, Management Knowledge and Learning International Conference, Coatia)</i>	Pentingnya pendidikan kewirausahaan dan adanya hambatan-hambatan pada budaya	Kaum muda membutuhkan keterampilan sekaligus juga pengetahuan. Pengembangan kewirausahaan pemuda kurang mengalami perkembangan karena hambatan kurangnya pendidikan dan budaya.	Penelitian terdahulu memberikan wawasan tentang pentingnya pendidikan dan budaya . dalam penelitian ini Usia pemuda di Indonesia sudah di terapkan dalam UU Kepemudaan, dan budaya menjadi harapan baik dalam sistem desentralisasi dimana tujuan utama adalah bagaimana mensejahterakan dengan segala potensi yang ada didaerah. Dan kearifan lokal adalah potensi.	Persamaan : Yaitu tentang budaya lingkungan. Perbedaan : Budaya dalam penelitian sebelum lebih sebagai penghambat. Sedang dalam penelitian ini budaya atau kearifan lokal sebagai pendukung yang memberikan spirit dan motivasi serta menyatukan

	1	2	3	4	5
5	Lucio Cassia, Giuseppe Criaco, Tommaso <i>Entrepreneurial Process Of Youth: The Importance of Support Programs, 2013</i> (Center for Youth and family Enterprice and Development of Economics and technology Management, University of Bergamo, Bergamo , Italy)	Hambatan demografi pada gender dan faktor lingkungan keluarga	Pemuda hari ini mampu memicu proses inovasi menjadi pilihan yang menarik bagi pemuda dalam meningkatkan pendapatan. Hambatan yang menjadi penentu dalam kewirausahaan pemuda adalah karakteristik demografi yang biasanya di pengaruhi oleh faktor gender, sifat kepribadian pemuda, model sosial, modal (keuangan) dan faktor lingkungan keluarga.	Hambatan dari lingkungan keluarga ini hampir sama dengan yang terjadi di Indonesia karena orang tua lebih senang anak-anaknya bekerja dengan pendapatan yang jelas.	Persaman : Gender menjadi hambatan karena budaya. Dan Sama sama hendak membuat model yang tepat Perbedaan: Bagaimana lokal mampu menjadi trand global, selain itu membuat kebijakan yang sejalan dengan nalar publik. Nalar publik dibangun dari paradigma NPM dan NPS yang dikonstruksikan, <i>memalui teori Dynamic Governance</i>
6	Irene Wangari Mwangi, Kenneth Lawrence Wanjau <i>The Role of SACCO in Growth of Youth</i>	Peran tabungan dan kridit koperasi (SACCOS) dalam pertumbuhan kewirausahaan kaum muda di Kenya.	Dalam aspek produk dan layanan juga menunjukan peningkatan sehingga kendala yang dihadapi wirausaha muda		

	1	2	3	4	5
	<i>Entrepreneurship in Kenya: A Case of Nairobi County, 2012 (Greener Journal Of Business and Mamagement Studies, ISSN : 2276-7827, Impact Factor 2012 (UJRI) : 0.6670. ICV 2012 : 6.03.)</i>		terhindarkan. Sehingga dalam penelitian ini SACCOS memainkan peran kunci dalam pertumbuhan kewirausahaan pemuda.	Penelitian terdahulu telah memberikan wawasan nyata bahwa jika pemuda diberikan akses permodalan dalam membangun kewirausahaan pemuda maka dukungan permodalan ini akan sangat membantu. Di Indonesia sesungguhnya ada dana-dana dari CSR BUMN namun masih perlu pengaturan yang jelas dari dana bantuan tersebut. disini penting menunjuk satu POKJA dalam menangani hal ini seperti yang dilakukan di Nairobi dengan adanya semacam koperasi SACCOS.	Persamaan : Adanya dana dari CSR Perbedaan: Tidak menjadi kebijakan yang solid dan terintegrasi secara langsung sehingga model dalam penelitian terdahulu menjadi pemikiran baik dalam penelitian ini. Peran aktor dalam kebijakan ini dalam membangun sinergi khususnya pada pelatihan, pemasaran dan permodalan

	1	2	3	4	5
7	Hanadi Mubarak Al Mubarak & Michael Busler <i>Beyond Incubator: Youth Entrepreneurship Generation, 2012</i> <i>European Journal of Business and Management, ISSN 2222-1905 (Papaer) ISSN 2222-2839 (Online) Vol 4, No. 14, 2012)</i>	Inkubator mendukung generasi wirausaha dan inovasi dalam menciptakan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi melalui generasi muda yang cerdas.	Kewirausahaan dapat menjadi potensi ekonomi kaum muda dan menjadi sumber kerja baru dan pertumbuhan, serta meningkatkan kemandirian ekonomi. Ekonomi kewirausahaan berbasis pada ekonomi dan menggerakkan teknologi, dimana kekayaan tercipta secara langsung dari inovasi. Inovasi harus dipahami tidak hanya dalam hal teknik pemecahan masalah konvensional, tetapi juga keterbukaan, kewaspadaan dan kepekaan terhadap peluang baru yang akan muncul. Inkubator mendukung generasi wirausaha dan inovasi dalam menciptakan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi.	Penelitian ini dilakukan di Indonesia. Inkubator memang menjadi satu strategi dalam membentuk wirausaha muda, namun hasilnya masih harus diamati dengan lebih mendalam.	Persamaan: Penelitian ini dilakukan di Indonesia Perbedaan: Peneliti lebih tertarik untuk menggali lebih dalam pelaksanaan sistem desentralisasi dalam mengembangkan potensi lokal melalui kebijakan kewirausahaan yang sesuai dengan nalar publik. Dan sinergi antar aktor dari mulai pembinaan sampai berhasil menjadi pemuda wirausaha yang mandiri . pemantauan dilakukan oleh lembaga independen.

	1	2	3	4	5
8	Lemhanas Peningkatan Daya Saing Industri Indonesia Menghadapi Asean_China Free Trade Agreement (ACFTA) Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional, 2012 (Kajian Jurnal LEMHANAS RI/ Edisi 14? Desember 2012)	Kesiapan di dalam negeri menerima masuknya pasar bebas	Industri dalam negeri masih menghadapi permasalahan yang masih menghambat peningkatan daya saing, baik dari segi kualitas dan harga. Hal ini disebabkan karena kondisi infrastruktur yang belum memadai, antara lain ketersediaan dan kontinuitas suplai energi, serta kondisi infrastruktur jalan yang menyebabkan tingginya biaya produksi. Selanjutnya juga tingkat suku bunga yang tidak kompetitif. Juga adanya peraturan perundang-undangan yang tidak sinergis satu dengan yang lain.	Dalam penelitian harus disiapkan pemuda yang berdaya saing yang memiliki komitmen dan karakter sebagai pemuda mandiri dalam pembangunan sektor ekonomi. Kearifan lokal menjadi daya dukung dan daya dorong sebagai prilaku pemuda yang memiliki identitas dan sebagai kohesi sosial dengan kekuatan kearifan lokal kewirausahaan dapat dikapitalisasi menjadi ketahanan ekonomi.	Penelitian ini memberikan referensi untuk penelitian yang akan dihadapi bahwa dampak dari WTO dan globalisasi harus menjadi domain utama yang akan memberikan efek pada temuan dalam penelitian. Pemuda Wirausaha sebagai memiliki identitas melalui kekuatan kearifan lokal serta sebagai kohesi sosial dalam ketahanan ekonomi, akan menjadikan pemuda wirausaha mampu mengglocal dengan rasa percaya diri dalam daya saing sehingga terjadi glocalisasi dimana produk lokal mampu mengglocal

	1	2	3	4	5
9	G.E. Ifenkwe <i>Mobilizing and Empowering Youths For Sustainable Community and Rural Development in Nigeria, 2011</i> <i>(International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, HRMars, April 2012, Vol. 1. No. 2. ISSN: 2226-6348)</i>	Pendekatan pada dua arah untuk memanfaatkan kemampuan pemuda yaitu fisik dan intelektual	Pemuda harus berperan dalam pembentukan struktur administrasi yang kredibel di masyarakat, dimana kegiatan pembangunan dan isu-isu lain dari masyarakat di bahas dan ditindak lanjuti. Selanjutnya pemerintah dan masyarakat harus memberikan pengakuan dalam bentuk status hukum bagi pemuda,. Pemuda dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan kegelisahan terhadap isu-isu dalam masyarakat yang menjadi tanggungjawab sosial bagi pemuda. Melakukan kegiatan bersama, sama juga kegiatan olahraga bola merupakan kunci keberhasilan dalam berkomunikasi menjalankan program pembangunan pemuda di pedesaan di Nigeria.	Status hukum yang jelas ini juga menjadi pekerjaan rumah dalam penelitian nanti, hal ini disebabkan adanya anggapan dalam budaya masyarakat tentang pemuda yang masih ambiguitas, di satu sisi pemuda adalah aktor yang di harapkan dalam pembangunan namun di sisi lain pemuda juga dianggap penyakit masyarakat. Sehingga program penyadaran kewirausahaan menjadi komunikasi dua arah antara pemelintah dan pemuda itu sendiri bahwa program ini saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Masyarakat membeerikan kondisi yang lebih kondusif.	Persamaan: Status hukum . Perbedaan : di Indonesia status hukum masih belum jelas meskipun Undang-undang dan peraturan pemerintah ada dan mendukung. Namun dalam tataran implementasi pemuda masih banyak menjumpai kesulitan. Dalam penelitian dilihat betul keterlibatan aktor pelaksana dari kegiatan kewirausahaan pemuda. Aktor pemerintah yang mensosialisasikan program, pemuda

	1	2	3	4	5
					yang menerima program dan Swasta atau masyarakat lainnya yang memberikan ruang gerak yang baik serta dukungan.
10	Olawale Fatoki, lynety Chindodaga <i>An Investigation into the Obstacles To Youth Entrepreneurship In South Africa, 2011 (International business Research, Vol. 4. No. 2 : april 2011. www.Ccsenet.org/ibr)</i>	Hambatan akses modal, kurangnya ketrampilan dan kebijakan pemerintah	Alasan mengapa pemuda di Afrika Selatan tidak tertarik pada dunia wirausaha adalah kurangnya akses modal, kurangnya keterampilan bisnis, dukungan pemerintah, takut gagal dan peluang pasar yang lemah. Pendidikan kewirausahaan merupakan salah satu inisiatif yang dapat dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam kewirausahaan. Keterampilan dalam kewirausahaan termasuk di dalamnya adalah kreatifitas, inovasi, pengambilan keputusan yang mengandung resiko dan kemampuan menafsirkan kesuksesan dan mengidentifikasi peluang.	Dari penelitian memberikan wawasan yang baik dalam penelitian yaitu bagaimana memotivasi pemuda untuk tidak takut gagal, dan kewirausahaan adalah perjalanan masa depan dengan tidak bergantung pada siapapun selain pada kemampuan diri sendiri. Penting meningkatkan SDM pemuda dalam keberhasilan program kewirausahaan.	Persamaan : motivasi dan kesadaran pada pemuda wirausaha Perbedaan : Motivasi dan kesadaran dibentuk melalui kebijakan publik yang sesuai dengan nalar publik , melalui teori <i>Dynamic Governance</i> serta membentuk lembaga indepenen. Menghasilkan kebijakan Bela Beli. Menjadi model rekomendasi. model ideal kewirausahaan pemuda mandiri.

Dari penelitian terdahulu terdapat fokus dan keinginan yang sama tentang pembangunan ekonomi dengan memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk menciptakan inovasi dan kreatifitas. Di hampir setiap negara dalam jurnal yang tersaji pemerintah dan masyarakat serta swasta sadar betul tentang peran penting pemuda dalam berperan bagi kemajuan daerah dan negaranya. Persoalan yang ada umumnya berasal dari pemuda dan lingkungan sosial itu sendiri. Dengan demikian dalam penelitian ini nanti yang menjadi faktor utama untuk diteliti adalah pemahaman tentang potensi kearifan lokal sebagai daya dukung dan daya dorong bagi kesadaran pemuda dalam meningkatkan pembangunan sektor ekonomi pada daerahnya sendiri, serta kesungguhan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberikan bimbingan, melalui kebijakan yang tepat yaitu kebijakan publik yang sesuai dengan nalar publik. Kebijakan ini dengan mengelaborasi paradigma administrasi publik NPM dan NPS, serta mengkonstruksi program kewirausahaan pemuda melalui teori *Dynamic Governance* yang sesuai kearifan lokal di Kabupaten Bantul. Penelitian membangun kewirausahaan pemuda Indonesia melalui kearifan lokal inilah yang membedakan dari penelitian terdahulu. Nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia yang multi etnis merupakan potensi yang dapat dikembangkan dan merupakan kebaruan dari penelitian yang dilakukan di desa Wukirsari. Melalui Perda Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2011 Tentang RT RW Kabupaten bantul Tahun 2010-2030, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Peraturan Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri No. 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa telah menetapkan Desa Wukirsari sebagai Desa Wisata Budaya, dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan memfokuskan kelebihan nilai-nilai kearifan lokal dalam mengembangkan

kewirausahaan di Desa Wukirsari, pemuda Wukirsari tidak saja dididik dan dilatih untuk menjadi mandiri tetapi juga menghayati, memahami potensi lingkungan tempat tinggalnya.

Penetapan keunggulan lokal sebagai Desa Wisata Budaya merupakan identitas dan jati diri pemuda Desa Wukirsari dengan memahami modal dasar yang dimiliki semenjak lahir sebagai modal sosial dimana pemuda memiliki intelektual, modal mental dan moral serta modal spriritual yang telah diajarkan secara turun temurun, serta potensi daerah yang akan menjadikan pemuda kuat dari dalam dirinya, merupakan faktor internal pemuda yang sangat mendukung pemuda untuk menjadi pemuda yang memiliki komitmen dan konsistensi untuk menjadi pemuda mandiri, selanjutnya pemuda yang mandiri secara ekonomi yang ditunjang memiliki mental yang kuat akan mampu menjaga ketahanan ekonomi bagi daerahnya..

2.2. Kewirausahaan Pemuda

Peran generasi muda diperlukan dalam aksi nyata melalui kewirausahaan yang didukung dengan iklim yang kondusif dengan perubahan cara pandang bahwa kewirausahaan menjadi sebuah budaya dalam kehidupan tatanan bermasyarakat, yang efektif dengan ditandainya beragam harapan dan upaya yang memfasilitasi pengelolaan sumber daya strategis. Budaya yang efektif ini ditandai dengan munculnya harapan, ide-ide baru dan kreatifitas. Dorongan atas pengambilan resiko, toleransi pada kegagalan dan dorongan belajar serta perjuangan akan kelahiran inovasi.

Prakarsa atau inisiatif secara psikologis merupakan dorongan dalam diri seseorang (*inner drive*) untuk menyalurkan pemikiran-pemikiran bagi pemecahan

masalah yang dihadapinya. Secara normatif prakarsa dimaknai positif, sebab gagasan yang timbul ditujukan untuk pemecahan masalah secara positif pula serta berdasarkan norma moral / etika. Jika gagasan itu ditujukan untuk menyelesaikan masalah secara negatif dan tidak etis, maka tidak bisa disebut sebagai prakarsa, bahkan lebih disebut sebagai provokasi. Prakarsa berfungsi sebagai sebuah pencetus (*trigger*) untuk bergulirnya proses bernalar, berpikir dalam menyelesaikan masalah (*problem solving analysis*), yang disadari oleh kemampuan analisis-sintesa salah satu aspek dalam inteligensi dalam diri seseorang. Oleh karena itu prakarsa berperan penting sebagai motor dari dinamika sosial pemuda.

Kita sadari pembangunan dengan berbasis pada pemuda mencakup pembangunan yang bersifat *community based development* dan pembangunan manusia atau *people centered development*. Sehingga orientasi dari penelitian ini adalah bagaimana pemuda dapat membangun kewirausahaan sebagai upaya dalam meningkatkan martabatnya sebagai manusia untuk memiliki kualitas sebagai sumber daya yang memiliki kualitas. Dengan memiliki kualitas diri yang baik pemuda dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam melalui teknologi dan menyesuaikan dengan perkembangan informasi dunia. Prinsip ketergantungan juga harus dihindari khususnya ketergantungan pada dunia luar. Pemuda akan mampu menggerakkan perekonomian dengan berdikari membangun dengan modal sendiri melalui teknologi dan perkembangan informasi. Hal ini tentu akan terlihat nyata dengan pemuda mampu mengolah bahan baku dari sumber alam sendiri, dan tidak melakukan impor justru melakukan ekspor. Dalam menjalankan kebijakan perundangan-undangan tentang kewirausahaan pemuda, sangat diharapkan peran aktif dari para

pemuda untuk mengambil inisiatif dan perannya. Begitu juga dukungan yang kuat dari pemerintah daerah untuk memberikan peluang dan aksesnya demi keberhasilan dalam menumbuhkan pembangunan pemuda wirausaha.

Shefsky (dalam Nugroho 2015) menyatakan bahwa *entrepreneurs are made, not born*. Jadi entrepreneur dapat dipelajari dan diajarkan serta dididik menjadi entrepreneur tidak memandang latar belakangnya, hal ini menjadikan kita optimis bahwa setiap orang dapat menjadi entrepreneur. Kewirausahaan merupakan sebuah proses penciptaan yang baru, dan membuat sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada (inovasi), dengan tujuan tercapainya kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungannya. Faktor motivasi tersebut dapat diringkas Lupiyoadi (2004) sebagai berikut :

1. *The foreign refugee* , peluang-peluang ekonomi di negara lain yang lebih menguntungkan sehingga mendorong seseorang pergi meninggalkan negaranya.
2. *The corporate refugee*, pekerja-pekerja yang tidak puas dengan lingkungan perusahaannya. Merasa kepuasan kerjanya akan meningkat dengan memulai dan menjalankan bisnis sendiri.
3. *The parental (parental) refugee*, Pengalaman bisnis dari keluarganya dan pada perkembangannya mereka ingin mencoba bisnis sendiri diluar kebiasaan yang di jalankan keluarganya.
4. *The feminist refugee*, para perempuan yang mendapatkan perlakuan diskriminatif di bandingkan kaum pria, baik dalam pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat. Maka kaum wanita ini akan membuktikan dirinya mampu dengan mendirikan perusahaan
5. *The housewife refugee*, para ibu rumah tangga yang sibuk membantu suaminya dalam hal keuangan karena desakan kebutuhan.
6. *The society refuge*. Anggota masyarakat yang tidak setuju dengan kondisi lingkungannya dan menjalankan usaha yang tidak terikat dengan lingkungannya.
7. *The educatial refugee*. Banyak orang yang gagal dalam studi menjadi terpacu dengan berwirausaha

Kewirausahaan adalah seorang wirausaha yang tidak hanya dimotivasi oleh *financial intenteive* melainkan keinginan untuk melepaskan diri dari lingkungan yang tidak sesuai dan untuk menemukan arti baru bagi kehidupannya

menurut Sukardi (dalam Lupioadi, 2004: 6) ada sembilan karakter tingkah laku kewirausahaan yaitu :

1. Sifat instrumental : menunjukkan bahwa wirausaha dalam berbagai situasi selalu memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungannya untuk mencapai tujuan pribadi dalam berusaha.
2. Sifat prestatif: wirausaha dalam berbagai situasi selalu tampil lebih baik . lebih efektif dibandingkan dengan hasil yang di capai sebelumnya.
3. Sifat keluwesan bergaul: menunjukkan bahwa wirausaha selalu berusaha cepat menyesuaikan diri dalam berbagai situasi hubungan antar manusia.
4. Sifat kerja keras: wirausaha selalu terlibat dalam situasi kerja dan tidak mudah menyerah sebelum pekerjaan selesai.
5. Sifat keyakinan diri: wirausaha selalu percaya pada kemampuan diri tidak ragu-ragu dalam bertindak bahkan memiliki kecenderungan untuk melibatkan diri secara langsung
6. Sifat pengambil resiko : wirausaha selalu memperhitungkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan berusaha.
7. Sifat Swa Kendali : wirausaha menunjukkan bahwa menghadapi berbagai situasi selalu mengacu pada kekuatan dan kelemahan pribadi, batas batas kemampuan dalam berusaha.
8. Sifat inovatif ; wirausaha menunjukkan ia selalu mendekati berbagai masalah dalam berusaha dengan cara-cara baru yang lebih bermanfaat. Terbuka untuk gagasan, pandangan dan emuan baru untuk memperbaiki kinerja.
9. Sifat mandiri : wirausaha menunjukkan bahwa ia selalu mengembalikan perbuatannya sebagai tanggungjawab pribadi. Keberhasilan dan kegagalan merupakan konsekwensi pribadi.

Dalam perkembangannya kewirausahaan pada hakekatnya tidak semata-mata masuk dalam dunia bisnis/ekonomi namun menyebarluas ke bidang publik (non bisnis) seperti politik dan pemerintahan sebagaimana yang disampaikan Alif (2001), hal ini karena secara konstektual dunia *entrepreneur* berisi wilayah tak bertuan yang belum terjamah, asing dan pola dinamikanya belum memiliki keteraturan.

Wacana berfikir Mc Clelland seperti yang di kutip Lupiyoadi (2004), seorang psikolog pemrakarsa lahirnya pelatihan pembentukan perilaku *entrepreneur* mengungkapkan bahwa pada hakekatnya seorang *entrepreneur*

akan memiliki profil kepribadian yang berbeda dengan seorang profesional, karena dalam diri seorang *entrepreneur* terkandung motivasi (tindakan) yang didominasi oleh keinginan (motif) berprestasi dan berkuasa yang sangat tinggi dibarengi dengan motif afiliasi yang cenderung sedang-sedang saja.

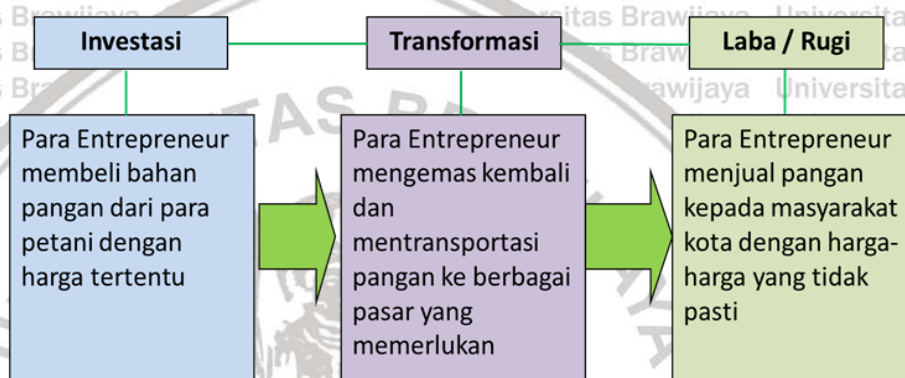
Wirausaha merupakan pemain paling penting dalam pembangunan ekonomi global. Karena begitu pentingnya wirausaha, perusahaan-perusahaan besar di dunia memecah perusahaannya menjadi unit-unit kecil jaringan wirausaha. Salah satu contohnya melalui sistem waralaba yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki jaringan wirausaha perusahaan besar. Bukan pilihan yang aneh jika kemudian kewirausahaan dijadikan alternatif kebijakan untuk mengatasi pengangguran dan mengentaskan pemuda dari jurang kemiskinan. Lebih lanjut disampaikan oleh Lupiyadi ada lima karakter untuk membangun *mindset* wirausaha yaitu :

1. Mereka sangat bersemangat dalam melihat/mencari peluang-peluang baru
2. Mereka mengejar peluang dengan disiplin yang ketat
3. Mereka hanya mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang lain yang melelahkan diri dan organisasi mereka
4. Mereka fokus pada pelaksanaan
5. Mereka mengikutsertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka.

Istilah kewirausahaan itu sendiri memiliki beragam definisi. Istilah *entrepreneur* dan *entrepreneurship* pertama kali diperkenalkan oleh Richard Cantillon, seorang ahli ekonomi Perancis keturunan Irlandia. Dalam karyanya yang berjudul *Essai Sur La Nature du Commerce en General*, Cantillon memberikan peranan utama kepada konsep *entrepreneurship* dalam ilmu ekonomi. Joseph Scumpeter (dalam Suryana, 2013) mengemukakan bahwa *entrepreneur* sebagai aktor dalam ekonomi kreatif, yang menemukan sumber

daya baru, proses produksi baru, teknologi, dan model baru, organisasi baru serta pasar baru. *Entrepreneur* menciptakan kebaruan (*novelty*) melalui inovasi.

Kreatifitas dan inovasi dari para *entrepreneur* ini telah membuat keadaan tidak statis, tetapi dinamis atau selalu berubah sehingga tidak stabil, faktor pengubah ini disebut destruktif kreatif (*creative destruction*) yang artinya munculnya inovasi baru di dalam industri yang akan menggusur industri-industri lama yang tidak kreatif dan menggantikannya dengan yang kreatif.



Gambar 2.1 : Perilaku *entrepreneur* menurut Cantillon

sumber Winardi (2005:2)

Secara sederhana, Cantillon menggambarkan cara kerja seorang *entrepreneur* sebagaimana terlihat pada gambar di atas. Di mana seorang *entrepreneur* adalah orang yang membayar harga tertentu untuk produk tertentu, untuk kemudian dijualnya dengan harga yang tidak pasti (*an Uncertain Price*), sambil membuat keputusan-keputusan tentang upaya mencapai dan memanfaatkan sumber-sumber daya, dan menerima risiko berusaha (*The Risk of Enterprise*, 1993).

Sementara itu, Alma (2002) mendefinisikan wirausaha sebagai orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan

baku baru. Berdasarkan pengertian yang disampaikan Schumpeter, wirausaha lebih dinilai dari segi mentalitas seseorang yang memiliki sifat kreatif, inovatif, dan pelopor perubahan.

Adapun definisi wirausaha yang lebih komprehensif dengan melihat kewirausahaan sebagai sebuah proses untuk menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai dengan modal dan risiko, yang nantinya akan memperoleh balas jasa berupa uang dan kepuasan pelanggan, serta kebebasan pribadi. Wirausaha tidak hanya seseorang yang kreatif dan inovatif, melainkan juga memiliki karakter berani mengambil risiko atas segala tenaga, waktu, dan modal yang ia keluarkan.

Dalam beberapa literatur, acapkali istilah wirausaha disamakan dengan istilah wiraswasta. Suparman Sumahamijaya (dalam Wijandi, 2003) merupakan salah satu penulis yang mempopulerkan istilah wiraswasta untuk menggantikan istilah wirausaha. Menurutnya wiraswasta merupakan sifat-sifat keberanian, keutamaan dan keteladanan dalam mengambil risiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Dalam hal ini, pengertian wiraswasta lebih ditekankan pada mentalitas yang mengedepankan keberanian, keutamaan, keteladanan, dan semangat yang bersumber pada kekuatan sendiri.

Menurut Hornaday (dalam Lupioadi, 2004c), wirausaha yang sukses memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Kepercayaan pada diri sendiri (*self confidence*); (2) Penuh energi, dan bekerja dengan cermat (*diligence*); (3) Kemampuan untuk menerima risiko yang diperhitungkan; (4) Memiliki kreativitas; (5) Memiliki fleksibilitas; (6) Memiliki reaksi positif terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi; (7) Memiliki jiwa dinamis dan kepemimpinan; (8) Memiliki kemampuan untuk bergaul dengan orang-orang; (9) Memiliki kepekaan untuk

menerima saran-saran; (10) Memiliki pengetahuan untuk memahami pasar; (11) Memiliki keuletan dan kebulatan tekad untuk mencapai sasaran-sasaran (*perseverance, determination*); (12) Memiliki banyak akal (*resourcefulness*); (13) Memiliki rangsangan/kebutuhan akan prestasi; (14) Memiliki inisiatif; (15) Memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri (*independent*); (16) Memiliki pandangan tentang masa yang akan datang (*foresight*); (17) Berorientasi pada laba; (18) Memiliki sikap perseptif (*perceptiveness*); (19) Memiliki jiwa optimisme; (20) Memiliki keluwesan (*versatility*); (21) Memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang produk dan teknologi.

Selain itu, pada banyak kasus menjadi wirausaha merupakan pilihan terakhir bagi para pengangguran setelah mereka tersingkir dari persaingan dunia kerja. Sebagaimana disoroti Shapiro & Sokol (dalam Winardi, 2005), bahwa individu-individu kerap kali menjadi *entrepreneur* karena mereka terlempar dalam situasi-situasi yang memaksa mereka mencari cara mencari nafkah mereka sendiri. Setelah para pengangguran merasa frustrasi tidak memperoleh pekerjaan, mereka mulai mencoba-coba untuk membuka usaha sendiri.



Gambar 2.2 : Alur pengangguran menjadi *entrepreneur*

dalam Winardi (2005:30)

Tentu sepinya minat pemuda menjadi kendala tersendiri dalam upaya pengembangan kewirausahaan pemuda. Dalam UU No.40/2009 tentang Kepemudaan Pasal 1, Angka 8, pengembangan kewirausahaan pemuda didefinisikan sebagai berikut:

Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.

Lebih lanjut, pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda diatur pada Pasal 27, ayat (1):

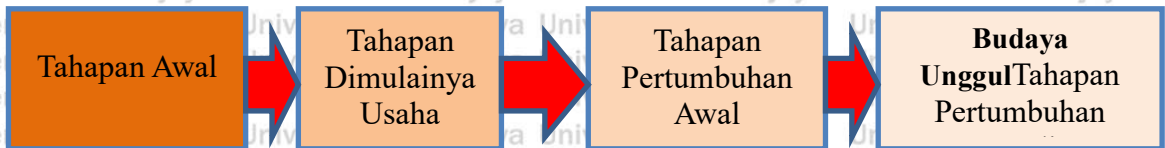
Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.

Adapun strategi pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui: (a) pelatihan; (b) pemagangan; (c) pembimbingan; (d) pendampingan; (e) kemitraan; (f) promosi; dan/atau (g) bantuan akses permodalan

Terkait dengan bantuan akses permodalan, pada tahun 2013 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda. Dalam PP tersebut disebutkan, bahwa wirausaha muda pemula yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh bantuan permodalan berupa: (a) hibah; (b) dana bergulir; (c) penjaminan dan/atau subsidi bunga; (d) modal ventura; dan/atau (e) bentuk permodalan lainnya.

Secara konseptual, upaya pengembangan kewirausahaan pemuda dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, yang diawali dengan tahap

awal untuk mempersiapkan mental wirausaha. Adapun tahapan yang dimaksud sebagai berikut:



Gambar 2.3 : Model Pertumbuhan Empat Tahap (*Pertumbuhan Entrepreneur*)

Sumber: Winardi (2005:60)

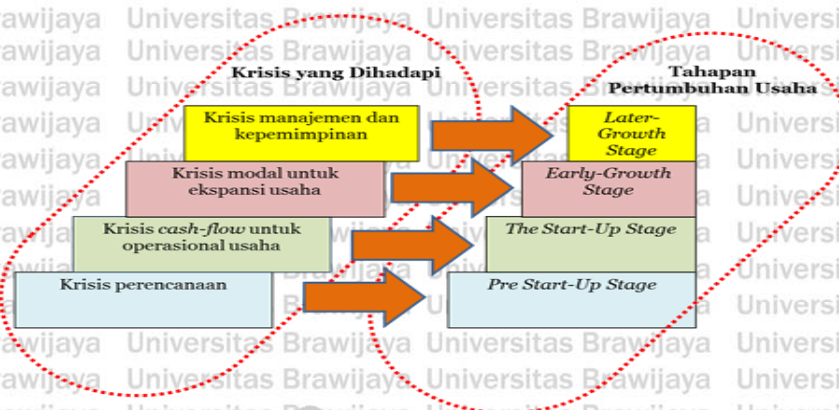
- Tahapan awal (*pre start-up stage*). Para entrepreneur mempersiapkan mental, merencanakan usaha dan melaksanakan pekerjaan awal mencapai sumber daya dan melaksanakan pengorganisasian.
- Tahapan dimulainya usaha (*the start-up stage*). Periode inisial perusahaan, di mana para entrepreneur harus memposisikan usaha tersebut pada sebuah pasar dan melaksanakan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan guna mempertahankan kelangsungan usaha.
- Tahapan pertumbuhan awal (*early-growth stage*). Periode di mana perkembangan dan pertumbuhan, sewaktu perusahaan yang bersangkutan mengalami perubahan besar di pasar-pasar, bidang keuangan dan pemanfaatan sumber daya.
- Tahapan pertumbuhan lanjutan (*later-growth stage*). Evolusi sebuah usaha yang berkembang menjadi sebuah perusahaan dengan persaingan aktif di dalam sebuah industri yang mapan, di mana manajemen profesional menjadi lebih penting dibandingkan dengan semangat entrepreneur.

Pada masing-masing tahapan pertumbuhan usaha tersebut terdapat krisis yang harus dihadapi oleh seorang wirausahawan. Pada tahapan awal (*pre start-up stage*), wirausahawan mengalami kesulitan dalam hal mengubah *mindset* dan mengatasi *mental block* tentang jiwa kewirausahaan, perencanaan bisnis, meliputi perencanaan teknis, penentuan target pasar, strategi pemasaran, dan manajemen keuangan.

Pada tahap usaha sudah mulai dijalankan (*the start-up stage*), wirausahawan akan menghadapi kesulitan *cash flow*. Di mana modal sudah terkuras untuk persiapan membuka usaha, belanja barang dagangan, peralatan, sewa lokasi, gaji pegawai, dll. Sementara omset penjualannya masih rendah, karena usahanya belum dikenal luas oleh konsumen.

Pada tahap pertumbuhan awal (*early-growth stage*), wirausahawan mengalami krisis permodalan. Di saat usaha sudah mulai tumbuh, wirausahawan ingin melakukan ekspansi usaha. Namun untuk bisa melakukan ekspansi, dibutuhkan dukungan modal yang mencukupi. Pada tahap inilah wirausahawan dihadapkan pada masalah permodalan.

Pada tahap pertumbuhan lanjutan (*later-growth stage*), wirausahawan akan menghadapi masalah manajemen dan kepemimpinan. Di saat usaha sudah semakin besar, maka dibutuhkan sistem manajemen yang lebih baik. Di mana usaha digerakkan oleh sebuah sistem, tidak tergantung pada individu. Selain itu, wirausahawan juga akan dihadapkan pada masalah regenerasi kepemimpinan.



Gambar 2.4 : Tahapan pertumbuhan usaha dan krisis yang dihadapi

Dalam Winardi (2005:68)

Dengan memperhatikan berbagai tahapan pertumbuhan usaha dan permasalahan yang dihadapi, Bygrave (1994, h.5) mensyaratkan karakteristik kewirausahaan yang berhasil dengan istilah 10 D, yaitu:

1. *Dream*, seorang wirausaha memiliki visi bagaimana keinginannya terhadap masa depan pribadi dan bisnisnya.
2. *Decisiveness*, seorang wirausaha adalah orang yang tidak bekerja lambat. Mereka membuat keputusan secara cepat dengan penuh pertimbangan.
3. *Doers*, seorang wirausaha tidak mau menunda-nunda kesempatan yang dapat dimanfaatkan.
4. *Determination*, seorang wirausaha melaksanakan kegiatannya dengan penuh perhatian, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan tidak mudah menyerah walaupun dihadapkan pada halangan atau rintangan yang tidak mungkin diatasi.
5. *Dedication*, seorang wirausaha memiliki dedikasi tinggi terhadap bisnisnya. Semua perhatian dan kegiatannya dipusatkan semata-mata untuk kegiatan bisnisnya.
6. *Devotion*, seorang wirausaha sangat mencintai pekerjaannya sebagai pebisnis, dan mencintai produk atau jasa yang dihasilkan.
7. *Details*, seorang wirausaha memperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci yang dapat menghambat bisnis.
8. *Destiny*, seorang wirausaha bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya. Dia merupakan orang yang bebas dan tidak mau tergantung kepada orang lain.
9. *Dollars*, seorang wirausaha tidak menjadikan uang sebagai motivasi, melainkan sebagai indikator kesuksesan bisnis. Mereka berasumsi jika mereka sukses berbisnis maka pantas mendapat laba/uang.
10. *Distribute*, seorang wirausaha bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya terhadap orang-orang kepercayaan.

Peran pemuda menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan pendayagunaan pembangunan potensi daerah secara optimal terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, menggalakkan peran serta pemuda dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara luas dan nyata, bertanggungjawab akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan daya saing.

Berdasarkan uraian konseptual tersebut di atas, semakin jelas bahwa kewirausahaan merupakan salah satu upaya efektif untuk mengentaskan pemuda dari pengangguran dan kemiskinan. Adapun untuk menjadikan pemuda sukses dalam berwirusaha diperlukan upaya secara bertahap, berkesinambungan, dan sinergi dengan bidang lainnya yang terkait dengan kewirausahaan pemuda.

Webster (2001), yang dimaksud dengan kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk mengenali produk baru, menemukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya serta mengatur permodalan operasinya. Dalam hal ini seorang wirausaha juga mampu mengorganisir dan berani mengambil resiko dari suatu kegiatan bisnis atau usaha yang di jalankannya. Kewirausahaan sangat penting dalam mendorong dinamika ekonomi moderen dan penciptaan lapangan kerja. Pembuat kebijakan perlu mengetahui bagaimana perusahaan baru memulai usahanya dan kelembagaan keuangan seperti apa yang diperlukan untuk mendorong kewirausahaan. Menurut Klapper (dalam laporan Bapenas 2013), data *time series* antar negara menunjukan bahwa terdapat korelasi antara kewirausahaan dengan kualitas peraturan akses terhadap modal dan adanya informalitas

Dalam menindaklanjuti UU No.40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, serta untuk mendorong generasi muda menjadi wirausaha dan menjadi generasi yang menciptakan pekerjaan, pemerintah merancang sistim pembiayaan bagi wirausaha Muda Pemula melalui pembentukan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda atau LPKP yang di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2013. Tugas LPKP di antaranya: (1). Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula, (2). Melakukan pendataan sumber dana permodalan, (3) memfasilitasi penyaluran permodalan bagi wirausaha Muda Pemula, (4). Mengusulkan wirausaha muda pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan dan (5) menyediakan panduan bimbingan teknis dibidang manajemen keuangan.

Dalam Nugroho (2008:512) model kebijakan ini akan dapat terimplementasi dengan mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada para pemuda: tujuan, strategi, aktifitas dan jaringan yang di miliki. Sehingga model implementasi kebijakan perundangan Kepemudaan yang dapat mendorong pemuda untuk berperan aktif dalam implementasi kebijakan dengan tetap melibatkan pejabat pemerintah pada tataran eselon yang sesuai. Harapannya kebijakan pemerintah yang telah di buat sesuai dengan harapan, keinginan publik yang menjadi target dan sesuai dengan pejabat pelaksana. Lebih lanjut di sampaikan bahwa model kebijakan demikian adalah kebijakan dari bawah ke atas kebijakan yang dibuat pemerintah pelaksanaannya oleh masyarakat dengan implementasi lebih efektif.

Implementasi kebijakan bermuara pada *output* yang terdapat dalam kebijakan itu sendiri, manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh pemanfaat

dan dalam jangka panjang kebijakan menghasilkan *outcome* dalam bentuk impek kebijakan yang diharapkan semakin meningkatnya tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut (Nugroho, 2008: 145). Meningkatkan pelaksanaan kewirausahaan pemuda sebagai salah satu implementasi kebijakan dalam Undang-undang Kepemudaan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional yang signifikan dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan.

Menurut Campbell dan Rogers (2007), kebijakan pembangunan ekonomi telah bergeser kearah peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal melalui kewirausahaan dan bukan berpijak pada investasi yang datang dari luar daerah. Lebih lanjut Jones (1984) menyebutkan bahwa ada tiga aktivitas utama yang penting dalam implementasi kebijakan dalam hal Undang- undang kepemudaan dalam pengembangan kewirausahaan pemuda yaitu :

1. Organisasi : pembentukan atau penatan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan.
2. Interpretasi : menafsirkan agar program (umumnya dalam status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Penerapan: ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau hal lainnya yang di sesuaikan dengan tujuan dan perlengkapan program.

Menurut sosiolog David Mc Clelland (dalam Echard, 2013:1) suatu negara dikatakan sebagai negara maju apabila 2 (dua) persen penduduknya adalah wirausaha, sejalan dengan hal tersebut pemerintah sangat berharap pada tahun 2030 nanti penduduk Indonesia 4,8 juta dari populasi penduduk adalah wirausaha. Untuk dapat melihat tingkat keberhasilan dari program kewirausahaan, Smith (dalam Tachjan 2008:38) menyatakan ada empat variabel keberhasilan dalam implementasi kebijakan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Empat variabel tersebut adalah :

1. Kebijakan yang diidealkan (*idealised policy*), yaitu pola-pola interaksi ideal yang telah didefinisikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan.
2. Kelompok sasaran (*target Groups*) yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan.
3. *Implementing organization*, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan.
4. *Environmental factor*, yaitu unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Sebagai bangsa sebuah negara berkembang, kita harus mengejar ketinggalan dari bangsa lain di dunia, utamanya dalam bidang ekonomi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa penduduk daerah tropis dengan sumber alamnya yang kaya telah memanjakan penduduknya sehingga bermental malas dan lembek. Tidak perlu kerja keras, alam sudah menyediakan apa yang dibutuhkan. Ini sangat berbeda dari penduduk subtropis, terlebih lagi jika sumber alamnya miskin, maka penduduknya dipaksa kerja keras dan berencana agar *survive*. Misalnya saja bagaimana bersiap menghadapi musim dingin/salju yang mematikan kalau mereka tidak menyiapkan pakaian hangat dan pemanas suhu rumah. Yang demikian ini tidak terjadi pada bangsa Indonesia yang hidup di daerah tropis yang melimpah cahaya matahari, hasil kebun, laut, hutan dan hewan ternak. Oleh karenanya etnos kerja bangsa ini dianggap rendah dibanding Jepang, Korea dan bangsa-bangsa Eropah. Yang kemudian unggul atau menonjol adalah karya seni dan tradisi ritual keagamaan. Untuk sekedar bertahan hidup kita tidak perlu bekerja keras menaklukkan udara dingin atau udara panas seperti mereka yang tinggal di wilayah sahara. Ditambah tradisi komunalisme yang kental, seseorang bisa minta tolong saudaranya jika mendapatkan kesulitan.

Dengan demikian, kini saatnya kita mesti membangun etos kerja baru yang dapat mengaktualkan dan mengefektifkan potensi kerja masyarakat, antara lain dengan bekerja keras dan cerdas (*hard and smart working*) dan fokus dalam upaya mencapai cita-cita bangsa dan negara yang sudah diamanatkan dan digariskan oleh para pejuang kemerdekaan. Kerja keras, bertanggung-jawab, amanah, dan memiliki visi kebangsaan, harus menjadi ciri-ciri masyarakat pekerja kita ke depan. Kegiatan wirausaha ini akan dapat mengatasi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus juga akan mengembalikan rasa nasionalisme sebagai rasa cinta dalam wujud pembelaan pada negara. Ini urgen dilakukan dalam situasi persaingan dan gempuran pasar bebas yang membuat kita sempoyongan. Melalui kegiatan kewirausahaan pemuda mesti dilatih agar produktif dan mandiri dengan tetap memahami dan mencintai tradisinya yang kaya dengan kearifan lokal. Membangun pemuda dalam kegiatan kewirausahaan dapat dilakukan dengan mengemas keragaman budaya Indonesia sehingga memiliki nilai jual, sehingga kekayaan budaya menjadi sumber devisa negara, mengurangi ketergantungan yang masih tinggi pada sumber alam. Dalam konteks inilah yang saya maksudkan dengan *smart working*. Pemuda didorong berkreasi membangun daerahnya tanpa harus meninggalkan nilai-nilai budaya kearifan lokal yang ada. Di sini pemuda juga diharapkan mampu memiliki strategi dalam mengembangkan kewirausahaan seperti yang disampaikan Quinn (dalam Miftahuddin, 2007:190) yaitu strategi yang menyediakan landasan berkelanjutan dengan kemampuan beradaptasi terhadap inovasi baru tanpa kehilangan karakternya dan tetap setia pada tujuan yang dipahami didukung secara lebih luas oleh masyarakatnya. Suasana batin demikian ini dimiliki masyarakat Jepang pasca Perang Dunia ke 2 untuk

mengejar ketertinggalannya dari Barat, dan sekarang virus *need of achievement* ini melanda masyarakat dan pemuda Korea Selatan. Pemudaanya bangkit untuk belajar dan keras untuk memajukan bangsanya dengan mengkapitalisasi seluruh potensi yang ada, termasuk budayanya. Di sini *human capital* dan *cultural capital* secara efektif diberdayakan.

2.3. Konsep Pembangunan Pemuda

Menurut Joesoef (2014:158-162) Kegagalan dari pembangunan adalah karena ketiadaan konsep yang memadai bagi keberhasilannya. Adapun konsep-konsep pembangunan yang gagal tersebut dikarenakan :

1. Konsep pembangunan yang bersifat partial dan menyendiri.
2. Konsep pembangunan yang mengabaikan aspek human dari rakyat (manusia) Indonesia. Manusia dalam kehidupannya tidak hanya butuh "*to have more*" tetapi lupa "*to be more*", berarti bahwa mereka *self esteem* dan ingin dihargai martabatnya dengan dilibatkan, berpartisipasi dalam pemikiran dan pelaksanaan pembangunan.
3. Konsep pembangunan yang tidak dikaitkan sama sekali dengan konsep "*Nation State Building*" tetapi dengan kenaikan GNP, yang seolah olah dengan kenaikan pendapatan nasional negara-bangsa sebagai satu entitas dengan sendirinya menjadi semakin kukuh.
4. Konsep pembangunan yang mengabaikan etika masa depan yaitu etika yang harus dihayati sekarang untuk dan demi masa depan.
5. Konsep pembangunan yang tidak memanfaatkan penalaran aneka disiplin ilmiah, jadi kerja pembangunan bersifat multidisipliner.

Secara konseptual, Hamilton (2004) menyampaikan bahwa pembangunan pada pemuda yang dilakukan secara optimal akan memungkinkan pemuda untuk memimpin, produktif, hidup sehat, mampu mencari nafkah, terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan budaya. Selanjutnya menurut Adhyaksa, (2008:7) peran kesejahteraan dan keterlibatan yang amat panjang telah menetapkan pemuda sebagai kelompok strategis yang memiliki daya dorong transformasi sosial yang signifikan.

Dalam lanskap sejarah Indonesia, pemuda selalu menjadi topik pembicaraan dalam konteks perjuangan kemerdekaan dan berbagai perubahan sosial yang terjadi di negeri ini. Para pejuang kemerdekaan pun banyak terdiri dari kalangan pemuda. Sedemikian besarnya peran pemuda dalam perjalanan bangsa sehingga di Indonesia terdapat hari besar nasional bernama Sumpah Pemuda serta ada Kementerian Pemuda. Dalam konsep pembangunan dewasa ini muncul sebuah gagasan dan keinginan untuk mendorong agar generasi muda tampil untuk memimpin tampuk kekuasaan, menerima estafet kepemimpinan nasional demi kemajuan bangsa, lebih relevan lagi ketika gagasan ini dikaitkan dengan bonus demografi. Litbang surat kabar *Kompas* pernah melakukan penelitian dengan responden 830 di 10 kota besar di Indonesia. Mayoritas responden berpendapat bahwa 7 dari 10 menyatakan bahwa usia ideal seorang Presiden RI dibawah 50 tahun (Syamsudin, 2008). Sejalan dengan hal tersebut di atas Hamengku Buwono X (2009), menyampaikan bahwa perlu pemikiran dan pendekatan baru dalam melakukan perubahan atau transformasi politik yang pasti akan melibatkan generasi muda.

Kategori Pemuda seringkali dikaitkan dengan usia. Usia adalah salah satu penanda klasifikasi dan stratifikasi sosial. Sedangkan pemuda adalah klasifikasi budaya dan usia yang sifatnya elastis, bukan mendasarkan kategori umur. Menurut Parsons (dalam Barker, 2000:334), pemuda bukan satu kategori universal biologis, melainkan satu konstruksi sosial yang tengah berubah dan muncul pada kurun waktu tertentu pada kondisi difinitif. Sedangkan LIPI (2010), menyatakan bahwa konsep pemuda tidak memiliki makna universal, sehingga dengan demikian kategori pemuda merupakan konsep ambigu yang diartikulasikan dengan wacana lain seperti kekuasaan, tanggungjawab, harapan,

masa depan, dan gaya hidup. Lebih lanjut Ari Sujiti (2008) menyatakan, ada tiga hal yang perlu menjadi tolok ukur kalau kita mengidealisasikan pemuda yaitu (1).

Keteladanan moral, maksudnya disini adalah pemuda yang bersih, tidak melakukan tindak pidana, tidak korupsi, tidak pernah melakukan tindakan moral yang tercela, (2). Memiliki visi secara intelektual yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki akar sosial pada lingkungan tempat seseorang berada, mampu memberikan jalan keluar dari persoalan-persoalan pada masyarakat, pemuda yang menginspirasi perubahan dan melakukan transformasi bagi masyarakat, (3), Pemuda yang mau berkeringat dan berdarah-darah bersama masyarakat.

Pemuda Indonesia semestinya juga memahami persoalan bangsa dalam aspek-aspek khusus dari sifat sosial dan ekonominya terutama problem pengangguran dan kemiskinan yang menjadi beban negara. Adapun problem ekonomis yang tengah terjadi pada persoalan bangsa seperti Indonesia antara lain (1). masuknya produk asing dan mayoritas pemuda telah menjadi konsumen produk-produk asing tersebut, (2). menghadapi tekanan dan ledakan jumlah penduduk yang tidak terkontrol, (3). sumber-sumber alam yang semakin berkurang dan sebagian lagi belum banyak terolah, (4) penduduk desa yang masih terbelakang dari segi ekonomi karena kekurangan kapital, *skill* dan lingkungan budaya yang kurang mendukung. Sementara itu dalam waktu yang sama produk asing membanjiri Indonesia dengan harga dan kualitas lebih murah, lebih baik dari produk dalam negeri. Dengan melihat kondisi yang berlangsung, diperlukan satu perencanaan pembangunan yang matang, visioner dan memiliki keberpihakan jelas kepada kepentingan nasional serta melibatkan masyarakat bawah.

Dalam konteks membangun kewirausahaan pemuda Indonesia, nilai-nilai budaya kearifan lokal dapat diberdayakan atau direvitalisasi sehingga menjadi identitas diri dan sumber inspirasi serta motivasi untuk memajukan wilayahnya.

Diperlukan pandangan yang saling berkesinambungan antara kebijakan di tingkat pusat dan di tingkat daerah untuk dapat diimplementasikan oleh pemuda, diharapkan sebagai aktor, pemuda mampu mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Dalam disertasi ini paradigma pembangunan dipandang sangat penting untuk memberikan wawasan teoritis yang lebih luas dalam penelitian disertasi.

Pemuda adalah aktor kunci dalam proses perubahan ekonomi dan sosial. Mereka memiliki mobilitas tinggi, cenderung meninggalkan tempat kelahirannya untuk memperbaiki nasib di kota. Oleh karenanya, terjadi marak urbanisasi dan pergeseran sektoral dalam pekerjaan yaitu dari pertanian pada pekerjaan lainnya (*de-agrarianisasi*) sekalipun seringkali pekerjaan baru yang dibayangkan tidak sesuai dengan harapan. Suatu proses perubahan matang dan berencana adalah konsep yang melekat dalam pembangunan yang ditandai dengan suatu bentuk perencanaan yang dilakukan oleh pemuda. Sumardjan-Soemardi (1974:490) menekankan bahwa perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang dirancanakan oleh pihak-pihak yang mengadakan perubahan didalam masyarakat. Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok yaitu : (1). masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, (2) masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif dalam hal ini pemuda yaitu menjadi pemuda pembangunan. Bagaimanapun juga pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan pemuda. Program pembangunan pemuda diharapkan akan melahirkan pemuda yang kreatif. Kreativitas akan muncul jika terdapat kondisi yang bebas dari rasa takut untuk berkreasi dan berinovasi,

terdapat dukungan pemeruntah dan masyarakatnya, dan tidak dibayangi rasa takut untuk gagal dan bangkrut. Oleh karenanya penting adanya pelatihan dan ketelitian membaca ancaman dan peluang. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Budiman (1995:14) bahwa pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material, namun pembangunan harus menciptakan kondisi-kondisi manusia yang mengembangkan kreatifitasnya.

Makna pembangunan menurut Tjokrowinoto (1987) dalam prespektif diakronis adalah pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju pada tataran kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan tahapan : (1). Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga, (2). Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*), (3). Pembangunan memperoleh sifat dan konsep transendental, sebagai *meta-diciplinary phenomenon*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, *the ideology of developmentalism*, (4). Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (*value loaded*) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa untuk semakin meningkat. (5). Pembangunan menjadi *culture specific, situation specific* dan *time specific*.

Sedangkan menurut Suryono (2001), pembangunan berarti upaya yang terus-menerus dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia pada peranannya dan posisinya baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan, untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya. Pembangunan juga diartikan sebagai suatu hal yang relatif, sehingga tidak satupun negara/bangsa yang dapat mengklaim sebagai suatu bagian dunia yang telah (selesai) membangun dalam arti segalanya. Pembangunan pada hakekatnya

adalah proses transformasi pemuda dari suatu keadaan kepada keadaan lainnya yang mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan, dan dalam proses transformasi ini terjadi keberlanjutan dan perubahan, dan dari keduanya ini menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat (Djoyonegoro, 1996:7).

Sedangkan menurut Siagian (1991) pembangunan adalah rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang terencana dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Dalam teori modernisasi dijelaskan bahwa kemiskinan disebabkan terutama oleh faktor-faktor internal. Teori ini lebih didasari pada dikotomi antara apa yang disebut moderen (masyarakat negara maju) dan tradisional (masyarakat negara-negara berkembang) dengan menularkan nilai-nilai moderen disamping memberikan bantuan modal dan teknologi serta menawarkan bantuan untuk pembangunan bagi siapa saja dan dimana saja, peran negara-negara maju sangat dominan dan dianggap positif sehingga kegagalan adalah disebabkan oleh internal masyarakat itu sendiri. Dengan model pembangunan seperti ini lebih menekankan pada peningkatan pendapatan penduduk, dan pemerintah merancang dan melaksanakan pembangunan tanpa melibatkan masyarakat (pemuda) atau dikenal dengan pendekatan atas ke bawah (*top down*) dan model *top down* inilah yang mewarnai pembangunan Indonesia selama Orde Baru, dimana pemuda hanya menjadi obyek dari pembangunan itu sendiri. Pendekatan yang mementingkan inisiatif nasional (moderen) tersebut mengabaikan inisiatif lokal/ tradisional (Antjok, 1995).

Strategi pembangunan menurut Swasono (2010) harus bertitik tolak pada modal dasar sendiri yaitu:

- 1) Kemerdekaan dan kedaulatan, semangat kebangsaan, semangat membangun, kedudukan geografis yang strategis, sejarah, ketangguhan sosial budaya serta ketagwaan agama,
- 2) Strategi pembangunan yang mengutamakan kepentingan nasional tanpa mengabaikan tanggungjawab global,
- 3) Pembangunan perlu bertitik tolak pada cita-cita nasional.
- 4) Strategi pembangunan harus berdasar pengutamaan penggunaan SDA dan SDM dalam negeri (*resources-based*),
- 5) Strategi pembanguan meningkatkan kemampuan rakyat dalam pembangunan yang merupakan pemberdayaan (*empowerment* dan *expension of people's capabilities* untuk melaksanakan modernisasi, (6) ekonomi terbuka artinya negara proaktif ikut mendesain wujud globalisasi dalam percaturan ekonomi global (memanfaatkan interdependensi global tanpa terjebak dalam dependensi *tekuklutut*)

Pembangunan hendaknya tidak semata-mata bertumpu pada pertumbuhan dan kenaikan perkapita, akan tetapi lebih menekankan pada aspek manusianya dan dapat dikatagorikan *people centered development*. Oleh karena itu pembangunan pemuda yang dilaksanakan akan mampu mendorong diri pemuda dan berkembang berdasarkan sumberdaya yang dimiliki oleh pemuda. Sehingga pemuda tidak sekedar mengharapkan bantuan, memohon pertolongan terus menerus, namun pemuda sadar akan kekurangannya, berusaha sendiri dan tidak mau bergantung pada pihak lain sehingga akan tumbuh swadaya dan berkembang swasembada.

Selanjutnya menurut Korten (dalam Tjokroamidjojo, 1995) pendekatan dalam pembangunan berorientasi pada masyarakat (*people oriented*) harus diubah dalam pembangunan yang berpusat pada masyarakat (*people centred development*) artinya usaha perubahan yang berlangsung dalam masyarakat perlu diubah dengan pendekatan masyarakat (pemuda) sebagai figur sentral pembangunan dalam berbagai dimensi. Lebih lanjut Tjokroamidjojo (1996:50) menyatakan proses pembangunan ada lima dimensi yaitu :

1. Dimensi kesejahteraan sosial masyarakat dimana suatu negara dikatakan pertumbuhannya meningkat jika ekonomi mereka meningkat maka kesejahteraan sosial pun akan meningkat.
2. Dimensi transformasi sosial dari masyarakat kearah masyarakat maju (moderen), dalam hal ini tolok ukurnya adalah perkembangan ilmu dan teknologi, dan perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.
3. Dimensi pembangunan bangsa, dalam hal ini dilihat perkembangan dari masyarakat primordial kearah masyarakat nasional dengan proses integritas nasional dikembangkan kepribadian, ideologi, dan wawasan kebangsaan, termasuk integritas stabilitas dan partisipasi politik. dalam konsep ini berlaku secara global, namun tetap memiliki ikatan kekeluargaan, kedaerahan dengan sebutan Bhinneka Tunggal Eka yang merupakan suatu konsep pembangunan yang perlu diterus dipertahankan.
4. Dimensi keseimbangan, dalam konsep ini pembangunan yang berwawasan lingkungan. Artinya adanya keseimbangan, keserasian antara kehidupan manusia dan lingkungannya.
5. Dimensi manusia sebagai pusat perhatian dalam proses pembangunan. Dalam prespektif positif proses pembangunan pada manusia yang lebih mampu membangun kualitas hidup yang lebih baik. Aspek pengembangan sumberdaya manusia tidak hanya diarahkan pada peningkatan kemampuan dan keterampilan, akan tetapi juga diarahkan pada perilaku dan sikap yang kondusif untuk perubahan dan kemajuan.

Dari kelima dimensi dalam pembangunan tersebut diatas, maka dimensi yang terakhir lebih condong penekanannya pada upaya membangun sumberdaya manusia (pemuda) sebagai sentra dan fokus dari pelaku pembangunan. Paradigma pembangunan pemuda menekankan pemuda sebagai aktor pembangunan (*actor oriented*) pada *community based* atau *people centered development*. Menurut Chambers (1995) paradigma pembangunan masyarakat dalam hal ini pemuda merupakan peralihan dari paradigma kebendaan (*paradigm of things*) kepada paradigma yang lebih menghargai manusia (*paradigm of people*). Perubahan dari *something* ke *somebody*.

Pemuda sebagai bagian dari masyarakat dapat memiliki peran yang sangat optimal dalam meningkatkan kesejahteraan melalui aset yang ada yaitu sumberdaya manusia, sosial, fisik dan lingkungannya. Pemuda melalui kemampuan dan kreativitasnya dapat membangun visi bersama. Pengembangan

kapasitas peran serta pemuda ini diperlukan suatu agen perubahan, sebagai konsep power (kekuatan) dalam masyarakat adalah sebagai kekuatan anggota masyarakat, dengan tujuan kolektif, yang dapat dicapai bila ditunjang oleh struktur sosial yang tidak berpengaruh terhadap kekuasaan (*powerful*). Dengan kata lain pemuda dalam masyarakat diberdayakan melalui ilmu pengetahuan dan kemandirian sehingga dapat berperan sebagai agen pembangunan.

2.3.1. Pembangunan Pedesaan

Menurut Yulianti & Poernomo (dalam Yuwono, 2001:23) desa merupakan satu kasatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa dan mengadakan pemerintahan tersendiri. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyeleggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya menurut Siagian (2005:108) pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa. Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa pembangunan desa adalah suatu usaha dalam kesatuan wilayah atau daerah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur atau mengadakan pemerintahan sendiri menurut prakarsa masyarakat tersebut untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Kansil (dalam Todaro dan Smith, 2006:251) yaitu:

- a. Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat.
- b. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan essensial kegiatan masyarakat.
- c. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan.
- d. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.
- e. Menggerakkan partisipasi, prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu.

Sedangkan menurut Pedoman peningkatan kapasitas pemerintahan desa (2004:157) Perencanaan Pembangunan Desa Bersama Masyarakat (PPDBM)

adalah model perencanaan pembangunan skala lingkungan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perencanaan adalah serangkaian kegiatan mulai dari indentifikasi kebutuhan masyarakat sampai dengan penetapan program pembangunan.
- b. Pembangunan skala lingkungan adalah semua program peningkatan kemakmuran, kesejahteraan, ketentraman, dan kedamaian masyarakat dilingkungan pemukiman tingkat Rt, Rw, dusun atau desa.
- c. Dari masyarakat adalah bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi, usulan, dan sumber daya masyarakat setempat.
- d. Oleh masyarakat adalah mengikut sertakan warga dan kelembagaan masyarakat setempat.
- e. Untuk masyarakat adalah menghasilkan program pembangunan yang berdampak peningkatan kemakmuran, kesejahteraan, ketentraman, dan kedamaian masyarakat.

Sedangkan menurut Sojogyo dan Sagojo (1996:136) pembangunan desa harus dilakukan secara menyeluruh terpadu dan terkoordinasi. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat pokok-pokok rumusan dalam pembangunan desa yaitu :

1. Prinsip-prinsip pembangunan desa meliputi :

- a. Hubungan yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat.
- b. Dinamis dan berkelanjutan
- c. Menyeluruh, terpadu dan terkoordinasikan

2. Pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan Desa antara lain :

- a. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan potensi alam
- b. Pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat
- c. Peningkatan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat
- d. Peningkatan kehidupan ekonomi yang kooperatif.

3. Sasaran Pembangunan Desa

Menjadikan semua desa-desa diseluruh wilayah Indonesia memiliki tingkat klasifikasi desa swasembada yaitu desa yang berkembang dimana taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya menunjukkan kenyataan yang makin meningkat.

4. Obyek dan Subyek Pembangunan

Yang menjadi objek pembangunan adalah desa secara keseluruhan yang meliputi segala potensi manusia, alam dan teknologinya, serta yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan yang ada di desa.

Usaha pembangunan desa juga diarahkan kepada menjadikan desa itu bukan saja sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek pembangunan yang mantap.

Dalam realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana- sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang.

Adapun yang menjadi skala prioritas pembangunan pedesaan yang berbasis pada pengembangan pedesaan (*rural based development*), meliputi :

- pengembangan ekonomi lokal;
- pemberdayaan masyarakat;
- pembangunan prasarana dan sarana; dan
- pengembangan kelembagaan.

Selanjutnya, model intervensi terhadap proses pembangunan pedesaan bertumpu pada pandangan yang menganggap bahwa pengkotaan pedesaan (*rural urbanization*) yang berdasarkan pengembangan perkotaan dan pedesaan sebagai kesatuan ekonomi dan kawasan serta pengembangan kegiatan pertanian secara modern melalui mekanisasi dan industrialisasi pertanian dan penerapan standar pelayanan minimum yang sama antara desa dan kota. Dalam intervensi pembangunan pedesaan digunakan analisis terhadap anatomi desa sehingga tidak kontraproduktif dalam merealisasikan pembangunan pedesaan. Anatomi tersebut mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial-budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman sehingga dalam pembangunan pedesaan berlandaskan pada kearifan lokal.

2.3.2. Pemberdayaan Pemuda Pedesaan

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003).

Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan pemuda sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan

keputusan yang mempengaruhi komunitasnya (Foy, 1994). Pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan (Sadan, 1997). Lebih lanjut menurut Mubarak (2010) pemberdayaan pemuda dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

Pada Pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam hal ini pemuda dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat (kelompok) yang meliputi: kepercayaan (*trusts*), patuh aturan (*role*), dan Jaringan (*networking*). Dengan modal sosial yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur (*direct*) pemuda serta mudah mentransfer *knowledge*. Dengan memiliki modal sosial yang kuat maka kita akan dapat menguatkan *Knowledge*, modal (*money*), dan *people*. Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial kelompok untuk menjadikan kelompok produktif dalam mencapai kesejahteraan sosial. Modal sosial yang kuat akan menjamin *sustainable* di dalam membangun rasa kepercayaan masyarakat khususnya pemuda sebagai anggota kelompok (*how to build the trust*).

Jimmu, (2008) menyatakan bahwa pengembangan masyarakat tidak hanya sebatas teori tentang bagaimana mengembangkan daerah pedesaan tetapi memiliki arti yang kemungkinan perkembangan di tingkat masyarakat. Pembangunan masyarakat seharusnya mencerminkan tindakan masyarakat dan kesadaran atas identitas diri. Oleh karena itu, komitmen untuk pengembangan masyarakat harus mengenali keterkaitan antara individu dan masyarakat dimana mereka berada. Masyarakat adalah sebuah fenomena struktural dan bahwa sifat struktural dari kelompok atau masyarakat memiliki efek pada cara orang bertindak, merasa dan berpikir. Tapi ketika kita melihat struktur tersebut, mereka jelas tidak seperti kualitas fisik dari dunia luar. Mereka bergantung pada keteraturan reproduksi sosial, masyarakat yang hanya memiliki efek pada orang-orang sejauh struktur diproduksi dan direproduksi dalam apa yang orang lakukan. Oleh karena itu pengembangan masyarakat memiliki epistemologis logis dan yang dasar dalam kewajiban sosial yang individu memiliki terhadap masyarakat yang mengembangkan bakat mereka.

Adedokun, et al. (2010) menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif akan menimbulkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat dalam pengembangan masyarakat. Ia juga mengungkapkan bahwa ketika kelompok masyarakat yang terlibat dalam strategi komunikasi, membantu mereka mengambil kepemilikan inisiatif pembangunan masyarakat dari pada melihat diri mereka sebagai penerima manfaat pembangunan. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan bahwa para pemimpin masyarakat serta agen pengembangan masyarakat harus terlibat dalam komunikasi yang jelas sehingga dapat meminta partisipasi anggota masyarakat dalam isu-isu pembangunannya.

Jimu (2008) menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat khususnya masalah ekonomi, teknis atau infrastruktur, adalah masalah pencocokan dukungan eksternal yang ditawarkan oleh agen pembangunan pedesaan dengan karakteristik internal sistem pedesaan itu sendiri. Oleh karena itu, agen pembangunan pedesaan harus belajar untuk 'menempatkan terakhir terlebih dahulu' (Chambers, 1983 dalam Jimu, 2008). Secara teori, peran pemerintah pusat dan agen luar lainnya harus menginspirasi inisiatif lokal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Passmore 1972 dalam Jimu, 2008). Dalam prakteknya, *top-down* perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan harus memberi jalan kepada *bottom-up* atau partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai apa yang disebut 'pembangunan melalui negosiasi'.

Talcot Parsons (dalam Prijono, 1996:64-65) *power* merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat, sedangkan *power* dalam *empowerment* adalah daya sehingga *empowerment* dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah (*Bottom-Up*). Lebih lanjut disampaikan Shucksmith, (2013) pendekatan *bottom-up* untuk pembangunan pedesaan (didorong dari dalam, atau kadang-kadang disebut endogen) berdasarkan pada asumsi bahwa sumber daya spesifik daerah yaitu potensi alam, manusia dan budaya memegang kunci untuk perkembangannya. Sedangkan pembangunan pedesaan *top-down* melihat tantangan utamanya dalam mengatasi perbedaan pedesaan yang meliputi kekhasan pedesaan tersebut melalui promosi keterampilan teknis universal dan modernisasi infrastruktur fisik,

Model *bottom-up* terutama dalam mobilisasi sumber daya lokal dan aset hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat pedesaan harus harus dianggap

sebagai subyek pembangunan dan bukan obyek pembangunan dengan menekankan pada emansipasi , sehingga pengembangan masyarakat harus menjadi mekanisme yang menarik bagi kekuatan kolektif anggota masyarakat tertentu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, mampu dan cacat, dll – untuk mengubah di wilayah mereka.

Konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain : pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Sumodiningrat, 2002).

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Person et al, 1994 dalam Sukmaniar, 2007). Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan

tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya (Mubarak, 2010).

Menurut Wilson (1996) terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat. *Tahap pertama* yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pada *tahap kedua*, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Pada *tahap ketiga*, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. *Tahap keempat* yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pada *tahap kelima* ini hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada *tahap keenam* telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Pada *tahap ketujuh* masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini

menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang

Pendapat dari Chambers (1995), bahwa konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yakni yang bersifat *people-centered*, *participatory*, *empowering*, and *sustainable*. Selanjutnya Eko (2002) mendefinisikan pemberdayaan secara lebih luas, tidak semata pada masalah ekonomi. Eko membagi konsep pemberdayaan dalam dua sudut pandang yaitu :

(1). Pemberdayaan yang menempatkan posisi masyarakat sebagai obyek (penerima manfaat – *beneficiaries*), yang hanya tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, (2). Pemberdayaan yang menempatkan posisi masyarakat sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Lebih lanjut disampaikan Eko, masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Pada batasan tertentu, Eko menggaris bawahi inti dari pengertian pemberdayaan (masyarakat) adalah merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Sementara itu dalam konteks pemberdayaan pada pemuda, konsep pemberdayaan juga telah tertuang dalam Undang-Undang Kepemudaan. Pada Pasal 1 Angka 6 mendefinisikan pemberdayaan pemuda sebagai berikut: Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda, dalam Undang-undang Kepemudaan juga memuat strategi/cara pelaksanaan pemberdayaan pemuda melalui: (a) peningkatan iman dan takwa;

(b) peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi; (c) penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional; (d) peneguhan kemandirian ekonomi pemuda; (e) peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau (f) penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan pada pemuda, dasar pemikiran yang perlu ditekankan bahwa setiap pemuda memiliki potensi yang dapat diberdayakan dan dikembangkan. Potensi pemuda ini dapat ditilik dari berbagai aspek. Pada aspek demografi, pemuda adalah komponen terbesar dalam struktur penduduk Indonesia. Pada aspek fisiologis, pemuda adalah usia di mana seseorang mengalami puncak kesehatan dan kebugaran, yang tentu dapat menjadi modal untuk mendongkrak produktivitas kerja. Pada aspek psikologis, pemuda memiliki mentalitas sebagai seorang pemberani yang mendobrak kemajuan zaman, pembaharu, inovator, dan pelopor. Pada aspek sosiologis, pemuda memiliki interaksi sosial yang luas dalam pergaulannya dengan lingkungan. Pada aspek politis, pemuda relatif bisa diterima oleh semua pihak, karena belum menanggung beban dan kesalahan politik masa lalu. Dengan berbagai potensi yang ada, sudah selayaknya pemuda Indonesia diberdayakan agar segala potensi positif yang dimilikinya dapat tumbuh dan berkembang.

Pemberdayaan pada Pemuda adalah sikap, proses struktural dan kultural dimana orang-orang muda mendapatkan kemampuan, kewenangan dan lembaga untuk membuat keputusan dan menerapkan perubahan dalam kehidupan mereka sendiri dan kehidupan orang lain termasuk orang dewasa.

Pemuda diberdayakan karena mereka mengakui pemuda memiliki pilihan hidup, menyadari implikasi dari pilihannya mampu membuat keputusan dan menerima

tanggungjawab atas seluruh pilihannya itu. Dalam arti luas pemberdayaan mengacu pada individu, keluarga, organisasi, dan masyarakat melakukan kontrol dan pengawasan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup.

Kim (dalam Laporan akhir Bapenas, 2013), dalam *Youth Development & Empowerment (YD&E)*, menyatakan bahwa pemuda adalah aset dan sumber daya yang harus dipanggil untuk partisipasi dalam masyarakat dan persoalan sosial, namun proses dari *Youth Development & Empowerment (YD&E)* memerlukan dukungan sosial yang kuat dari orang dewasa yang peduli dan mendukung untuk meraih harapan tinggi pada pemuda. Pengangguran merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Pengangguran tidak hanya melumpuhkan warga negara dari aspek finansial, tetapi juga membawa dampak negatif lainnya. Terlebih jika pengangguran tersebut terjadi dikalangan pemuda akan dapat meningkatkan kerawanan sosial terhadap kriminalitas, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, serta maraknya gelandangan dan pengemis usia muda.

Seorang peramal masa depan, John Naisbitt, dalam bukunya yang bertajuk *Global Paradox* (1994), mengakui bahwa mengatasi pengangguran dikalangan pemuda merupakan salah satu upaya yang berat namun harus bisa dilakukan. Salah satu alternatif kebijakan yang dapat dipilih untuk mengatasi pengangguran pemuda adalah melalui kewirausahaan. Dimana pemuda didorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, tidak tergantung dengan daya serap lapangan pekerjaan yang disediakan oleh sektor industri.

Pada era globalisasi, kewirausahaan justru memegang peran penting dalam perekonomian.

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian pikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan, yang selanjutnya perlu dimaknai tentang kemandirian pemuda. Kemandirian pemuda adalah merupakan suatu kondisi yang dialami pemuda yang ditandai dengan kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konotif, psikomotorik, dengan pengerahan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan intrernal pemuda tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumberdaya manusia yang utuh dan sumberdaya lainnya yang bersifat fisik –material.

Dalam konteks pemberdayaan ini terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana pemuda dilibatkan dalam proses pembangunan, dan berhak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan dan daya (power) yang dimiliki obyek.

Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalih fungsikan individu yang sebelumnya menjadi obyek kemudian memiliki peran sebagai subyek (Suparjan dan Hempri, 2003:44). Untuk mencapai itu semua ada tahapan yang harus dilewati dalam pemberdayaan ini seperti yang disampaikan oleh Teguh (2004: 83) sebagai berikut :

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

3. Tahap peningkatan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kemandirian.

Lebih lanjut disampaikan Winari (1998:76), Pemberdayaan hendaknya jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (charity), namun pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.

2.3.3. Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan

Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata "*participation*" yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi.

Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijakan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut :

1. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.

2. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.

3. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan.

Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.

4. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

Pendapat Suryono (2001:124) partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi.

Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik

dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya menurut Slamet (dalam Suryono 2001:124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Supriady (2005:16) diartikan sebagai ikut serta masyarakat yang efektif membutuhkan kesepian dari partisipasi masyarakat. Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan dan menilai hasil partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi pemuda dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat dalam hal ini pemuda merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya (Soetomo, 2006).

Hetifah (dalam Handayani 2006:39) partisipasi sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah kepentingan eksternal. Lebih lanjut disampaikan oleh Histiraludin (dalam Handayani 2006:39-40) Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan. Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat, seolah-olah menjadi model baru yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Selanjutnya menurut Slamet (2003:8) menyatakan bahwa, ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu :

1. Partisipasi politik (*political participation*)
2. Partisipasi social (*social participation*)
3. Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*)

Ketiga hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a) Partisipasi politik (*political participation*) lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam

lembaga pemerintah ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.

- b) Partisipasi sosial (*social participation*) partisipasi ditempatkan sebagai beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi dan implementasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.
- c) Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*) menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum terisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik.

Partisipasi dapat dijelaskan sebagai masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah

masyarakat merasa tidak memiliki dan acuh tak acuh terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila akan dilakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokal lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Bahkan pula mereka akan mempunyai pengetahuan lokal untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut.

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala, dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala

prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (*acceptable*) dan dianggap layak dipercaya (*reliable*) untuk dapat dilaksanakan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula. Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

2.3.4. Aktor Dalam Pembangunan Pemuda

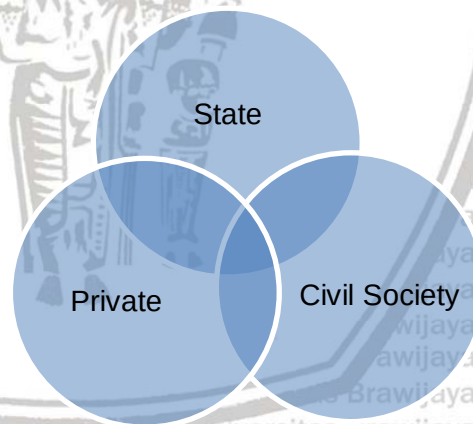
Tjosvold (dalam Wastiono, 2003) mengatakan bahwa melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan, merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi. Tjosvold (1993 :xii)

sebagai organisasi, melayani konsumen merupakan saat yang menentukan (*moment of thruts*), peluang bagi organisasi untuk menunjukkan kredibilitas dan kapabilitasnya.

Analisis kebijakan publik dengan menggunakan pendekatan orientasi aktor ini memiliki asumsi-asumsi dasar sebagai berikut (Long & Long, 1992):

- 1) Logika yang mendasarinya adalah setiap individu memperoleh kemampuan dan kesempatan berperan dalam proses kemasyarakatan dan kehidupan. Dalam konteks pembangunan ini bermakna sebagai pembangunan yang partisipatif.
- 2) Dalam model ini, pembangunan berarti untuk semua (semua kelompok sasaran seperti wanita, anak-anak, penduduk miskin dan lainnya) dan pembangunan bermakna pemerataan
- 3) Pembangunan didasarkan pada logika keseimbangan ekologi lingkungan, yang berarti tidak hanya mementingkan generasi sekarang, tetapi juga generasi mendatang; dalam konteks ini berarti bermakna pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Hubungan tiga aktor tersebut dapat digambarkan seperti di bawah ini



Gambar 2.5. Aktor dalam Kebijakan Publik

Sumber LAN 7 BPKP, 2000:6

Dari gambar hubungan interaksi aktor kebijakan publik, kinerja administrasi publik berkaitan yang berkaitan dengan pemuda wirausaha dipengaruhi oleh bentuk hubungan dan interaksi para aktor dan pelaku ekonomi.

Pengaruh interaksi itu melalui suatu mekanisme atau aturan main yang

disepakati bersama. Para aktor dalam administrasi publik di negara yang demokrasi secara umum dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu : State atau Penyelenggara Negara, Privat atau non pemerintahan dan Masyarakat Madani atau Civil Society, ketiganya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda untuk saling mendukung yaitu :

1. State atau Penyelenggara Negara

Penyelenggara negara lazimnya terdiri dari tiga pilar berupa lembaga negara yang saling bersinergi dalam mencapai tujuan bernegara. Agar penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan baik, ketiganya harus menjaga keseimbangan (*check and balances*). Ketiga lembaga negara tersebut adalah:

- a. Eksekutif atau pemerintah (presiden, wakil presiden dan para menteri, gubernur, bupati, walikota, sampai lurah dan aparat birokrasinya, yang bertugas di pusat maupun di daerah) sebagai pelaksana undang-undang dan peraturan untuk kepentingan publik (dari berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara) yang sudah disepakati dan disetujui rakyat melalui wakilnya di parlemen.
- b. Legislatif atau parlemen (di pusat maupun di daerah) yang membuat dan menetapkan berbagai undang-undang untuk kepentingan publik (dari berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara) yang berlaku di negara tersebut.
- c. Legislatif atau lembaga peradilan, yang menerjemahkan, menafsirkan undang-undang tersebut di masyarakat.

Dalam perkembangan budaya dan peradaban bangsa ini, pasca reformasi tahun 1998, penyelenggara negara di Indonesia tidak hanya terdiri dari 3 lembaga tersebut, tetapi sudah dilengkapi dengan berbagai Lembaga Kuasi Negara yang juga memiliki peran penting dalam menyelenggarakan urusan negara. Adapun yang dimaksud lembaga kuasi (*quasy*) tersebut misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Dimana Kelompok penyelenggara negara ini mempunyai peran strategis dan penting dalam ekonomi publik. Kelompok inilah yang mengatur proses atau aturan main dalam berjalannya

aktivitas ekonomi di masyarakat melalui berbagai peraturan dan kebijakannya.

Berbagai peraturan kebijakan penyelenggara negara ini berujung pada bentuk alokasi dan distribusi penggunaan sumber daya menggerakkan aktivitas ekonomi di masyarakat.

Penyelenggara negara berperan strategis dalam menentukan besaran serta alokasi dan distribusi sumber daya negara dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). Kebijakan mengenai besaran atau volume serta alokasi APBN/D digunakan untuk mempengaruhi atau merangsang aktivitas kebijakan publik. Kebijakan APBN ini dikenal juga dengan istilah kebijakan fiskal (*fiscal policy*) dalam ekonomi makro.

2. *Private (Non Pemerintah)*

Kelompok privat adalah non pemerintah adalah mereka para pengusaha yang berprofesi dan berperan sebagai penghasil (produsen) barang dan jasa dengan tujuan mendapat keuntungan usaha. Kelompok dunia usaha atau ini terdiri dari berbagai bentuk (berbadan hukum, seperti PT, CV, Firma dan koperasi, milik domestik atau PMDN, milik asing atau PMA, milik BUMN dan BUMD, maupun yang tidak berbadan hukum) dan berbagai skala usaha, seperti usaha besar atau konglomerasi, usaha menengah, usaha kecil, koperasi, sampai usaha rumah tangga.

Kelompok bisnis ini adalah aktor atau pelaku kegiatan ekonomi publik yang berperan nyata di lapangan. Kelompok inilah yang menggerakkan ekonomi publik yang menciptakan nilai tambah di tengah masyarakat, seperti membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat konsumen (domestik maupun asing), dan membayar pajak dan retribusi kepada negara (sebagai sumber utama keuangan negara).

Dengan demikian, sebenarnya peran pelaku usaha ini cukup penting dalam menentukan perkembangan ekonomi publik. Walaupun, kelompok dunia usaha ini adalah kelompok yang menggerakkan kebijakan publik, dalam kegiatannya kelompok dunia usaha sangat dipengaruhi oleh situasi usaha yang diciptakan oleh penyelenggara negara melalui berbagai kebijakan dan aturan main bisnis yang berlaku di negara tersebut.

3. *Civil Society* atau Kelompok Masyarakat Madani

Civil Society adalah masyarakat yang peduli terhadap hak-hak publik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kelompok ini lebih mewakili kepentingan publik dan masyarakat luas, sebagai konsumen dari barang dan jasa yang dihasilkan para produsen maupun konsumen dari pelayanan yang disediakan oleh negara, dan produsen dari faktor produksi, seperti tenaga kerja, pemilik modal, dan pemilik faktor produksi lainnya.

Civil Society atau kelompok masyarakat madani terdiri dari berbagai bentuk masyarakat, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kelompok swadaya lainnya (*Non Governmental Organization/NGO*), asosiasi profesi, perguruan tinggi dan organisasi massa (dalam bidang keagamaan maupun di luar bidang ini). Masyarakat madani ini adalah aktor yang perannya tidak langsung dan kurang jelas dalam aktivitas ekonomi publik seperti halnya para pelaku bisnis. Namun, kelompok masyarakat madani ini lebih mewakili kepentingan masyarakat yang lebih luas, yaitu masyarakat konsumen, pengguna barang dan jasa, maupun pemilik faktor produksi dan sumber daya yang digunakan oleh produsen maupun negara dalam menjalankan perannya masing-masing. Masyarakat madani dapat berperan sebagai aktor yang mewakili kepentingan tenaga kerja, maupun faktor produksi lainnya yang digunakan oleh

para pebisnis, dan kepentingan membayar pajak (*tax payer*) yang membiayai kehidupan bernegara dan berbangsa.

Dalam praktek kehidupan sehari-hari, di negara demokrasi kelompok madani ini adalah kelompok yang kritis sehingga kadangkala terlihat sebagai kelompok penekan bagi pihak lain. Berbagai masalah kepentingan publik secara luas sering diangkat ke permukaan dan selanjutnya minta penyelesaiannya dari penyelenggara negara, seperti masalah kesejahteraan masyarakat, masalah lapangan pekerjaan dan pengangguran, masalah keadilan, masalah penegakan hukum di masyarakat, masalah lingkungan, perlindungan konsumen, perlindungan tenaga kerja, masalah kesehatan, dan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak.

Walaupun *civil society* terlihat kurang menonjol dalam menggerakkan ekonomi publik dibandingkan dengan kedua kelompok lain, di negeri yang makin demokratis dan yang rakyatnya makin maju, kelompok masyarakat madani ini dapat menjadi kelompok penekan sehingga memengaruhi kebijakan dan perilaku penyelenggara negara (*political society*) maupun kebijakan dan perilaku masyarakat pebisnis (*business society*) dalam aktivitas ekonomi publik.

Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari keseimbangan berbagai kepentingan yang ada dalam negeri dan kepentingan pihak asing. Bahkan bila kepentingan asing pada kehidupan berbangsa suatu negara makin lama terlihat makin menonjol dibandingkan kepentingan nasional dan kepentingan publik, yang disebabkan terutama oleh lemahnya kepentingan (*leadership*) dari pemerintah negara tersebut, kedaulatan negara menjadi kedaulatan semua atau menjadi jargon belaka.

Keseimbangan kepentingan berbagai kelompok masyarakat (*balanced of power*) juga dapat digambarkan dari keseimbangan berbagai kepentingan masing-masing kelompok di masyarakat. Keseimbangan ini sangat berpengaruh terhadap kinerja kebijakan publik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam prakteknya, negara tidak jarang disusupi oleh kepentingan asing atau ada kelompok yang memakai kekuatan asing untuk kepentingan kelompoknya, sehingga kepentingan publik domestik atau nasional terabaikan, yang mengakibatkan rakyat hanya menjadi jargon kampanye para politikus dalam berebut kekuasaan, namun kesejahteraan rakyat masih jauh dari kenyataan. Di sini tampak pentingnya kepedulian antar sesama anak bangsa, atau lebih dikenal dengan etika berbangsa dan bernegara dalam membangun kesejahteraan bersama.

2.4. Desentralisasi Dalam Prespektif Administrasi Publik

Secara umum pandangan desentralisasi lebih cenderung diartikan sebagai instrumen pemerintah lokal dalam mewujudkan otonomi daerahnya.

Pengertian desentralisasi menurut Conyers (1983) dibedakan ke dalam dua terminologi yaitu :

1. Desentralisasi bermakna sebagai "*devolution*" yang pemahamannya menunjukkan pengertian kewenangan politik yang ditetapkan secara legal dan dipilih secara lokal.
2. Desentralisasi sebagai konsep dalam "*Deconcentration*" yang menunjukkan pada kewenangan administratif (*administrative authority*) yang diberikan pada perwakilan badan-badan pemerintah pusat maupun pemerintah lokal dalam suatu negara.

Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya. Pemberian otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien

dan profesional. Dalam meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pemerintah daerah perlu melakukan perekayasaan ulang terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan (*buereaucracy reengineering*) (Mardiasmo, 2002).

Selanjutnya otonomi daerah menjelaskan bahwa sebagai konsep, ternyata desentralisasi mempunyai bentuk, seperti : *Dekonsentrasi, Delegasi dan Devolusi*. Gelombang Demokratisasi, *Good Governance* dan Globalisasi, telah menjadikan desentralisasi sebagai tuntutan besar bukan hanya di negara – negara maju namun juga di negara – negara berkembang. (Abdullah, 2005).

Dengan berlakunya otonomi daerah atau pelaksanaan desentralisasi maka telah merubah pola manajemen pemerintahan, yaitu dengan ditandai adanya pergeseran pola manajemen pemerintahan dari manajemen pemerintah yang *sentralistik dan eksploitatif ke desentralistik dan partisipatif*. Terjadinya perubahan yang cukup mendasar dari sistem pemerintahan adalah untuk mewujudkan karakter pemerintahan yang demokratis, akuntabel, transparan, bebas dari korupsi, berorientasi pada pasar, dan adanya peran aktif masyarakat dalam berbagai bidang salah satunya adalah peran aktif dari pemuda wirausaha.

Esensi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 tentang Pemerintahan daerah telah memberikan ruang dan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas ketahanan sosialnya. Ini memberi peluang dan dorongan bagi penguatan daerah, termasuk wilayah pedesaan, karena pimpinan daerah memiliki tugas dan kewenangan lebih besar. Selain itu secara substansial dari pasal tersebut mengandung dua nilai dasar yaitu nilai unitaris dan nilai desentralis. Nilai unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan memiliki kesatuan yang bersifat negara. Sedangkan desentralis yaitu nilai-nilai kewenangan dalam

hak dan kewajiban pemerintahan dan pemerintah daerah. Otonomi daerah merupakan suatu perwujudan pelaksanaan desentralisasi dan merupakan penerapan konsep teori '*areal division of power*' yang membagi kekuasaan secara vertikal, yaitu daerah di bawahnya. Konsep desentralisasi atau otonomi daerah merupakan konsekuensi dari bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana konsep tersebut merupakan sistem perencanaan pelaksanaan pembangunan yang akomodatif terhadap inisiatif dan tanggungjawab masyarakat daerah.

Menurut Kaban (2000) perbedaan konsep desentralisasi lebih dikarenakan beberapa faktor yaitu : (1) desentralisasi sebagai prinsip penghormatan terhadap kehidupan regional sesuai riwayat, adat istiadat, dan sifat-sifatnya dalam negara kesatuan. (2) desentralisasi sebagai upaya perspektif ekonomi politik dimana daerah diberi peluang untuk berdemokrasi dan berprakarsa memenuhi kepentingannya. (3) desentralisasi sebagai kemerdekaan dalam segala urusan yang menjadi hak daerah. (4) desentralisasi sebagai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memenuhi kepentingan masyarakat lokal. (6) desentralisasi sebagai mekanisme pemberdayaan.

Desentralisasi mempunyai tujuan yaitu mewujudkan kemandirian daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, lebih lanjut disampaikan Suwandi (2002:5) bahwa terdapat dua tujuan utama yang ingin dicapai dalam desentralisasi yaitu tujuan politik dan tujuan administrasi. Tujuan politik akan memposisikan pemerintah daerah sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat lokal dan secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan politik secara nasional untuk mempercepat terwujudnya *civil society*, sedangkan tujuan administrasi akan memposisikan pemerintah daerah sebagai

unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif dan ekonomis.

Desentralisasi diarahkan pada penguatan lokal serta memberikan ruang pada prakarsa-prakarsa lokal menuju kemandirian desa. Desentralisasi dan otonomi daerah selalu digerakkan oleh regulasi daripada maraknya prakarsa dan inisiatif masyarakat. Kendala yang harus diatasi desa dalam mengembangkan otonominya adalah melepaskan ketergantungan terhadap supra desa. Eko

(2005) menegaskan bahwa prakarsa desentralisasi dan otonomi desa merupakan entitas dan sekaligus basis penguatan hidup sebagian besar masyarakat Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia jauh akan lebih kokoh dan kuat kalau ditopang oleh eksistensi, kemampuan dan kemandirian desa. Salah satu pendapat dari Gie (1968), dianutnya desentralisasi adalah pada aspek budaya, bahwa dengan desentralisasi dapat berkembang sejalan dengan *indigeneus knowledge* termasuk kekuasaan geografis, kegiatan penduduk, kegiatan ekonomi dan latar belakang sejarah masyarakat di daerah.

Sejalan dengan hal tersebut Soetardjo (1984:41) menyampaikan bahwa dasar-dasar kebudayaan nasional sumbernya terdapat di desa. Desa merupakan sumber kekuatan dan tenaga kebangsaan termasuk timbulnya getaran jiwa.

Kekuatan tersebut telah memberikan warna desa sebagai subsistem pemerintahan maupun desa sebagai subsistem sosial. Fenomena tersebut memposisikan desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri menuju kemandirian desa dengan melibatkan semua elemen masyarakat sebagai perwujudan otonomi desa dengan titik berat otonomi desa sebagai proses suatu proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju kehidupan masyarakat dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Jadi,

salah satu ukuran dan target keberhasilan pembangunan, salah satu variabelnya adalah diukur seberapa jauh negara mampu memajukan dan mensejahterakan masyarakat pedesaan serta menjaga serta menumbuhkan *local wisdom* yang menjadi kekayaan mereka.

Desa bukanlah sekedar himpunan orang yang tinggal di lingkungan yang sama. Lebih dari itu desa juga merupakan entitas psikologis-sosiologis yang diikat atau disatukan oleh nilai-nilai, tradisi dan struktur kepemimpinan yang tumbuh alami yang pada urutannya melembaga dan menjadi bagian dari struktur pemerintahan yang lebih luas. Jauh sebelum masa penjajahan, desa merupakan entitas yang menjadi pilar dan lokus tumbuhnya kearifan lokal. Pada mulanya mungkin saja desa didominasi dan diikat oleh hubungan kekerabatan, lalu yang tertua menjadi pimpinan puncak. Selanjutnya entitas sosial ini membuka diri bagi kehadiran orang lain, namun memiliki kesetiaan dan keterikatan dengan tradisi yang ada sehingga terbangun kohesi sosial yang didalamnya tumbuh nilai-nilai sosial dan kemanusiaan dan menjelma bagaikan rumah yang bernama adat. Hukum adat merupakan ajaran tentang tata-kehidupan masyarakat dan juga merupakan pedoman tata-cara penyelenggaraan pemerintahan desa, berfungsi mengatur perilaku individu dan kelompok dan juga berperan sebagai identitas mereka serta berperan sebagai ketahanan desa, baik ketahanan yang bersifat fisik maupun non-fisik. Potensi ini sesungguhnya dapat dikembangkan lebih

lanjut menjadi Ketahanan Bangsa (Santoso, 2016). Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini justru ekspansi dan intervensi kota telah merusak keharmonisan dan kohesi sosial kehidupan desa.

Administrasi publik akan sangat kental mewarnai keberhasilan desentralisasi hal ini sejalan dengan pendapat Rewansyah (2011) bahwa

administrasi dalam arti pelayanan (*administrate*) dan antologik Administrasi adalah *ministe and ministry*, maka hakekat dari ilmu administrasi adalah ilmu yang memberikan layanan dan pelayanan yang dilakukan oleh pihak yang melayani (penyelenggara negara) kepada pihak yang dilayani yaitu warga negara. Lebih lanjut disampaikan Musanef (1996:1) administrasi sebenarnya berasal dari bahasa latin yaitu *administratie*, kata tersebut dalam bahas Inggris disebut *administration* yang berarti *to serve*, artinya melayani atau mengabdikan.

Beberapa pendapat tentang administrsi seperti yang disampaikan oleh Suganda (1992:6) yang menyatakan bahwa administrasi merupakan kerjasama kelompok manusia untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Handayaniingrat (1994:3) fenomena administrasi dapat diartikan didirikannya kelompok manusia dua orang atau lebih dengan adanya kerjasama kelompok, adanya kegiatan usaha dan adanya tujuan yang hendak di capai. Dan menurut Siagian (1995:5) administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dari uraian di atas administrasi publik dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang memberikan bantuan dalam mengelola, informasi, manusia, sumberdaya alam menuju satu arah tujuan yang terhimpun dalam organisasi.

Dan selanjutnya tugas administrator dalam pemerintahan desentralisasi adalah melayani atau mentaati, melaksanakan administro (memimpin) serta mengarahkan personil yang dipercaya. Administrasi dalam desentralisasi juga berhubungan erat dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan dalam berkehidupan manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya. Kerjasama ini selanjutnya diatur dalam tugas atau sesuai dengan perannya masing –masing.

2.4.1. Good Governance Dalam Prespektif Pemuda Wirausaha

Pemerintahan yang baik atau *Good Governance* biasa diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *privat sectors* (sektor swasta/dunia usaha) dan *society* (masyarakat). Menurut UNDP (1999) *Good Governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders*, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumberdaya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya menurut sedarmayanti (2009) arti *Good* dalam pemerintahan yang baik mengandung pemahaman, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

Kasim (2015:14) menyatakan fase *Good Governance* adalah proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan (sosial, politik, ekonomi, dan lain lain) dalam suatu negara dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta menggunakan sumber daya alam dan manusia dengan cara yang sesuai dengan prinsip partisipasi masyarakat, *Rule of Law*, transparansi, *responsiveness*, *consensus oriented*, *equity ang inclusiveness*, efektivitas dan efisiensi dan akuntabilitas publik.

Dalam Undang-undang Kepemudaan No. 40 Tahun 2009 nilai-nilai tersebut dirancang dalam tata kelola kepemudaan yang baik dengan memberikan program salah satunya pengembangan kewirausahaan pemuda. Pemuda mendapatkan pelayanan yang baik melalui usaha penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan dengan harapan mampu menjadi pemuda yang berperan dalam pembangunan yang memiliki karakter, kemampuan daya saing dan mandiri. Pengembangan kewirausahaan pemuda dalam tata pemerintahan yang baik mengharapkan mekanisme pengelolaan sumberdaya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif (Rochman, 2000). Dalam membangun kewirausahaan pemuda diperlukan tiga syarat sesuai yang disampaikan oleh Bapennas (2005) yaitu adanya (1) kesempatan, (2) adanya kemampuan, (3) adanya keamanan dan perlunya semua pihak agar mendukung gerakan ini, dan tiga syarat tersebut dapat dipenuhi apabila posisi dunia usaha /swasta dan masyarakat setara. Dimasa yang akan datang pemerintah dalam melaksanakan pembangunan memiliki peran yang tidak lagi dominan, pemerintah akan berfungsi sebagai regulator atau fasilitator. Dengan peran pemerintah yang semakin berkurang ini hendaknya pemuda sebagai masyarakat dan bisa juga sebagai swasta akan memiliki peran yang sama untuk ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat diartikan peran pemerintah, swasta/ dunia usaha dan masyarakat menjadi lebih seimbang.

Pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat dihindari. Dari aspek pemerintahan menurut Sedarmayanti (2009) juga dapat dilihat melalui :

- a. Hukum (kebijakan) ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik dan ekonomi.
- b. Kompetensi administrasi dan transparansi, kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administrasi, keterbukaan informasi.
- c. Desentralisasi. Desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen
- d. Penciptaan pasar yang kompetitif. Penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi.

Menurut Rewansyah (2012:110), setiap pelaku *good governance* memiliki peran dan tugasnya masing-masing dalam mencapai tujuan hidup bernegara.

Pemerintah berperan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, berperan dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah, dan membangun lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan baik pada level lokal, nasional maupun internasional dan global. Sektor swasta/dunia usaha berperan menciptakan pekerjaan dan pendapatan. Peran swasta ini sangat penting dalam perannya dalam penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat (*civil society*) berperan memfasilitasi gerakan-gerakan kelompok pada masyarakat dalam kegiatan ekonomi, sosial dan politik.

Reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya digunakan model manajemen pemerintahan yang baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, karena perubahan tidaklah sekedar perubahan paradigma, namun juga perubahan manajemen (Mardiasmo, 2002). Perubahan yang bersifat lokal dan nasional tersebut dapat mempengaruhi pola pemerintahan terjadi pula pada tingkat regional dan global, sebagai mana

disampaikan Kartajaya dan Yuswohady (2005) bahwa efektifitasnya pemberlakuan AFTA dan Pasar bebas yang mempengaruhi pula berbagai negara sehingga perlu untuk menggeser orientasi mereka dalam pengelolaan kawasan dari lokal orientasi ke global *cosmopolitan-orientation*. Oleh karena itu untuk membangun landasan yang kuat, pemerintah perlu melakukan perenungan kembali (*rethinking government*) yang kemudian diikuti dengan *reinventing government* untuk menciptakan pemerintahan baru yang lebih baik (Mardiasmo, 2002). Orientasi pemerintah daerah dalam pengelolaan daerah yang sangat dipengaruhi oleh perubahan di tingkat lokal, nasional, regional-global telah memaksa berbagai pemerintah daerah di Indonesia untuk mengadakan penyesuaian dalam menggali potensi daerahnya agar mempunyai daya saing dan mampu memasarkannya.

Administrasi publik menurut Islamy (2003:7) pada dasarnya berbasis pada makna administrasi yaitu proses kerjasama sekelompok manusia dalam rangka mencapai tujuan bersama. Selanjutnya administrasi publik mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat (*service making*). Administrasi publik tidak dikendalikan oleh harga pasar, dan dalam kegiatannya selalu ditujukan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat banyak (*social welfare*). Dan hasil pelaksanaan pelayanan yang dilakukan tergantung pada penilaian masyarakat banyak.

George Edward III (1980:1) menyatakan bahwa masalah utama administrasi publik adalah : “ *leak of attention to implementation without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully.*”

Selanjutnya Edwad III (dalam Widodo, 2008: 96) menjelaskan empat (4) faktor agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu : “ *communication, resources,*

disposition or attitudes dan bureaucratic”. Pemuda sebagai aset penting dalam pembangunan di daerah, harus melakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya, dengan cara mentransformasi pendekatan dan cara pandang pemerintah daerah dan pemudanya dalam sistem otonomi daerah dengan harus memiliki daya kreativitas yang tinggi terutama yang berhubungan dengan upaya-upaya penggalan sumber-sumber pendapatan (Riady dan Bratakusumah, 2005). Pemerintah Daerah harus mampu menggali potensi-potensi daerahnya secara optimal dan mengembangkan secara inovatif dari potensi-potensi yang ada. Pemuda memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut sebagai masyarakat yang tinggal di daerah itu dengan perannya. Orientasi pengelolaan daerah atau desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan mentransformasi diri sebagaimana disampaikan oleh Kartajaya dan Yuswohady (2005), yaitu : berbagai perubahan memaksa pemerintah daerah untuk melakukan reorientasi dalam pengelolaan daerah, (1). Untuk mentransformasi diri dari *bureaucratic-monopolistic government* menjadi *entrepreneurial competitive government*, (2). Dari “*cuek-bebal*” menjadi *customer-driven government* dan *accountable government*, (3) dari *local orientation* menjadi *global-cosmopolit orientation*.

Transformasi di dalam sistem pemerintahan daerah atau pemerintahan desa menjadi *entrepreneurial government* ini menjadi transformasi juga pada diri pemuda sebagai agen perubahan bukan lagi mencari kerja tapi memiliki pemikiran untuk selalu berfikir dan memanfaatkan peluang yang muncul untuk memakmurkan dan meningkatkan kualitas hidup pada diri sendiri dan masyarakat dilingkungannya. Sedangkan pemahaman pada *competitive government* juga memberikan pemahaman bagi kaum muda untuk terus

melakukan kompetisi dalam setiap persaingan dengan dunia luar, sedangkan pada pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakatnya. Transformasi selanjutnya adalah *customer-driven government* dimana pemerintah daerah selalu berorientasi dan peduli terhadap setiap kebutuhan pelanggannya, secara serius akan memberikan keinginan dan harapan dari pelanggannya dan akan merespon dalam rangka memuaskan pelanggannya. Sistem yang berorientasi pada pelanggan memaksa pemberi jasa untuk dapat bertanggungjawab kepada pelanggannya (Osborne dan Gaebler, 1992).

Dalam perspektif pemuda wirausaha transformasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang baik pada pelanggannya (masyarakat) adalah memberikan pandangan untuk para pemuda berfikir pada hal yang sama. Tanpa mengesampingkan konsep yang dikemukakan Osborn dan Gaebler, perubahan orientasi tentang kedudukan warga negara dalam hal ini pemuda, nilai-nilai yang dikedepankan dan peran pemerintah telah memunculkan paradigma baru dalam administrasi publik yang disebut dengan *New Public Service* yang menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat (pemuda) dalam administrasi publik.

Paradigma *new public service* bermula dari pemikiran bahwa warga negara memiliki posisi sangat penting bagi pemerintahan yang demokratis. Warganegara dipandang tidak saja pada sisi pribadi yang diasumsikan sebagai pelanggan pada konsep *reinventing government* namun juga melibatkan nilai-nilai dan kepercayaan pada pihak lain. Denhardt (2003) menyatakan bahwa perspektif baru ini merupakan “*a set of idea about the role of public administration in the governance system that place public service, democratic*

governance and civic engagement at the center". Pemuda wirausaha dalam perspektif administrasi publik lebih cenderung pada paradigma *new public service* dimana para pemuda ditempatkan di depan dan *new public service* ini akan lebih mengarahkan pada bagaimana institusi publik didasarkan pada integritas dan responsibilitas. Partisipatif dalam pembangunan nasional merupakan strategi melibatkan peran serta pemuda sebagai masyarakat bukan saja sebagai obyek tetapi sebagai subyek pembangunan. Nuansa yang dikembangkan dalam pembangunan pemuda adalah pembangunan dengan pendekatan dari bawah. Namun konsep ini tidaklah mudah dalam implementasinya karena tentu banyak faktor yang harus dipertimbangkan, termasuk dalam sosialisasinya pada pemuda. Namun demikian membangun kewirausahaan pemuda yang melibatkan semua masyarakat tanpa membedakan ras, agama, status sosial, pendidikan, hal ini adalah langkah yang baik untuk dicermati dan dikembangkan dalam tataran pemikiran maupun dalam implementasinya, di tengah-tengah pemuda sebagai agen perubahan dalam pembangunan. Pelayanan publik yang dipraktekkan dengan situasi yang kreatif, di mana warga negara dan pejabat publik dapat bekerja sama mempertimbangkan tentang penentuan dan implementasi dari birokrasi publik, yang berorientasi pada "aktivitas administrasi dan aktivitas warga negara".

Dalam penelitian ini selanjutnya akan menggunakan paradigma NPM dan NPS sebagai pisau analisis dalam keberhasilan pelaksanaan "Membangun Kewirausahaan Pemuda Indonesia Melalui Nilai-Nilai Kearifan Lokal", hal ini didasari pada adanya dua hal besar yang harus diberdayakan dan dikembangkan pada keberhasilan membangun kewirausahaan yaitu sebuah manajemen baru dalam NPM yang akan menjadikan kinerja baik itu pemerintah,

swasta dan pemuda dalam menjalankan perannya bagi perkembangan bangsa dapat terukur dengan jelas melalui kemampuan daya saing dan efisiensi pencapaian. Selanjutnya pemuda sebagai *citizen* harus melakukan kegiatan ini dengan satu kesadaran penuh sebagai warga negara yang memiliki peran dalam menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan terlibat aktif menjadikan dirinya bukan beban sosial karena menganggur akibat sempitnya lapangan pekerjaan yang diciptakan pemerintah atau sempitnya lahan pertanian sebagai tanah olahan, tetapi menjadi pemuda yang memiliki kesadaran penuh untuk membangun daerahnya, dan tidak hanya menuntut pelayanan saja dari pemerintah, akan tetapi bersama sama pemerintah memajukan daerahnya. Disinilah pemuda dengan kesadaran sebagai warga negara melakukan inisiasi, partisipasi dan bahkan emansipasi dalam pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi demi mencapai ketahanan ekonomi dalam mensejahterakan dirinya dan lingkungannya.

2.4.2. The New Public Management (NPM) dan The New Public Services (NPS)

Wasistiono dan Polyando (2017), pada saat menyusun UU No. 32 Tahun 2004, sedang berkembang aliran pemikiran dalam administrasi publik yang menekankan pada pelayanan publik. Paradigma ini merupakan kelanjutan dari *The New Public Management* yaitu *The New Public Services* yang dikembangkan oleh Denhardt and Denhardt. Pada konsideran UU Nomer 32 tahun 2004 terdapat dua alasan yaitu :

1. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggara pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan potensi dan keragaman daerah

Menurut Mindarti (2007) dalam bukunya tentang Revolusi Administrasi

Publik menyampaikan bahwa ada pengembangan konsep dan kerangka teori administrasi publik yang dimulai dengan tumbuhnya kesadaran yaitu :

- 1) Pengakuan bahwa kebudayaan merupakan faktor ekologi yang paling menentukan dalam sistem administrasi publik.
- 2) Timbulnya pendekatan baru dalam studi perbandingan administrasi publik berupa pendekatan pada lintas budaya (*Cross Culture*) dari sebelumnya lebih menekankan pada tradisional yang bercorak normatif dan struktural.

Lebih lanjut disampaikan Mindarti, bahwa dari kedua kecenderungan tersebut telah mendorong munculnya empat kecenderungan dasar dalam pengembangan kerangka dan konsep ilmu administrasi publik yaitu :

- 1) Perhatian administrasi publik pada masalah-masalah pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan, termasuk perumusan kebijakan, substansi program, instrumen pelaksana kebijakan dan program pembangunan itu sendiri serta keterkaitannya dengan lingkungan.
- 2) Pemanfaatan pendekatan perilaku (behavioral approach) untuk menelaah sikap perilaku birokrasi serta berbagai persoalan dalam hubungan manusia dalam birokrasi publik. Disini termasuk dalam pengambilan keputusan, peningkatan pengetahuan dan kinerja.
- 3) Penerapan pendekatan manajemen dalam administrasi publik, pengembangan sistem analisis dalam pelaksanaan tugas administrasi, penggunaan teknik dan kuantitatif seperti operation research, budgeting dan lainnya.
- 4) Pengembangan studi komparatif yang memberikan penekanan pada aspek ekologi sosial dan kultur.

Perbedaan karakter administrasi publik dan konsep administrasi pembangunan dapat diringkas dalam Tabel berikut ini

Tabel 2.2. Perbedaan Karakteristik Konsep Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan.

No.	Administrasi Publik	Administrasi Pembangunan
1	Lebih banyak terkait dengan lingkungan negara maju	Lebih menaruh perhatian pada lingkungan berbeda negara berkembang
2	Bersikap netral terhadap tujuan pembangunan	Berperan aktif dan berkepentingan terhadap tujuan pembangunan
3	Lebih menekankan pada tertib administrasi dan orientasi masa kini	Lebih menekankan perubahan kearah lebih baik dan berorientasi ke masa depan.
4	Lebih menekankan pada tugas rutinitas	Lebih berorientasi pada tugas pembangunan (<i>agent of development</i>)
5	Lebih mengutamakan kearpian aparatur administrasi itu sendiri	Lebih mengkaitkan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan dengan aspek lingkungan
6	Terkesan aparatur lebih sebagai pelaksana	Aparatur lebih sebagai <i>agent of change</i> (penggerak perubahan)
7	Lebih berpendekatan legalitas	Lebih berpendekatan lingkungan berorientasi pada tindakan (<i>action</i>) dan <i>Problem solving</i>

Sumber : Mindarti (2007 : 149)

Kennedy (dalam Wasistiono, 2010) mengingatkan perlunya semua pihak mempersiapkan diri, hal ini karena berbagai hal misalnya saja mengenai ledakan bonus demografi diberbagai belahan dunia, komunikasi dan revolusi finansial, revolusi bioteknologi serta munculnya revolusi industri baru. Disamping itu juga peranan negara-negara mulai nampak terlalu besar karena cenderung ingin menangani dan menguasai semua urusan masyarakat. Selain itu juga batas antara urusan militer dan non militer, keamanan dalam negeri dan keamanan

internasional mulai kabur. Oleh karena itu Kennedy menyarankan menggunakan kombinasi yang tepat antara manajemen sumberdaya manusia, manajemen kependudukan dan manajemen teknologi. Selanjutnya McRae (1995) mengemukakan bahwa negara dapat tumbuh apabila didukung oleh masyarakat yang efisien, dan motor pertumbuhan yang baru akan terletak pada rangkaian kualitatif yang mencakup kualitas, organisasi, motivasi dan disiplin dari pribadi rakyat.

Menurut Elashmawi dan Harris (1996), dalam perubahan sosial budaya ada kecenderungan dikembangkannya manajemen multibudaya sebagai salah satu kecakapan dalam menyongsong eraglobalisasi. Sejalan dengan hal ini disampaikan oleh Ansari dan Jackson (dalam Wasistiono, 2003) mengemukakan perlunya menerima kenyataan adanya keragaman budaya di lingkungan kerja, dan keragaman tersebut perlu dikelola guna meningkatkan daya saing. Dalam sistem pemerintahan selanjtnya terjadi satu perubahan yang sangat mendasar seperti yang disampaikan oleh Savas (1987) dengan menawarkan privatisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menurut Savas karena privatisasi merupakan kunci kearah pemerintahan yang lebih baik.

Konsep perubahan besar dalam pemerintahan tersebut selanjutnya hadir dari pemikiran Osborne dan Gaebler (1992) yang menawarkan transformasi semangat kewirausahaan pada sektor publik. Disini Osborne dan Gaebler menawarkan sepuluh pokok pemikiran yang menjadi inti yaitu, mengurangi peranan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat serta menjadikan sektor pemerintah menjadi lebih efisien. Berkaitan dengan efisiensi, Stewart (1988) mengemukakan bahwa kegiatan organisasi pemerintah yang baik tidak hanya memenuhi efisiensi dan efektif akan tetapi juga harus memenuhi *economie*,

efficiency, effectiveness, equity. Sehingga dalam hal ini pemerintah tidak hanya memperhatikan efektif dan efisien saja akan tetapi juga ekonomi dan keadilan.

Sehingga tindakan pemerintah perlu memperhitungkan aspek ekonomi yang menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat.

Perubahan baru yang sangat fundamental ini selanjutnya disebut sebagai pendekatan *New Public Management* yang oleh Osborne dan Gaebler (dalam Mindarti, 2007) merupakan gagasan konseptual yang sangat terkenal dengan sebutan *reinventing goverment*. Konsep ini menawarkan sebuah model dengan sepuluh prinsip dasar yaitu :

1. Mekanisme kompetisi dalam pemberian pelayanan publik,
2. Adanya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kontrol masyarakat terhadap birokrasi
3. Adanya pengukuran kinerja terhadap lembaga dengan fokus bukan pada input tetapi pada sisi *outcome*
4. Banyak digerakkan oleh tujuan yang menjadi misinya dan bukan oleh aturan dan peraturan
5. Perlu mendefinisikan ulang kelompok sasaran lebih sebagai konsumennya dan menciptakan adanya aneka pilihan bagi mereka dalam mendapatkan pelayanan publik yang dibutuhkannya
6. Lebih menekankan pada upaya mencegah terjadinya masalah daripada sekedar memberikan layanan setelah masalah itu terjadi.
7. Mendaaya gunakan sumber daya yang dimiliki agar mampu berfungsi sebagai sumber pendapatan baru daripada sekedar membelanjakannya.
8. Lebih banyak mengembangkan mekanisme desentralisasi termasuk manajemen yang partisioatoris
9. Lebih menekankan penggunaan mekanisme pasar daripada mekanisme birokrasi
10. Lebih berfokus bukan semata-mata pada pelayanan publik yang diberikan, tetapi lebih pada memfasilitasi semua sektor, baik itu sektor publik, swasta dan masyarakat ke arah suatu tindakan bersama untuk memecahkan aneka problem dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti merasa perlu melakukan kombinasi pendekatan paradigma dalam melakukan analisis hal ini karena pendekatan NPM ini cenderung hanya mengkaitkan State dengan pasar semata. Sementara dalam pemerintahan yang modern sesungguhnya pencapaian pemerintah tidak

semata mata pada penyediaan barang dan jasa dengan pelaksanaan efisiensi tetapi juga terjadinya hubungan yang akuntabilitas antara State dengan warganya. Disinilah warga tidak hanya sekedar diperlakukan sebagai pelanggan akan tetapi sebagai warga negara yang memiliki hak untuk menuntut pemerintah agar lebih bertanggungjawab atas tindakan yang diambilnya atau atas kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya (Mindarti, 2007). Lebih lanjut disampaikan Mindarti bahwa warga negara juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan akan hak-haknya, didengar suaranya, sekaligus dihargai nilai dan preferensinya.

Dalam *New Public Servis* yang dikembangkan Denhardt dan Denhardt (2003) memiliki tujuh gagasan yaitu :

1. *Serve Citizens, not Costumers*, disini kepentingan publik menjadi lebih utama, sehingga ada upaya membangun kepercayaan dan kolaborasi yang kuat antar warga negara sebagai pemilik dan penjaga hak serta berkewajiban bagi komunitas yang lebih luas.
2. *Seek the public interest*, Administrator publik harus berperan aktif membangun paham bersama dan kolektif tentang kepentingan publik. Hal ini untuk menumbuhkan kreatifitas bersama
3. *Value Citizenship over Entrepreneurship*, disini kepentingan publik akan dapat dicapai dengan lebih baik jika dilakukan oleh pemerintah bersama warga negara yang terikat dalam komitmen dalam memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat.
4. *Think Strategically, Act Democratically*, kebijakan dan program yang baik hanya dapat dicapai melalui upaya bersama melalui proses kolaboratif.
5. *Recognize that Accountability is Not Simple*, Disini diharapkan pegawai pemerintah lebih responsif dan atentif daripada pasar, yang bekerja berdasarkan ketentuan status, hukum, konsitusi, nilai-nilai masyarakat, norma –norma poliitik dan standar profesional serta kepentingan warga.
6. *Serve rather than Steer*, disini aparat pemerintah mendayagunakan kepemimpinan berbasis pada nilai bersama dalam membantu warganya untuk menemukan kepentingan bersama. Dan tidak mengendalikan atau mengarahkan pada satu arah baru.
7. *Value People, Not Just Productivity*, disini seluruh organisasi publik dalam berpartisipasi mencapai kepentingan publik akan menghasilkan hasil dalam jangka panjang apabila melalui proses kolaborasi dan kepemiminan bersama dengan saling menghormati pada yang lainnya.

Ketujuh prinsip utama dalam NPS tersebut selanjutnya Denhardt dan Denhardt (2003) memformulasikan dalam delapan pelayanan publik yang harus diwujudkan agar pemerintah mampu memberikan pelayanan yang bermutu yang mencakup :

1. *Convenience*, merupakan ukuran sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat diakses dengan mudah oleh warga negara.
2. *Security*, suatu ukuran pelayanan yang menjadikan warga negara merasakan keamanan
3. *Reliability*, ukuran yang menunjukkan pelayanan yang diberikan dapat tersedia secara benar dan tepat waktu.
4. *Personal Attention*, ukuran sejauh mana pelayanan pemerintah dapat diinformasikan oleh aparat dengan tepat kepada warga dan aparat dapat bekerjasama dalam memenuhi kebutuhannya.
5. *Problem Solving Approach*, ukuran sejauh mana aparat mampu menyediakan informasi bagi warga dalam mengatasi masalahnya
6. *Fairness*, adalah ukuran sejauh mana warga percaya bahwa pemerintah menyediakan pelayanan dengan cara yang adil bagi semua orang.
7. *Fiscal Responsibility*, adalah ukuran sejauh mana warga percaya bahwa pemerintah telah menyediakan layanan dengan menggunakan uang publik dengan penuh tanggungjawab
8. *Citizen Influence*, ukuran sejauh mana warga merasa bahwa mereka mempengaruhi mutu pelayanan yang diterima dari pemerintah.

Lebih lanjut disampaikan Denhardt and Denhardt (dalam Wasistiono dan Polyando, 2017 : 404) , tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan, bukan hanya mengendalikan dalam bentuk pembuatan pelayanan publik.

Pemikirannya tersebut telah memberikan warna dalam pembuatan UU tentang

Pemerintah daerah yaitu :

1. *Serve citizenz, not customers*
2. *Seek the public interst*
3. *Value citizenship and public service above entrepreneur*
4. *Think strategically, act democratically*
5. *Recognize the accountability isn't simple*
6. *Serve, rather than steer*
7. *Value people, not just productivity.*

Berdasarkan Denhardt and Denhardt, perlu dibedakan antara pelanggan (*customers*) dengan warganegara (*citizen*). Sebagai warganegara, masyarakat

memiliki dua kedudukan yaitu pelanggan produk barang dan jasa pemerintah serta pemangku kepentingan. Dalam kedudukannya sebagai pelanggan, posisi masyarakat lemah karena pelayanan yang diberikan oleh pemerintah bersifat monopoli tanpa adanya persaingan. Sebaliknya dalam posisinya sebagai pemangku kepentingan posisinya sangat kuat, karena dapat memberhentikan pejabat publik apabila terjadi krisis kepercayaan publik yang meluas., hal tersebut diatur dalam pasal 32 ataat (1) UU No. 32 tahun 2004 yang berbunyi :

Dalam hal kepala daerah dan /atau wakil kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan melibatkan tanggungjawabnya, DPRD menggunakan hak angket untuk menangggapinya.

Sedangkan dalam menanggapi adanya daya saing Erwan dKK (dalam Wastiono dan Polyando (2017 : 408) menyatakan bahwa salah satu model NPM ketiga yaitu *in Search of Excellence* yang bercirikan : (1) *emphasis on organizational development and learning* , (2). *managed culture change programmes*, terlihat jelas bahwa entitas dituntut untuk memiliki visi dan misi yang unggul, terdepan dibandingkan yang lainnya. Artinya setiap entitas, termasuk pemerintah daerah harus memiliki daya saing agar dapat menjadi terdepan.

Dari kedua pendekatan dalam administrasi publik yaitu *New Public Management* dan *New Public Service* secara lebih jelas dapat dilihat dalam tabel perbandingan sebagai berikut

Tabel 2.3.

Perbandingan Perspektif Administrasi Publik (NPM dan NPS)

Element	New Public Management	New Public Service
Dasar Epistemologi	Teori Ekonomi	Teori Demokrasi, Beragam pendekatan
Konsep <i>Public Interest</i>	Kepentingan publik Mewakili agregasi Kepentingan individu	Kepentingan publik merupakan hasil dialog nilai-nilai
Siapa yang dilayani	Pelanggan (<i>Customers</i>)	Warga negara (<i>Citizens</i>)
Peran Pemerintah	Mengarahkan (bertindak sebagai katalis untuk mengembangkan kekuatan pasar)	Melayani (melakukan negosiasi dan menjadi perantara beragam kepentingan dimasyarakat dan membentuk nilai bersama)
Rasionalitas dan Model perilaku manusia	Rasionalitas teknis dan ekonomis, "economicman" pengambilan keputusan yang self-interested	Rasionalitas Strategis atau formal, Uji rasionalitas Berganda (politis, Ekonomis, dan organisasional)
Akuntabilitas Diskresi Administrasi	Kehendak pasar yang merupakan hasil keinginan customers	Banyak dimensi Akuntabilitas pada Nilai, hukum, Komunitas, norma Politik, profesionalisme, Kepentingan citizen
Diskresi Administrasi	Berjangkauan luas Untuk mencapai Sasaran entrepreneurial	Diskresi diperlukan Tetapi bertanggung-jawab dan bila terpaksa
Struktur Organisasi	Organisasi publik Terdesentralisasi	Struktur kolaboratif antara kepemimpinan eksternal dan internal
Dasar Motivasi Perangkat dan administrator	Semangat wirausaha, Keinginan ideologis Untuk mengurangi Ukuran pemerintah	Membangun koalisi antara agensi publik, non-profit dan swasta
		Pelayanan kepada masyarakat, keinginan untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat

Sumber : Denhardt & Denhardt, 2003

Sedangkan perbandingan antara *customer* dan *citizen*, Nada Kakabadse dll (Wasistiono dan polyando, 2017: 493) terlihat jelas perbedaannya dimana *customer*, *consumer*, *client* lebih kepada kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi dan bersifat individual dalam rangka pertukaran barang dan jasa privat., dan nilai yang dicari adalah kepuasan dan keuntungan individu (profit). Sedangkan dalam *citizen* lebih berkaitan dengan komunikasi dalam rangka memperoleh barang dan jasa publik, demi kepentingan bersama serta kemanfaatan (benefit), yang secara jelas perbandingan tersebut terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4 . Perbandingan Antara Customer dan Citizen

Parameter	Customer (Client or Consumer)	Citizen
Ideology	<i>Individual purchaser seeking to meet private need through a free market (i.e. consumer of services)</i>	<i>Member of a political community with a collective existence and public purpose (i.e. producer and consumer of services)</i>
Metaphor	<i>Social capital (i.e. market opportunity)</i>	<i>Civic Community</i>
Service Approach	<i>Market segmentation (i.e. service according to ability to pay)</i>	<i>Need as basis for services</i>
Accessability	<i>Purchase capability, exclusivity</i>	<i>Equality of access</i>
Core values	<i>Individual choice</i>	<i>Liberty, equality, commonality</i>
Provision	<i>Private goods-customer-driven demand for services</i>	<i>Public goods – need driven services</i>
Alocative processes	<i>Market mechanism (e.g. contract, litigation)</i>	<i>Democratic and administrative processes</i>
Outcomes	• <i>Desegregation of public into</i>	

1	2	3
	• collection of public customers • Commercialization of public sphere • Commodification of products, services, values and culture • Propagation of 'political patronage' for private interests • Promotion of 'personal democracy' according to personal wealth - Corporate governance	• Citizen participation in political processes • Publicly deliberated and negotiated societal values • Caring communities • Social welfare infrastructure (i.e. protection of political, economic and social rights) • Democratic governance (i.e. processes, organs) • Public emancipation
Entity	Profit maximising	Public will
Utility	Differentiated good	Common good

Kakabadse, et . al (Wasistiono & Polyando, 2017: 492)

Masing-masing paradigma telah memberikan doktrin atau nasihat yang berbeda-beda dalam rangka membangun birokrasi. Perbedaan doktrin ini sebenarnya dipengaruhi oleh perbedaan konteks dan tipe sektor atau bidang yang ditangani. Karena itu, pemaksaan penerapan satu paradigma yang sama untuk semua jenis bidang kehidupan publik, jelas akan sangat kontraproduktif.

Dalam bidang ekonomi, pemerintah harus berjiwa *entrepreneurial*, inovatif, dan kreatif agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penerapan NPM nampak lebih tepat. Selanjutnya dalam

mempromosikan demokrasi dan pemerataan, pemerintah harus mengikutsertakan masyarakat sebagai warga negara yang berkepentingan, dan memperhatikan nilai-nilai mereka. Dalam konteks ini, penerapan NPS akan lebih efektif.

2.4.3. *Dynamic Governance*

Dalam penelitian “Membangun Kewirausahaan Pemuda Melalui Nilai-Nilai Kearifan Lokal”, peneliti yang menitik beratkan pada kekuatan budaya yaitu kearifan lokal ingin mengambil seluruh kebaikan dalam paradigma NPM untuk membangun kinerja pemerintah dalam melayani masyarakatnya dengan hasil yang efektif, sedangkan keterlibatan masyarakat atau pemuda sebagai warga negara (*Citizen*) peneliti berfikir bahwa prinsip-prinsip dalam paradigma NPS akan mampu menggerakkan pemberdayaan yang akan berhasil dengan baik. Namun rasanya itu semua tidaklah cukup mengingat perubahan di era globalisasi ini terlalu cepat dan dinamis, selain itu potensi kearifan lokal menjadi pendorong utama dalam penelitian ini. Untuk hal tersebut peneliti dalam penelitian menggunakan teori yang mengedepankan peran penting, pemerintah, masyarakat yang memiliki kemampuan dan budaya yaitu teori *Dynamic Governance*. Menurut Kasim (2015 : 14) Good Governance di Indonesia baru mengenal transparansi dan akuntabilitas, sementara di Singapura telah melangkah ke *Dynamic Governance* yang kini menjadi acuan banyak negara maju dan berkembang. Reformasi administrasi yang ideal adalah reformasi yang mengikutsertakan semua Stakeholders, yaitu pemerintah/ sektor publik, sektor bisnis dan masyarakat madani (*Civil Society*).

Governance telah lama kita kenal dalam menunjuk hubungan antara pemerintah/ negara dengan warga negaranya sehingga memungkinkan berbagai

kebijakan dan program dapat dirumuskan, diimplementasikan dan dievaluasi.

Konsep *Dynamic Governance* sendiri merupakan penentuan cara mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan jangka panjang dari suatu bangsa maka pada negara demokratis cara yang dirtempuh adalah melibatkan semua pemangku kepentingan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan, penetapan institusi serta pola hubungan antara pemangku kepentingan. Terkait perubahan yang sangat dinamis ini esensi dasar dari *Dynamic Governance* menurut Boon dan Chen (2007) adalah :

1. Budaya organisasi pemerintah, meliputi :

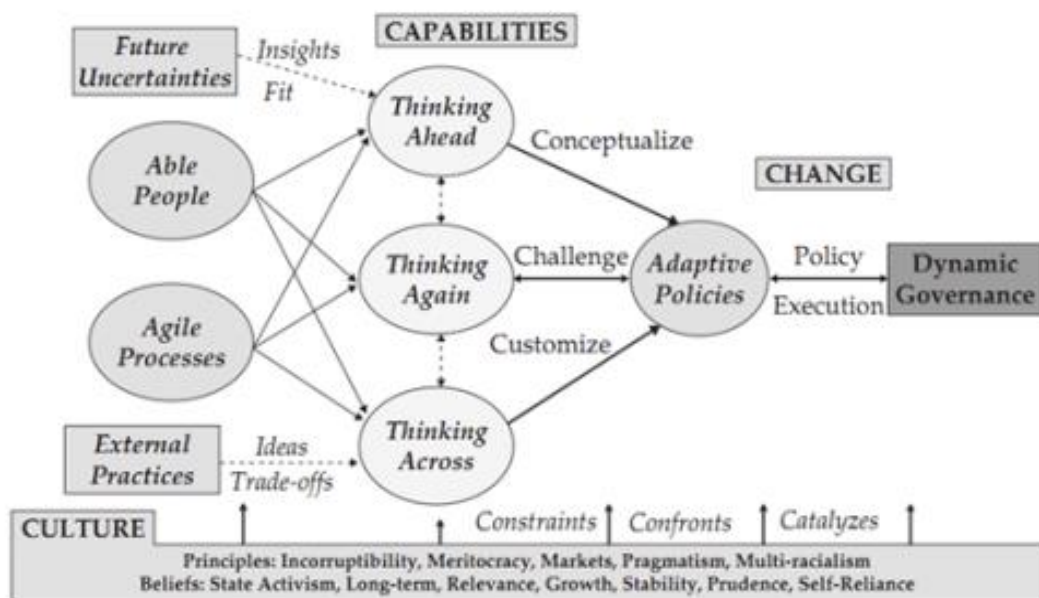
- a. Integritas (*Integrity*), sehingga tidak terjadi suap dan korupsi (*incorruptibility*).
- b. *Meritocracy* yaitu berdasarkan bakat dan kemampuan atau prestasi
- c. Orientasi pasar yang berkeadilan
- d. *Pragmatisme* yaitu mudah menyesuaikan dan lebih berorientasi pada pencapaian tujuan negara daripada berkuat pada soal *ideology*.
- e. Multi *Racialism* atau multi etnik dan kepercayaan termasuk juga dalam budaya adalah aktifitas negara (*state activism*), tujuan dan rencana jangka panjang (*Long term*), kebijakan sesuai masyarakat (*relevance*), pertumbuhan (*Growth*), stabilitas (*Stability*), bujaksana (*prudence*) dan mandiri (*self reliance*)

2. Kemampuan dinamis yang meliputi :

- a. *Think ahead* (berfikir kedepan), kemampuan menganalisa kondisi di masa depan yang penuh dengan ketidakpastian dari lingkungan eksternal dengan melihat peluang-peluang baru dan potensi ancaman yang ada. Kemampuan ini membuat sebuah institusi dapat memprediksikan perkembangan di masa depan. Hal ini akan berdampak pada pencapaian tujuan dari institusi pemerintah untuk mengatur negaranya.
- b. *Think again* (mengkaji ulang), kemampuan mengevaluasi dan mengidentifikasi perubahan kebijakan yang telah ditetapkan agar memperoleh hasil dan kualitas yang lebih baik. Sehingga institusi dapat mengemukakan permasalahan dan isu yang dihadapi, dan melihat bagaimana cara untuk

meningkatkan performa institusi tersebut. Hal ini membutuhkan efisiensi dan efektifitas kebijakan yang telah dibuat dan juga ketepatan dalam penjapaian tujuan dan penetapan strategi.

- c. *Think across* (belajar dari pengalaman negara atau organisasi lain), kemampuan melintasi batas-batas tradisional untuk 'berpikir diluar batas', juga untuk 'belajar dari orang lain' apabila terdapat ide-ide bagus yang dapat diadopsi dan diadaptasi sebagai inovasi baru dalam pembuatan kebijakan. Itu seperti meng-copy aturan dan kegiatan/praktek yang telah berhasil diterapkan di suatu tempat. Hal ini mengizinkan transfer pengetahuan antar negara dengan mengadopsi program dari suatu negara dan disematkan kedalam institusi lokal dan lingkungan kebijakan. Selain itu, kita harus mengerti 'bagaimana menerapkannya, bagaimana itu bekerja dengan baik atau mengapa itu tidak bekerja dengan baik' dan bagaimana kita menerapkannya dengan sudut pandang yang berbeda dari ide dasarnya.



Gambar 2.6. Framework For Dynamic System, Boon, Chen (2007 :13)

Menurut Kasim (2015 : 9), bangsa Indonesia masih belum bisa keluar dari lingkaran keterpurukan, korupsi, pelayanan publik yang belum memuaskan dikarenakan :

- a. Budaya birokrasi menghambat kemajuan seperti banyaknya nilai (*value*), keyakinan (*beliefs*), dan norma budaya yang kurang kondusif bagi pembangunan. Misalnya menurunnya nilai kejujuran, kurangnya meritokrasi (*the best of talent*), perilaku yang sangat *rule driven* daripada *mission driven*, kurang menghargai efisiensi, merosotnya nilai nasionalisme, dan meningkatnya *particularistic* (orientasi sukuisme, fanatisme agama dan perkoncoan) dan masih banyaknya pola pikir linier dan mempertahankan *status quo* dari pada pola pikir dinamis dan menginginkan perubahan menyeluruh.
- b. Administrasi negara yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan yang berbelit-belit, *top-down approach* tanpa adanya evaluasi program dan umpan balik. Pemimpin lebih menyukai laporan pelaksanaan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang dibuat instansi setempat dari pada evaluasi kinerja oleh penyandang kepentingan.

Bong (dalam Kasim, 2017: 33), Merumuskan konsep pemikiran yang diberi nama *Dynamic Governance* sebagai pelengkap kunci keberhasilan pembangunan di Singapura bukanlah resep tunggal bagi negara sebesar Indonesia, namun *Dynamic Governance* sangat mungkin diterapkan di tingkat kabupaten, Kota dan Provinsi di Indonesia.

2.5. Kearifan Lokal Memperkuat Pemuda Wirausaha

Bagi analisis kulturil, gagasan-gagasan, konsepsi-konsepsi, dan nilai-nilai memuat paham kebudayaan. Kebudayaan dianggap membentuk persepsi, merupakan pedoman bertindak serta interpretasi atas tindakan itu. Berkaitan dengan kebudayaan kita berfikir guna memahami hidup dan karena itu mampu menempatkan diri di suatu tempat dengan struktur logis yang penuh makna. Berbudaya berarti meninggalkan chaos dan menciptakan keteraturan, ini merupakan ciri manusia paling istimewa (Greertz, 1973). Selanjutnya disampaikan Mulder (1983) gaya hidup orang Jawa amat ritual, memiliki rasa aman karena waktu telah dihentikan dengan ditata melalui koordinat-koordinatnya (sesuai situasi dan kondisi), penafsiran simbol-simbol dan

pertanda-pertanda dan adanya lotre yang dapat diramalkan dan terjaminnya nujum-nujum yang kesemuanya itu menunjukkan bahwa orang Jawa, menganggap waktu mengalir dari kondisi yang sudah pasti ke kondisi pasti lainnya. Sengingga pada hakekatnya tidak ada kondisi yan baru, maksudnya adalah kemajuan bergerak secara melingkar dari satu kondisi yang tak terhindari ke kondisi berikutnya dan kondisi yang sekarang hampir tidak berarti bagi tahapan niscaya berikutnya.

Lebih lanjut Mulder (1983) menyampaikan bahwa diantara ciri-ciri khas Jawa, salah satu yang menarik bahwa orang Jawa teramat sadar tentang apa arti kebudayaan bagi kehidupan sosial. Pengertian *dhurung njawani* (belum Jawa), belum berbudaya. Pada dasarnya manusia memiliki keterbatasan yang harus dihadapi dalam mempercepat proses terwujudnya sosok manusia seutuhnya. Pendekatan sosial budaya merupakan konsep manajemen budaya sesuai yang disampaikan Ndraha (2005) menejeman budaya bertolak atas dua anggapan dasar yaitu : (1). Budaya adalah kolektif mental program sehingga budaya dapat diprogram dan dikelola, (2) Nilai yang dapat berubah, sehingga budayapun dapat diubah. Lebih lanjut disampaikan Ndraha pendekatan manajemen budaya memiliki enam bentuk yaitu : pendekatan budaya, pendekatan multibudaya, pendekatan lintas budaya, pendekatan Hampden-Turnerian, pendekatan atlit bisnis dan pendekatan makro-mikro, dengan terminologi ini maka pembangunan adalah perubahan budaya, perubahan budaya adalah perubahan sistem nilai yang menentukan proses.

Menurut ilmu antropologi kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dengan demikian hampir seluruh

tindakan manusia adalah kebudayaan. Dalam perkembangannya beberapa pendapat ahli sosiologi Talcott Parsons, A.L Kroeber, JJ. Honigmann membedakan kebudayaan dalam tiga gejala yaitu : (1) *ideas* , (2) *activities* dan (3) *artifacts*. Sementara Koentjoroningrat (2009) tetap berpendirian bahwa kebudayaan ada tiga wujud yaitu : (1) Sebagai kelompok dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya, (2) sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, dan (3), sebagai benda-benda hasil karya manusia. Dalam *Categoris of Culture* (1954) yang kemudian disarikan oleh Koentjoroningrat maka ada tujuh unsur yang dapat disebut sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan yaitu : (1) Bahasa, (2) Sistem pengetahuan, (3) Organisasi sosial, (4). Sistem peralatan hidup, (5) Sistem mata pencaharian hidup, (6) Sistem religi dan (7). Kesenian.

Dan dalam perpektif partisipasi masyarakat, kebudayaan menurut Ralph Linton (terjemahan Firmansyah, 1984), membagi kebudayaan dalam empat hal yaitu, universal, alternative, specialtes dan individual peculiarities. Dalam pengertian universal kebudayaan menunjuk partisipasi masyarakat yang dapat dinikmati secara keseluruhan, dalam pandangan specialties, kebudayaan hanya dapat dinikmati oleh para anggota yang dapat pengakuan sosial di dalam masyarakat, sedangkan pada alternatif, kebudayaan merupakan unsur tertentu yang hanya dinikmati oleh orang tertentu dan menjadi asing jika ditentukan oleh masyarakat keseluruhan, dan dalam pengertian *individual peculiarities* adalah bahwa dalam suatu masyarakat selalu ada seorang individu yang pertama tampil ke depan melakukan *discovery*, *invention* berdasarkan keistimewaannya.

Menurut Sujadmoko, (1954), teori pembangunan wacana aksiologi menjadi aspek yang paling utama karena menentukan kearah pertumbuhan

ekonomi, dan kearah mana masyarakat secara keseluruhan dapat berkembang.

Dengan demikian masalah pembangunan ekonomi menjadi masalah kebudayaan. Seperti yang telah di tuliskan St Takdir Alisjahbana aspek atau sektor-sektor kebudayaan mencakup nilai solidaritas, agama, kesenian, kuasa yang mengandung unsur hukum militer, ilmu pengetahuan-teknologi (IPTEK) dan ekonomi. Dalam kebudayaan yang paling modern yang di tulis St. Alisjabana, adalah IPTEK dan Ekonomi. Dan menurut Marcuse (Damanhuri, 2014), nilai yang dominan dalam masyarakat modern adalah nilai budaya Tekno-Ekonomi dalam masyarakat sehingga mendangkalkan kualitas hidup manusia.

Menurut Suryana (2012), dalam disiplin antropologi istilah kearifan lokal (*local genius*) diartikan sebagai *cultural identity*, yaitu identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengelola kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Dalam hal ini unsur budaya daerah dianggap sangat potensial ssebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan dalam nilai-nilai kedaerahannya (tradisi, hukum, adat, dan budayanya). Adapun ciri-ciri sebagai *local genius* adalah :

1. Mampu bertahan terhadap budaya luar.
2. Memiliki kemampuan untuk mengakomodir unsur-unsur budaya luar
3. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli.
4. Mempunyai kemampuan mengendalikan
5. Mampu memberikan arah pada perkembangan budaya

Lebih lanjut disampaikan Suryana, secara konseptual, kearifan lokal adalah keunggulan lokal yang merupakan kebijakan manusia yang bersandarkan pada filosofi, nilai dan etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga dalam masyarakat. Dengan demikian kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan

benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga.

Dalam pemaknaan kearifan lokal terdapat empat ciri utama yaitu :

1. Kearifan lokal (*local genius*) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah
2. Kearifan lokal adalah perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada
3. Kearifan lokal berbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas
4. Kearifan lokal merupakan produk budaya masalalu yang patut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap universal.

Kearifan lokal merupakan salah satu produk kebudayaan, kearifan lokal lahir karena kebutuhan akan nilai, norma dan aturan yang menjadi model untuk melakukan suatu tindakan (Mufid, 2010). Kearifan lokal juga dapat didefinisikan sebagai kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup (*way of life*) yang mengakomodasi kebijakan (*wisdom*) dan kearifan hidup. Di Indonesia kearifan lokal itu tidak hanya dikenal atau berlaku secara lokal pada budaya etnik tertentu melainkan dapat bersifat lintas budaya atau etnis sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional.

Kearifan lokal dalam pandangan Kartawinata (2011) adalah perwujudan tradisi berupa aktivitas disekitar daur kehidupan, lingkungan alam, dan lingkungan sosial yang kemudian diinterpretasikan sebagai pengetahuan lokal atau juga disebut kearifan lokal. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam pengertian kebahasaan kearifan lokal, berarti kearifan setempat (*local wisdom*) yang dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai yang tertanam dan diikuti oleh masyarakat. Dalam konsep antropologi kearifan lokal dikenal sebagai pengetahuan setempat (*indigenous or local knowledge*), atau kecerdasan setempat (*local genius*) yang menjadi dasar identitas kebudayaan (*cultural identity*). Kearifan lokal merupakan perwujudan dari

daya tahan dan daya tumbuh yang memanifestasi melalui pandangan hidup, pengetahuan, dan pelbagai strategi kehidupan yang berupa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk menjawab masalah pemenuhan kebutuhan hidupnya, sekaligus memelihara budayanya.

Kearifan lokal merupakan fenomena empirik tentang sifat, watak, tabiat yang diungkapkan dalam pola pikir, pola tindakan, dan perbuatan individu atau kelompok sosial. Menurut Ndraha (1997:45) merincikan fungsi-fungsi budaya atau kearifan lokal sebagai berikut:

- 1) Identitas dan citra suatu masyarakat. Identitas ini terbentuk oleh berbagai faktor seperti sejarah, kondisi dan sisi geografis, sistem sosial politik, ekonomi dan perubahan nilai-nilai masyarakat
- 2) Pengikat suatu masyarakat,
- 3) Sumber inspirasi, kebanggaan dan sumber daya,
- 4) Kekuatan penggerak, karena budaya terbentuk melalui proses belajar maka budaya bersifat dinamis,
- 5) Pola perilaku karena budaya berisi norma yang menggariskan batas-batas toleransi sosial,
- 6) Warisan,
- 7) Formalisasi,
- 8) Mekanisme adaptasi terhadap perubahan
- 9) Proses yang menjadikan bangsa kongruen dengan negara sehingga terbentuk *nation state*.

Selanjutnya menurut Effendy (2010:70) fungsi kearifan lokal dalam otonomi diharapkan pada dua hal, yaitu budaya lokal yang diperintah dan ke dua budaya lokal yang memerintah (birokrasi). Budaya lokal yang diperintah memiliki fungsi antara lain ; (1). memberikan warna dan nuansa nilai yang termuat dalam program-program pemerintah daerah. (2). menjadi kekuatan dan potensi dalam menjaga kesatuan dan persatuan dan (3). memperkuat proses terbentuknya jati diri masyarakat, bangsa bahkan *nation state*. Sedangkan budaya lokal yang memerintah (pemerintah) dalam hal ini adalah birokrasi memiliki fungsi antara lain : (1). memberi jiwa, semangat dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam visi, misi

dan strategi pembangunan, (2). membuat program yang sejalan dengan harkat, martabat dan orientasi kehidupan masyarakat, melaksanakan program pembangunan dan memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan bagi masyarakat.

Dalam lingkungan budaya Jawa, seperti di Yogyakarta dan Surakarta, sudah lama nampak gejala-gejala ketidakpercayaan pada rasionalitas. Kadang-kadang ada semacam kesadaran palsu dikalangan penggemar kepercayaan atau kebatinan. Keterasingan mereka telah membuat mereka menebak-nebak sendiri secara salah. Kesadaran palsu ini ditunjukkan dengan seolah-olah mereka menghadapi golongan agama yang ortodoks, padahal kebingungan mereka dalam menghadapi arus modernisasi. Hal ini terlihat dengan hilangnya rukun sebagai akibat dari rasionalisasi, yang jelas budaya Jawa terancam untuk tenggelam dalam proses modernisasi, sekalipun lapisan luarnya justru makin digemari, untuk itu diperlukan langkah –langkah sebagai berikut : (1). Dalam situasi sosial, rasional harus disertai dengan etika, (2). Dalam bidang ekonomi, pendekatan positivisme dan mekanisme harus diganti dengan pendekatan humanisme dan (3). Dalam nilai budaya, nilai-nilai agama harus didorong kembali. Selanjutnya keterasingan harus diatasi dengan cara kolektif dan individual. (Kuntowijoyo, 2006 : 129)

Sementara Durkheim (Suryono, 2001) dalam pandangannya menyatakan bahwa paradigma sosial bertumpu pada pandangan yang memberikan arti penting pranatan dan struktur sosial sebagai dasar realitas kehidupan sosial. Pranatan dan struktur sosial merupakan kenyataan eksternal yang memiliki daya paksa, sehingga pranatan dan struktur sosial merupakan kunci dalam memahami dan mengerti tindakan seseorang atau sekelompok orang. Menurut paradigma ini

tindakan manusia tidak dapat dilakukan secara bebas karena ada fakta lain yang memiliki daya paksa terhadap tindakan manusia. Sedangkan dalam teori pilihan rasional (*rational choice theory*) yang berintikan bahwa (a). Manusia pada dasarnya melakukan tindakan atas dasar pertimbangan efisiensi, (b). Manusia pada dasarnya menonjolkan kepentingan pribadinya (*self interest*), (c). Manusia pada dasarnya selalu berusaha, untuk mencari dan mencoba mencapai tujuannya (*goal seeker*), (d). Manusia pada dasarnya selalu memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan meminimalkan resiko-resiko yang muncul (*maximizing gains and minimizing risk*). Sehingga manusia akan memperoleh keuntungan yang selalu diupayakan secara maksimal yaitu : perolehan kekuasaan (*gain of power*), perolehan ekonomi (*gain of economy*) dan perolehan harga diri (*gain of prestise*), dan varian dari teori pilihan rasional adalah teori permainan sosial (*social game of theory*) yang menerangkan seringkali terjadi beberapa orang secara simultan menyesuaikan diri satu sama yang lain secara rasional.

Kearifan lokal pada masyarakat Jawa selalu menyatakan bahwa mereka adalah keturunan leluhur Jawa. Jawa adalah orang yang bebadra (mendirikan) tanah Jawa. Orang Jawa meyakini dirinya adalah keturunan dari Nabi Adam dan ibu Hawa, hanya saja perantara nabi sampai ke dunia Jawa masih ada beberapa pendapat antara lain yaitu : (1). Melalui orang Timur Tengah yang mengembara sampai ke Jawa, (2). Melalui para dewa dari wilayah Hindustan, (3). Dari seorang pengembara yang mengelilingi dunia (seperti Marcopolo). Ketiga asal –usul tersebut sama logis dan menduduki peranan penting dalam kehidupan orang Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa ada nenek moyang Jawa pun terjadi sinkretis antara Hindu Jawa dan Islam Jawa yang amat halus. (Endraswara , 2016 : 2)

Dalam memandang kehidupan orang Jawa menurut Endarswara (2016 : 7) memiliki falsafah dalam kehidupan agar hidupnya tidak salah arah. Alam semesta diciptakan Tuhan, berkaitan dengan hidup manusia, terutama unsur-unsur kehidupan. Agar manusia selamat, ia harus memahami alam semesta sebagai simbol kekuatan Tuhan. Alam hidup manusia, oleh Tuhan diberikan arah (kiblat) agar orang Jawa tidak salah arah. Arah tersebut dinamakan *keblat papat lima panser*, artinya empat penjuru dan satu di tengah. Kiblat alam semesta diawali dari Timur (*wetan*), artinya kawitan (mula). Arah timur adalah kiblat, sebagai lambang saudara manusia yaitu disebut kawah. Selanjutnya menyusul selatan (lambang darah), barat (lambang puser/plasenta), dan utara (lambang adhi ari-ari). Arah kiblat tersebut dalam hidup orang Jawa senantiasa disatukan atau diseimbangkan. Jika tidak, di antara saudara manusia akan menanggung hidupnya. Sebaliknya, kalau tercapai keseimbangan dalam berteman dengan empat saudara tadi keempatnya mau membantu (*ngewang-ewangi*) panser.

Karakteristik orang Jawa sangat suka melakukan *othak-atkik mathuk* hal ini merupakan pola pikir genius dari masyarakat Jawa, namun dalam perkembangannya karena prinsip ini orang Jawa sering dilecehkan karena tidak adanya tanggapan positif, sehingga sering dikatakan bahwa pola pikir orang Jawa itu *Kethul* (tumpul), tidak logis dan tidak sistematis. Namun demikian tradisi *othak-atkik mathuk* juga dapat ditafsirkan aksara Jawa yaitu *Ha-na-ca-ca-ka*, *Ha-na* artinya Nyata ada, mengiaskan ilmu kasunyatan. *Ca-ra-ka*, mengandung aksara yang menyiratkan kata cipta, rasa dan karsa, yaitu salah satu unsur kelengkapan hidup manusia. *Da-ta-sa-wa-la* : mengiaskan dzat yang datasawala, yakni dzat yang tidak pernah salah dan tidak pernah dapat salah, yaitu dzat Tuhan. Tuhan memberi manusia satu sifat Nya, yaitu sifat baik dan buruk, kedua

sifat harus sama kuatnya. Pa-dha-ja-nya : sama jayanya, sedangkan Ma-ga-ba-tha-nga : Ma itu menyiratkan kata sukma, dan ga menyiratkan kata angga (badan). Maksudnya jika sukma masih bersatu dengan badan, manusia itu hidup, tetapi jika sukma telah meninggalkan badan, manusia itu mati tinggal ba-tha-nga yaitu bangkai, sukma kembali kepada Tuhan.

Tradisi *othak-atkik mathuk* ini dapat ditafsirkan ke arah romantika budaya Jawa (Endraswara 2002) *falsafah seks* yang tersamar . Dua puluh huruf Jawa itu diartikan ada utusan yaitu manusia laki-laki dan perempuan, keduanya tanpa bisa menghindari dari panah asmara, masing-masing bebas dan keduanya mencari kenikmatan dunia dalam ulah raga memadu kasih, keduanya unggul, karena telah tercapai keinginannya, keduanya tidak berdaya tetapi penuh kemenangan.

Pola pikir dalam *othak-atkik mathuk* merupakan pola pikir yang genius mestinya tidak ditinggalkan, kecerdasan nalar dan rasa yang disimbulkan melalui aksara Jawa tersebut diatas memberikan sumbangan penting dalam semangat membangun kewirausahaan pemuda melalui nilai-nilai kearifan lokal, hal ini karena *othak-atkik mathuk* memberikan analisis spesifik tentang karakteristik orang Jawa yang sangat pelik juga lebih mewakili ranah spiritual Jawa.

Lebih lanjut disampaikan Endraswara, selain *othak-atkik mathuk* orang Jawa juga percaya pada mitos *angka ganjil* yang mewarnai kehidupan orang Jawa, yang memiliki kekhasan perhitungan yang telah mendarah daging dalam kehidupannya. Angka satu, tiga, lima, tujuh dan sembilan sebagai refleksi budaya sakral, masing –masing angka keramat itu memberikan implikasi yang sangat luas. Misalkan saja bilangan satu dikaitkan dengan Kang Maha Tunggal (Tuhan), manunggal (*nyawiji*) yaitu penyatuan dua unsur / dzat dan seterusnya,

angka tiga juga dihubungkan dengan tradisi : *nelung dina*, *triloka*, *tripurusa*, *trikawula busana*, dan seterusnya, bilangan lima terimplikasi pada konsep *pandawa lima*, *pancadarma*, *lima pancer*. Angka tujuh terkait dengan *mitung dina*, *bumi-langit sap pitu*, *pitung gajah lan pitung gunung*, *turun pitu*, bilangan sembilan terkait dengan *babahawan*, *hawa sanga*.

Dalam kearifan lokal pada masyarakat Jawa juga terdapatnya budaya *semu*, dimana penyampaian sikap dan perilaku selalu tersamar hal ini merupakan kehalusan budi. Dalam hal ini orang Jawa memang tidak vulgar, kendati memang harus bertindak kasar. Dengan demikian kondisi sosial diharapkan tetap terjaga. Keretakan sosial akan terjaga melalui budaya *semu*. Sehingga orang Jawa cenderung menjalankan hidupnya untuk membahagakan sesama. Dalam budaya *semu* ini yang lebih bermain adalah rasa, rasa dari orang Jawa selalu memegang ungkapan *dhupak bujang*, *esem mantri*, *semu bupati dan sasmita narendra*, artinya dalam menyampaikan segala sesuatu, orang Jawa selalu memberikan perhatian siapa yang dituju, segala hal tidak dapat disamaratakan, melainkan harus dicermati. Jika hal ini digunakan sebagai semangat dalam kewirausahaan akan sangat baik karena seorang wirausaha mestinya harus cermat, teliti dan hati-hati.

Karakter orang Jawa dalam memegang prinsip *cocog juga* dapat dikembangkan dalam wirausaha melalui kearifan lokal. *Cocog* artinya tepat dan sesuai dengan keadaan. Prinsip *cocog* ini merupakan *ngelmu titen* artinya ilmu yang didasarkan pada kebiasaan yang berulang-ulang, dicatat, direnungkan dan diamalkan. Orang Jawa menggunakan pegangan ini sebagai kompas hidup yang mereka bangun dengan menggunakan pengalaman nyata. Pengalaman inilah yang dinamakan prinsip *cocog* yang sarat *ngelmu titen*.

Karakteristik orang Jawa diatas senada dengan apa yang disampaikan oleh Swasono (2016) dalam prespektif ekonomi yang bertolak belakang antara masyarakat barat dan masyarakat timur. Hal ini terlihat pada pola pikir, nalar, dan berbagai nilai budaya masyarakat Barat berbeda dengan masyarakat Timur. Secara dikotomis, ekonomi barat bersifat kompetitif, berujung semata-mata pada upaya peningkatan daya saing, dipimpin oleh paham liberalisme dan individualisme, yang mengutamakan kepentingan perorangan (*self interest*), sedangkan ekonomi timur atau *oriental* bersifat kooperatif, berujung pada upaya peningkatan daya kerja sama, melekat (*inherent*) dengan paham kebersamaan (*mutualism*) dan paham kekeluargaan (*brotherhood*) yang mengutamakan kepentingan bersama (*mutual interest*).

Dalam etika Jawa memaknai sikap hidup terlihat dalam proses pengambilan keputusan secara musyawarah, kemandirian yang hierarkis dan terkoordinasi dalam tercapainya kemufakatan atau keputusan yang bulat, kesatuan yang harmonis dalam kelompok terwujud cita-cita dan praktek gotong royong, yaitu saling membantu antara pihak-pihak yang sederajat maupun yang tidak dan juga dalam mewujudkan kerukunan. (Mulder, 1983:112).

Dalam kongres BKKI (Badan Kongres Kebatinan Seluruh Indonesia) tahun 1955 dirumuskan etika kebatinan Jawa yaitu *Sepi ing pamrih, rame ing gawe, Memayu hayuning bawono* yang memiliki makna, (Mulder 1983) :

- 1) *Sepi ing pamrih*, merupakan satu usaha sadar untuk melawan hawa nafsu dalam rangka usaha mencapai ketenangan hati dan kebijaksanaan. Bila manusia berjuang untuk memperbaiki kondisi duniawi merekapun meningkat, namun tujuan kebatinan tetaplah hubungan seseorang yang selaras dengan Tuhan terlepas dari ada tidaknya konsekwensi-konsekwensi duniawi.
- 2) *Rame ing gawe*, menafsirkan dengan setia menjalankan kewajiban di tempat tugasnya masing-masing, apakah sebagai petani, pelayan, atau sebagai pejabat bukan karena prakarsa atau tanggungjawab pribadi melainkan karena pasrah menerima tugas dan kewajiban itu,

menjalankan ditempat hidupnya dimana orang itu di lahirkan dan bertindak hukum karma, hukum Tuhan dan hukum manusia.

- 3) *Memayu hayuning bawano*, secara baik diterjemahkan oleh de Jong (dalam Mulder, 1983) sebagai Menghiasi Dunia, lebih lanjut diterjemahkan oleh Sosrosudigdo (dalam Mulder, 1983) “mengusahakan keselamatan pada dunia”. Dalam pengertian “usaha” itu dimasukkan, karena adanya penyesuaian terhadap pemikiran moderen mengenai kemajuan dan pembangunan, namun hal ini tidak sesuai dengan yang dimaksud kebatinan. Manusia baik adalah manusia yang sejalan dengan Tuhan dan tatanan masyarakat yang ditentukan oleh Tuhan.

Nilai- nilai agama, memiliki peran menentukan dalam mempengaruhi tingkah laku individu, jika nilai-nilai dalam masyarakat dapat di arahkan kepada sikap positif terhadap pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan dalam masyarakat dapat terlaksana. Peran penting nilai spiritualitas sebagai kemampuan transenden, yaitu kepekaan terhadap sesuatu yang goib, suci dan supranatural. Kemampuan spritualitas dapat dimiliki oleh orang yang mengaku tidak memiliki agama. Jadi sesungguhnya spiritualitas justru lekat dengan kemanusiaan, atau tepatnya dimiliki oleh seseorang yang sesuai dengan kadar kemanusiaannya. Fitrah manusia adalah *homo religious* dan *homo spriritual*, sebab manusia adalah sosok yang terbatas dan membutuhkan sesuatu yang transenden, goib dan diluar jangkauannya, serta pada dasarnya tercipta dalam cinta dan kebaikan, serta hanif (Said, 2016).

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa kearifan lokal Jawa dengan karakteristiknya yang unik mampu menjadi dasar yang kuat bagi pembangunan mental dan spiritual serta intelektual kaum muda dalam mengembangkan kewirausahaan. Di sinilah kearifan lokal menjadi daya lebih karena dia sudah tumbuh dari sejak bangsa itu berdiri dan dituturkan secara turun temurun sehingga merupakan kekuatan dari dalam. Sedangkan kewirausahaan tentu saja tidak akan terlepas dari persoalan ekonomi, ada beberapa pendapat tentang

teori pertumbuhan ekonomi seperti yang telah diintrodusir oleh Rostow dalam bukunya *The Stages Of Economics Growth*, bahwa suatu negara dalam proses pembangunan ekonomi akan melalui lima tahapan yaitu : (1) masyarakat tradisional, suatu tradisi masyarakat yang hanya sedikit terjadi perubahan sosial, (2) prakondisi tinggal landas, suatu tahap yang ditandai dengan munculnya para usahawan, terjadi perluasan pasar, dan pembangunan industri, (3), tahap lepas landas, yaitu ditandai oleh pertumbuhan ekonomi, dan adanya upaya untuk mempertahankan ekonomi secara otonom dan berkelanjutan (*self sustained economics growth*) (4). tahap pematangan pertumbuhan, yaitu tahap pertumbuhan ekonomi sudah berlangsung secara otonom dan berkelanjutan, (5). tahap konsumsi massa sangat tinggi, yaitu ditandai dengan pesatnya perluasan kesempatan kerja, pendapatan nasional, permintaan konsumen meningkat dan terjadinya pembentukan pasar domestik yang tangguh.

Sedangkan menurut Hughes (1992) tentang industrialisasi di negara Asia Timur (Taiwan, Korea Selatan dan Jepang) pemerintah memiliki kapasitas yang baik guna melaksanakan intervensi selektif dalam pembangunan yaitu pada : (1). Instrumen kebijakan yang ampuh, (2). Adanya bentuk organisasi pemerintah tertentu, yang berkaitan dengan lembaga ekonomi dalam masyarakat lainnya , (3) adanya prestasi ekonomi yang unggul khususnya dalam hal restrukturisasi ekonomi pada arah struktur produksi berteknologi tinggi. Dan untuk melaksanakan hal tersebut maka pemerintah harus mampu merumuskan kebijakan tanpa adanya intervensi dari pihak lain yang akan mengubah perilaku kelompok dalam masyarakat.

Senada dengan pendapat ini adalah pendapat dari Kwon (2007) dimana suatu pembangunan akan dapat berhasil dengan baik khususnya di Asia Timur

apabila pembangunan yang dilaksanakan menggunakan pendekatan budaya.

Faktor dominan dalam tulisan Kwon ini adalah adanya keberhasilan pembangunan ekonomi dengan faktor memahami ajaran *confucianism* yang memberikan ajaran bagi kesuksesan ekonomi Asia Timur yaitu (1) memungkinkan negara-negara di Asia Timur untuk menciptakan dan menerapkan kapitalisme yang berbeda dari Barat, kapitalisme Asia Timur ini lebih pada *less adversarial*, *less individualistic* dan *less self –interested*, (2)

Orang-orang di Asia Timur memiliki etika ekonomi yang sama sehingga mendorong untuk kompetitif, kerja keras, pentingnya pendidikan, menghormati otoritas sehingga dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk suatu kesuksesan. Peran model manusia dan model fisik dalam pembangunan ekonomi muncul adanya kesadaran baru bahwa hubungan sosial (*social relationship*) dalam bentuk jaringan kerja (*networks*) memberikan kontribusi penting dalam keberhasilan dan berkelanjutannya ekonomi. Hubungan sosial dalam jaringan kerja, merupakan unsur utama modal Sosial.

Thomas, et al, (2001) dalam buku yang berjudul *The Quality of Growth* menegaskan bahwa terdapat unsur lain yang dapat memainkan peran positif dalam mendorong pertumbuhan kualitas, yaitu kuatnya institusi informal di suatu negara yang di sebut modal sosial. Pembangunan bukan saja menjadi masalah dalam penyediaan modal dan investasi (aspek ekonomi), namun juga menekankan aspek-aspek psikologi individu, sebagai upaya dalam membentuk manusia wirausaha melalui pendidikan individual masa anak-anak, terutama dalam lingkungan keluarga dengan kata lain memanipulasi mental anak didik sejak dini.

Peran lingkungan akan memberikan pengaruh baik dalam membentuk manusia modern yang bisa membangun, disini bukan memanipulasi mental tetapi menggunakan instrumen pengubah dengan pengalaman kerja yang secara nyata di alami oleh pelaku yang mengubah sikap dan tingkah lakunya.

Pendidikan dianggap cara yang paling efektif untuk membentuk manusia moderen. Jika pembangunan pada dasarnya adalah kegiatan nasional yang dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi maka yang harus diwujudkan adalah GDP (*Gross Domestic Product*) yang dilihat dari teori ekonomi tradisional bahwa dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tidak perlu mempersoalkan siapa pemilik modal, akan tetapi siapa yang sesungguhnya melakukan kegiatan produksi, sehingga modal itu berfungsi menciptakan produk, lapangan kerja bagi penduduk dan memberikan pendapatan kepada masyarakat. Di sini peran penting pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi dan mesti membedakan antara GDP dan GNP (*Gross National Product*). GNP berorientasi pada siapa yang menerima hasil produksi yaitu berupa keuntungan. Jika seluruh modal berasal dari pemodal asing maka pemodal asinglah yang diuntungkan.

Beberapa pendapat tentang budaya dalam pengaruhnya terhadap tatanan ekonomi dalam suatu masyarakat, baik itu budaya dalam tatanan spiritual, ataupun ideologi suatu masyarakat yang memiliki dampak pada tatanan kehidupan selanjutnya seperti yang disampaikan Kunio dalam bukunya *Asia Percapita Why National Income Differ in East Asia* (1999) menyatakan bahwa budaya sangat mempengaruhi kinerja ekonomi nasional, dimana budaya, institusi dan pendapatan bukan variabel otonom akan tetapi budaya secara luas memberikan cara pikir tentang masyarakat dan peran didalamnya akan mempengaruhi institusi. Selanjutnya pandangan Webber dalam bukunya

Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (1939), adanya pengaruh agama dalam aktifitas administrasi suatu perusahaan, dimana motivasi perilaku ekonomi individu akan mendorong suatu keberhasilan dalam hal materi. Hal ini dikarenakan adanya keinginan atau hasrat alamiah dari setiap manusia untuk mendapatkan kekayaan materi. Selain itu dalam persepsi Webber ini juga adanya unsur-unsur dari nilai-nilai doktrinal keagamaan yang kemudian mendorong setiap individu untuk berfikir sosiologis yaitu mendorong tindakan individu dan nilai-nilai spiritual agama menjadi instrumen yang kuat dalam proses perkembangan kapitalisme modern yang fenomenanya menonjol pada mobilisasi ekonomi masyarakat industri di negara barat.

Di Indonesia sendiri mencoba menghubungkan gerakan reformasi Islam, seperti Masyumi dan Muhammadiyah, seperti dalam gerakan Protestantism di Eropa, karena reformasi lahir dari para pedagang, dan kelas menengah di Kota. Etika para pendukung reformasi Islam rupa-rupanya mendukung perkembangan kapitalisme di lingkungan orang Indonesia. Menurut Greertz (dalam Kuntowijoyo 2006 :134), para pengusaha dari reformasi muslim mempunyai semangat *Entrepreneurship* seperti kaum Puritan pada permulaan kapitalisme. Lebih lanjut dalam bukunya Clifford Greertz yang mengkaji sistematis terhadap agama di Jawa dan varian-varianannya, abangan, santri dan priyayi telah menguraikan tentang priyayi yang memonopoli terhadap kesenian klasik dan populer, hal ini tidak diberikan pada varian lainnya yaitu abangan dan santri. Untuk abangan hanya disebutkan simbol-simbol berupa magis, mitologis dan ritual. Sedangkan untuk santri pembicaraan terutama berkisar pada organisasi sosial dari agama. Selanjutnya Kuntowijoyo (2006 : 68) mengupas kekurangan-kekurangan dari tulisan Greertz tersebut yaitu tentang hubungan antara agama dan seni dalam

sistem budaya Islam Jawa, sangat penting dipahami bahwa unsur estetis hadir dalam sistem keagamaan dan sebaliknya yaitu bagaimana agama hadir dalam kesenian Islam. Selanjutnya para santri di Jawa juga menciptakan simbol-simbol meskipun tidak semua simbol memiliki kadar makna yang sama. Dan rupanya telah terjadi semacam proses yang berlawanan arah dalam lingkungan budaya Islam yaitu satu pihak adanya usaha pemiskinan simbol yang dikerjakan oleh kaum puritan yang menghendaki agama bersih dari simbol yang dapat merusak agama dan dilain pihak mengkayakan atau menggandakan simbol.

Pengaruh Islam dalam pembentukan mantra dan jimat, rupanya menegaskan sisi lain dari sifat Islam di Jawa. Greetz (dalam Kuntowijoyo 2006 :70) mengemukakan bahwa Islam di Jawa itu bersifat elitis, esoterik dan estetis. maka tidak aneh jika sebenarnya ia juga populer, keduniawian dan utilitarian. Barangkali Greetz banyak berfikir tentang dunia Jawa yang penuh dunia mistik, tapi lupa bahwa budaya petani juga sering disebut sangat utilitarian. Selanjutnya menurut Read (Kuntowijoyo 2006: 70) menyatakan bahwa dorongan estetis itu inheren pada manusia dan masalah hubungan seni dengan agama terletak dalam pernyataan sejauh mana suatu agama mengembangkan atau menghambat. Meskipun demikian agama dan seni pada mulanya secara empiris mempunyai hubungan yang erat. Agama mempunyai unsur ritual, emosional, kepercayaan, dan rasionalisasi.

Sedangkan menurut Pelly dalam seminar Kebangsaan (2013), transformasi unsur-unsur budaya lokal ke dalam budaya nasional berjalan secara simultan. Perkembangan *information technology* telah memperlancar interaksi sosial, baik komunikasi bersama maupun melalui berbagai media cetak-elektronik, dan proses yang paling intensif melalui pendidikan nasional di

kalangan pemuda. Budaya sebagai sistem yang merupakan pedoman dalam konsep-konsep ideal kebudayaan memberikan motivasi kuat terhadap arah kehidupan warga masyarakatnya, hal ini disampaikan C. Kluckhohn (dalam Koentjaraningrat, (2009) yang memberikan analisa secara universal setiap variasi dalam sistem nilai budaya yang terdapat di dunia . Adapun kelima sistem nilai budaya tersebut adalah : (1). Masalah hakekat dari hidup manusia dimana dalam orientasi nilai budaya hidup itu buruk dan hidup itu baik maka tiap manusia wajib berikhtiar supaya hidup itu menjadi baik. (2). Masalah dari hakikat karya dimana orientasi nilai budayanya adalah karya itu untuk nafkah hidup, karya itu kedudukan, kehormatan dan sebagainya maka manusia hidup harus berkarya untuk menambah karya, (3). Masalah hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu dimana nilai orientasi budayanya adalah hidup manusia berorientasi pada masa kini dan berorientasi ke masa lalu untuk menjalani kehidupan pada masa depan, (4). Masalah hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya dimana nilai orientasi budayanya adalah manusia tertunduk pada alam yang dasyat dan manusia juga menjaga keselarasan dengan alam sehingga manusia harus mampu menguasai alam, (5). Masalah hakekat dari hubungan manusia dengan sesamanya, nilai orientasi budaya yang terkandung adalah manusia memiliki orientasi kolateral (horisontal) memiliki rasa ketergantungan kepada sesamanya (berjiwa gotong royong) dan orientasi vertikal yaitu rasa ketergantungan kepada tokoh –tokoh atau orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi sehingga individualisme yang menilai tinggi usaha atas kekuatan sendiri.

Pemuda dengan kemampuan otaknya sebagai manusia yang mampu membentuk gagasan-gagasan dari konsep-konsep akalnya, hal ini menyebabkan

pemuda mampu membayangkan dirinya sendiri lepas dari lingkungan dan alam sekitarnya. Kemampuan ini merupakan dasar dari kesadaran identitas diri dan kesadaran kepribadian dirinya. Depdiknas (2004) dalam upaya mempersiapkan, membangun dan memberdayakan pemuda agar mampu berperan serta sebagai pelaku-pelaku aktif dalam pembangunan Bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yaitu ketahanan budaya dan kepribadian nasional dikalangan pemuda yang semakin luntur, yang disebabkan cepatnya perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi, dan derasnya arus informasi globalisasi yang berdampak pada penetrasi budaya asing.

Saat ini pemuda ditantang untuk menaklukkan zaman yang sudah sangat global dan moderen yang disebut dengan globalisasi dan modernisasi. Masalah perekonomian dan pasar bebas menjadi tantangan terberat dalam globalisasi yaitu aspek daya saing pemuda. Pemuda baik langsung ataupun tidak langsung diuntut untuk mempunyai keterampilan baik bersifat keterampilan praktis maupun keterampilan yang menggunakan teknologi tinggi untuk bersaing dalam menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan jenis pekerjaan yang sedang dijalani. Globalisasi telah menyuburkan negara maju dari pada negara yang sedang berkembang, yang terasa sekali dampaknya pada hilangnya identitas kelokalan.

Derasnya arus globalisasi yang harus diterima, dan sejauhmana kearifan lokal mampu tumbuh dan berkembang di kalangan pemuda untuk menjadi bekal diri dalam bersikap dan berbuat terhadap setiap perubahan dan perkembangan yang ada. Pemuda sesungguhnya memiliki peranan strategis sebagai agen perubahan yang telah dibuktikan dalam sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga diharapkan pemuda dalam mengambil perannya

sebagai agen perubahan akan mampu menjadikan globalisasi sebagai peluang untuk memakmurkan daerah dengan tidak meninggalkan kearifan lokal yang telah dimiliki semenjak lahir sebagai identitas diri. Ada enam prinsip kearifan lokal yang disampaikan KGPAA Mangkunegoro (dalam Endaraswara, 2016:180), yang dapat dipegang oleh pemuda wirausaha yaitu :

- 1) *Nut Wiradat*, artinya mengikuti upaya dan usaha manusia dengan penuh tanggungjawab.
- 2) *Nyangkul sagawene*, artinya menjalankan tugas dengan sepenuh hati, tidak banyak menolak dan komentar. Kritis boleh asalkan benar, namun sikap setia justru lebih baik apalagi pekerjaan itu mulia. Sehingga di sini pemuda dalam menjalankan pekerjaannya harus wekel (rajin dan bersungguh-sungguh), dan tawakal (berserah diri kepada Tuhan).
- 3) *Mbiantu negoro sakadare*, artinya mau membantu kesejahteraan dan ketentraman masyarakat menurut kemampuannya. Bantuan diberikan dengan ikhlas dan tanpa pamrih.
- 4) *Ngowel ing kapitunan*, artinya lebih hati hati menjalankan pekerjaannya, tidak banyak tingkah yang akan merugikan masyarakat lainnya.
- 5) *Milu rumekso pakewuh*, artinya ikut menjaga dan mempertahankan negara dengan sepenuh hati.
- 6) *Murinani rusake praja*, artinya selalu mengetahui kesulitan masyarakat banyak. Tentunya dengan keinginan mencari jalan keluar

Dalam penelitian ini peneliti menekankan nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat di Kabupaten Bantul, tepatnya desa Wukirsari yang masyarakatnya mayoritas melakukan kegiatan diluar pertanian dengan memenuhi kebutuhan wisata akibat dari penetapan Desa Wisata Budaya. Nilai-nilai kultural inilah yang kemudian digali menggunakan kelebihan kelebihan paradigma NPM dan NPS yang kemudian dikonstruksikan menggunakan kerangka pikir *Dynamic Governance*. Dalam *Dynamic Governance* yang memahami perubahan yang selalu terjadi dan tidak tetap menyatakan bahwa hanya fondasi kultural yang akan mensukseskan kemajuan suatu bangsa. Kultur atau kearifan lokal yang memiliki seperangkat nilai, kepercayaan dan prinsip sebagai pegangan hidup bermasyarakat, yang akan mempengaruhi perilaku dan cermin model mental

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kultur atau kearifan lokal merupakan produk keberhasilan dimasa lalu yang kemudian ditanamkan dan menjadi acuan dalam berfikir dan selanjutnya menyatakan arah dalam penyusunan strategi dan kebijakan. Selanjutnya kearifan lokal menurut Kasim (2017: 36) dapat menjadi rambu-rambu dalam penyelenggaraan pemerintah meliputi :

1. Kearifan lokal pada akhirnya menjadi penentu dalam proses perumusan kebijakan dan agenda. Artinya segala hal yang menyangkut isu, kebijakan yang berseberangan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang dianut tidak akan diterima
2. Kearifan lokal akan berperan sebagai bahan pertimbangan dalam mengadopsi atau mengadaptasi sebuah kebijakan baru
3. Kearifan lokal menjadi sebuah katalisator dalam proses pengambilan keputusan

Meskipun kearifan lokal keberadaannya implisit, dan informal namun keberadaannya sangat signifikan dalam jiwa para pemimpin pemerintahan. Jika masyarakat Singapura memiliki Singapura Dream yaitu tujuan hidup 4C : *Condo Car, Children, Career* (apartemen, mobil, anak-anak, karir), maka masyarakat Jawa mengenal tiga konsep syarat hidup bangsawan (Priyayi) yang bermartabat, yaitu Garwo, Wisma, Turonggo dan Kulilo (Istri, Kuda tunggangan yang sekarang berarti mobil mewah, dan burung peliharaan yang diartikan sebagai kesenangan atau hobi kelas atas).

Kiranya kita perlu mengidentifikasi dan sekaligus mengkampanyekan nilai-nilai kearifan lokal yang positif bangsa kita. Diantara nilai kearifan lokal yang positif itu adalah *budaya kolaboratif*, sebab selama ini masalah terbesar bangsa kita adalah *ego-sektoral* yang menjadi penghambat bagi kerja sama, koordinasi,

dan komunikasi lintas sektoral. Ketika masalah bangsa semakin kompleks dan dinamis, nyaris tidak ada persoalan yang bisa diselesaikan oleh hanya satu unit organisasi saja. Melalui semangat dan kesadaran pentingnya budaya kolaboratif, akan banyak hal yang dapat dicari solusinya (Firmanzah, 2016). Kearifan lokal di Jawa bukan tidak mungkin akan mampu menggerakkan seluruh kebijakan dalam pembangunan, dalam konsep *Dynamic Governance* yang mengajarkan tentang *thinking ahead*, *thinking again* dan *thinking across* dalam ajaran Jawa dapat dipahami dari filosofi *Mulat Sarira Hangroso Wani dan Bisaa Rumongso* yang berarti bertindak dan mawasdiri serta mampu memahami situasi serta dinamika yang terjadi.

2.6. Kerangka Pemikiran

Membangun kewirausahaan pemuda sebagai solusi dengan asumsi dasar bahwa setiap manusia, khususnya pemuda, memiliki kemampuan, potensi dan semangat serta daya untuk mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Modal sosial pemuda menunjukkan kemampuan yang dimilikinya melalui pendidikan, pelatihan atau pengalaman dalam bentuk keterampilan yang perlu untuk melakukan kegiatan tertentu. Untuk berkembang mengatasi batas-batas yang dibebankan oleh keluarga dan lingkungan sosialnya. Untuk bangkit mencari jalan keluar (*way out*) dari belenggu sosial yang menjeratnya. Atas dasar asumsi ini maka pemberdayaan didefinisikan sebagai upaya untuk membangun daya dan potensi yang dimiliki, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki pemuda untuk mengembangkan perannya dalam pembangunan.

Selanjutnya lingkungan akan mendorong dan memperkuat potensi yang ada pada diri pemuda dengan memberikan dukungan akses dalam meraih peluang hal ini dibutuhkan hubungan yang baik dalam domain tata pemerintahan yang baik antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, sehingga akan menuntun peran aktif dari pemuda dalam pembangunan. Agar sebuah kebijakan publik sejalan dengan nalar publik dan mampu mensinergikan faktor-faktor yang mungkin menghambat maka dibutuhkan sebuah elaborasi dari administrasi publik dengan mengambil kelebihan- kelebihan dari paradigma kebijakan publik

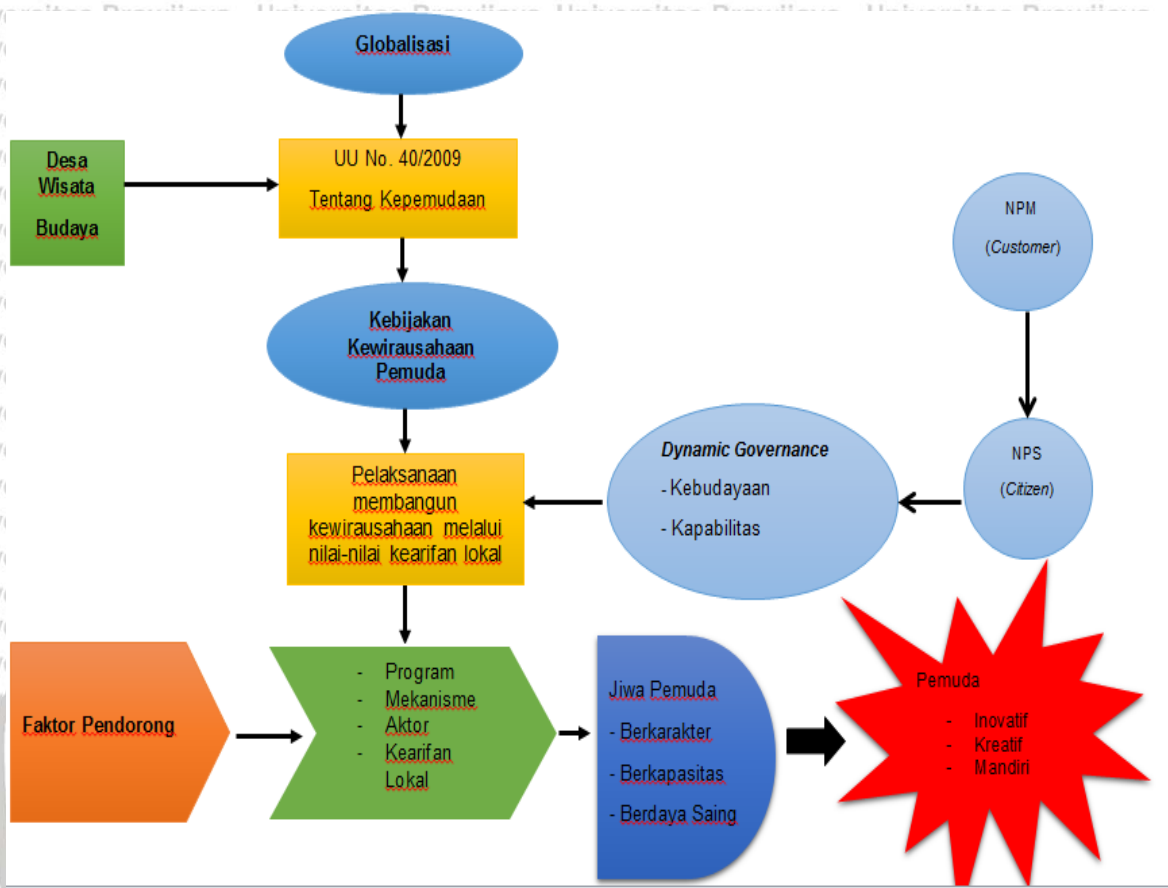
Paradigma *New Public Management* (NPM) dan *New Public Service* (NPS), yang selanjutnya dikonstruksikan melalui konsep *Dynamic Governance* sesuai disesuaikan dengan nilai – nilai kearifan lokal yang ada Pulau Jawa khususnya di Kabupaten Bantul yaitu *Mulat Sarira Hangroso Wani* dan *Bisaa Rumongso* yang akan memberikan kesempatan pemuda memiliki peran penting dalam mengembangkan seluruh kreativitas dan inovasinya melalui kewirausahaan yang akan memberikan perubahan yang baik dalam mensejahterakan dirinya sendiri dan lingkungannya.

Dukungan yang kuat dari para aktor pembangunan dan pembagian peran sebagai daya dukung dari potensi pemuda merupakan perlindungan bagi pemuda menuju pemuda yang bebas dalam berkeaktifitas dan berinovasi serta memiliki kemampuan berdaya saing. Untuk mencapai hal tersebut pemuda dapat melakukan melalui tiga fase dalam membangun kewirausahaan pemuda melalui pemberdayaan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan baik secara internal ataupun eksternal.

Membangun kewirausahaan pemuda ini puncaknya adalah terwujudnya pemuda yang kreatif, inovatif dan mandiri yang dicirikan oleh adanya perubahan

karakter dan cara pandang pemuda dan masyarakat daerah bahwa kewirausahaan adalah salah satu cara pemuda memberikan peran aktif dalam pembangunan daerahnya. Dan menjadi wirausaha adalah pilihan baik bagi para pemuda di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan. Selain itu keberhasilan ini juga diindikasikan adanya hubungan komunikasi dan kerjasama antara pemuda dan pemerintah daerah dalam membangun daerahnya. Meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia dalam mengelola potensi daerah dan meningkatnya ilmu pengetahuan dan keterampilan (teknologi tepat guna) yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan kemampuan ini, meskipun berakar pada kekuatan kearifan lokal dalam membangun kekuatan ekonomi, hendaknya memiliki daya antisipasi serta partisipasi terhadap daya saing dalam era globalisasi sekaligus juga mampu melihat peluang dalam era globalisasi. Dengan demikian, muncul apa yang disebut *glokalisasi*, bangkit serentak baik pada tingkat lokal, nasional maupun global. Untuk mencapai hal ini semua maka setiap komponen dalam proses pemberdayaan memiliki strategi masing-masing sesuai dengan mempertimbangkan *sosio cultural* pemuda yang diberdayakan.

Secara skematis kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.7

Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah karena kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, rasional, empiris dan sistimatis. Rasional karena peneliti melakukan penelitian dengan cara yang masuk akal sesuai penalaran manusia. Bersifat empiris karena dapat diamati melalui indra manusia dengan membuat perbandingan yang seimbang yang merupakan kenyataan-kenyataan di lapangan. Melalui penggunaan pendekatan kualitatif peneliti mampu menggambarkan secara utuh dan komprehensif fenomena yang diteliti sebagaimana yang dijabarkan dalam fokus penelitian, sehingga dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan dan tujuan penelitian tercapai. Adapun alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah :

1. Membangun kewirausahaan pemuda Indonesia melalui nilai-nilai kearifan lokal merupakan implementasi dari kebijakan kepemudaan menyangkut pengetahuan yang tidak dapat dibahasakan (*tacit knowledge*) yang hampir tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan rasionalitas, sebab pendekatan ilmiah hanya menjelaskan pengetahuan proporsional saja (Alwasilah, 2002:103). Melalui pendekatan naturalistik peneliti mengkonstruksi emik para informan serta memotret secara lengkap dan utuh fenomena pemberdayaan pemuda wirausaha melalui program yang telah dicanangkan pemerintah sesuai undang-undang kepemudaan.

2. Tujuan penelitian ini diwarnai oleh adanya interaksi diantara realitas.

Untuk mewarnai interaksi ini maka peneliti melakukan interaksi langsung dengan para informan, dengan cara mewawancarai dan melakukan observasi pemahaman emik (menurut persepsi para informan, bukan persepsi peneliti) tentang pelaksanaan pemberdayaan pemuda wirausaha serta kendala yang dihadapi. Dalam hal ini data yang diperoleh oleh peneliti sebagai mediator yang responsif terhadap konteks yang ada.

Penelitian ini telah sesuai dengan paradigma naturalistik yang memadukan asumsi adanya saling pengaruh antara peneliti dengan informan.

3. Peneliti melakukan pemilihan lokasi yang merupakan lokasi pemberdayaan pemuda wirausaha. Penelitiannya sendiri merupakan penelitian terinci tentang suatu unit sosial selama kurun waktu tertentu (Bangin, 2003). Studi kasus pada Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta karena memiliki keunggulan sebagai berikut : (a). Merupakan desa Wisata budaya dengan kelebihan etnik yang menarik untuk diteliti karena memberikan informasi penting mengenai hubungan antar variabel serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas, (b). Kearifan lokal terbangun sangat baik sebagai satu sikap masyarakat dalam mengembangkannya sebagai mata pencaharian selain pertanian. (c) Memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai perilaku masyarakat dalam memegang kearifan lokal sebagai pedoman hidup, (d). Dapat menyajikan data dan temuan yang lebih besar dan mendalam, dalam rangka pengembangan ilmu sosial, khususnya yang berkaitan

dengan studi membangun kewirausahaan pemuda Indonesia melalui nilai-nilai kearifan lokal.

3.2. Fokus Penelitian

Berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian yang dicapai, maka yang menjadi fokus dalam penelitian membangun kewirausahaan pemuda melalui nilai-nilai kearifan lokal adalah:

1. Pelaksanaan membangun kewirausahaan pemuda Indonesia melalui nilai-nilai budaya kearifan lokal yang meliputi:
 - a. Program
 - b. Mekanisme
 - c. Aktor yang terkait dan peranannya masing-masing dalam program
 - d. Nilai-nilai kearifan lokal : sistim nilai, institusi, artefak
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program membangun kewirausahaan pemuda Indonesia melalui nilai-nilai kearifan lokal, yang meliputi:
 - a. Faktor internal pada diri Pemuda sendiri yaitu intelektua, moral, mental, spiritual.
 - b. Faktor eksternal: yaitu kebijakan, senergi program, kolaborasi aktor, permodlan dan pemasaran.
3. Membangun model yang tepat dalam membangun kewirausahaan pemuda Indonesia melalui nilai-nilai kearifan lokal. Dan telah diberikan model rekomendasi dari hasil penelitian.

3.3. Lokasi dan Situs Penelitian

Di Kabupaten Bantul yang merupakan tempat berkembangnya budaya tradisional yang banyak tercermin dari hasil – hasil kerajinan industri kreatif. Dengan masyarakat yang masih mempertahankan adat melalui perilaku budaya yang masih sangat kental. Secara khusus penelitian dilaksanakan di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.

3.4. Jenis Dan Sumber Data

3.4.1. Jenis data adalah :

1. Data Primer, yaitu data- data diperoleh pada saat melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dan juga pada saat melakukan wawancara dengan para informan yang relevan dengan penelitian
2. Data sekunder, yaitu data- data yang diperoleh melalui sumber lain baik secara lisan maupun tulisan.

Sedangkan sumber data utama dalam penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara, serta dokumentasi baik itu berupa data dan dokumentasi lainnya yang menunjang dalam penelitian ini. Sebagai mana di katakan oleh Lotfland (1984:47) bahwa sumber data kualitatif adalah berupa hasil wawancara , data –data dokumentasi lainnya

3.4.2. Sumber Data

Penelitian kualitatif tidak bermaksud menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi yang berlaku bagi suatu populasi seperti dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif terfokus pada representasi terhadap fenomena yang ada . Data dan informasi dalam penelitian kualitatif harus ditelusuri sedalam mungkin sesuai variasi yang ada. Sumber data

penelitian ini terdiri dari informan, peristiwa yang merupakan sumberdata dari data primer, sedangkan dokumen yang merupakan sumber data dari data sekunder .adapun yang dimaksud sumber data tersebut adalah :

1. Informan

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar- benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor- faktor kontekstual, jadi dalam hal ini sampling dijamin sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Maksud kedua dari informan adalah untuk menggali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah mereka yang secara khusus memiliki pengetahuan dan informasi atas data yang ingin diperoleh .Informan adalah orang-orang yang dianggap mengetahui secara benar suatu fenomena yang menjadi obyek penelitian, sehingga dapat membantu peneliti dalam menggali informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif interaktif (Miles,Huberman,dan Saldana, 2014). Informan awal penelitian ini dipilih secara *purposive (purposive sampling)* yaitu ditentukan oleh peneliti sendiri sesuai dengan tujuan penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah: (1) Kepala Daerah Kabupaten Bantul yang dipandang sangat mengetahui kebijakan program pengembangan kewirausahaan dan (2) Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, (3) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul atau Dinas yang terkait , (4) Budayawan, (5) Masyarakat lainnya, (6) Pemuda sebagai kelompok sasaran

program untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya agar dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data penelitian ini.

Adapun beberapa pertimbangan dalam menentukan informan pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan keakuratan dan valid nya data yang diperoleh maka jumlah informan sangat tergantung pada hasil yang dikehendaki. Oleh karena itu peneliti harus memiliki kecerdasan dalam menentukan informan yang tepat dan memiliki data yang akurat. Karena hasilnya akan digunakan untuk bahan melakukan analisis. Jumlah informan sangat tergantung pada pencapaian tujuan penelitian, artinya jika masalah-masalah dalam penelitian yang sudah terjawab dari satu orang informan, dan kemudian dari hasil penelusuran informasi berikutnya (triangulasi sumber data) sudah tidak ada variasi jawaban dari informan (data jenuh) maka jumlah tersebut sudah dianggap sebagai jumlah yang tepat.
2. Peneliti memiliki kewenangan dalam menentukan siapa saja yang menjadi informan dalam penelitiannya.

Dalam hal ini Spradley (1979) memberikan panduan tentang informan penelitian sebagai berikut:

- 1) apa yang diketahui informan tentang perilaku mereka;
- 2) konsep-konsep apa yang digunakan informan untuk mengklasifikasikan pengalaman mereka;
- 3) bagaimana informan mendefenisikan konsep tersebut;
- 4) dengan cara apa informan menjelaskan pengalaman mereka;
- 5) bagaimana peneliti menterjemahkan pengetahuan informan ke dalam deskripsi yang dapat dipahami oleh peneliti.

Selain itu informan terakhir didasarkan atas kejenuhan data yakni tidak ada lagi variasi pada data yang diberikan informan. Sebagaimana dijelaskan oleh

Lincoln dan Guba (dikutip Moleong, 2000), sebagai berikut:

Tujuan memperoleh variasi sebanyak-banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sampel dilakukan jika satuan sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis; setiap satuan berikutnya dapat dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu sehingga dapat dipertentangkan atau diisi adanya kesenjangan informasi yang ditemui

2. Peristiwa

Sumber data yang lain adalah peristiwa yang terjadi dalam konteks penelitian, yang relevan dengan masalah yang diteliti. Peristiwa yang dapat diperoleh adalah peristiwa yang terkait dengan pelaksanaan membangun kewirausahaan pemuda melalui nilai-nilai kearifan lokal. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah pada saat peneliti menyaksikan kegiatan pelatihan pemuda wirausaha, saat ada rembuk pemuda tentang persoalan yang dihadapi dalam kewirausahaan, saat peneliti berkunjung di rumah pemuda wirausaha dan melihat aktifitas industri kreatif di rumah-rumah mereka, dan saat berkunjung di toko atau sentra –sentra industri kreatif sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli dari hasil produk –produk industri rumahan.

3. Dokumen

Sumber data berupa dokumen yang dipergunakan adalah sumber yang berhubungan antara lain, Foto-foto dari kegiatan kewirausahaan pemuda, laporan kegiatan kewirausahaan pemuda baik yang ada pada pemuda ataupun yang didokumentasi oleh pemerintah setempat, dari media masa yang memberitakan perkembangan kegiatan kewirausahaan pemuda, data-data pencapaian kegiatan kewirausahaan pemuda lainnya.

3.5. Prosedur Dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini proses pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis, yang merupakan standar yang harus dilakukan

untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan teknik pengumpulan data agar mendapat data, fakta serta sesuatu yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, pengamatan berperan serta, wawancara mendalam, dan analisis dokumen merupakan tiga teknik pengumpulan data yang bersifat fundamental dan sering digunakan bersama-sama, seperti dalam studi kasus (Mulyana, 2001:155). Hal tersebut telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara yang mendalam dan terjadi perkembangan dalam wawancara sesuai dengan pokok bahasan yang tergali secara mendalam. Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan oleh peneliti untuk dibuat analisis yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian membangun kewirausahaan pemuda melalui nilai-nilai kearifan lokal.

Teknik pengumpulan data selama penelitian di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Pengamatan (Observasi)

Pengertian Observasi adalah Proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses proses psikologis dan biologis. Dalam menggunakan teknik observasi, hal terpenting yang harus diperhatikan ialah mengandankan pengamatan dan ingatan si peneliti.

Menurut Rock (dalam Atkinson, et.al. (eds): 2001:32) penelitian kualitatif dalam upaya memperoleh data bergantung pada observasi

pertisipan. Melalui observasi partisipan, peneliti berusaha memasuki dunia kehidupan sehingga dapat memastikan logika subyektif pada apa yang dirasakan, didengar, dan dilihat tentang kehidupan sosial dari subyek penelitian. Peneliti sebagai seorang pengamat yang berada di luar subyek penelitian mengajukan pertanyaan yang relevan dan menganalisisnya. Salim (2006) menyebutkan ada dua hal yang prinsip yang mencirikan teknik observasi dalam tradisi kualitatif yaitu: 1). Observasi kualitatif tidak boleh mencampuri urusan subyek penelitian, (2) Observer kualitatif harus menjaga sisi alamiah dari subyek penelitian.

Dan menurut Sugiyono (2005) ada beberapa macam teknik penelitian yaitu, observasi partisipatif. Dalam penelitian partisipatif peneliti dapat terlibat dalam kegiatan sehari-hari dari obyek yang sedang diteliti baik itu kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan penelitian, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dalam observasi partisipasi ini tentu data yang diperoleh lebih lengkap dan tajam serta mengetahui setiap perilaku yang tampak. Selanjutnya adalah peneliti partisipasi pasif. Dalam penelitian partisipatif pasif, peneliti datang di tempat kegiatan obyek atau orang yang diamati, namun peneliti tidak terlibat dalam kegiatannya. Observasi yang dilakukan tidak terstruktur, karena fokus penelitian yang telah tertulis dan dimungkinkan berubah.

Dengan menggunakan penelitian observasi partisipatif pasif peneliti memperoleh manfaat dari penelitian yaitu :

- 1) Peneliti memperoleh pengalaman langsung, sehingga peneliti dapat menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif dimungkinkan mendapatkan penemuan baru.
- 2) Peneliti dapat melihat kekurangan dan kelebihan dari subyek yang diteliti, yang tidak terungkap dalam wawancara
- 3) Peneliti memperoleh kesan-kesan pribadi.

Obyek dalam observasi penelitian ini adalah :

- a) Desa Wukirsari yang oleh pemerintah Kabupaten Bantul telah dijadikan sebagai Desa Wisata Budaya karena letaknya sebagai makam Raja-raja Mataram
- b) Kearifan lokal di Desa Wukirsari telah mengubah perilaku masyarakat dalam merawat dan melestarikan kearifan lokal secara produktif dan kreatif.
- c) Kearifan lokal di Desa Wukirsari telah menciptakan satu kegiatan dalam mengembangkan kewirausahaan sebagai mata pencaharian selain pertanian.

2. Wawancara

Metode wawancara menurut Nazir (1999:234) adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab dengan berhadapan langsung. Wawancara dilakukan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (pedoman wawancara). Dengan demikian penelitian ini dilakukan wawancara dengan informan yang secara nyata memahami dan memiliki pengalaman yang terkait dengan lingkungan penelitian. Selanjutnya Mulyana (2001:180) mengatakan bahwa wawancara adalah bentuk komunikasi antara

dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.

Selanjutnya, menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2005:186) bahwa: dalam melakukan wawancara antara lain: perlu mengkonstruksikan mengenai orang, peristiwa, kegiatan yang terjadi, organisasi yang dijumpai, keterlibatan perasaan atau emosional (motivasi, harapan, kepedulian). Dan mampu memproyeksikan keutuhan seluruh kejadian sebagai mana yang telah diharapkan, selanjutnya memverifikasi, mengembangkan informasi yang diperoleh baik dari informan maupun dari data yang di peroleh untuk selanjutnya dikembangkan sesuai kebutuhan dalam penelitian.

Menurut Arikunto (2002:202) ada dua macam pedoman wawancara, yaitu: pedoman wawancara tidak terstruktur, dan pedoman wawancara terstruktur. Penelitian ini menggunakan wawancara tak terstruktur. Menurut Mulyana (2001:180) menyatakan bahwa:

Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka.

Wawancara tidak terstruktur mirip dengan percakapan informal. Metode ini bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden.

Dengan demikian wawancara dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pedoman wawancara kepada key informan yaitu Bupati Kabupaten Bantul, Deputi Kementrian Pemuda dan Olahraga, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten

Bantul atau yang terkait, Pemuda sebagai kelompok sasaran program di Kabupaten Bantul.

3.6. Keabsahan Data

Data yang telah diperoleh pada saat observasi, maupun saat FGD maka perlu dilakukan triangulasi, menurut Denzin (1978) bahwa pelaksanaan triangulasi perlu dilakukan untuk menguji keabsahan data dengan memanfaatkan sumber, metode, penyelidik dan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini triangulasi dilakukan terhadap sumberdata (informan) dan metode pengumpulan data dengan menggunakan langkah-langkah :

- 1) Hasil observasi dan wawancara ditriangulasi melalui FGD untuk menguji kebenaran hasil wawancara dan observasi
- 2) Hasil-hasil wawancara dan observasi yang sudah dibahas dalam FGD kemudian ditunjukkan beberapa orang peserta FGD yang dianggap menguasai masalah penelitian ini untuk mengkritisi atas kesalahan dan ketidak sesuaian.
- 3) Hasil penelitian secara keseluruhan diseminarkan dalam tim kecil yang terdiri dari para ahli dan juga dari birokrasi yang terlibat dalam proses membangun kewirausahaan pemuda.

Uji keabsahan data dalam kualitatif adalah dengan validitas dan reabilitas data penelitian. Validitas (kesahihan) dalam penelitian kualitatif adalah data yang di nyatakan valid artinya sesuai dengan kenyataan dalam penelitian. Uji validitas dalam kualitatif ada dua yaitu; (a). Validitas internal berkaitan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai, (2). Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi. Sedangkan reabilitas (keterandalan) ialah

konsistensi pengukuran suatu obyek secara berulang-ulang dan hasilnya dari pengukuran pertama sampai pengukuran terakhir harus tidak berbeda. Dalam praktek di lapangan peneliti menanyakan secara berulang tentang jawaban dari pertanyaan sebelumnya, sehingga catatan dalam laporan merupakan catatan yang sesuai dengan apa yang di maksud oleh responden.

Keabsahan data yang dikumpulkan dapat dilihat dari derajat kepercayaan (*credibility*) dengan menggunakan teknik: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamat, dan triangulasi. Melalui perpanjangan pengamatan, peneliti memiliki waktu cukup banyak untuk mempelajari kebiasaan, dapat melakukan pengujian terhadap distorsi data, dan juga untuk membangun kepercayaan subyek terhadap penelitian. Dengan ketekunan pengamat dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang menonjol dari setiap fokus yang diamati, dan selanjutnya peneliti memusatkan diri pada ciri atau unsur tersebut.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara mengkonfirmasi data kepada informan lain. Triangulasi dilakukan terhadap lebih dari satu sumber untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran data peneliti. Triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, dengan tujuan memperoleh data yang valid dari informan yang dianggap paling mengetahui masalah yang sedang ditanyakan. Dalam prakteknya satu pertanyaan ditanyakan pada beberapa informan secara *snowball*.

Selain teknik tersebut, keabsahan data dapat diuji dengan kriteria kesahihan. Untuk memenuhi kriteria ini peneliti berusaha untuk menyajikan hasil penelitian ini dengan memperkaya wacana ilmiah serta membandingkannya dengan penelitian yang sejenis atau yang relevan dengan fokus penelitian. Uji keabsahan data yang terakhir adalah menggunakan kriteria kepastian, dan untuk

mewujudkan kepastian atas hasil dari penelitian maka peneliti mendiskusikannya dengan promotor dan co promotor serta para penelaah ahli, yang merupakan anggota Tim Penguji Proposal Disertasi. Sehingga diperoleh masukan untuk menambah kepastian dari hasil penelitian.

3.7. Analisis Data

Dalam analisis adalah dilakukan proses penyusunan data agar dapat difafsirkan. Dengan menyusun data dan menggolongkan melalui pola, yang sesuai dengan tema atau kategori. Dalam penelitian kualitatif analisis data harus dimulai sejak awal. Data yang diperoleh di lapangan segera harus dituangkan dalam bentuk tulisan untuk kemudian dilakukan analisis.

Analisis data penelitian ini menggunakan Model Analisis Data dari Miles, Huberman dan Saldana (2014), yang disebut Analisis Data Model Interaktif, yang meliputi: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion: drawing/verifying*). Penjelasan terhadap ketiga komponen tersebut disajikan di bawah ini, yaitu :

a) Kondensasi data

Kondensasi data mengarah kepada proses untuk memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan/atau mengubah data yang dalam bentuk kumpulan catatan yang diperoleh dari lapangan, transkrip interview, dokumen, dan materi empiris lainnya. Dengan kondensasi, kita membuat data itu lebih kuat. Tidak digunakan istilah *reduksi data* karena mengindikasikan adanya kelemahan atau menghilangkan sesuatu dalam prosesnya. Seperti yang kita lihat, kondensasi data terjadi terus-menerus sepanjang hidup dari setiap proyek yang berorientasi kualitatif, bahkan sebelum datanya dikumpulkan. Antisipatif kondensasi data terjadi saat peneliti memutuskan kerangka konseptual, yaitu

adanya permasalahan yang ingin diteliti, rencana pertanyaan peneliti dalam wawancara, dan adanya pendekatan koleksi dalam pemilihan data yang dipilih.

Saat pengumpulan data dilakukan, maka peneliti selanjutnya adalah membuat ringkasan, koding, membangun tema, menjeneralisasi kategori, dan menulis memo analitikal. Proses kondensasi/transformasi data berlanjut setelah pekerjaan lapangan berakhir, hingga laporan final selesai.

Kondensasi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ini adalah bagian dari analisis. Peneliti mampu membuat keputusan dalam memilih atau memotong data yang menjadi kode, kategori mana yang memberikan ringkasan terbaik, cerita mana yang berkembang untuk diberitahu dan semuanya merupakan pilihan analitikal. Kodensasi data adalah bentuk dari analisis yang mempertajam, memilah, berfokus, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga konklusi final dapat ditarik dan diverifikasi.

Dengan kondensasi data, kita tidak selalu mengartikan kuantifikasi. Data kualitatif bisa ditransformasikan ke beberapa cara; melalui seleksi, melalui ringkasan atau paraphrase, dengan memasukkan kedalam pola yang lebih besar, dll. Kadang, itu mungkin membantu untuk mengubah data menjadi besaran (contoh: analisis menentukan bahwa suatu program dilihat dari tinggi atau rendahnya tingkat efektifitannya), tetapi ini tidak selalu diperlukan.

b) Penyajian Data

Aliran mayor kedua dari aktivitas analisis ini adalah penyajian data. Umumnya, penyajian adalah pengaturan, kompresi membangun sebuah informasi yang memperbolehkan menggunakan penggambaran konklusi dan aksi. Melihat *displays* membantu kita untuk mengerti apa yang sedang terjadi dan

melakukan sesuatu baik menganalisis lebih lanjut atau mengambil tindakan dengan didasarkan pada pemahaman.

Bentuk display yang paling sering pada data kualitatif di masa lampau telah diperpanjang menjadi teks (dalam bentuk, yang lebih panjang misalnya 1000 lembar dari catatan lapangan) dan hal ini tentu sangat rumit dan tersebar, sekuensial bukan simultan, kurang terstruktur, dan sangat besar. Hanya menggunakan teks yang diperpanjang, peneliti akan merasa mudah untuk sampai pada kesimpulan awal. Manusia tidaklah sekuat seperti prosesor yang memiliki informasi dengan jumlah yang banyak. *Extended text overload* kemampuan memproses informasi dan cenderung untuk menemukan pola yang sederhana. Atau secara berlebihan memperoleh informasi yang jelas, sehingga dapat dilakukan kriteria pembobotan dan melakukan pemilihan dari apa yang mungkin.

Display yang baik adalah jalan utama untuk analisis kualitatif yang kuat. Display itu dibahas dan diilustrasikan melalui berbagai jenis yaitu matriks, grafik, diagram, dan jaringan. Semua dirancang untuk membangun informasi yang teroganisir menjadi suatu bentuk yang kompak dan gampang diakses sehingga analis dapat melihat apa yang terjadi, baik menarik justifikasi kesimpulan atau pindah pada langkah berikutnya.

Seperti kondensasi data, penciptaan dan penggunaan display tidak terpisah dari analisis yang merupakan bagian dari analisis. Mendesign display, memutuskan pada baris dan kolom dari matriks untuk data kualitatif dan memutuskan data, dimana, harus dimasukkan dalam sel merupakan kegiatan analisis. (Catat bahwa mendesign display juga memiliki implikasi jelas kondensasi data.)

Metode ini menganjurkan lebih sistematis, display yang kuat, dan sikap yang lebih inventif, sadar diri, dan berulang terhadap generalisasi dan penggunaannya. Seperti yang pernah disebutkan sebelumnya *You know what you display*

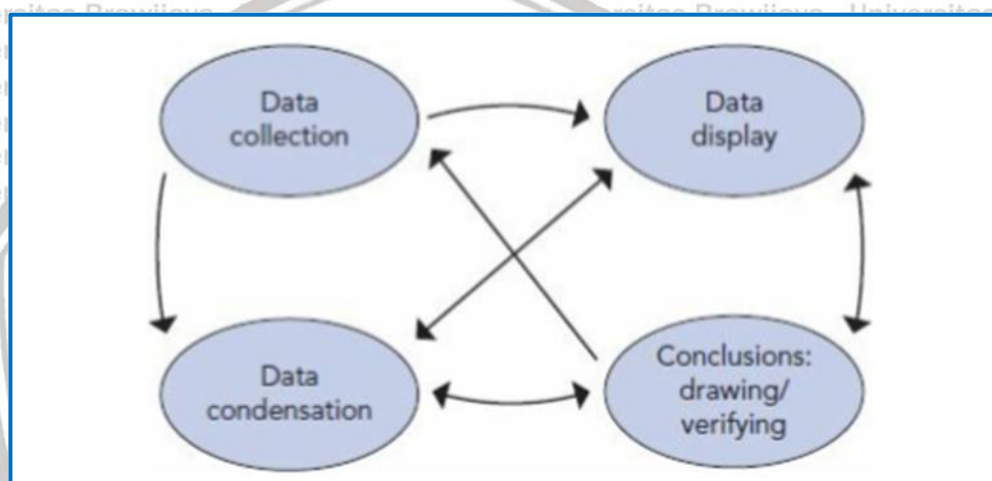
c). Penggambaran dan Verifikasi Kesimpulan

Aliran ketiga dari aktivitas analisis ini adalah penggambaran kesimpulan dan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif menafsirkan/mengartikan sesuatu dengan pola, penjelasan, aliran kausal, dan proposisi. Peneliti yang kompeten memegang kesimpulannya ringan, mempertahankan keterbukaan dan skeptisisme, tapi kesimpulannya tetap ada, samar diawal, lalu semakin eksplisit dan membumi. Kesimpulan final mungkin tidak muncul hingga pengumpulan data berakhir, tergantung pada ukuran badan dari catatan lapangan; coding, penyimpanan, dan metode pengambilan yang digunakan; kecanggihan dari peneliti; dan batas waktu yang diperlukan untuk dipenuhi.

Kesimpulan harus diverifikasi sebagai hasil analisis. Verifikasi mungkin singkat sebagai pikiran dari peneliti dengan melihat kembali pada catatan lapangan; atau mungkin menyeluruh dan rumit, dengan argumentasi yang panjang dan review antara rekan-rekan untuk mengembangkan konsensus intersubjektif atau dengan upaya luas untuk mereplikasi temuan dalam kumpulan data lain. Makna yang muncul dari data harus diuji untuk masuk pada pemikiran yang masuk akal pada informan atau responden yang kita ajak berdiskusi sehingga hal itu akan memperkuat pendapat sehingga memberikan konfirmasi bahwa apa yang diteliti adalah sesuatu yang masuk akal inilah keabsahan yang merupakan kebenaran. Jangan sampai bahwa apa yang kita teliti tidak

mendapatkan keabsahan sehingga meskipun itu bagus namun kebenaran dari penelitian tidak diketahui kebenaran dan utilitasnya.

Ketiga aliran dalam metode kualitatif interaktif yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penggambaran kesimpulan/verifikasi yang terjaln sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data dalam bentuk parallel, untuk membuat domain umum yang disebut analisis. Ketiga aliran ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar. 3 1. Components of Data Analysis : Interactive Model

Sumber: Miles, Huberman, Saldan (2014) *Qualitative data analysis : An expanded sourcebook (2nd ed)*. Thousand Oaks. CA. Sage Publications.

Pada gambar jaringan pertama. Dalam pandangan ini, ketiga tipe dari aktivitas analisis dan aktifitas pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus interaktif. Peneliti terus bergerak antara empat mode ini selama pengumpulan data lalu bergerak antara *condensing*, *displaying*, dan *conclusion drawing/verifying*.

Pengkodean data, contohnya (*kondensasi data*), mengarahkan ide-ide

baru tentang apa yang harus pergi ke suatu matriks (*penyajian data*).

Memasukkan data membutuhkan kondensasi data lebih lanjut. Setelah matriks

terisi, kesimpulan awal diambil, selanjutnya mengarahkan ke keputusan,

contohnya, untuk menambah kolom ke matriks untuk menguji kesimpulan itu.

Dalam pandangan ini, analisis kualitatif data adalah usaha yang terus

menerus dan berulang. Masalah kondensasi data, penyajian, dan,

penggambaran kesimpulan/verifikasi berturut-turut sebagai episode analisis

mengikuti satu sama lain. Proses tersebut sebenarnya tidak ada yang lebih

kompleks, konseptual berbicara, daripada mode analisis yang peneliti kuantitatif

gunakan. Dalam penelitian kualitatif, kita pasti disibukkan dengan kondensasi

data (memperhitungkan cara, standar deviasi), dengan gambar (table korelasi,

printout regresi). Aktivitas dilakukan melalui metode yang dirumuskan dengan

baik serta familiar; dibimbing; biasanya lebih berurutan daripada berulang atau

siklus. Peneliti kualitatif lebih cair dan humanis.

Dalam melakukan analisis kualitatif perlu terdokumentasi dengan baik

sebagai suatu proses. Kita perlu mengerti lebih jelas apa yang terjadi ketika kita

menganalisa data, untuk mencerminkan, memperbaiki metode kami.

BAB IV

DISKRIPSI DAERAH PENELITIAN

4.1. Profil Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul adalah daerah dengan pesona wisata yang menarik baik itu berupa daratan dengan taman wisata, pegunungan ataupun lautan. Dan oleh karena itu menumbuhkan pariwisata menjadi salah satu tujuan pembangunan di kabupaten ini. Karena pariwisata diharapkan mampu mendongkrang pendapatan daerah. Kekayaan alam yang luar biasa ini selanjutnya dipromosikan dalam wisata alam dengan tematik budaya, mengingat budaya kearifan lokal di Kabupaten Bantul ini masih sangat kental bahkan dilestarikan. Kearifan lokal yang masih sangat kental ini dimungkinkan karena letak makam Raja-Raja Mataram berada di Kabupaten Bantul. Makam Raja-Raja Mataram ini memiliki pesona dan daya tarik tersendiri baik oleh masyarakat lokal ataupun pendatang.

Kearifan lokal yang terus dikembangkan dan dilestarikan tadi pada kenyataannya menjadi pesona tersendiri, berdatangannya para wisatawan telah menumbuhkan adanya kebutuhan pendukung pada daerah ini. Kebutuhan pendukung tersebut juga dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut misalnya saja mengembangkan hasil kerajinan sebagai buah tangan berupa produk dari kulit, kain batik, ayaman bambu, juga kuliner makanan khas daerah. Dengan pesona pariwisata yang menitik beratkan pada kelestarian budaya telah memberikan manfaat yang baik khususnya dalam bidang ekonomi, bidang sosial-budaya, pendidikan, iptek, dan perkembangan lingkungan setempat. Pesona wisata ini Di sinilah diharapkan mampu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat diluar mata pencaharian utamanya sebagai petani. Potensi lokal yang dilestarikan dan dikelola serta dikembangkan dengan baik oleh masyarakat, yang didukung oleh Pemerintah dan Swasta akan memberikan dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi bagi daerah tersebut. Sinergi ini perlu dibangun dengan kesadaran bersama sesuai porsinya masing-masing.

Pesona wisata di Kabupaten Bantul, khususnya pada pesona makam Raja-Raja Mataram yang terletak di desa Wukirsari, merupakan salah satu pesona wisata dalam kebijakan pemerintah Bantul yang menetapkan desa wukirsari sebagai desa Wisata budaya.. Harapan dari pemerintah dengan penetapan desa wisata ini akan memicu kreatifitas para kaum muda untuk menciptakan lapangan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan baik untuk pribadi pemuda sendiri ataupun juga untuk mendukung kegiatan pariwisata di Desa Wisata Budaya. Mereka para generasi muda ini mestinya memiliki talenta atau kecakapan dalam mengembangkan produk unggulan yang telah pernah diciptakan oleh para pendahulunya di daerah tersebut. Kemampuan ini tentu saja akan didukung oleh perkembangan pemikiran pemuda dengan melihat perkembangan dunia. Kemampuan dalam menciptakan produk –produk yang dibutuhkan wisatawan baik dalam dan luar negeri seperti membuat souvenir dan aneka kerajinan tangan yang memiliki nilai jual tinggi. Selain itu, di desa wisata banyak bermunculan warung makan, warung sembako, dan lain sebagainya. Pada akhirnya desa wisata budaya akan menciptakan peningkatan kesejahteraan warganya. Dibidang sosial, desa wisata mampu menciptakan lapangan kerja bagi warganya. Tentu saja ini menjadi peluang baik bagi pemuda di desa untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru seperti menjadi pemandu

wisata, pengrajin souvenir, membuka rumah makan, usaha rental kendaraan mulai dari mobil, motor. Dalam bidang ekonomi sangat jelas bahwa pemuda akan mampu memiliki penghasilan sendiri dari usaha kreatifnya dalam mengembangkan usaha. Pemuda sendiri mampu berinteraksi dengan lingkungan yang mengglobal melalui produk-produk unggulan yang ditawarkan melalui sentuhan kemajuan teknologi dan informasi.

4.1.1. Administrasi Pemerintahan

Secara administrasi luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506,85 km² yang terbagi dalam tujuh belas Kecamatan, tujuh puluh lima desa dan sembilan ratus tiga puluh tiga pedukuhan. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang RT/RW Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 memiliki rencana pola ruang dalam pengembangan kawasan di Kabupaten Bantul yang terdiri dari :

1. Kawasan Lindung Kabupaten

Rencana pengembangan kawasan lindung Kabupaten meliputi :

- a. Dilakukannya penyebaran kawasan hutan lindung.
- b. Direncanakan perlindungan kawasan melalui kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (kawasan resapan air).

Penyebaran kawasan resapan air meliputi sebagian wilayah desa Parangtritis (Kecamatan Kretek). sebagian desa Bangunjiwo (Kecamatan Kasihan), sebagian wilayah desa Seloharjo (Kecamatan Pundong), hampir seluruh wilayah Kecamatan Imogiri, Pleret dan Piyungan serta seluruh wilayah Kecamatan Dlingo

c. Kawasan perlindungan terhadap kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan pantai dan kawasan mata air, dan ruang terbuka hijau perkotaan Kabupaten

d. Kawasan perlindungan alam.

Kawasan perlindungan alam terdiri dari : Kawasan suaka alam yaitu cagar alam Imogiri di desa Girirejo dan kawasan pantai berhutan bakau di wilayah Gading Sari (desa Srigading Kecamatan Sanden), desa Poncosari (Kecamatan Srandakan) dan desa Tirtoharjo (Kecamatan Kretek).

Kawasan konservasi penyu di desa Srigading (Kecamatan Sanden), kawasan cagar budaya yang penyebarannya meliputi Masjid Agung Kotagede, Museum wayang kekayon, kompleks makam raja-raja Imogiri, situs ambarbinangun dan masjid patok negara, petilasan/zirah mangir dan goa selarong, petilasan keraton mataram dan cagar budaya pendidikan serta makam sewu.

e. Kawasan perlindungan terhadap bencana

Kawasan perlindungan terhadap bencana meliputi kawasan yang rawan terjadinya gempa bumi, kawasan yang rawan terhadap terjadinya tanah yang longsor, kawasan yang rawan terhadap terjadinya banjir, kawasan yang rawan terhadap terjadinya gelombang pasang dan kawasan yang rawan terhadap terjadinya kekeringan.

2. Pengembangan Kawasan yang Potensial dalam Budidaya

Pengembangan Kawasan yang memiliki potensial untuk di budidayakan adalah kawasan –kawasan yang diperuntukkan untuk hutan rakyat, pertanian rakyat, pertambangan yang dikelola oleh rakyat, industri dan pariwisata.

4.1.2. Kabupaten Bantul Memiliki Potensi Wilayah

Secara geografis dan administratif Kabupaten Bantul memiliki potensi pengembangan, hal ini berdasarkan :

1. Batas wilayah yang tidak berbatas secara fisik, meski terdapat ring road namun perkembangan saat ini telah melewati batas tersebut
2. Topografi kawasan yang relatif datar
3. Resapan air bukan merupakan kendala
4. Potensi daerah dalam hal pariwisata yang belum di kelola atau tergarap dengan optimal.

Sesuai Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang RT/RW Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030, potensi pengembangan kawasan di Kabupaten Bantul dilakukan dengan penetapan kawasan strategis kabupaten meliputi Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Strategis Sosio-Kultural, dan pengembangan Kawasan Strategis Lingkungan Hidup. Adapun kawasan ekonomi yang merupakan kawasan strategis di Kabupaten Bantul adalah :

- a. Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta
- b. Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri
- c. Kawasan Strategis pantai selatan, pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut pantai Depok, pantai Samas, pantai Kuwaru, dan pantai Pandansimo
- d. Kawasan Strategis Industri Sedayu, dan
- e. Kawasan Strategis Industri Piyungan

Sedangkan Kawasan Strategis dalam bidang Sosio-Kultural Kabupaten Bantul meliputi, kawasan Desa Wisata dan kerajinan yang terletak di desa Manding yaitu kerajinan kulit, di desa Gabusan dan desa Tembi yang banyak mengolah tanah liat untuk tembikar. Selain itu juga Kasongan, Jipangan, Gendeng dan di Lemahdadi. Selanjutnya adalah pengembangan Kawasan Strategis untuk Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah adanya agrowisata yang terletak di Kecamatan

Dlingo, agropolitan di Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Dlingo. Selain itu kawasan lingkungan strategis lainnya adalah gumuk pasir di pantai Prangtritis.

Kabupaten Bantul selain pengembangan wilayah yang memiliki potensi-potensi seperti diatas juga melakukan pengelolaan terhadap wilayah yang merupakan kawasan khusus. Adapun kawasan khusus tersebut meliputi :

a. Kawasan Perkotaan Yogyakarta

Wilayah Kabupaten Bantul termasuk dalam kawasan perkotaan Yogyakarta meliputi kecamatan Kasihan, kecamatan Sewon, dan kecamatan Banguntapan. Kawasan tersebut memiliki fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan merupakan kawasan strategis nasional. Kawasan ini memiliki kegiatan utama di sektor perdagangan, jasa, perumahan, hotel dan restoran yang berkembang sangat cepat dan berdampak pada berkurangnya daya tampung ruang kawasan sehingga memerlukan dukungan perencanaan, penataan, dan penanganan sarana dan prasarana yang memadai.

b. Bantul Kota Mandiri (BKM)

Kawasan strategis BKM merupakan kawasan mandiri yang dibangun dalam rangka untuk menggairahkan dan menampung kegiatan investasi serta menyeimbangkan (mengurangi kesenjangan) pembangunan wilayah di bagian barat Kabupaten Bantul. Kawasan BKM direncanakan untuk memwadahi berbagai macam kegiatan seperti permukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa, olahraga dan rekreasi, perkantoran, dan aneka industri.

Sesuai dengan induk (*Master Plan*) BKM, kawasan inti BKM meliputi areal seluas 1.300 Ha yang mencakup desa Sendangsari, desa Triwidadi, dan desa Guwosari di Kecamatan Pajangan dan desa Bangunjiwo di kecamatan Kasihan. Sebagai embrio keberadaan BKM saat ini telah ada beberapa pengembang perumahan dan industri yang melakukan kegiatan di kawasan BKM. Perum Perumnas telah menguasai lahan di kawasan BKM seluas 27 Ha. Dari lahan tersebut saat ini telah dibangun sebanyak 1.637 unit rumah dengan tingkat hunian sekitar 85%. Kawasan BKM mempunyai peran penting terhadap rencana pengembangan kawasan industri terpadu Bantul-Kulonprogo dan dapat dijadikan kawasan pendukung pembangunan bandara internasional Kulonprogo dan penambangan serta pengolahan pasir besi.

c. Kawasan Strategis Pantai Selatan

Kabupaten Bantul memiliki potensi alam berupa pantai sepanjang 13,5 km. Pengembangan pantai Depok, pantai Samas, pantai Kuwaru dan pantai Pandansimo sebagai kawasan strategis merupakan langkah awal di wilayah selatan Bantul untuk meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian sehingga mampu memberikan kontribusi PDRB yang besar bagi Kabupaten Bantul.

d. Kawasan Strategis Piyungan dan Sedayu

Penetapan kawasan industri Piyungan dan industri Sedayu sebagai kawasan strategis di wilayah Kabupaten Bantul akan berdampak besar terhadap pertumbuhan perekonomian (taraf

hidup) baik bagi masyarakat pada kawasan setempat maupun bagi fisik dan perekonomian wilayah Kabupaten Bantul. Kawasan industri Piyungan terdapat di desa Srimulyo dan desa Sitimulyo, menampung kegiatan industri yang berskala menengah dan besar yang cenderung berpolutan tinggi. Sedangkan kawasan industri Sedayu terdapat di desa Argosari, desa Argomulyo, desa Argorejo, dan desa Argodadi, mampu menampung kegiatan industri yang berskala menengah dan besar dengan tingkat polutan rendah.

e. Desa Wisata Kerajinan

Desa Wisata Kerajinan ini terletak di wilayah desa Gabusan, Manding dan Tembi serta desa Kasongan, Gendeng dan Lemahdadi yang memiliki potensi budaya. Kerajinan tangan, dan cinderamata (*handicraft*). Tidak hanya produknya saja melainkan proses pembuatannya juga menarik wisatawan untuk turut secara interaktif.

f. Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis

Gumuk Pasir di pesisir selatan pulau Jawa yang terdapat di Kabupaten Bantul memiliki karakteristik unik dan langka di dunia. Kerusakan terhadap gumuk pasir akan mengubah ekosistem secara nyata yang berakibat besarnya kerusakan ekologis dan mengganggu keseimbangan ekologi. Potensi karakteristik yang unik dapat dikembangkan untuk daya tarik wisata juga merupakan wisata pendidikan. Pengembangan kawasan strategis gumuk pasir di Parangtritis dilakukan dengan kegiatan dalam rangka

konservasi alam gumuk pasir untuk kegiatan lain selain konservasi, laboratorium alam, penelitian, dan kegiatan yang menunjang pelestarian keberadaan kawasan, serta pembangunan laboratorium alam geospasial bekerjasama antara lain dengan Universitas Gajah Mada, dan Pemerintah Kabupaten Bantul. Kawasan pasir pantai selatan di luar kawasan gumuk pasir dapat dipergunakan untuk kegiatan pertanian lahan pasir sebatas memenuhi aturan sepadan pantai dan kaidah konservasi lahan pantai.

4.1.3. Pembinaan Batas Wilayah

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penentuan dan penegasan batas wilayah mempunyai arti yang sangat penting. Terutama untuk tertib administrasi pemerintahan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta di sisi utara. Di sisi barat Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo. Di sisi timur Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah DIY.

Penegasan batas daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul telah ditetapkan dengan Permendagri Nomor 83 Tahun 2013. Batas daerah antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul telah ditetapkan dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2012. Sedangkan batas daerah antara Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo dengan Kabupaten Bantul telah

ditetapkan dengan Permendagri Nomor 71 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2007.

Sementara itu permasalahan batas wilayah diakibatkan oleh karakteristik alamiah terjadi pada batas daerah antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulonprogo, tepatnya di perairan sekitar muara sungai Progo yang berubah-ubah sehingga ada wilayah Kulonprogo yang menjadi berada di sebelah timur sungai dan wilayah Bantul berubah menjadi di barat sungai. Untuk mendiskusikan batas wilayah ini Kabupaten Bantul berkoordinasi dengan Pemerintah DIY dan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo.

Terkait batas wilayah Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, pembicaraan batas wilayah juga berkoordinasi dengan Pemerintah DIY. Pembahasan permasalahan perbatasan ini melibatkan warga masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, dengan tujuan menginventarisir permasalahan perbatasan yang terjadi di tingkat masyarakat.

4.2. Profil Desa Wukirsari: Situs Penelitian

4.2.1. Orientasi dan Batas Administratif

Desa Wukirsari adalah desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Wisata Budaya, yang memiliki luas wilayah 15.385, 504 Ha dengan Jumlah KK = 5.003 KK, dan jumlah penduduk 17.318 Jiwa. Dan tinjauan dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul, Desa Wukirsari yang termasuk dalam wilayah kecamatan Imogiri merupakan Sub Wilayah Pengembangan (SWP) VI hirarki II. Secara umum arahan pengembangannya adalah sebagai: (1) Kawasan agribisnis, (2) Kawasan cagar budaya, (3) Kawasan cagar alam, (4) Kawasan lindung bawahan, (5) Kawasan wisata minat khusus. Adapun arah

Pengembangan / Strategi Kabupaten Bantul, khususnya kawasan Sub Wilayah adalah pengembangan (SWP) VI wilayah timur termasuk didalamnya Kecamatan Imogiri dikembangkan secara terbatas, sesuai dengan daya dukung lingkungannya dan fungsi lingkungannya, antara lain: (1) Intensifikasi dan diversifikasi pertanian lahan kering dan peternakan, (2) Pengembangan perhutanan rakyat, (3) Pengembangan Industri Kerajinan, dan (4) Pengembangan kawasan Industri.

Dalam menggambarkan potret Desa Wukirsari secara eksisting beserta persoalannya akan dikaji lebih mendalam dalam rangka pengembangan desa kedepan untuk jangka 5 tahun, fokus infrastruktur tersier mitigasi bencana merupakan kegiatan prioritas awal yang harus dikerjakan. Batas Administrasi desa Wukirsari terletak di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Propinsi DIY, yang berbatasan wilayah dengan:

- Sebelah Utara. Desa Trimulyo, Desa Segoroyoso dan Desa wonolelo.
- Sebelah Timur. Desa Munthuk dan desa mangunan Kecamatan Dlingo.
- Sebelah Selatan. Desa irirejo dan Desa Imogiri.
- Sebelah Barat. Sungal Opak Desa Trimulyo, kecamatan Jetis.

Adapun Desa Wukirsari terdiri dari enam belas dusun (pedukuhan), yaitu: Dusun Sindet, Dusun Giriloyo, Dusun Singosaren, Dusun Gengicehan, Dusun Manggung, Dusun Nogosari I, Dusun Bendo, Dusun Nogosari II, Dusun Tilaman, Dusun Karangasem, Dusun Pundung, Dusun Jatirejo, Dusun Kedungbuweng, Dusun Dengkeng, Dusun Kamgkulon, Dusun Karangtalun. Dari ke enam belas dusun tadi memiliki orbit jarak empuh seperti dalam tabel di bawah ini.

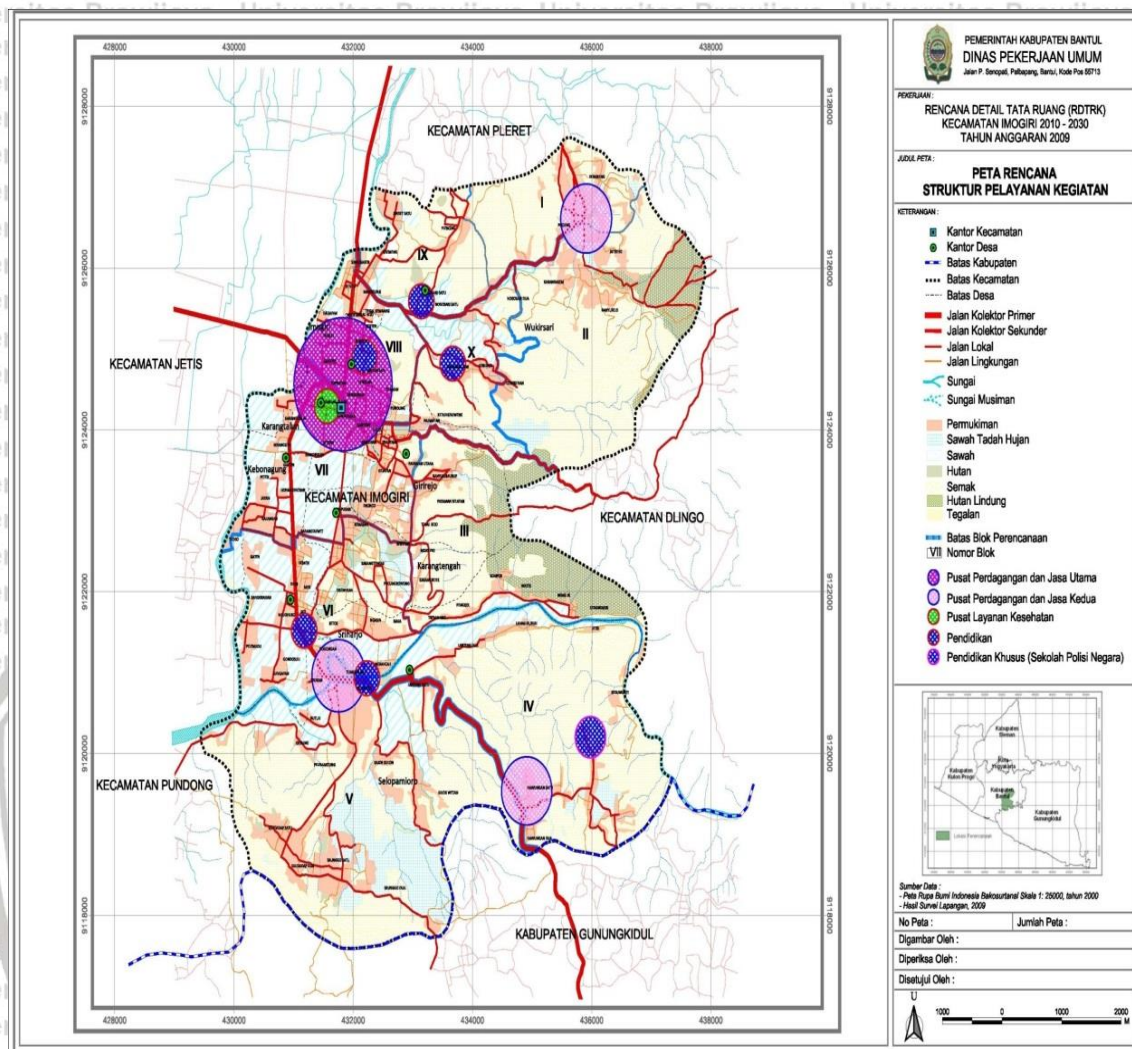
Tabel 4.1. Orbitasi Jarak Tempuh

No.	Orbit Jarak Tempuh	Jarak	Waktu	Keterangan
1	Jarak ke Kecamatan	2 km	5 menit	Dengan kendaraan
2	Jarak ke Kabupaten	6 km	15 menit	Dengan kendaraan
3	Jarak ke Propinsi	15 km	45 menit	Dengan kendaraan
4	Jarak ke Pusat fasilitas terdekat (ekonomi, kesehatan, Pemerintahan)	2 km	5 menit	Dengan kendaraan

Sumber: Profil Desa Tahun 2009

4.2.2. Kondisi Fisik Wilayah.

Luas Desa Wukirsari : 1.538,55 ha. Yang terdiri dan 33% wilayah atau sekitar 507.73 ha merupakan daerah daratan dan 67% atau sekitar 1.030,82 ha wilayah adalah perbukitan, terutama pada bagian timur. Topografi desa Wukirsari berada pada ketinggian antara 110 s/d 200 dpl, sebagian wilayahnya adalah pegunungan perbukitan dengan kondisi kemiringan tanah antara 20° s/d 65°.



Gambar 4.1. Peta Tata Ruang Kecamatan Imogiri

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2009

Wilayah Desa Wukirsari adalah termasuk daerah dataran rendah dengan kisaran ketinggian 50 s/d 150 m dan penguasaan air laut, dan sangat potensial untuk kondisi iklim yang stabil khususnya dalam aspek pertanian, dengan mengacu dua musim, yakni tropis dan iklim musim penghujan dengan curah hujan yang memadai mampu menjadikan desa Wukirsari sebagai pewaris kehidupan yang agraris. Dengan 1/3 dan luas wilayah adalah dataran rendah dan 2/3 daerah adalah perbukitan. Sedangkan hidrologi wilayah desa Wukirsari

terlintasi sungai besar yaitu sungai Opak dan sungai Celeng. Dan beberapa sungai kecil yang melintasi beberapa wilayah dusun, dengan demikian banyak terdapat jembatan sebagai sarana transportasi.

Lahan pertanian setengah teknis cukup sempit, sumber air irigasi dan DAM sindet hanya mampu mengalir sepertiga bagian wilayah wukirsari di sebelah barat. Sedangkan di sebelah selatan, utara, dan timur adalah tandus dan kering, karena hanya tergantung dan air hujan. Oleh karena keprihatinan irigasi itu maka perlu diupayakan pembangunan saluran irigasi lagi. Keadaan wilayah dimusim penghujan selalu ada bencana banjir tahunan seperti yang terjadi di aliran sungai Celeng, meskipun dimusim-musim kemarau mengalami kekeringan namun dimusim hujan akan melimpah bahkan banjir mengakibatkan korban lingkungan pemukiman, persawahan, perkebunan, perternakan, bahkan pernah menelan korban manusia. Di lain sisi keberadaan pegunungan dan perengan sering terjadi bencana tanah longsor. Kondisi permukaan tanah di Wukirsari adalah tanah gembur dan tanah tandus bebatuan. Untuk lahan gembur hanya sebagian kecil yang bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian dengan sistim pengairan irigasi dan DAM sindet, sedangkan yang lainnya dengan sistim sawah tadah hujan. Sebagai sumber air bersih dapat dihasilkan dengan sumur galian antara 8 s.d 10 meter. Sedangkan untuk dataran tinggi air dihasilkan oleh sumur bor. Kondisi alam Wukirsari masih tergolong stabil, dengan keadaan dataran tinggi adalah 2/3 wilayah mampu menghasilkan akar bebagai macam hasil hutan baik kayu untuk kebutuhan bangunan, mebel dan kayu bakar yang masih digunakan oleh sebagian masyarakat. Selain itu masih banyak daerah perkebunan yang dimanfaatkan sebagai penghasil jambu monyet, pisang, dan

lain-lain. Untuk bidang pertanian dapat dipanen padi, polowijo, dan hasil sayur-sayuran.

Kondisi alam Desa Wukirsari meliputi daerah pertanian, perkebunan, dan hutan. Jenis tanaman secara umum dapat tumbuh, dan di daerah tertentu terdapat berbagai jenis tanaman obat. Jenis tanaman pertanian yang ada seperti padi, jagung, kacang tanah, kedelai, ketela (singkong). Sedangkan untuk kehidupan binatang adalah hewan-hewan ternak yang terdiri dari kambing, sapi, ayam, dan berbagai unggas piaraan, sedangkan untuk hewan buas sudah punah. Dan berbagai hewan piaraan tersebut yang menonjol adalah untuk Jenis burung, di mana telah didominasi oleh masyarakat Pucung, yang konon sebelum ada virus flu burung telah menguasai pasaran sampai ke daerah Jakarta dan Bali, walau jenis burung tersebut tidak hanya dari lokal saja melainkan impor dan berbagai daerah.

4.3. Data Kependudukan Desa Wukirsari

Masyarakat desa yang merupakan *rural community* diartikan sebagai masyarakat yang anggotanya hidup bersama di suatu lokalitas tertentu, di mana seseorang merasa dirinya menjadi bagian dari kelompok. Mereka dalam berkehidupan terikat pada norma-norma yang ditaati bersama dan merupakan kesepakatan. Berikut disajikan data kependudukan yang bersumber pada potensi desa dan pemudanya. Data-data kependudukan tersebut meliputi penduduk berdasarkan jenis kelamin, struktur umur, struktur pendidikan, struktur mata pencaharian. Jumlah penduduk Desa Wukirsari pada tahun 2008 berjumlah 17.308 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak adalah di Dusun Karangkulon : 1.708 jiwa (482 KK) dan Nogosari 2 dengan jumlah penduduk 1.708 jiwa (462 KK).

Jumlah penduduk terendah terdapat di dusun Pundung sebanyak 487 jiwa (147 KK). Total jumlah penduduk desa Wukirsari adalah 17.308 jiwa.

Tabel 4.2. Jumlah penduduk Desa Wukirsari Menurut Jenis Kelamin

No.	Penduduk	Jmh RT	Jumlah		Total KK	Jmh Pend L	Total (Jiwa)		Total Pend
			L	P			L	P	
1	Singosaren	5	291	66	357	545	586		1131
2	Bendo	7	309	41	350	598	583		1181
3	Manggung	7	283	50	333	528	512		1040
4	Sindet	5	282	33	315	567	514		1108
5	Taliman	4	145	27	172	248	269		517
6	Pundung	4	117	31	148	239	248		487
7	Kedungbweng	4	145	37	182	297	282		579
8	Karangkulon	9	425	55	482	878	831		1709
9	Giriloyo	6	179	23	202	342	335		677
10	Cengkehan	4	196	35	231	448	426		874
11	Nagasari I	6	274	49	323	714	626		1340
12	Nogosari II	9	426	39	462	877	832		1709
13	Karangasem	6	348	46	394	652	592		1244
14	Jatirejo	7	347	44	391	633	628		1261
15	karangtalun	6	332	36	368	761	728		1487
16	Dengkeng	4	277	16	293	495	479		974
	Total	93	4,378	625	5,003	8,822	8,496		17.318
	Persentase (%)		87,51	12,49		50,94	49,06		

Sumber : Pemetan Swadaya 2009

Sedangkan data penduduk menurut struktur umur, 2.598 jiwa atau 15% penduduk di desa Wukirsari berumur lebih dari 50 tahun yang merupakan usia non produktif, sedangkan untuk usia produktif antara 15 – 49 tahun sebanyak 8.660 jiwa atau 50%. Sisanya adalah usia sekolah yaitu 6.060 jiwa atau 35%.

Tabel 4.3 Data Penduduk Menurut Usia

No	Pedukuhan	Total KK	Struktur Umur				Total jiwa
			0-14	15 - 24	25 - 44	45 Keatas	
1	Singosaren	357	396	283	283	170	1132
2	Bendo	350	413	295	295	177	1180
3	Manggung	333	364	260	260	156	1040
4	Sindet	315	388	277	277	166	1108
5	Tilaman	172	181	129	129	78	517
6	Pundung	148	170	122	122	73	487
7	Kedungbweng	182	203	145	145	87	580
8	Karangkulon	482	598	427	427	256	1708
9	Giriloyo	202	237	169	169	102	677
10	Cengkehan	231	306	219	219	131	875
11	Nogosari I	323	469	335	335	201	1340
12	Nogosari II	462	598	427	427	256	1708
13	Karangasem	394	435	311	311	187	1244
14	Jatirejo	391	441	315	315	189	1260
15	Karangtalun	368	520	372	372	223	1487
16	Dengkeng	293	341	244	244	146	975
Total		5.003	6060	4330	4330	2598	17318
Perentase (%)			34.99	25.00	25.00	15.00	100.00

Sumber : Pemetaan Swadaya 2009

Sedangkan data Penduduk menurut struktur pendidikan, untuk tinjauan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan memiliki rata-rata pendidikan yang belum memenuhi harapan. Dari Data yang terlihat ada sekitar 345 orang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sedangkan yang lulusan Sekolah Menengah Atas sebanyak 3.325 orang, dan lulus Sekolah Menengah Pertama sebanyak 4.722 orang, sementara yang lulus Sekolah Dasar sebanyak 5.320 orang. Selain pendidikan formal terdapat juga pendidikan informal yang ditempuh oleh masyarakat Wukirsari. Dan umumnya adalah pendidikan yang berhubungan dengan keagamaan seperti yang dilakukan di pondok Pesantren, atau Madrasah.

Tabel 4.4. Data Penduduk Menurut Struktur Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
A. Pendidikan Umum		
1	Taman Kanak-kanak.	945
2	Sekolah Dasar.	5.320
3	SMP /SLTP.	4.722
4	SMU / SLTA	3.325
5	Akademi / D1 – D3	155
6	Sarjana S1 – S3	190
B. Pendidikan Khusus		
1	Pondok Pesantren	104
2	Madrasah.	120
3	Kursus Ketrampilan	2.37

Sumber : Pemetaan Swadaya 2009

Data Penduduk menurut mata pencaharian penduduk desa Wukirsari pada umumnya berkaitan dengan sektor pertanian, perdagangan dan industri rumah tangga. Jumlah penduduk yang berprofesi menjadi petani sebanyak 2.840 jiwa (34,09%) dan buruh tani sebanyak 1.168 jiwa (14,02%). Penduduk yang berprofesi di sektor perdagangan sebanyak 577 jiwa, dan penduduk desa Wukirsari yang berprofesi dalam industri rumah tangga sebanyak 362 jiwa.

Tabel 4.5. Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

NO	Pedukuhan	Petani	Buruh Tani	Perkebunan	Perdagangan	PNS	Peg. Swasta	Industri RT	Lain-Lain	Jumlah
1	Singosaren	80	74	14	55	24	179	32	43	501
2	Bendo	150	105	9	47	24	145	14	51	545
3	Manggung	160	88	8	37	27	180	26	63	589
4	Sindet	125	66	13	25	8	112	39	38	426
5	Tilaman	74	46	17	34	16	145	12	47	391
6	Pundung	55	37	2	35	21	123	17	52	342
7	Kedungbweng	77	35	7	36	15	126	21	42	359
8	Karangkulon	205	75	14	45	24	145	27	32	567
9	Giriloyo	212	66	13	33	18	129	23	42	536
10	Cengkehan	140	43	5	53	21	155	17	38	472
11	Nogosari I	267	97	21	29	20	135	27	47	643
12	Nogosari II	225	91	15	32	14	142	31	36	586
13	Karangasem	215	67	13	33	23	154	23	39	567
14	Jatirejo	287	98	22	26	15	121	12	31	612
15	Karangtalun	293	105	15	25	17	113	18	32	618
16	Dengkeng	275	75	12	32	12	119	23	29	577
	Jumlah	2,840	1,168	200	577	299	2,223	362	662	8,331

Sumber : Pemetaan Swadaya 2009

4.4. Kondisi perekonomian dan sosial budaya

Bagi desa Wukirsari sektor perekonomian yang menjadi kegiatan utama adalah pertanian, selanjutnya ditunjang kegiatan industri rumah tangga, perdagangan, jasa. Karena perkembangan sektor usaha cukup rendah maka tata ruang yang ada terkait dengan sektor usaha bersifat antisipatif dalam arti penyediaan tata ruang desa untuk ditujukan penyediaan perkembangan tergantung pada perkembangan rencana-rencana yang belum pasti. Di desa Wukirsari beberapa kerajinan yang dikembangkan melalui rumah –rumah warga merupakan kegiatan secara turun temurun yaitu kerajinan kulit, kerajinan membatik, kerajinan menganyam bambu, kerajinan membuat genteng, dan lain-lainnya. Untuk kerajinan kulit dan kerajinan batik telah menembus pasar internasional.

Adapun sentra industri yang terkenal di Desa Wukirsari adalah Pucung Wukirsari - Sentra kerajinan tатаh sungging, Giriloyo Wukirsari - Sentra kerajinan batik, Banyusumurup - Sentra kerajinan keris. Imogiri - sentra pembuatan makanan keripik tempe.

Tabel 4.6. Warisan Budaya

No	Jenis	Waktu	Tempat	Keterangan
1	Majemukan, perti dusun bersih-bersih	Setelah panen raya	Dusun	Wayang kulit, Karnaval, do'a bersama
		setiap tahun		
2	Nguras Guci /Kong	Bulan Suro (Jum'at/Selasa Kliwon)	Makam raja-raja Mataram	Karnaval
3	Suran	Tiap tgl 9 suro	dusun	Kenduri
4	Selikuran	Tgl 21 romadhon	dusun	kenduri
5	Sadranan	Menjelang romadhon	dusun	Do'a
6	Rejeban	Tiap bln Rejeb	Dusun	Do'a
7	Mauludan	Tiap bln Mulud	Dusun	Do'a
NORMA ADAT.				
1	Gotong royong	Tiap ada keperluan masa	dusun	Jika tidak mau gotong-royong tidak akan di royong

Sumber : Pemetaan Swadaya 2009

Adapun kondisi sosial budaya Desa Wukirsari sebagai desa pusat pertumbuhan diharapkan berkembang sebagai pemukiman penduduk untuk menampung pertumbuhan jumlah penduduk dan juga menyiapkan datangnya pendatang sebagai wisatawan. Dengan jumlah penduduk yang pasti akan bertambah ini maka diperlukan fasilitas-fasilitas penunjang yang memadai demi kenyamanan dan keamanan. Fasilitas-fasilitas ini tentunya oleh pemerintah daerah perlu disiapkan melalui perencanaan tata ruang desa dan pengaturan lokasi permukiman. Mengingat desa Wukirsari ke depan dirancang menjadi jalur wisata desa, maka proyeksi pertumbuhan penduduk yang berasal dan pertambahan cukup menonjol. Ketika kegiatan wisata cukup meningkat maka dapat dipastikan meningkat pula jumlah pendatang. Hal tersebut perlu diantisipasi dengan cara menyiapkan daya saing masyarakat setempat sehingga program-program yang telah ada untuk dapat diprioritaskan agar cepat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produk lokal perlu ditingkatkan desain dan pemasarannya. Bantuan permodalan yang telah merambah pasca gempa perlu ditingkatkan lagi dan ditindaklanjuti. Serta strategi pemasaran/promosi, oleh karena itu campur tangan pihak pemerintah sangat diharapkan, begitu juga pihak swasta. Kegiatan sosial di Wukirsari dikoordinir oleh lembaga kemasyarakatan melalui kelompok unit kerja. Dilihat dari keberhasilan pembangunan di wilayah desa/dusun untuk mengembangkan wilayahnya adalah dari kegiatan gotong royong, kerja bakti, bahu membahu dengan masyarakat di sekitarnya.

Kelompok RT (Rukun Tetangga) kegiatannya cukup menonjol dan spesifik akan pembangunan baik dari pengerjaan dan segi pembiayaan, meski demikian kesatuan warga dusun masih tetap terpelihara. *Event-event* penting

seperti peringatan yang selalu dilakukan di desa yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya adalah cara melestarikan kearifan lokal yang menjadi tradisi dan sebagai pembelajaran bagi generasi penerusnya. Kelompok-kelompok pengembang budaya ekspresi berupa tarian, wayang dan tembang akan terus berkembang di Desa Wukirsari. Adapun kegiatan budaya yang terus diperingati itu dapat kita lihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.7 Kegiatan Budaya

No	Kegiatan	waktu	Lokasi	Keterangan
1	Malam Tirakatan	Malam satu suro	Tiap RT/dusun	-
2	Malam Tirakatan	Malam peringatan kemerdekaan	RT/dusun/desa	-
3	Kemerdekaan RI	Tgl 17 agustus	RT/dusun/desa	-
4	Hari Kartini	21-Apr	RT/dusun/desa	PKK
5	Sumpah Pemuda	28 Oktober	RT/dusun/desa	Karang Taruna

Sumber : Pemetaan Swadaya 2008

Selain itu Desa Wukirsari mempunya ciri khas ketrampilan seni warisan budaya yang dihasilkan penduduknya yaitu batik tulis, kerajinan kulit, kerajinan bambu, bambu dan lain-lain. Melihat dari perkembangan desa Wisata maka industri rumah tangga yang sangat baik berkembang di desa Wukirsari industri rumah tangga yang mampu meningkatkan pendapatan perekonomiannya . Kegiatan ini dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

Tabel 4.8. Kerajinan industri rumah tangga

No	Jenis Kerajinan	Jumlah Pengrajin	Lokasi Pengrajin	Keterangan
1	Kerajinan kulit	750 org	Pucung	Yang masuk anggota koperasi
2	Kerajinan Batik	465 org	Giriloyo	
3	Kerajinan Bambu	333 org	Karangtalun dan jatirejo	
4	Kerajinan Genteng	242 org	Demi bendo	
5	Kerajinan Benang	67 org	Sindet, Nogosari I,II	
6	Kerajinan Manik-manik	144 org	Sindet, Nogosari I,II	

Sumber : Pemetaan Swadaya 2009

Dan masih banyak lagi potensi yang dapat dikembangkan sebagai perkembangan kondisi sosial Desa Wukirsari antara lain rumah-rumah tradisional, bendungan sungai opak, wisata alam gunung Bathok dan sumber mata air Bengkung yang berbatasan dengan desa Mangunan. Potensi ini pun dikembangkan secara swadaya oleh masyarakat, mereka saling bahu-membahu membuat semacam bendungan sungai Opak atau Kaliopak. Dan saat ini Kaliopak mampu menyuguhkan pemandangan yang sangat menarik bagi wisatawan khususnya pada sore hari menjelang malam.

BAB V HASIL PENELITIAN

5.1. Pelaksanaan Membangun Kewirausahaan Pemuda di Desa Wukirsari

Ada begitu banyak perangkat perundang-undangan yang mengatur tentang kewirausahaan sebagai upaya menempatkan aspek penting dalam dinamika perkembangan ekonomi yang membuka jalan bagi peran pemuda dalam berwirausaha. Potensi wirausaha di Indonesia menurut survey BBC (dalam LP3ES, 2016) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat *entrepreneurship* paling tinggi, yang kemudian disusul oleh Amerika Serikat, Kanada, India dan Australia dengan menggunakan empat indikator yaitu (1) kreatifitas dan inovasi, (2). Tingkat kesulitan memiliki usaha, (3) tingkat kemauan memiliki usaha, dan (4). Tingkat kemudahan menjalankan usaha. Dan dalam penelitian ini peneliti mengambil fokus dan lokus di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.

Desa Wukirsari merupakan desa agraris dengan mata pencaharian utama pada pertanian, namun dalam perkembangannya pertanian ini tidak akan cukup memadai dengan jumlah lahan yang tidak bertambah sementara jumlah penduduk terus meningkat. Penduduk desa Wukirsari yang memiliki usia produktif berjumlah 8.660 jiwa atau 50 % dengan mata pencaharian lebih banyak sebagai petani sebanyak 2.840 jiwa (34.09 %) dan buruh tani 1.168 orang (14.02%), dengan ketersediaan lahan sebesar kurang lebih 307.7 ha, sehingga setiap petani akan menggarap lahan seluas 0.11 ha. Jika hasil panen yang dihasilkan satu sampai dua kali panen maka petani Desa Wukirsari masih memerlukan lahan untuk digarap dalam memenuhi tingkat kebutuhan

ekonominya. Sementara untuk membuka lahan baru rasanya sudah tidak memungkinkan, sehingga petani harus mulai memikirkan intensifikasi pertanian dengan menggunakan bibit unggul atau melakukan kegiatan lainnya sebagai penunjang. Jumlah usia produktif tersebut yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki perbandingan yang hampir sama, artinya potensi usia produktif untuk kaum perempuan menjadi sangat penting. Sedangkan angka penduduk yang tidak memiliki pekerjaan tetap di Desa Wukirsari sebesar 8% atau sebanyak 662 orang. Dari data ini tentu saja dibutuhkan lapangan kerja baru diluar sektor pertanian, hal ini karena mulai minimnya lahan. Untuk itu diperlukan pengembangan kegiatan kerajinan yang sudah ditekuni untuk meningkatkan kualitas hasil produksi melalui pembekalan keterampilan khususnya bagi usia produktif melalui pembinaan, pelatihan keterampilan, dengan demikian akan meningkatkan produksi yang memiliki kualitas yang baik. Selain itu akan dapat membuka lapangan pekerjaan baru khususnya bagi pemuda karena tanah garapan adalah milik orang tua mereka.

Masyarakat dan khususnya pemuda di Desa Wukirsari menjadi pelaku usaha adalah sebuah pilihan yang menjanjikan, melalui industri rumah tangga yang dikembangkan akan menumbuhkan iklim berdagang, menjual jasa, membuka warung makanan atau kuliner dengan berbekal keterampilan tertentu yang didapat dari keluarga atau lingkungan. Kemampuan dalam hal keterampilan serta minat yang tinggi dari diri pemuda di Wukirsari telah dibuktikan ketika bulan mei 2006 Yogyakarta telah diluluhlantahkan dengan peristiwa bencana alam, Desa Wukirsari sekan-akan telah lumpuh dari seluruh persendian kegiatannya dan mampu bangkit dengan mengembangkan kesadaran sebagai desa wisata.

Namun saat ini Desa Wukirsari telah kembali dengan seluruh aktifitas yang ada

khususnya dalam hal kewirausahaan. Untuk melihat perkembangan yang terjadi maka pelaksanaan membangun kewirausahaan pemuda dapat dilihat meliputi :

- (1). Program,
- (2). Mekanisme,
- (3). Aktor yang terkait dalam program dan perannya masing masing,
- (4). Mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal : sistim Nilai, Institusi dan artefak

5.1.1. Program

Desa Wukirsari telah dicanangkan sebagai Desa Wisata Budaya dan ini merupakan program pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Usaha pencanangan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan perekonomian akibat mulai sempitnya lahan pertanian dan melihat potensi yang sangat baik di Desa Wukirsari sebagai Desa Wisata Budaya. Artinya dalam strategi ini pemerintah Kabupaten Bantul mulai mengembangkan fisik atau kekayaan lokalitas yang ada, dengan mengembangkan dunia usaha melalui industri rumahan yang memproduksi hasil-hasil kerajinan dan berusaha meningkatkan kemampuan sumberdaya manusianya, dalam hal ini pemuda.

Sehingga dengan pencanangan sebagai Desa Wisata Budaya ini akan memberikan perubahan yang dapat mengurangi kesenjangan dan meningkatkan taraf hidup warganya serta meningkatkan pendapatan daerah. Tentu saja hal ini membawa satu perubahan besar, di mana mata pencaharian utama masyarakat Desa Wukirsari awalnya adalah pertanian kemudian mulai mengembangkan industri rumahan secara kreatif dari warisan leluhur yaitu pembuatan wayang dari

kulit (wayang kulit) atau tatah sungging, batik, kerajinan bambu dan kuliner khusus makanan khas daerah Bantul.

Pada saat awal kunjungan ke Desa Wukirsari peneliti dipertemukan dengan bapak Nur yang merintis awal terbentuknya kelompok sadar pariwisata, selanjutnya dalam wawancara di tanggal 29 Oktober 2015, Jam 11.00 Wib di pendopo Kabupaten Bantul, beliau banyak bercerita tentang awal mulanya kegiatan sadar pariwisata ini sebagai berikut:

Desa Wukirsari ini awalnya adalah desa biasa, namun selain pertanian masyarakatnya memang sudah giat membuat kerajinan membuat wayang dan membatik sebagai mata pencaharian tambahan. Lantas begitu desa Wukirsari ditetapkan sebagai desa Wisata kami mulai membuat kelompok sadar pariwisata pengunjungnya sangat sedikit.

Lebih lanjut disampaikan bapak Nur, baru sejak ditetapkan sebagai desa Wisata ditahun 2008 setelah bencana alam semuanya mulai ditata, salah satunya kelompok sadar wisata ini dibantu oleh Dinas pariwisata, dalam hal menggalakkan kesadaran sebagai Desa Wisata. Dan kelompok kegiatan sadar wisata ini lantas sepakat bahwa kerajinan wayang dan batik menjadi andalan desa wisata, sementara untuk kulinernya wedang uwuh dan sate klatak. Selain itu juga ada program *ngajari* wisatawan membatik.

Dalam Wawancara dengan ibu Mgy yang merupakan pamong Desa (29, Oktober 2015, jam 13.00 Wib) disampaikan bahwa:

Permasalahan yang timbul dalam bidang perekonomian yang harus segera diatasi di Desa Wukirsari adalah ketersediaan lahan pertanian yang tidak mungkin lagi diperluas sehingga dibutuhkan satu pemikiran bersama antara Pemerintah Desa dan masyarakatnya untuk mengatasi hal tersebut.

Lebih lanjut dalam wawancara tersebut ibu Mgy seorang pamong Desa menyampaikan tentang kondisi perekonomian masyarakat Desa Wukirsari sebagai berikut (Wawancara tanggal 2 November, 2015, Jam 10.00 Wib) :

Desa Wukirsari bukanlah desa miskin, hanya hasil panen mulai berkurang karena tanahnya kian sempit. Tingkat perekonomian warga yang kurang merata, karena kemampuan sumberdaya manusianya.

Lebih lanjut disampaikan ibu Mgt adanya bencana gempa pada tahun 2006, menambah persoalan tersendiri karena harus kembali membangun yang sudah ada.

Wawancara (3 November, 2015 Jam 12.00 Wib) dengan Mas Ydh seorang pemilik persewaan mobil, motor dan sepeda sebagai usaha jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang sedang berlibur di Yogyakarta dan selanjutnya tertarik untuk mengunjungi makam Raja-Raja di Imogiri, dalam wawancara disampaikan sebagai berikut :

Desa Wukirsari sebagai desa wisata telah mendorong berkembangnya perekonomian di luar pertanian, hal ini karena ada kebutuhan pasar dalam memenuhi fasilitas pendukung untuk para wisatawan. Contohnya saya saat ini menjadi penyedia mobil untuk disewakan. Beberapa teman membuka warung makan dan kios yang menjual aneka oleh-oleh seperti kaos, baju batik, atau permainan dari kerajinan baik bambu atau kayu atau kulit. Dan kami saling mengikatkan diri untuk saling membantu sesuai bidangnya masing masing. Hal ini tumbuh begitu saja karena kita saling kenal baik.

Jadi kami-kami ini saling membantu sesuai bidang masing-masing untuk membuat wisatawan senang. Nah fungsi saya sebagai wirausaha jasa penyewaan kendaraan ya memberikan arahan kepada wisatawan kemana harus membeli oleh-oleh atau makan - makanan khas Bantul.

Lebih lanjut disampaikan mas Ydh,

Namun ada persoalan kualitas barang produksinya yang harus ditingkatkan. Jika untuk wisatawan asing, kami dari persewaan mobil sering diminta untuk berkeliling melihat produk khas Bantul dan kadang kalau cocok mereka setelah sampai di negaranya minta pada kami untuk dikirimkan lagi. Namun yang menjadi kendala bagi kami adalah kualitas barang dan kemampuan produksi dalam jumlah pesanan tertentu. Jumlahnya sering tidak mencukupi atau terbatas.

Lebih lanjut disampaikan mas Ydh (4 November, 2015, Jam 20.00 Wib),

Kalau wisatawan asing suka dengan hal-hal yang sangat lokal, misalnya budaya keraton, wisatawan dapat merasakan pesona mistik yang eksotik dan estetis yang membuat mereka ingin hadir kembali, ditambah dengan makanan yang menarik seperti bakmi Jowo, sate klatak dan wedang jahe sangat digemari.

Mereka juga belajar membuat batik, atau ada juga yang tertarik untuk belajar menari. Selain itu pesona Malioboro melengkapi ketertarikan wisatawan

asing, Malioboro tertata rapi sebagai pedestrian memberikan kenyamanan bagi wisatawan asing.

Lebih lanjut disampaikan kami tinggal mengantar ke Gazebo (tempat *Show room* barang bangang hasil kerajinan) jika mereka ingin belanja batik atau oleh-oleh lainnya. Yang masih kurang barangkali cara mengemas barang-barang yang untuk oleh-oleh tersebut, jadi mesti ada pembelajaran atau pelatihan tersendiri agar menarik dan bercita rasa tinggi dengan nuansa khas Bantul.

Wawancara selanjutnya bersama pemuda wirausaha yang juga dari kelompok karang taruna namanya mas Ujg (5 November, 2015, Jam 10.00 Wib)

yang meneruskan usaha kakaknya, adapun yang disampaikan adalah tentang :

Pembangunan infrastruktur pasca bencana 2006, dengan cepat lingkungan yang rusak terpulihkan, hanya saja persoalan kami adalah barang-barang yang sudah kami produksi dan belum sempat dikirimkan, hancur dan ini kerugian pada kami karena kami tidak mengasuransikan. Akibatnya kami menderita kerugian yang cukup besar.

Lebih lanjut di sampaikan mas Ujg

Usaha kami dulunya dibantu oleh orang tua angkat dari salah satu BUMN. Jadi kami adalah wirausaha binaan dan dilatih sampai produk jadi. Mereka lah yang menjualnya untuk kebutuhan mereka atau juga mungkin di jual keluar. Jadi jelas produk kami terbeli, selain itu pengembangan pelatihan didasarkan dari hasil produk kami untuk meningkatkan kualitas.

Namun seiring dengan pergantian sistem pemerintahan, kegiatan kami yang dulunya sudah baik itu seperti terhenti, orang tua angkat memiliki kebijakan sendiri dan dengan alasan dana kami pun tak lagi memasok ke orang tua angkat tersebut.

Lebih lanjut disampaikan mas Ujg yang sebelumnya telah beberapa kali bersama orang tua angkat dalam kewirausahaan berkeliling ke Australia untuk memamerkan produknya.

Agak sulit mengangkat kembali kegiatan wirausaha yang dulu sudah berjalan dengan baik ini akibat Bencana dan perubahan kebijakan pemerintah.

Lebih lanjut yang disampaikan oleh mas Ujg, bahwa usaha yang dijalankan ini dulu dirintis oleh dirintis kakaknya.

Kami, melakukan kegiatan usaha tidak semudah dulu adanya kegiatan nyata dari pemerintah yaitu adanya orangtua angkat atau sebagai binaan salah satu BUMN dan perbankkan mengucurkan anggaran dengan syarat yang tidak rumit sebesar Rp. 50.000.000 untuk pemuda wirausaha yang usahanya sudah jalan namun butuh pengembangan. Proram ini sangat membantu kami.

Saat ini kalaupun program bantuan itu ada baik pelatihan ataupun pendanaan tetapi kurang jelas sosialisasinya dan tidak terintegrasi dengan baik antara antara Pemerintah, Swasta maupun Perbankan serta kami pemuda wirausaha sebagai sasarannya. Akibatnya pelaksanaan program bantuan tersebut tidak merata hanya teman –teman wirausaha yang memiliki koneksi atau kenal saja yang dapat menerima program tersebut. Mestinya ada sosialisasi yang jelas dan ada keterkaitan atau saling terkait antara pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan tersebut

Wawancara selanjutnya adalah di perpustakaan Desa Wukirsari, perpustakaan tersebut hasil sumbangan dari PT Medco (perusahaan perminyakan) dan Bank Mandiri. Dalam perpustakaan berisi buku-buku yang dapat dibaca ditempat ataupun dipinjam. Penunggu perpustakaan ada dua orang, dan salah satu yang diwawancara adalah mbak Sri seorang wirausaha yang mengemas minuman *Wedang Uwuh* (minuman kas) yang ada di Makan Imogiri yang sangat disukai karena hangat dan menyehatkan. Dalam wawancara tersebut mbak Sri menceritakan perkembangan wedang uwuh yang akhir – akhir ini sudah mulai dipasarkan sampai ke Provinsi Yogyakarta bahkan di kirim ke daerah lain. Wawancara dengan mbak Sri dilakukan pada 5 November, 2015, Jam 14.00 Wib, sebagai berikut:

Wedang uwuh itu dari bahan alam tumbuhan-tumbuhan berupa daun dan serat kayu tertentu yang tumbuh di lingkungan Kecamatan Imogiri, agar manis kami tambahkan gula batu. Minuman ini mulai terkenal saat kami menjual di hari minggu pagi dengan gelaran tikar di sekitar makam, jadi saat sebelum atau sesudah naik ke makam rasanya nikmat sekali kalau minum wedang uwuh, lama –lama dari para tamu membeli untuk oleh – oleh, saat ini kami buat kemasan tinggal sedu dengan tidak mengubah bentuk yaitu dedaunan dan kayu-kayuan dengan harga Rp. 1500.

Lebih lanjut disampaikan mbak Sri yang lulusan SMA ini, berharap pemerintah memfasilitasi pelatihan untuk cara-cara pengepakan dan menjual

minuman dengan lebih baik. Harga kami kan murah sekali coba dibandingkan kalau jualannya seperti di Mall tentu kami punya keuntungan lebih. Tentu dengan penampilan wedang uwuh yang lebih elegan.

Berbeda dengan mbak Sri, seorang pemuda wirausaha mas Sgt namanya, (wawancara, 6 November, 2015, Jam 12.00 Wib) menyampaikan bahwa :

Desa Wukirsari ini selain pertanian, juga memiliki mata pecaharian sebagai peternak dan perkebunan buah, namun masih harus dikembangkan melalui pelatihan agar hasilnya lebih baik, saat ini saya beternak ikan di kolam tadinya saya membuat desain untuk batik. Agak bosan jadi mencoba beternak ikan.

Lebih lanjut disampaikan mas Sgt:

Desa Wukirsari sendiri telah melakukan upaya menuju kepada program yang cita-citakan dan sedang mengembangkan program kewirausahaan dengan mengajak seluruh pemuda dan ibu-ibu muda untuk melakukan :

- a. Meningkatkan produktivitas pada pertanian, kerajinan, melalui pemberdayaan pemuda melalui karang taruna yang di pimpin Mas Donny.
- b. Membudidayakan pemanfaatan lahan-lahan di sekitar permukiman, untuk menanam buah ataupun sayuran dan hal ini akan meningkatkan perekonomian serta lapangan kerja baru.
- c. Pemuda karang taruna bersama Pemerintah Desa melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, sebagai jawaban atas ditetapkanya desa Wukirsari sebagai Desa wisata

Dalam wawancara di kantor kelurahan Wukirsari, bersama ibu Mgt dan beberapa tamu yang ada di kelurahan, mereka bercerita yang kemudian oleh peneliti disarikan (wawancara , 7 November 2015, Jam 11.00 Wib) sebagai berikut

1. Industri kerajinan batik di Kawasa Giriloyo, tujuannya adalah untuk menampung para pengrajin telah di bangun Gazebo Batik Giriloyo yang diharapkan mudah untuk pemasaran kerajinan batik, sekaligus untuk pembinaan dari sisi pemasaran dan keterampilan.
2. Industri kerajinan kulit, industri ini sudah terkenal baik dilingkungan domestik maupun mancanegara, terdapat showroom disepanjang jalur karangasem dan akan ditata kembali untuk mempermudah para

wisatawan di kawasan Pucung, ditambah akan dibangun *homestay* disekitar showroom tersebut

3. Kerajinan bambu, tersebar di kawasan Pucung dan telah mendapatkan respon baik dari LSM (Lembaga Sosial Masyarakat), akan terus ditingkatkan kualitas produk dan pemasarannya.
4. Wisata air dan Pasar Burung, terletak di Dusun Singosaren
5. Wisata Ceremonial, di daerah tempat peninggalan sejarah makam Sunan, Cirebon dan makam Raja-raja.
6. Wisata Gunung Bathok, lokasinya terletak di puncak pegunungan perbatasan dusun singosaren dan dusun sindet.

Yang kesemuanya itu memberikan dampak pada meningkatnya penghasilan masyarakat desa.

Sedangkan wawancara dengan pihak lainnya adalah dengan pihak perbankan yang memiliki perhatian khusus, wawancara dilakukan pada 10 Novemver 2015 dengan bapak Cyrs seorang pengelola salah satu Bank. Adapun yang disampaikan oleh bapak Cyrs adalah:

Perbankan memiliki perhatian yang besar dengan keberlangsungannya pariwisata di Indonesia khususnya wisata budaya. Sehingga sangat penting buat kami melakukan pembinaan dan secara aktif melakukan pendampingan dalam mengembangkan potensi daerah. Harapannya adalah membuka peluang usaha dan menciptakan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Lebih lanjut disampaikan bapak Cyrs tentang keyakinannya mau menjadi pembina bagi kerajinan di Desa Wukirsari ini adalah karena kerajinan wayang di Desa Wukirsari ini telah menjadi daya tarik baik dari dalam ataupun dari luar negeri seperti Swiss, Perancis, Belanda dan Jepang telah pernah belajar kesenian wayang di desa ini. Sehingga desa tersebut memerlukan pengembangan. Dan untuk itu harus ada lembaga seperti kami ini yang bersedia turun tangan.

Wawancara selanjutnya dengan pihak perbankan lainnya yaitu dengan ibu SR (Wawancara, 10 November 2015, Jam 14.00 Wib) yang berkantor di jalan Imogiri, beliau menyampaikan

Bahwa perbankan memiliki anggaran untuk membantu para wirausaha, namun persoalannya pemuda ini membutuhkan pengarah yang lebih dan kami perbankan membutuhkan pemuda wirausaha yang memiliki konsistensi dan komitmen, bukan yang ikut-ikutan aris saja.

Jika saja program inkubator dapat berjalan dengan baik tentu kami perbankan akan lebih senang, karena terukur tingkat keberhasilan dan kesungguhan dari pemuda wirausaha dan dukungan pembinaan Pemerintah.

Senada dengan Ibu SR, dari perbankan lainnya yang siap mengucurkan dana KUR adalah bapak Smt (wawancara , 11 November 2015, jam 12.00 Wib), menurut beliau :

Pemuda di Desa Wukirsari ini sangat kreatif dan inovatif, hanya membutuhkan bimbingan dan pengarahan yang lebih baik khususnya dalam hal manajemen dan pemasaran. Dukungan bimbingan atau pembinaan ini akan sangat termonitor dengan baik jika pemerintah dalam pelaksanaannya berjalan bersama-sama dengan program inkubator yang terukur waktu dan keberhasilannya. Kami perbankan akan siap menjadi pendamping baik dari sisi modal ataupun mempromosikan sebagai pemuda wirausaha binaan kami. Dan sebaiknya untuk terjadi pemerataan maka harus dibuat kejelasan aturan jika sudah dibina dari bank A, jangan lagi dibina sama bank B, agar semua pemuda pemula wirausaha bisa mendapat bagian.

Selanjutnya Pemerintah daerah dengan di fasilitasi Kodim mengadakan temu kader Wirausaha Pemuda se Kabupaten Bantul untuk melihat dan lebih mendengarkan keinginan pemuda, acara dilaksanakan pada tanggal 26 November 2015, atas undangan PEMDA Bantul maka hadir peneliti, Dinas Pora, Dinas Pariwisata, UKM, Ketenagakerjaan, TNI, pemuda wirausaha dan masyarakat lainnya.



Gambar 5.1. *Backdrop Diskusi Panel*

Acara ini sangat menarik, ada keterbukaan dari para peserta baik dari lintas dinas pelaksana kegiatan kewirausahaan (hadir dari Dinas Pora, dinas UMKM, dinas tenaga kerja), pemuda wirausaha, pemuda FKPPi sebagai pemuda wirausaha pemula, pemuda yang akan melakukan wirausaha dan masyarakat. Temu Kader ini diprakarsai oleh bapak dari Kodim Bantul dengan undangan lengkap dari semua aktor pelaksana program kewirausahaan pemuda, yang didukung oleh dinas pora. Tujuannya adalah untuk melihat keterlibatan semua pihak dengan permasalahan yang ada.



Gambar 5.2. Pelaksanaan Diskusi Panel.

Diskusi bersama ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, disinilah nilai budaya yang harus disadari bersama bahwa untuk membangun itu harus dari jiwanya baru badannya ("Bangunlah Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya") (Lagu Indonesia Raya, WR Supratman). Dan dari diskusi bersama tersebut tergali dengan jelas seluruh potensi dan keinginan dari masing-masing pelaksana kegiatan membangun kewirausahaan pemuda yaitu adanya beberapa hal yang harus segera ditindaklanjuti (disarikan oleh peneliti), yaitu :

- 1) Adanya dampak yang harus ditindak lanjuti dari penetapan Desa Wukirsari sebagai Desa Wisata.
- 2) Tindak lanjut tersebut dalam hal peningkatan kualitas pemuda wirausaha melalui program kegiatan dalam bidang pelatihan kewirausahaan yang meliputi, peningkatan keterampilan, manajemen, pemasaran dan keuangan
- 3) Membuka kemitraan dalam hal pemasaran dan permodalan serta pelatihan bersama sama dengan Perguruan Tinggi, Swasta

4) Pemetaan kemampuan sesuai potensi yang ada pada Dusun-dusun di Wukirsari. misalnya yang terdata oleh peneliti adalah :

a. Di Dusun Dengkeng dengan adanya *showroom* Kerajinan bambu bertujuan untuk menciptakan wadah atau tempat hasil kerajinan untuk mempermudah pemasaran.

b. Di Dusun Dengkeng dengan pelatihan kerajinan anyaman bambu bagi kaum perempuan, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas produk hal ini karena pasar telah menuntut para pengrajin harus benar-benar memiliki kualitas yang baik untuk meningkatkan pemasaran.

c. Di Dusun Giriloyo melalui pelatihan manajemen batik, bertujuan meningkatkan kualitas industri batik untuk dapat bersaing di pasaran

d. Di Dusun Giriloyo adanya Usaha Kecil Mandiri, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan mengurangi pengangguran.

e. Di Dusun Karangasem adanya pelatihan kerajinan tatah Sungging/kulit, tujuannya untuk meningkatkan hasil dan kualitas industri

f. Di Dusun Karangkulon melalui pembangunan kiosisasi tujuannya untuk mengurangi pengangguran dan memasarkan produk yang ada se Desa Wukirsari.

g. Di Dusun Manggung adanya pembangunan Ruko, tujuannya untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi pengangguran.

h. Di Dusun Nogosari II melalui Pembuatan kios pengrajin tujuannya untuk memudahkan akses pemasaran dan sebagian pasar kerajinan kulit, dan bambu.

i. Di Dusun Nogosari melalui pelatihan desain produk, Plencing, Karang asem bertujuan untuk berbagi keterampilan yang sering tersisih oleh ketatnya persaingan pasar.

j. Di Dusun Sindet melalui pelatihan pertukangan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga ahli dalam hal pertukangan.

k. Di Dusun Sindet melalui pelatihan usaha kecil menengah, bertujuan untuk memahami permasalahan permodalan.

l. Di Dusun Bendo melalui adanya pembangunan pabrik genteng press bertujuan meningkatkan produksi yang tadinya manual menggunakan teknologi mesin.

m. Di Dusun Bendo pelatihan sebagai tempat penampungan sampah, bertujuan sebagai bak penampungan sampah yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan bakar pengolahan genteng.

n. Di Dusun Cengkehan 4 melalui pelatihan keterampilan PKK, pelatihan ini khusus untuk tata boga dan menjahit, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan mengurangi pengangguran.

o. Di Dusun Karang kulon, melalui pembinaan UMK bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran

p. Di dusun Kedawung, melalui pembinaan usaha kecil dan bengkel, bertujuan untuk pembinaan wirausahawan makanan kecil, industri

tempe khususnya dalam pemasaran dan permodalan serta pengusaha bengkel kecil.

q. Di Dusun Manggung Galian C atau tambang batu putih, bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan menata lingkungan.

r. Di Dusun Pundung Pelatihan komputer/ internet bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sebagai sarana mengurangi pengangguran

Sedangkan pada program kegiatan yang sudah terselenggara di Desa Wukirsari dalam bidang pembangunan fisik adalah:

1. Rehab Masjid Sunan Cirebon di Dusun Cengkehan yang bertujuan untuk melestarikan warisan/peninggalan budaya keraton yang memerlukan perawatan intensif
2. Pembangunan tata wisata ritual makam Sunan Cirebon di Dusun Cengkehan, yang bertujuan untuk menjaga keberadaan makam karena lokasi rawan longsor .
3. Penataan Gardu pandang di Dusun Jatirejo, bertujuan menata kembali kawasan wisata agar bisa menarik wisatawan lokal luar negeri
4. Kios Gazebo lanjutan di Dusun Karangkulon, bertujuan untuk lebih menarik dalam pemasaran karena letaknya yang strategis sebagai tempat pemasaran batik.
5. Pembangunan jalan menuju makam raja-raja di Dusun Kedungbweng , bertujuan untuk mempermudah akses ke makam raja-raja dan jalur alternatif serta jalur evakuasi wisata alam.
6. Kolam renang di Dusun Pucung bertujuan untuk melengkapi fasilitas pariwisata.

7. Wisata alam di Dusun Sindet , lokasi ini memanfaatkan kedekatan lokasi dengan makam raja –raja di pajimatan sehingga wisata air sebagai gardu pandang kota Jogjakarta di waktu sore.
8. Wisata Air di Dusun Singosaren, bertujuan memanfaatkan areal tepian sungai opak yang sangat berpotensi untuk kawasan wisata air.
9. Jalan lingkaran Bendo-Singosaren, merupakan penataan wisata air dan lajur penghubung rencana pemukiman.
10. Jalur hijau buah-buahan di 7 dusun, bertujuan menciptakan kawasan penghijauan yang produktif.

Untuk dapat mengembangkan seluruh program di atas dibutuhkan kerjasama dari para aktor kebijakan pelaksanaan kewirausahaan pemuda di Desa Wukirsari yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Swasta melalui program teknis yang diperlukan yaitu pembinaan melalui pelatihan, baik itu pelatihan untuk pemuda wirausaha pemula, pelatihan peningkatan produksi bagi pemuda yang telah berwirausaha, pelatihan pemasaran dari produk yang sudah diproduksi, bantuan permodalan, pameran bersama dan membentuk wirausaha muda berprestasi, sampai pada pendampingan berkelanjutan dan tentu saja pelatihan dalam manajemen pengelolaan suatu usaha.

Jika dilihat dari program desa wisata yang merupakan program pariwisata ini oleh peneliti dari pengamatan dan wawancara telah melahirkan kreativitas pemudanya dalam melakukan wirausaha yaitu tumbuhnya industri rumahan berupa kerajinan-kerajinan seperti : produksi berbahan kulit, kain batik tulis, bambu, ayaman benang, manik –manik dan kayu serta kuliner makanan khas Imogiri. Selain itu juga bermunculan pengobatan tradisional, wisata air, wisata alam (hutan wisata Wonokromo) serta peternakan .



Gambar 5.3: kegiatan pemuda pada tatah Sungging

Pemuda dusun Karangasem ini melukis di atas kulit untuk membuat souvenir dari kulit , berupa hiasan dinding, gantungan kunci dan tokoh tokoh wayang. Kegiatan ini dilakukan setelah mereka sekolah dan berkumpul pada satu tempat di rumah penduduk yang menggiatkan kegiatan ini. Hasilnya selanjutnya akan dijual melalui sentra industri kerajinan atau wisatawan dapat langsung menandangi lokasi untuk melihat cara peoduksi atau bahkan ikut mencobanya.



Gambar 5.4 : Kegiatan membatik

Foto ini diambil pada saat bapak dari kementrian Pemuda dan olah raga mengajak diskusi ibu-ibu muda sedang melakukan membatik. Kegiatan ini juga dilakukan di salah satu rumah penduduk yang memang menngeluti dunia batik kain sejak leluhur sebelumnya. Kegiatan ini adalah kegiatan turun temurun dan beberapa warga yang memilikimkeahlian yang sama berkumpul di rumah warga yang memiliki tempat lebih luas. Setelah proses produksi selaesai maka tugas warga yang ketempatan tersebut untuk memasarkan atau menitipkannya di Gazebo sebagai showroom kerajinan . Terkadang dinagi tugas bagi ibu ibu yang tidak dapat pergi dari rumah mereka hanya mengambil kain polos dan membatiknya dirumah sendiri namun semua kebutuhan produksi didukung oleh salah satu warga yang mampu. Biasanya satu kelompok industri rumahan ini berjumlah 5 ssampai 10 orang.



Gambar 5.5 : Kegiatan menyiapkan kemasan

Gambar diatas adalah kegiatan disalah satu sekolah SMK yang mengirimkan anak didiknya untuk melakukan kegiatan membuat kemasan atau bungkus dari hasil produksi industri kerajinan sebagai daya dukung untuk memberikan kemaan yang menarik bagi produk produk yang telah diproduksi.

Hal ini tentu saja menjadi daya tarik tersendiri. Kemasan yang dibuat bercorak secara umum adalah budaya seni dari Yogyakarta dan khususnya motif batik dari Bantul yang memiliki ciri khas warna tersendiri.

Program kewirausahaan yang dilaksanakan oleh pemuda wukirsari ini sudah berjalan dengan sendirinya yang merupakan kesadaran dari pemuda, keluarga dan masyarakatnya sendiri karena adanya keinginan untuk mendukung Pemerintah daerah yang telah menetapkan Desa Wukirsari sebagai Desa Wisata sehingga tumbuh kebutuhan untuk mendukung keberhasilannya sebagai Desa Wisata. Pemerintah telah memberikan rangsangan dan dukungan melalui pelatihan namun persoalan ini tidak dengan mudah dapat dilaksanakan, hal ini

karena peneliti mendapatkan data temuan paling awal adalah secara administrasi belum bisa menjadikan program kewirausahaan sebagai program yang terintegrasi hal ini karena belum adanya kebijakan kewirausahaan yang secara khusus mengatur tentang kewirausahaan pemuda. Sehingga dalam perkembangannya terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kewirausahaan pemuda. Hal ini dapat dengan jelas diamati dengan penelusuran melalui hasil wawancara dengan responden bapak SW dari lingkungan Dinas PORA (Wawancara, 5 Desember 2015, jam 10.) dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa :

PORA Kabupaten Bantul hanya melakukan program pelatihan sekali dalam satu tahun di bulan Juni, dan tugas lainnya adalah melakukan pemilihan pemuda pelopor dan pelatihan kewirausahaan dan tidak melakukan kegiatan yang bersifat mengeluarkan anggaran.

Dinas PORA dalam kerjasama dengan dinas lainnya yang memiliki program kewirausahaan bagi pemuda sebatas pada tenaga pelatih atau diundang untuk menjadi pengajar saja.

Berikut adalah tabel kegiatan seksi pemuda pada tahun 2015 .

Tabel 5.1. Program Kegiatan Seksi PORA Kab. Bantul 2015

NO	KEGIATAN	BULAN											
		JAN	VEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES
1	PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN												
2	DIKLAT DASAR KEPIMPINAN PASKIBRAKA												
3	SELEKSI PESERTA BPAP KAB, BANTUL												
4	SELEKSI PEMUDA PELOPOR KAB. BANTUL												
5	KEPELATIHAN KETRAMPILAN PEMUDA												
6	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA												
7	MTQ PELAJAR UMUM KAB. BANTUL												
8	LOMBA BARIS-BERBARIS												

Sumber Kantor PORA kabupaten Bantul, 2015

Lebih lanjut disampaikan bapak SW, secara teknis mengeluarkan anggaran, karena anggaran bersifat dekonsentrasi yaitu dari pemerintah Provinsi langsung kepada kelompok pemuda yang menjadi target pembinaan. Memperhatikan pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan sementara bahwa Dinas Pora hanya melakukan seleksi selanjutnya dari seleksi itu program lanjutan seperti apa tidak terinventarisasi dengan jelas, di sini proses kaderisasi bahkan program pendampingan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Jadi program dari Dinas Pora yang dilaksanakan hanya melakukan seleksi untuk mengirimkan peserta mengikuti program pelatihan. Sementara karena tidak ada program lanjutan tidak teridentifikasi dengan jelas dari peserta pelatihan yang telah dikirimkan untuk mengikuti pelatihan tersebut apakah dapat menindaklanjuti sebagai wirausaha muda atau berhenti sebagai peserta pelatihan saja, hal ini diperkuat dengan pernyataan mas Ujg (Wawancara, 6 Desember 2015, Jam 14.00 Wib) salah satu wirausaha muda dan Mas Sgt yang menyampaikan sebagai berikut :

Kurangnya konsistensi pemuda wirausaha dalam menjalankan kegiatannya lekas bosan dan berpindah pada bidang lain. Karena memang setelah dilatih program dari Pemerintah seperti tidak ada tindak lanjut.

Lebih lanjut Di sampaikan mas Sgt,

Untuk menjadi wirausaha dibutuhkan dukungan sampai benar-benar jadi. Pemuda Wirausaha biasanya hanya bertahan 1-3 tahun, sesudahnya bosan dan akan pindah ke usaha lain atau profesi lainnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa peserta pelatihan kurang memahami pentingnya pembekalan yang telah diberikan melalui pelatihan, hal ini karena terkadang pelatihan yang di berikan kurang implementatif.

Melihat hal tersebut peneliti lantas mendatangi seorang birokrat yang bertugas melakukan pendidikan pelatihan kewirausahaan yaitu Bapak Drj pada

tanggal 7 Desember 2017, lebih lanjut disampaikan beliau adalah sebagai berikut:

Program pelatihan dilakukan dengan berjenjang, mulai dari memotivasi sampai kepada tahapan implementasi bahkan pameran, memang kesulitannya kegiatan ini tidak terintegrasi dengan lintas dinas lainnya. Jika saja kegiatan ini terintegrasi maka pelatihan ini akan termonitor dengan baik dan bukan program yang putus putus, maksudnya dinas A melatih lintas dinas B melanjutkan dalam tahapan program berikut. Terkadang yang terjadi adalah pengulangan program. Kewirausahaan ini membutuhkan program berkelanjutan sampai pemuda mampu berdiri sendiri dan menyebarkannya pada pemuda lainnya. Ini yang masih sulit dilakukan.

Lebih lanjut disampaikan bapak Drj ,

Sehingga dalam kewirausahaan pemuda ini dibutuhkan program berkelanjutan yang jelas terarah untuk memupuk semangat dan konsistensi pemuda wirausaha dan yang tepat ya melalui program Inkubator.

Dari yang disampaikan mas Ujg dan mas Sgt serta bapak Drj, peneliti menghadiri kegiatan pelatihan yang diberikan, dan dari pemahaman peneliti memang materi pelatihan masih sangat standar yaitu membuka wawasan pemuda wirausaha, sementara pemuda Wukirsari wawasan atau kesadaran melakukan kewirausahaan sudah menjadi pilihan, sehingga peneliti mengusulkan adanya rapat bersama pemuda untuk menjaring keinginan pelatihan seperti apa untuk mengembangkan kewirausahaannya. Dan disampaikan oleh salah satu kelompok wirausaha dalam pertemuan bersama melalui kelompok kecil di rumah makan Ingkung Kual yang disampaikan mbak Lpw (10 Desember, 2015, jam 13.00 Wib) sebagai berikut :

Kami membutuhkan pelatihan sesuai dengan produk kami khususnya dalam peningkatan kualitas, pengepakan dan cara-cara membuat iklan. Selanjutnya kami ingin dilatih dalam pengelolaan usaha dan cara-cara mencari mitra khususnya untuk pemasaran. Kami memiliki kesadaran dan motivasi kuat untuk berwirausaha kami membutuhkan dukungan lebih lainnya agar kami dapat benar-benar menjadi wirausaha yang memiliki komitmen dan dedikasi. Wirausaha menjadi perilaku hidup kami untuk

terus berusaha dan optimis serta dapat melahirkan produk yang berkualitas.

Selanjutnya disampaikan pada rapat tersebut di rumah makan Ingkung kuali yang disampaikan oleh Mas Dny sebagai aktifis karang Taruna (wawancara 10 Desember, 2015, jam 13.30 Wib) keinginan wirausaha muda untuk mensukseskan apa yang diharapkan pemuda wirausaha seperti yang disampaikan mbak Lpw diatas yaitu :

Dibutuhkan satu lembaga khusus yang secara fokus menangani kegiatan dan keberlangsungan pemuda wirausaha yang telah mendapatkan pelatihan dan bimbingan hal ini akan memudahkan pemuda wirausaha untuk melakukan koordinasi dan bertukar pengalaman untuk mengembangkan kreatifitasnya sebagai wirausaha misalnya akses permodalan, pengembangan produksi dan jaringan pasar sehingga sebagai kader wirausaha dapat berjalan dengan baik dan termonitor.



Gambar 5.6 : Pertemuan Pemuda di Rumah makan Ingkung kuali

Para pemuda ini berkumpul di rumah makan ingkung kuali, tempat ini diprakarsai oleh personal HIPMI Bantul yang mampu meyakinkan PEMDA setempat untuk dapat mengelola lahannya dibangun menjadi wisata kuliner dengan bangunan yang dapat menampung untuk kegiatan kegiatan besar atau menerima tamu yang cukup banyak. Selain itu dikembangkan juga wisata

olahraga dan perkebunan dan pemancingan sehingga menarik banyak wisatawan. Bangunan yang dibangun menggunakan Bambu dan terbuka tanpa menggunakan AC memiliki daya pesona tersendiri. Ditambah makanan yang khas yaitu Ingkung Kualo dengan bumbu dan cara penyajian yang sangat kental dengan budaya lokal. Para pemuda ini menggunakan lokasi ini untuk melakukan rapat bersama dari beberapa dusun untuk saling berpendapat atau mengeluarkan gagasannya dalam menyikapi seluruh perkembangan di kabupaten Bantul dan khususnya pada desa Wukirsari. Ada banyak keinginan yang diharapkan para pemuda. Diantaranya bagaimana dukungan pemerintah terhadap kegiatan wirausaha pemuda di Bantul khususnya di Desa Wukirsari sebagai Desa Wisata Budaya.

Selanjutnya peneliti mengadakan wawancara dengan ibu Mgy, (wawancara, 11 Desember, 2015 Jam 10.00 Wib),

Anggaran yang ada setiap tahun hanya Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk semua kegiatan kewirausahaan pemuda tentu saja tidak dapat mendukung kegiatan kewirausahaan pemuda Desa Wukirsari. Di dalam situasi yang seperti ini pemuda dengan persetujuan dari Pemerintah Desa mengajukan proposal pada lembaga perbankan, atau dari Perguruan Tinggi yang menawarkan bantuan sebagai pembinaan

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa bantuan dari pemerintah sangatlah tidak cukup anggaran sebesar Rp. 500.000 selama satu tahun untuk menggerakkan kegiatan dalam pengembangan kewirausahaan tentu sangat tidak memadai. Pemuda berusaha sendiri dengan ijin dari pemerintah desa dan kabupaten untuk mencari dukungan dari lembaga pendidikan berupa dana-dana hibah dan yang pernah memberikan dana dan pelatihan adalah dari Universitas Negeri Jogjakarta dan Universitas Gajah Mada serta dari mitra kerjasama Pemdes yaitu perbankan seperti BCA dan Mandiri. Dan ada dari pemerintah

Swiss yaitu untuk membangun tempat berkumpulnya pemuda dalam mengembangkan kewirausahaan khususnya yang mendalami masalah budaya lokal. (disampaikan oleh salah satu Pemuda Wirausaha pengrajin Batik).

Disampaikan mas Wgy seorang Pemuda yang aktif pada kegiatan Himpunan Pengusaha Muda Di Bantul, pada wawancara 11 desember 2015, Jam 12.00 Wib di Perpustakaan Desa,

Dana hibah bantuan dari perguruan tinggi sangat membantu kami dalam membuka wawasan kami khususnya dalam hal teknologi. Teknologi yang dipergunakan untuk membuka wawasan kami dan perguruan tinggi membuka peluang itu. Persoalannya adalah pada konsistensi pembinaan dan konsistensi pemuda wirausaha sendiri. Perguruan tinggi membantu manakala mereka mendapatkan teknologi hasil risetnya yang bisa tepat untuk kita tapi kadang yang kita butuhkan belum ada hasil risetnya. Dana-dana hibah dari Perguruan tinggi tidak kami dapatkan dalam bentuk uang tetapi yaitu kerjasama untuk pengembangan teknologi.

Lebih Lanjut disampaikan mas Wgy

Jika saja ini masing – masing lembaga dapat dikolaborasikan program-program dalam kewirausahaan pemuda, antara Perguruan tinggi, Perbankan dan pemerintah melalui kebijakan tentu kami lebih terarah dengan baik, Jadi semua memiliki semangat yang sama sesuai perannya. Kami pemuda ya di bimbing dengan dukungan yang kami butuhkan.

Lebih lanjut disampaikan mas Wgy,

Dan ini adalah harapan kami sebagai pemuda desa Wukirsari. Wukirsari memiliki pesona dalam nilai kearifan lokal yang tentu saja jika itu menjadi program bersama yang disinergikan, dikolaborasikan antar semua dinas, perbankan, swasta, tentu akan menambah semangat pemuda, kearifan lokal yang kami rasakan sebagai rejeki yang tak akan habis dari kraton, melalui acara –acara atau upacara –upacara yang menjadi pesona dan keinginan tawaran dari masyarakat dunia, dilaksanakan di makam raja –raja ini benar-benar telah menumbuhkan kreatifitas bagi kami, mulai dari wedang uwoh, sate klatak, ingkung kuali, batik, kerajinan bambu, kulit dan lain-lain yang dapat tumbuh sesuai minat wisatawan.

Kami ini masyarakat Jogjakarta yang akan selalu mengutamakan budi dan kesantunan sebagai nilai kami, kearifan lokal buat kami adalah berkah dari yang Maha Kuasa melalui kerajaan.

Lebih lanjut disampaikan bu Mgy (wawancara, 15 Desember 2015, jam 10.00 WIB), tentang sumber daya pemuda yaitu:

Sumber daya pemuda merupakan permasalahan tersendiri, yaitu masih sedikit yang menempuh pendidikan tinggi, dan kegiatan kewirausahaan lebih kepada kebiasaa turun temurun yang diajarkan oleh keluarga tanpa pengembangan teknologi, produksi, dan pasar.

Lebih lanjut disampaikan ibu Mgt,

Kami mengadakan pelatihan sesuai dengan potensi setiap pedukuhan, pelatihan tersebut kami maksudkan untuk meningkatkan keterampilan bagi pemuda wirausaha khususnya yang berpendidikan rendah, dengan maksud mereka menguasai cara produksi melalui kebiasaan atau keterampilannya. Sedangkan yang berpendidikan lebih tinggi kami ikutkan program pelatihan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk memahami teknologi hasil riset. Begitu juga dengan pelatihan manajemen dan pemasaran. Hanya itu semua tergantung dari Perguruan Tinggi atau Perbankan atau Swasta yang memiliki program untuk Desa Wukirsari jadi lebih bersifat pasif. Ini yang sebenarnya kurang bagus untuk memotivasi pemuda karena tidak jelasnya program berkelanjutan. Jika saja ini dapat menjadi program bersama tentu akan sangat baik dalam meningkatkan sumber daya pemuda di Desa Wukirsari.

Pernyataan ibu Mgy ini didukung oleh pemuda Karang taruna Ahd

(wawancara, 15 Desember 2015, jam 14.00 wib) sebagai berikut :

Umumnya pemuda wirausaha memiliki keterampilan yang turun temurun, jika produksi dengan skala kecil masih mampu dikerjakan dengan kualitas yang baik dan waktu yang tepat. Namun jika kebutuhan dalam jumlah yang banyak pemuda wirausaha tidak mampu memenuhi karena kurangnya pembinaan keterampilan dalam mengelola produksi dalam jumlah besar serta manajemen dalam mengelola suatu usaha.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa seleksi dari program pelatihan kurang bisa terbagi dengan baik, program pelatihan pemuda pemula wirausaha tentu tidak bisa digabungkan dengan pemuda wirausaha yang sudah berjalan dan sudah berkonsentrasi pada peningkatan produksi, sehingga Dinas Pora atau organisasi yang mendaftar pelatihan harus membuat kriteria atau syarat penjenjangan agar tidak sia-sia serta minat pada pelatihan bidang yang diinginkan, tidak sekedar mengirimkan peserta agar kegiatan penuh.

Dalam hal program pendampingan, pemuda wirausaha menyampaikan dalam wawancara bahwa tidak terjadi pendampingan yang berkelanjutan, hanya yang memiliki kedekatan dan akses yang terus berkesempatan mendapatkan bimbingan dalam pendampingan dan juga permodalan dalam pengembangan usaha. Pendampingan umumnya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi.

Pada bulan februari 2016, Kabupaten Bantul mengadakan kegiatan pelatihan pemuda pemula kewirausahaan pemuda yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pemuda dan Olah Raga dan Pemerintah daerah dengan mengundang sekitar 50 pemuda pemula Wirausaha. Kegiatan ini dalam rangka penggalangan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya menjadi pemuda wirausaha.



Gambar 5. 7. Pemuda wiarusaha pemula.

Memperhatikan berbagai pernyataan sebagaimana diuraikan diatas, pelaksanaan membangun kewirausahaan pemuda di Desa Wukirsari dalam hal

program kewirausahaan, menunjukkan bahwa pelaksanaan membangun kewirausahaan pemuda di desa Wukirsari umumnya sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih dirasakan kurang dari sisi perhatian dari Pemerintah antara lain:

- a. Belum adanya kebijakan tentang kewirausahaan yang menjabarkan lebih teknis untuk dapat dilaksanakan.
- b. Tidak adanya lembaga bersama yang dibentuk untuk menjalankan program yang sama dengan lintas lembaga.
- c. Materi pelatihan hendaknya sesuai yang dibutuhkan sehingga dapat mendorong perkembangan kewirausahaan pemuda.
- d. Perlunya peningkatan anggaran untuk pelatihan, pembinaan dan pengembangan kewirausahaan pemuda
- e. Sumber daya pemuda perlu ditingkatkan sesuai dengan penjejaran sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki baik dari sisi pendidikan ataupun keterampilan.
- f. Dibutuhkan jaringan pada akses permodalan dan pemasaran bagi pemuda wirausaha.

5.1.2. Mekanisme

Menurut Bapak Pnj seorang birokrat di Kementrian Pemuda Dan OlahRaga di kantor beliau jalan Pemuda, Jakarta (wawancara, Oktober 2015 Jam 13.00 Wib), ada empat hal penting dalam membentuk pemuda wirausaha yaitu :

- 1) Pemuda seyogyanya memiliki integritas dimana dalam integritas tersebut akan membangun nilai-nilai diri berupa nilai kejuangan,
- 2) Pemuda memiliki karakter yaitu tekun, ulet dan bertanggungjawab,
- 3) Pemuda memiliki budaya yang kuat sebagai manusia dengan daya untuk berbuat baik

- 4) Pemuda harus memiliki budi pekerti sebagai tatanan dalam berkehidupan. Selanjutnya dikatakan dengan memiliki empat hal tersebut pemuda wirausaha harus mempunyai dukungan semangat yaitu melalui minat dan bakat untuk menjadi profesional.

Setelah menjadi profesional pemuda wirausaha harus ditunjang dengan pengetahuan yang cukup, sikap yang mencakup keberanian, perilaku dan tutur kata, pemuda tetap harus melatih keterampilannya Pemuda dengan pengalaman yang baik serta memiliki kepekaan dan bertanggungjawab. Untuk mencapai itu semua diperlukan perencanaan, bersikap obyektif, prosedural dan akuntabel.

Dalam wawancara dengan beberapa masyarakat desa dan diperkuat ibu Mgy pamongpraja di Desa Wukirsari, masyarakat Desa Wukirsari adalah masyarakat yang sangat guyup dan memiliki kesadaran akan arti pentingnya ikut 'cawe-cawe" (berpartisipasi), mereka menyadari dengan kondisi wilayah mereka yang rentan terhadap bencana menumbuhkan sikap kegoyongroyongan yang sangat baik, sikap gotong royong ini menjadi hal utama untuk membangun kehidupan bersama di desa Wukirsari. Dari kesadaran akan arti pentingnya gotong royong inilah yang lantas dijadikan prinsip dalam membangun di Desa Wukirsari yaitu Partisipatif. Prinsip yang dianut ini memberikan kesadaran tentang bagaimana saling menghormati sesama untuk menjadi masyarakat mandiri yang Swasembada .

Mekanisme partisipatif yang didorong oleh pemerintah Desa Wukirsari untuk mewujudkan masyarakat Swasembada, wawancara dengan bapak SS, birokrat di Pemda Bantul .(wawancara, 6 Desember 2015, jam 10.Wib) Lebih lanjut disampaikan, bahwa :

Mekanisme partisipatif masyarakat Desa Wukirsari ini dengan memberikan pemahaman yang mendalam kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya, pemberdayaan, melalui penguatan kemampuan yang telah, disini muncul kemampuan baru masyarakat yang

selanjutnya mendorong masyarakat melalui semua tahap dalam proses penguatan sektor ekonomi mulai dari kegiatan dan proses saling belajar.

Lebih lanjut disampaikan bapak SS dalam pemberdayaan ini kita juga mengutamakan kelompok ibu-ibu atau perempuan yang memiliki jumlah hampir sama dengan kaum laki-laki. Tujuan utama pemberdayaan ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial dan memenuhi keuntungan dari usaha yang telah dilakukan warga Desa Wukirsari.

Dalam mengembangkan kewirausahaan pemuda di Desa Wukirsari telah disampaikan bapak SS bahwa mekanisme partisipatif telah dikembangkan menuju masyarakat Swasembada. Jika menilik kembali tentang UU kepemudaan pada pasal 24 tentang penyadaran pemuda maka dibutuhkan satu mekanisme sinergis antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dengan Swasta dan Perguruan Tinggi dengan pelaku usahanya adalah pemuda. Mekanisme sinergis ini menjadi satu kebutuhan utama dimana semua memiliki peran strategis dalam mengembangkan kewirausahaan yang telah menjadi program di Desa Wukirsari. Kerjasama sinergi itu dapat dilaksanakan dalam program pelatihan dan pemasaran bersama atau membuat event pameran hasil produk di tingkat daerah, nasional atau internasional dan hal ini beberapa waktu telah dilakukan pameran hasil-hasil kewirausahaan melalui sentra-sentra usaha secara berkelompok sesuai produk atau terkonsentrasi di Gazebo Batik.



Gambar 5.8 : gazebo

Gazebo adalah tempat berkumpulnya hasil –hasil produksi dari industri kerajinan di Kabupaten Bantul. Adanya gazebo ini tentu mempermudah bagi kewirausahaan pemuda yang menggeluti bidang jasa karena dengan mudah akan langsung dalam satu tempat mengantarkan wisatawan untuk memperoleh hasil-hasil industri kerajinan sebagai Souvenir dari Bantul.



Gambar 5.9. Foto Display batik di sentra industri Wukirsari

Gambar diatas adalah hasil produksi kain batik Tulis dengan corak asli budaya Bantul dengan banyak dominan warna putih, biru dan coklat. Warna – warna yang sejuk yang di display di Gazebo



Gambar 5.10 : Display hasil produk dari tatah Sungging

Namun semua yang sudah berjalan ini lebih banyak dari sisi partisipatif pemuda dan masyarakat Desa Wukirsari dan belum secara total dari sentuhan program dari pemerintah sebagai pembina dari kader-kader wirausaha hal ini dikarenakan lembaga formal tidak ada atau penambahan fungsi lembaga sebagai pembinaan kewirausahaan pemuda belum ada.

Dari hal diatas kemudian menimbulkan kesulitan atau terkesan ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan kegiatan berkelanjutan, seperti yang disampaikan mas Hmt (wawancara, 7 Desember 2015, Jam 14.00 Wib) pemuda wirausaha berikut ini :

Kami ini seperti diberikan semangat atau *iming-iming* tetapi tidak ada yang buat menjalankannya, hal ini membuat kami kesulitan untuk mengakses perijinan, permodalan apa lagi pasar. Jadi kami berjalan saja sesuai yang biasa kami jalankan. Seandainya ini ada bimbingan lebih lanjut maka tentu hasilnya kan jauh lebih baik. Kami menjalankan ini dengan kesadaran supaya tidak jadi pengangguran. Dan ini adalah bisnis keluarga .

Seperti yang disampaikan mbak Dna aktifis Himpunan pengusaha Muda di Yogyakarta (wawancara, 7 Desember 2015, Jam 16.00 Wib) pada akhirnya supaya ini dapat berhasil maka mekanisme yang digunakan adalah partisipatif dan kesadaran pemuda untuk mau berbuat. Dalam wawancara menyampaikan bahwa:

Para pemuda Wukirsari paham betul potensi apa yang dimiliki desanya sebagai desa pariwisata, karena merupakan wilayah yang menjadi pewaris peninggalan sejarah tempo dulu dan sampai saat ini masih berdiri kokoh serta masih dilestarikan yaitu makam raja-raja.

Selain itu Desa Wukirsari juga termasuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, juga ada wisata kebun buah dan gardu pandang. Sehingga Desa Wukirsari termasuk desa dengan kategori desa dengan keberagaman potensi wisata budaya. Sehingga mekanisme dan tahapan untuk dapat mewujudkan itu semua adalah melalui prinsip-prinsip partisipatif dari pemuda berkearifan lokal.

Partisipasi yang berkearifan lokal inilah yang menjadi daya tarik kami, kami merasa saling memiliki dan saling membantu, saling bergotong royong dan kami merasakan dengan bekerja seperti itu rejeki akan datang pada kami. Ini adalah nilai kehidupan yang baik pada diri kami.

Dalam Wawancara dengan mas Hmt pemuda wirausaha (wawancara, 7 Desember, 2015, jam 20.00 Wib) mekanisme partisipatif ini adalah karena kesadaran murni dari para pemuda untuk tidak mau menganggur dan adanya dorongan dari keluarga, sehingga agar partisipasi ini dapat berjalan dengan baik maka :

Diperlukan tuntunan agar apa yang sudah dijalankan oleh pemuda melalui fasilitas dari keluarga serta dukungan keluarga dapat difasilitasi lebih lanjut oleh pemerintah melalui kebijakan yang sesuai dengan karakter kegiatan pemuda wirausaha di Desa Wukirsari.

Lebih lanjut disampaikan mas Hmt,

Selain kesadaran pemuda Desa Wukirsari untuk melakukan kegiatan wirausaha untuk mengembangkan potensi desanya juga kepedulian lembaga lainnya seperti perbankan untuk melakukan pembinaan karena melestarikan kekayaan budaya sangat penting dilakukan apalagi budaya tersebut dapat memberikan kehidupan yang baik melalui karya – karya dalam industri kerajinan.

Dengan tidak adanya kebijakan kewirausahaan untuk dapat mengembangkan usaha yang selama ini sudah di jalankan pemuda akan sulit bagi pemuda untuk mengembangkan usahanya. Dukungan dari pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasanana kepemudaan, memberikan pelayanan pada aspek pendanaan yang merupakan tanggungjawab dari Pemerintah,. Selain itu kelemahan ini selanjutnya menghambat pemuda wirausaha dalam melakukan akses pada lembaga lainnya khususnya lembaga yang dapat membantu masalah permodalan.

Mekanisme partisipatif yang berkearifan lokal yang telah tumbuh di desa Wukirsari, telah menumbuhkan harapan untuk menjadikan desa Wukirsari

sebagai desa yang swasembada. Dan tentunya akan menjadi lebih produktif manakala program membangun kewirausahaan pemuda yang telah dicanangkan pemerintah ini dapat berjalan dengan baik melalui integrasi program yang didukung oleh pemerintah dan non pemerintah. Harapannya kegiatan kewirausahaan adalah bagian yang penting dan sungguh – sungguh dalam melibatkan pemuda untuk menumbuhkan iklim kewirausahaan pemuda di daerah dan desa agar dapat berkembang dengan baik. Pertumbuhan kewirausahaan yang baik tentu saja akan berdampak sangat baik bagi pembangunan perekonomian nasional dan pemuda sendiri dalam perannya sebagai subyek pembangunan.

5.1.3. Aktor yang terkait dan peranannya masing-masing dalam program

Aktor yang memiliki peranan penting dalam membangun kewirausahaan pemuda adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian lainnya yang memiliki program serupa seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan melalui dinas –dinas di daerah, lembaga non pemerintah atau swasta, masyarakat dan tentu pemuda sebagai pelaku utamanya. Namun dalam perjalannya Kementerian dan lembaga ini sepertinya berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi, hal ini terlihat di daerah melalui program pada dians- dinas yang memiliki program yang sama tentang kewirausahaan namun tidak dapat terintegrasi untuk saling sinergi dan berkolaborasi.

Untuk mewujudkan pemuda wirausaha yang mandiri dan bertanggungjawab perlu dukungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah,

Lembaga non pemerintah serta lingkungan sekitar dan budaya setempat sebagai kearifan lokal yang akan mampu menjadi filter dari dalam diri dan membangun karakter pemuda. Nilai kearifan lokal di Desa Wukirsari yang berada di Kabupaten Bantul dan provinsi daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekuatan spiritual dan religius dan tatanan *unggah ungguh* yang sangat beradab dan ini merupakan nilai yang baik yang muncul dari dalam diri. Namun dalam sistem tata pemerintahan terjadi tumpang tindih kewenangan dalam proses pelaksanaan membangun kewirausahaan pemuda. Hal ini seperti yang disampaikan bapak Nht birokrat di Dinas UKM (wawancara November, 2015) sebagai berikut :

Pemerintah pusat dan daerah sebagai pendukung utama dalam kewirausahaan pemuda pada kenyataannya belum terjadi sinergitas antar lembaga atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang memiliki keterkaitan dengan Kementerian/ Lembaga misalnya Balai Pemuda dan Olahraga (BPO)-Diskespora dengan Kemenpora dan Kemendiknas, Disnakertrans dengan Kemennakertrans, Disperindagkop-UKM dengan Kemenkop-UKM dan Dinsos dengan Kemensos. Namun juga dapat dilaksanakan dengan kementerian yang tidak diikuti oleh SKPD misalnya kegiatan dapat dilakukan oleh Kementerian Agama, Kementerian PDT, serta Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Lebih lanjut disampaikan oleh bapak Nht yaitu, bahwa pada kenyataannya tidak semua lembaga atau instansi pemerintah melaksanakan program kewirausahaan pemuda, dan instansi pemerintah yang melaksanakan antara lain:

- Provinsi DIY, tidak semua instansi yang terkait dengan kepemudaan, terlibat menjadi pelaksana kebijakan. Setidaknya hanya ada empat yang menjadi implementator kebijakan kewirausahaan pemuda yaitu :

 1. Balai Pemuda dan Olahraga (Disdikpora)
 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
 3. Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop-UKM)
 4. Dinas Sosial (Dinsos)

Sementara itu instansi terkait yang tidak terlibat dalam implementasi kebijakan kewirausahaan pemuda adalah : Dinas pertanian, Dinas Kelautan dan perikanan (DKP), Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) serta Dinas pariwisata (Dispar). Secara kelembagaan, maka Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan dari Disdikpora merupakan *leading sector* dalam pembangunan pemuda, termasuk pembangunan kewirausahaan pemuda.

Aktor yang berkaitan dengan program kewirausahaan selain pemudanya sendiri yang harus memiliki komitmen dan konsistensi, diperlukan sinergi antar lembaga pemerintah sehingga tidak tumpang tindih dan terjadi pemborosan anggaran. Dan dibutuhkan satu lembaga yang jelas yang mengatur kegiatan pemuda dari setiap departemen dalam satu lembaga bersama yang bersifat independen. Pada aktor yang berperan ini terlihat bahwa administrasi publik yang mengutamakan warga sebagai pelanggan belum terlayani dengan baik oleh aparatur atau birokrasi, sementara di sisi lain pemuda memiliki kesadaran penuh untuk memajukan daerahnya dan menjadi pemuda yang tidak menganggur karena mulai sempitnya lahan pertanian. Hal ini menjadi perhatian khusus dari peneliti untuk melihat sejauh mana perhatian pemerintah dan birokrasinya dalam menangani program kewirausahaan, juga aktor non pemerintah dalam memberikan dukungannya seperti Perguruan tinggi, Perbankan dan lainnya yang dapat membantu program kewirausahaan pemuda.

Dalam beberapa wawancara sebelumnya pada program dan mekanisme, peneliti mencoba mensarikan bahwa sesungguhnya lembaga non pemerintah juga memiliki perhatian khusus untuk dapat membantu kegiatan kewirausahaan pemuda. Namun perhatian tersebut bersifat parsial dan disesuaikan dengan

program masing-masing instansi dan bukan program dukungan yang dibutuhkan oleh pemuda wirausaha sesuai jenjang keberhasilan mereka melakukan kewirausahaan. Pembinaan baik dari sisi teknologi, produksi, permodalan, pemasaran tidak sepenuhnya tepat sasaran. Disinilah dibutuhkan kerjasama dan saling mendengarkan apa yang dibutuhkan pemuda sebenarnya.

Peran penting pemerintah untuk dapat mengelaborasi menjadi satu program bersama yang kolaboratif dari para aktor sangat dibutuhkan. Untuk mempermudah hal tersebut pemerintah dapat membuat satu wadah independen melalui kebijakannya untuk berkumpulnya semua aktor dalam satu sinergi yang yang berkolaborasi dalam memajukan kewirausahaan pemuda dengan disesuaikan kebutuhan pemuda wirausaha. Peranan pelayanan kepada pemuda menjadi fokus utama dari para aktor dalam membangun kewirausahaan pemuda. Dan harapan ini disampaikan oleh mas Adkr seorang pembina kewirausahaan pemuda dari organisasi Himpunan Pengusaha Muda Di Bantul, dalam wawancara pada tanggal 2 Januari 2016, jam 14,00 Wib yang menyatakan bahwa

Pentingnya sinergi program dari lintas dinas atau lembaga, dukungan lembaga non pemerintah seperti Perguruan Tinggi, Perbankan, Swasta atau para pengusaha besar baik dari daerah ataupun dari ibu kota untuk menjadi orangtua angkat, serta pemudanya sendiri. Selain itu dalam menghadapi globalisasi dibutuhkan nilai-nilai lokal yang mengglobal ini menjadi motivasi pemuda untuk tidak minder. Sudah banyak contohnya seperti negara Korea..film, musik trand mode Korea saat ini juga mendunia, kenapa kita tida bisa harusnya bisa, nilai lokal kita ini memiliki sejarah baik yang perlu diengineering dengan baik dalam menghadapi perkembangan jaman.

Lebih Lanjut disampaikan mas Adkr,

Masyarakat Yogyakarta, adalah masyarakat yang kreatif dan inovatif dalam hal seni budaya, jika ini dikembangkan melalui enjinereng sosial yang baik tentu dapat menjadi trand dunia juga, kita punya didiek nini Thowok yang sudah mengglobal, melalui tarian dan busana, kita memiliki produk batik yang oleh seorang Presiden Afrika selatan, Nelson Mandela,

senang mengenakannya. Dan saat ini makanan gudeg Yogya juga sudah sampai ke mancanegara dalam kemasan kaleng. Persoalannya adalah pada bagaimana melakukan enjinering khususnya bagi pemuda supaya tidak tergradasi budaya luar. Kearifan lokal harus dikemas menjadi nilai yang membentuk karakter bangsa. Dan ini tugas kita semua.

Jika kewirausahaan pemuda ini mampu berjalan berjajar, dalam era globalisasi ini tentu pemuda kita bukanlah obyek pasar dari masyarakat dunia akan tetapi subyek yang membuat pengaruh juga pada dunia. Jadi harapan kami di HIPMI ini adalah peran nyata pemerintah baik Pusat dan Daerah dalam menggalakkan program yang saling bersinergi, berkolaborasi antar Aktor dalam mendukung gerakan kewirausahaan ini.

Saya katakan gerakan karena ini dinamis dan terus berkembang. Kewirausahaan pemuda yang didukung oleh sinergi dan kolaborasi antar aktor adalah Gerakan Membangun yang Dinamis.

5.1.4. Nilai-nilai Kearifan lokal : Sistem Nilai, Institusi dan artefak

Nilai kearifan lokal dalam sistem nilai ini ditandai adanya huruf jawa yang memiliki arti, kemudian paribahasan atau bahasa, simbol, paugeran dan lain-lain yang memiliki nilai dalam pembentukan karekter masyarakat Jawa khususnya di Bantul. Sehingga dalam kearifan lokal ini terdapat ide-ide, gagasan dan norma-norma yang menjadi paugeran yang harus di patuhi. Selanjutnya dalam nilai kearifan lokal dalam institusi terliat dalam perilaku masyarakat Bantul dengan terikat pada etos kerja dan toleransi yang sangat kuat terbangun dari kepercayaan yang berkembang di Bantul yaitu Sintikrisme agama Hindu dan agama Islam yang telah menjelma menjadi budaya yang kuat di Bantul. Dalam nilai kearifan lokal yang ketiga adalah artefak yaitu hasil karya manusia dalam mengabadikan budaya yang ada seperti makam raja – raja dan hal lain seperti Tari-tarian, seni dalam industri kerajinan, visualisasi upacara – upacara dan lain lain.

Pengembangan pariwisata melalui Desa Wisata Budaya di Wukirsari adalah sebuah gagasan cemerlang untuk mewujudkan pembangunan

perdesaan. Sektor pariwisata ini justru mampu menggerakkan sektor ekonomi, sehingga merangsang tumbuhnya proses lapangan kerja, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan penduduk. Konsep ekonomi yang dikembangkan di Desa Wukirsari tidak terlepas dari satu komunitas Jawa yang memiliki ketaatan terhadap para leluhurnya yaitu raja-raja yang mengikatkan konsep pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan, pertanian dan hubungan sosial budaya sehingga tatanan ekonomi tidak didasari pada konsep hubungan yang bersifat sakralitas dan teritorial tetapi lebih pada peran fungsional dan ideokrasi. Refleksi fungsional dapat dilihat dari keterlibatan semua pihak dalam mengembangkan struktur ekonomi. Meskipun secara hirarki ada susunan birokrasi.

Dari pengamatan peneliti, solidaritas kekeluargaan pemuda Wukirsari serta pandangan agama yang telah memberikan moral yang positif sebagai budaya lokal perlu ditingkatkan dalam keberanian intelektual untuk mengajak semua pemuda Wukirsari berpartisipasi dengan tulus membangun desanya. Makna besar yang terkandung dalam budaya lokal ini adalah perubahan besar yang dimungkinkan bukan yang dibutuhkan yaitu menuju penyiapan menerima globalisasi sebagai satu keniscayaan yang tidak perlu ditakuti. Sebagai masyarakat Jawa yang memiliki struktur agraris pemuda telah digiring pada satu aktifitas komunikasi lintas budaya yang tentu saja ini tidak mudah. Seluruh aktifitas tadi hakekatnya adalah upaya restrukturisasi budaya dalam era globalisasi.

Adapun hasil karya budaya lokal ini terdapat dua yaitu yang berbentuk ekspresi seni seperti Batik Tulis, Kerajinan Kulit, Kerajinan Bambu, Kayu, lingkungan buatan seperti Rumah-Rumah Tradisional serta makanan yang khas yang ada di Desa Wukirsari. Sedangkan warisan budaya yang lain adalah

kegiatan malam tirakatan setiap malam satu suro, malam tirakatan setiap memperingati hari kemerdekaan, hari kemerdekaan 17 agustus, hari Kartini 21 April, Sumpah pemuda 28 oktober yang selalu diisi dengan kegiatan hampir diseluruh RT/ dusun. Dan tidak kalah menarik yang selalu dilakukan juga adalah kegiatan bersih desa setiap habis panen raya dirangkai dengan kegiatan tanggapan wayang kulit, karnaval dan doa bersama, kegiatan nguras guci yang dilakukan pada bulan suro pada hari jumat atau Selasa yang bertempat dimakam Raja-Raja Mataram ini selanjutnya dilakukan karnaval. Kegiatan yang lain adalah sukuran yang dilakukan setiap tanggal 9 suro dengan bentuk kenduri, selain itu juga dilakukan selikuran setiap tanggal 21 romadhon yang diikuti juga dengan kenduri, Kegiatan yang lain adalah doa bersama yang dilakukan pada saat menjelang Romadhon yang dinamakan Sadranan, Rejeban pada tiap bulan rejab dan muludan yang dilaksanakan pada bulan mulud.

Dalam wawancara dengan seorang budayawan yang sudah cukup umur pada bulan 15 november, 2015, Jam 20.00 Wib, didapatkan informasi bahwa kelompok seni budaya di Desa Wukirsari yang masih terus dilestarikan adalah :

Kerawitan dengan beberapa group yang biasa latihan di Balai desa pada malam rabu dan malam minggu, ketoprak yang melakukan latihan saat akan melakukan pentas di Karangasem dan Jatirejo, sanggar tari yang merupakan perkumpulan anak-anak remaja di dusun Manggung yang melakukan latihan saat akan melakukan pementasan, solawat Mauludi yang memiliki beberapa grup, dan bertempat latihan di Sindet pada malam senin, solawat rodlat, memiliki beberapa grup dengan tempat latihan bergilir tiap minggu pada setiap malam sabtu, robana/ hadroh memiliki beberapa grup dengan latihan bergilir dan tiap malam sabtu melakukan latihan, seni tek-tek merupakan grup PKK dengan tempat latihan di rumah bapak Lurah tiap akan melakukan pentas, srandul/ montro tempat latihan dilapangan voley karangasem dengan latihan setiap akan melakukan pentas, Dalang wayang kulit, memiliki 5 dalang tempat latihan ditiga dusun yang selanjutnya merupakan profesi dari dalang tersebut, gejak lesung memiliki beberapa kelompok dan latihan setiap akan melakukan pentas, Samroh memiliki satu group saja.

Disampaikan dalam wawancara dengan bapak Rhm bulan 10 Desember, 2015 Jam 18.00 Wib mengatakan bahwa :

Perkembangan budaya Jawa kesenian dan agama adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, agama Islam di Desa Wukirsari telah menyatu menjadi budaya sebagai unsur estetis yang saling mempengaruhi sehingga proses *sinkretisme* (proses pencampuran) yang pada akhirnya Keraton sebagai pusat pemerintahan pada waktu itu dan aktifitas agama sebagai sentral pengembangan budaya. Dan sampai dengan saat ini pola kebudayaan Hindu Jawa, seperti pertunjukan wayang, tarian, gamelan masih secara dominan mewarnai setiap kegiatan.

Lebih lanjut disampaikan bapak Rhm adalah bahwa:

Percampuran warna Islam dengan Hindu tersebut secara nyata dapat dilihat pada peringatan hari-hari besar Islam yang diproses ritualisasinya secara Islam tetapi isi kegiatannya dilakukan tetap berpola budaya Hindu Jawa. Perayaan sekaten, grebeg maupun 1 suro yang masih berlaku sampai sekarang adalah contoh kongrit dari model sinkretisasi tersebut.

Menurut mas Ujg (wawancara bulan 11 Desember, 2015, jam 10.00 Wib) menyampaikan bahwa :

Budaya dan agama Islam telah memberikan warna kuat dalam pembangunan di Desa Wukirsari. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sendiri telah menjadikan Desa Wukirsari sebagai salah satu tujuan wisata tradisional dengan seluruh potensi yang ada di desa tersebut. Bahkan Raja Swedia yang juga ketua pramuka dunia Raja Carl XVI Gustaf berkunjung ke kabupaten Bantul tepatnya di Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul pada tahun 2012. Kunjungan tersebut berlanjut pada peninjauan lokasi untuk kegiatan kebudayaan yang ada di Desa Wukirsari yaitu tatah sungging, Batik dan kerawitan sebagai program *MoP (Messenger of Peace) Preserve Local and Traditional Culture*.

Demi melihat lebih dalam lagi maka peneliti akan membahas satu persatu dari fokus penelitian membangun kewirausahaan pemuda Indonesia melalui nilai-nilai kearifan lokal.

Dalam wawancara (11 Desember, 2015, 12.00 Wib) bersama bapak SR seorang birakrat di Pemda Bantul. Menyampaikan bahwa :

Bantul adalah Kabupaten yang memiliki harmonisasi dengan alam, sehingga program-program yang dilaksanakan termasuk program

kewirausahaan pemuda berbasis pada nilai-nilai yang menyatu dengan alam dan tradisi.

Selain itu bapak SR menyampaikan karakter dari pemuda Wukirsari yang masih sangat kental dengan budaya lokal yaitu :

(1). Sederhana, (2). Mudah curiga terhadap hal baru yang tidak dipahami lebih mencerminkan sifat kehati-hatian, (3). Menjunjung tinggi unggah-ungguh, (4) berjiwa kekeluargaan atau guyup, (5). Berbicara apa adanya (jujur), (6). Malu dan tertutup dalam hal keuangan, (7). Mudah minder dengan orang kota, (8). Menghargai orang lain, (9). Selalu ingat saat diberi janji dan akan menanyakan janji tersebut, (10). Suka membantu tanpa di minta (Gotong Royong), (11). Suka musyawarah, (12). Religius yaitu taat menjalankan ibadah agamanya.

Hal senada disampaikan bapak Sn seorang birokrat di Pemda Bantul (wawancara, 11 Desember 2015, Jam 14.00 Wib) sebagai berikut :

Desa Wukirsari memiliki kekayaan kearifan lokal yang selaras dengan agama yang dianut masyarakatnya yaitu agama islam yang mampu menumbuhkan kembangkan semangat para pemuda dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Kekayaan budaya lokal yang merupakan sumber daya ini kemudian dikembangkan menjadi berbagai potensi dalam meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi kerukunan dan gotong royong.

Adapun potensi yang dimaksud adalah :

1. Potensi wisata : makam raja-raja mataram, makam seniman dan seniman Girisapto, makam Giriloyo, sentra batik tulis, pusat pengobatan tradisional gurah, sentra tatasungging kulit, sentra kerajinan anyaman bambu, kampung peternakan dan pedagang burung. Goa asuh, air terjun seribu batu, dan bukit kedung buweng.
2. Potensi kuliner : Wedang uwuh, pecel kembang turi, abon jambu mete, kacang jambu mete, sirup jambu mete.
3. Potensi kegiatan tradisi : merti dusun , kirab budaya, khoul kyai kharismatik, festival kesenian tradisional, dan Wukir sari expo.
4. Potensi kesenian dan budaya ; kesenian kerawitan , hadroh, solawat jawa, seni pedalangan, ketoprak, sanggar tari, keroncong .

Pemuda Wukirsari bernama Bdj (wawancara, 12 Desember, 2015, jam 10.00 Wib) yang merupakan salah satu pemuda wirausaha menyampaikan bahwa :

Pembangunan kewirausahaan pemuda Desa Wukirsari lebih mengutamakan adanya rembug warga dari unsur pemuda/masyarakat, swasta dan pemerintahan terkait. Sektor pemuda/masyarakat memiliki prioritas utama sebagai subyek dalam proses selanjutnya, yang dikenal dengan pemberdayaan pemuda/masyarakat, dengan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan melalui proses belajar bersama untuk mencapai keberhasilan pemberdayaan dalam hal kemandirian dan kesejahteraan.

Selanjutnya Mas Ank seorang aktifis di organisasi HIPMI Bantul (wawancara, 12 Desember, 2015, Jam 15.00 Wib) menyampaikan bahwa :

Desa Wukirsari memiliki potensi budaya kearifan lokal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan. Kearifan lokal tersebut adalah adanya makam raja-raja dari dua kerajaan yaitu Kraton Mataram kuno yang terletak disebelah timur dan Kraton Surakarta yang terletak di sebelah barat yang diyakini telah memberikan berkah kesejahteraan. Hal ini terlihat masyarakat di sekitar makam dapat berdagang makanan dan kerajinan khas yang ada di Desa Wukirsari mereka meyakini sebagai "*Berkah Dalem*"

Disampaikan lebih oleh bapak Ngt (Budayawan) (wawancara 12 Desember, 2015 jam 20.00 Wib) budaya lokal yang sangat kuat disini adalah pemahaman tentang *ngalap berkah dalem*, ini semacam sirit dalam berkehidupan di desa Wukirsari

"*Berkah Dalem*" telah tertanam sangat kuat untuk terciptanya keselarasan antara budaya lokal dalam melestarikan warisan kerajaan. Selain itu juga agama islam, yang merupakan potensi lokal sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan, kerukunan dan gotong-royong menjadi semangat bersama dalam mencapai kemajuan.



Gambar 5. 11: Tangga Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri



Gambar 5.12 : Pintu Makam Raja-Raja Mataram Imogiri

Dua gambar di atas adalah bentuk Artefak yang berupa makam raja raja, dalam nilai budaya artefak ini dapat di gali lebih dalam dari sisi budaya sebagai sistem nilai dan institusi. Sebagai budaya nilai, masyarakat ddi sekitar Wukirsari sangat menghormati para pemimpinnya dengan menjaga dan bahkan dalam nilai institusi perilaku masyarakat sangat -mempercayai adanya Berkah dhalem yang menjadi motivasi kuat bahwa mereka akan makmur dengan memelihara makam raja –raja tersebut, meskipun mayoritas penduduk Wukirsari adalah beragama Islam justru hal tersebut lebih mendukung keyakinan tersebut. Bahwa raja mereka meskipun sudah meninggal adalah keturunan dari Nabi Muhammad

sebagai Nabi terakhir. Jadi sangat wajar mereka melakukan penghormatan dan penjagaan yang demikian rupa.

Lebih lanjut disampaikan seorang pemuka agama (wawancara, 13 Desember, 2015, Jam 10.00 Wib) di Desa Wukirsari tentang kedudukan pemuda Islam yang memiliki kreatifitas dan semangat merubah nasibnya melalui kekuatan dan kemauan sendiri yang harus diperjuangkannya sebagaimana disampaikan dibawah ini :

Daya kreatifitas pemuda Wukirsari terhadap karya seni sangat tinggi. Kuatnya motivasi dari dalam diri pemuda untuk melakukan pekerjaan yang diminatnya juga sangat tinggi. Pekerjaan – pekerjaan itu adalah pekerjaan membuat kerajinan yang sudah ada dari nenek moyangnya dan dipelajari secara turun temurun.

Lebih lanjut disampaikan oleh seorang pemuka Agama:

Disini agama Islam yang dianut mayoritas penduduk Wukirsari telah memberikan motivasi bahwa melakukan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan merupakan perintah dari Kitab Suci yaitu Alquran “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri”(Q.S. Ar-Ra’d:11). Semangat yang kemudian menjadi etos kerja ini terlihat betul saat mereka membangun kembali kegiatannya setelah terjadinya gempa bulan mei tahun 2006. Mereka yakin dengan tidak menyerah maka Alloh akan membantu, “maka apabila telah menyelesaikan suatu urusan, kerjakanlah urusan yang lain, dan kepada Tuhanmu gema dan berharaplah!” (Al-Insyiroh ayat 7-8). “Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”(Q.S. AnNajm:39). Pengaruh agama sangatlah kuat dalam memupuk semangat dan etos kerja.

Masih menurut salah satu masyarakat (seorang budayawan) (wawancara 5 Januari , 2016),

Masih ada kecenderungan perempuan di desa Wukirsari kurang produktif hal ini karena adanya anggapan bahwa perempuan adalah *konco wingking* (yang hanya membantu pada urusan di dapur saja). Hal ini tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan mengingat sistem sosial patriakhat masyarakat Jawa melahirkan ungkapan ungkapan bagi kaum perempuan sebagai, *kanca wingking*, *swargo nunut neraka katut*, disini perempuan jawa memiliki kedudukan pada struktur bawah. Sehingga dalam situasi apapun perempuan jawa harus *nrimo*, *pasrah*, *halus*, *sabar*, *setia dan berbakti*. Dalam perkembangannya sikap budaya yang demikian ini perlahan mulai mendapatkan perhatian dengan melibatkan perempuan

desa Wukirsari dalam kegiatan rumahan untuk mendukung keluarga dalam meningkatkan mata pencahariannya, yang dilakukan melalui pelatihan membuat, ayam bambu dan lain –lain.

Kekayaan budaya lokal yang ada di Desa Wukirsari telah menggerakkan kesadaran akan partisipasi, hal ini terlihat dengan rutusnya jadwal kegiatan keagamaan dan budaya dijalani sebagai *ngalap berkah dalem*. Islam telah menjadi fondasi kuat yang berkaitan dengan budaya yang membangun moralitas masyarakat Wukirsari, yang digunakan sebagai paugeran berkehidupan bersama-sama sehingga asas kebersamaan dan gotong royong serta menghargai sesama sangat tinggi terjalin di Desa Wukirsari. Harmonisasi ini dapat terlihat dalam hubungan manusia dengan manusia di sana. Nilai kearifan lokal termasuk agama di dalamnya telah menjadi potensi yang membuat harmonisasi kehidupan bersama dengan alam, yang menjadi semangat dan motivasi sebagai budaya unggul dalam mendorong tingkat kesejahteraan. Nilai budaya lokal inilah yang menjadi benteng pertahanan bagi pemuda Wukirsari dengan memiliki karakter dan jati dirinya .

5.2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program membangun kewirausahaan pemuda Indonesia melalui nilai-nilai budaya kearifan lokal.

5.2.1. Faktor-faktor yang mendukung

Pengembangan kewirausahaan pemuda yang didukung oleh Kebijakan perundangan pemuda dan kearifan lokal telah menjadi fokus perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam rangka membangun pemuda yang maju, mandiri dan berdaya saing, (Undang-undang Kepemudaan No. 9 Tahun 2009 tentang Kepemudaan khususnya dalam bab VIII pasal 27-28). Selain itu juga perundang-undangan dari Kementerian UMKM yaitu Undang –undang No. 20

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Menengah, dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, serta beberapa perundangan lainnya seperti : Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda, Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha, Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan membudayakan Kewirausahaan, Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga No. 0613 Tahun 2014 tentang tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, Peraturan Menteri Pemuda Dan Olah Raga No. 0641 tentang Fungsi Bersama Menteri Pemuda dan Olah raga, Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No. 0034A/MENPORA/1996, 02/SKB/VII/1996, 0812/U/1996 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Terdidik.

Dengan banyaknya produk hukum dan kebijakan dalam pengembangan kewirausahaan pemuda tentu menjadi satu harapan positif bagi para pemuda baik di tingkat pusat ataupun daerah dalam melaksanakan pengembangan kewirausahaan pemuda, dan sekaligus merupakan panduan bagi pemerintah daerah dalam melahirkan Peraturan Daerah tentang pengembangan kewirausahaan pemuda, sebagai komitmen Pemerintah Daerah untuk memajukan pemuda di daerah masing masing melalui jalur kewirausahaan.

Adanya isu ketenagakerjaan dan pengangguran pemuda akibat tidak semua angkatan kerja terserap oleh lapangan pekerjaan, atau akibat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), sehingga kewirausahaan didorong untuk dapat tumbuh pada

lingkungan usia kerja. Dari data BPS (2013) angka pengangguran di perkotaan untuk usia produktif mencapai 57 % dan 42,22 % pemuda dari perdesaan dari total jumlah angkatan kerja 118.053.110 jiwa. Sehingga pemerintah secara rasional dan sistematis melakukan pengarus utamaan kewirausahaan pemuda melalui program sesuai minat, bakat dan potensi pemuda kedalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program dalam membangun ekonomi masyarakat. Hal ini menjadikan kewirausahaan sebagai pilar dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Sehingga seluruh kebijakan yang diambil oleh kementerian dan lembaga serta Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi masyarakat harus menyentuh kewirausahaan sebagai pilar pembangunan ekonomi.

Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul kewirausahaan pemuda tumbuh dengan sangat baik karena ada kesadaran dari pemuda itu sendiri yang didukung oleh situasi lingkungan yang ada yaitu bahwa Kabupaten Bantul memiliki kekayaan alam yang menjadi obyek wisata dan wisata budaya yang sangat banyak, termasuk pada situs penelitian yang telah dijadikan sebagai jalur wisata. Kewirausahaan pemuda tumbuh karena adanya kesadaran dan kebutuhan dari pemudanya sendiri dalam meningkatkan taraf hidup serta adanya rasa percaya serta keyakinan akan warisan budaya yang memiliki daya magnet bagi wisatawan baik dari dalam maupun dari luar negeri sehingga membuka peluang untuk melakukan kreatifitas dan inovasi. Kewirausahaan pemuda juga memberikan kesadaran pada pemuda untuk berbuat dan tidak menganggur.

Di Desa Wukirsari kesadaran masyarakat dan pemuda melalui kegiatan kewirausahaan yang partisipatif dengan mengedepankan pemeliharaan pada budaya lokal melalui karya – karya seni budaya yang selanjutnya dikemas

menjadi barang produksi yang dijual untuk meningkatkan kehidupan mereka serta tidak menganggur sebenarnya merupakan tindakan akan kesadaran yang sangat baik dari lingkungan yang ada di sana. Selain itu keyakinan bahwa rejeki materi akan selalu didapat asalkan tetap merawat peninggalan para raja merupakan keyakinan yang sangat kuat yang muncul dari dalam diri para pemuda ditambah keyakinan mereka dalam beragama. Sehingga agama dan budaya disatukan dalam bentuk kreatifitas yang sangat membangun yang sangat positif.

Sementara itu pemerintah daerah telah berhasil membangun beberapa sentra kerajinan sebagai upaya pemuda dalam perannya pada pembangunan, disini peneliti diajak berkeliling dan melihat kegiatan yang sedang berjalan sebagai wujud dari partisipasi pemuda dan kesadaran pemuda akan perannya dalam membangun daerahnya. Pemerintah Desa sendiri melalui program dan mekanisme partisipatif menuju desa Swasembada telah melakukan program pengentasan kemiskinan, menanggulangi pengangguran melalui dibukanya kegiatan pariwisata dalam menumbuhkan lapangan kerja baru dan meningkatkan kemampuan sumberdaya melalui pelatihan.

5.2.2. Faktor-faktor yang menghambat

Faktor-faktor yang menghambat dalam kegiatan membangun kewirausahaan pemuda ini lebih kepada aktor pelaksana dari kegiatan kewirausahaan yang fungsi dan tugas dalam mendampingi pemuda yaitu pada lembaga yang ditunjuk oleh pemerintahan. Pemerintah sebagai pendamping dan fasilitator sepertinya tidak dapat berperan sesuai yang diamanatkan perundangan yang ada. Akibatnya kegiatan ini seperti berjalan sendiri, partisipasi pemuda desa merupakan satu kesadaran yang terbentuk dari lingkungan

budayanya dalam mempertahankan kehidupannya. Hal ini tentu saja memberikan dampak dengan tidak terciptanya kader kewirausahaan yang dapat diukur dengan jelas pengaruhnya baik di tingkat daerah ataupun di tingkat nasional pada tingkat keberhasilan membangun kewirausahaan pemuda. Sementara disisi lain kita mengharapkan bahwa pemuda sebagai aktor pembangunan akan memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan perekonomian, pemuda wirausaha yang dibina sebagai kader telah memberikan kontribusi kemajuan yang sangat baik. Hal ini sulit dicapai manakala tidak terjadi sinergi program kewirausahaan antara pemerintah pusat, daerah, pemuda dengan lembaga pemerintah lainnya yang memiliki program serupa.

Dalam beberapa kesempatan peneliti mempertanyakan kepada pemuda karangtaruna mas Ujg adakah ukuran yang jelas dari keberhasilan pemuda wirausaha. Dan jawaban dari mas Ujg (wawancara, 5 Januari, 2016, jam 12.00 Wib) adalah :

Bahwa tidak pernah ada satu ukuran yang jelas dari pemuda wirausaha yang dianggap telah berhasil, hal ini karena memang pembinaan yang diterima terkesan program putus dan tambal sulam. Yang lebih dirasakan oleh pemuda adalah memberikan motivasi diawal saja dan tidak dibarengi dengan tuntunan pada proses sampai menjadi hasil .

Ditambah lagi adanya sikap kurang konsistennya pemuda terhadap usaha yang digelutinya, yaitu mudah berpindah pada kegiatan usaha lainnya atau malah pergi dari desa ke Kota.

Hari ini bisa menjadi desainer atau pedagang batik dan beberapa hari kemudian bisa beternak ikan.

Masih disampaikan mas Ujg bahwa :

Pembinaan yang bersifat motivasi atau bantuan dana itu juga tidak merata hanya jatuh pada pemuda yang itu –itu saja tanpa pendataan jelas . Hal itu semua karena tidak adanya pendataan dan program yang jelas berkelanjutan sehingga kaderisasi terdata.

Pemuda juga kurang mendapatkan kepercayaan akses permodalan karena perbankan masih menggunakan syarat –syarat konvensional, hal ini tentu

saja sulit dilakukan oleh pemuda pemula wirausaha yang hanya memiliki bekal ketrampilan dan semangat. Pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan sebagai lembaga penjamin atau pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan beberapa perbankan untuk dapat membantu akses permodalan dengan membuat syarat ringan bagi pemuda wirausaha yang membutuhkan tambahan modal.

Hal ini dikeluhkan oleh salah satu pemuda wirausaha mas Nyt (wawancara, 5 Januari 2016, Jam 20.00 Wib) yang bergerak dalam bidang makanan disampaikan bahwa:

sangat sulit mengakses perbankan, apalagi dulu pernah dapat kredit kecil untuk mengembangkan usahanya namun begitu gempa bumi tidak dapat mengembalikan kriditnya, begitu sekarang mau pinjam ke perbankan syarat minimal saja tidak dapat dipenuhi akibat kredit sebelumnya yang belum terbayarkan akibat bencana yaitu masuk dalam list BI chacking. Mestinya hal ini jika ada pendampingan dari pemerintah tidak akan terjadi, kami tidak dapat membayar saat dapat kredit karena semua barang hasil produksi dan alat produksi hancur, lantas saat hendak memulai kami tidak bisa mengakses perbankan, Ini membuat para pemuda wirausaha patah arang .

Kewirausahaan pemuda secara yuridis dan kebijakan serta program menjadi prioritas utama dalam pembangunan khususnya pembangunan ekonomi. Desa Wukirsari sendiri memfokuskan pada beberapa kegiatan untuk menuju desa mandiri yaitu sebagai desa wisata kerajinan, meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan agrowisata menjadi agropendidikan. Namun pada kenyataannya persoalan menuju kearah tersebut banyak hambatan yang terjadi sesuai hasil wawancara pada program, mekanisme , budaya dan aktor , yaitu :

1. Belum adanya kebijakan yang secara khusus mengatur tentang kewirausahaan pemuda
2. Sinergi program kewirausahaan pemuda antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah

3. Perbedaan aktor pelaksana kegiatan kewirausahaan pemuda di tingkat Pusat dan daerah
4. Belum adanya Lembaga Independen yang mengatur kegiatan secara bersama dari seluruh instansi yang memiliki program kewirausahaan pemuda
5. Kurangnya terbukanya akses permodalan dan akses pasar bagi wirausaha muda

Kebijakan Kewirausahaan pemuda sangat dibutuhkan dalam mengatur jalannya kegiatan kewirausahaan, sehingga tugas dan fungsi dari masing-masing yang menjalankan akan terkontrol dengan baik. Tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang kewirausahaan pemuda ini akan akan berjalan dengan baik dalam mengukur tingkat keberhasilan melalui penajaman program, koordinasi dan sinkronisasi program. Jika hal ini dapat dilaksanakan dengan baik maka pemerintah daerah akan membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kewirausahaan pemuda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lebih lanjut disampaikan dalam pasal 13 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melakukan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. Dan tugas –tugas tersebut dilakukan oleh menteri, Gubernur dan Bupati atau Walikota. Disinilah akan terjadi sinergi antara pusat dan daerah.

Lembaga Independen yang mengatur kegiatan secara bersama dari seluruh instansi yang memiliki program kewirausahaan pemuda, seharusnya juga bukan menjadi hambatan jika koordinasi dapat berjalan dengan baik hal ini

terlihat pada pasal 14 dari UU NO. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dimana Menteri dapat mengkoordinasikan kebijakan dan program di bidang kepemudaan dengan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonpemerintah dan /atau pemerintah daerah serta unsur terkait lainnya, bahkan dapat melakukan kerjasama dengan negara lain. Sehingga seharusnya bukan menjadi faktor yang menghambat.

Akibat dari hambatan-hambatan didalam tataran sistem pemerintah daerah maka peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial serta agen perubahan tidak dapat berjalan dengan cepat kendati dari pemuda di Desa Wukirsari sendiri telah memiliki kesadaran penuh akan hal ini. Kegiatan kewirausahaan yang dilakukan tanpa dukungan dan bimbingan serta pendampingan yang konsisten dari Pemerintah telah nyata memberikan hambatan pada pengembangan kegiatan kewirausahaan pemuda sendiri khususnya pada keberlangsungan kegiatan dalam hal menghadapi persaingan kualitas produk, akses permodalan, pemasaran dan yang lebih penting lagi adalah pengakuan akan peran penting pemuda dalam pembangunan. Disini pemerintah memiliki kewajiban merangkul dengan kesamaan derajat, bahwa tenaga, pikiran dan kemampuan pemuda sangat dibutuhkan dalam mengembangkan ketahanan ekonomi di daerahnya.

Dari pernyataan diatas dibutuhkan satu model yang dapat mengatasi persoalan yang terjadi di desa Wukirsari dalam membangun kewirausahaan pemuda melalui nilai-nilai budaya kearifan lokal. Kearifan lokal menjadi satu hal penting dalam mempertahankan jatidiri dan semangat para pemuda desa Wukirsari

5.3. Model Eksisting membangun kewirausahaan pemuda di Desa Wukirsari

Model eksisting yang selama ini telah disosialisasikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Kewirausahaan Pemuda yaitu model pengembangan kewirausahaan pemuda, sudah sangat baik, namun dalam perkembangannya, peneliti melihat satu aspek menonjol yang tidak secara jelas di desain disana yaitu tentang kearifan lokal dan sistem administrasi publik dalam menangani persoalan kewirausahaan ini. Pemuda selain kegiatannya harus terukur dengan baik melalui pembinaan juga harus diajak dan dirangkul untuk berperan aktif. Dan bukan semata-mata untuk dirinya tetapi bahwa apa yang dilakukan pemuda adalah untuk kemajuan daerahnya.

Selanjutnya peneliti merangkaikannya melalui alur pemikiran sistem pemerintahan daerah dimana desentralisasi secara singkat dapat dikatakan untuk membangun kemakmuran dan keadilan bagi daerah masing – masing. Dan di Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini sangat memiliki keragaman kearifan lokal yang mestinya menjadi satu kunci kekuatan ketahanan tersendiri. Kearifan lokal harusnya sangat memberikan satu pemikiran yang kuat akan perbedaan yang membangun diri masyarakat dan juga kekayaan alam yang sudah ada atau disediakan. Jadi tinggal bagaimana hal ini dapat dikembangkan sesuai yang dibutuhkan untuk kemajuan suatu peradaban pada daerah tersebut. Disinilah peran Pemerintah, lingkungan dan non pemerintah mendorong pemuda untuk melakukan wirausaha atau berfikir sebagai wirausaha untuk mengembangkan potensi kearifan lokal, menjadi satu kekuatan dalam membangun daerahnya salah satunya melalui kegiatan kewirausahaan pemuda.

Kearifan lokal ini juga merupakan jawaban dari hadirnya globalisasi yang merupakan dua fenomena yang kontradiktif yaitu standarisasi dan diversifikasi.

Standarisasi budaya melalui kesamaan produk dan sistem organisasi dalam kehidupan bermasyarakat, disisi lain adalah diversifikasi berusaha melestarikan berbagai aspek masyarakat dengan mempromosikan ke figur beragam warisan dunia (hallak, dalam Martono, 2014). Sehingga para pemuda wirausaha harus mampu mensiasati serta memilah dan memilih setiap perkembangan budaya

yang terjadi. Budaya lokal memiliki nilai yang terus bergerak secara dinamis, nilai adiluhungnya sebagai etika dalam tatanan berkehidupan tentu melekat dalam diri karena tumbuh dalam lingkungan sehari-hari, masuknya budaya asing tentu akan memperkaya yang tentu saja dengan pemilahan yang sesuai.

Dengan demikian kearifan lokal tadi akan mampu menjadi budaya unggul dalam proses transformasinya dalam membentuk satu kekuatan kreatifitas dan inovasi.

Dalam kegiatan penelitian kewirausahaan yang berbasis pada kearifan lokal telah memberikan satu dorongan kuat bagi jiwa pemuda wirausaha bahwa hal ini juga merupakan banteng pertahanan ekonomi yang dilakukan oleh pemuda, pemuda yang mandiri adalah pemuda yang mampu mempertahankan hidupnya dan lingkungannya. Hanya saja disisi perlu adanya satu pelatihan dan pembelajaran yang benar tentang arti pertahanan tersebut baik melalui perilaku berdisiplin ataupun perilaku konsiten yang dimiliki pemuda Desa Wukirsari. Hal ini Nampak sekali tergali pada saat diselenggarakan FGD (*Focus group Discussion*) yang dilaksanakan kantor salah satu pemuda wirausaha pada bulan 2 Februari 2016, yang diikuti oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah, Swasta dan Pemuda dengan hasil FGD yang dirumuskan bersama dalam forum tersebut dan disampaikan oleh perwakilan dari pemuda Karang Taruna sebagai berikut :

Desa Wukirsari adalah desa wisata yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal, keagamaan dan penghormatannya pada yang lebih tua atau dituakan. Nilai budaya agama dan hormat pada yang lebih tua ini juga memupuk rasa cinta pada daerah atau lingkungannya, sebagai nilai cinta pada tanah air (nilai kebangsaan).

Program penyadaran dari Kementerian harusnya menyuntuh pada ranah tersebut. hal ini terlihat jelas saat dilaksanakan FGD untuk mencari jawaban yang lebih nyata dari apa yang seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintah, swasta (non Pemerintah) dan masyarakat sendiri.

Hasil –hasil wawancara dan FGD dapat menuntun peneliti dalam merekomendasikan model yang sesuai, dalam FGD juga dirumuskan tentang pentingnya pendisiplinan, dan semangat yang konsisten tidak mudah bosan bagi pemuda wirausaha serta pemahaman bahwa kewirausahaan pemuda merupakan salah satu dari bagian ketahanan ekonomi yang merupakan unsur dari bela negara.

Adapun kondisi eksisting dalam membangun kewirausahaan pemuda melalui budaya kearifan lokal di desa wukirsari terlihat pada saat dilakukan penelitian melalui wawancara dan observasi peneliti yaitu sebagai berikut:

a. Program apa saja yang sudah dilakukan di Desa Wukirsari dalam menumbuhkan perekonomian desa ? Dan dari data yang diterima baik melalui wawancara ataupun pengamatan adalah :

1. Meningkatkan produktivitas pada pertanian, kerajinan .
2. Memberikan lapangan kerja baru dengan pemanfaatan lahan-lahan di sekitar permukiman,
3. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada,
4. Meningkatkan kualitas anak sejak dini melalui pendidikan,
5. Mengembangkan kualitas, kreatifitas produksi kerajinan yang ada sebagai pendukung kawasan Agrowisata Sultan ground

b. Mekanisme seperti apakah yang sesuai dalam membangun pertumbuhan perekonomian yang sekaligus menyadarkan pemuda untuk ikut berperan ?

dan jawaban dari mekanisme ini adalah kuatnya partisipasi masyarakat desa.

c. Siapa sajakah aktor yang terlibat dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat desa Wukirsari ? dari jawaban yang ada adalah dari masyarakat dan pemuda Desa wukirsari sendiri serta Pemerintah.

d. Apakah budaya lokal memberikan kontribusi yang baik dalam memacu atau menjaga semangat kerja pemuda atau masyarakat desa, ? dari mayoritas jawaban, budaya atau kearifan lokal telah menjadi semangat yang tumbuh untuk terus produktif berkarya dalam mempertahankan hidupnya serta berusaha untuk menjadi lebih baik karena hal ini menjadi seperti identitas diri bagi pemuda Wukirsari. Pemuda Wukirsari bangga dengan budaya lokal yang mereka miliki khususnya dalam tatakrama melalui bahasa, atau *sanepo* (simbol), agama, dan spiritualitas dari budaya keraton yaitu *ngalap berkah dalem*.

Program yang sudah berjalan melalui partisipasi pemuda dan masyarakat jika dihubungkan kembali dengan peraturan perundangan tentang kewirausahaan pemuda ternyata masih terdapat faktor yang mendukung dan menghambat dalam kegiatan tersebut. Adapun faktor yang mendukung sangatlah banyak selain dari Pemerintah Desa, juga masyarakatnya sendiri serta budaya lokal yang ada. Selain itu pada tingkat Pemerintah Pusat seluruh perundangan sebagai dukungan membangun kewirausahaan ini telah diterbitkan. Hanya saja persoalannya tidak terjadi sinkronisasi yang baik antar lembaga dan belum diterbitkannya perundangan ditingkat daerah sehingga hal

ini menjadi sebuah hambatan, mengingat program membangun kewirausahaan pemuda merupakan program nasional dalam menumbuhkan jiwa dan semangat pemuda dalam keikutsertaannya pada program pembangunan nasional. Dalam hal ini terkait pertanyaan tentang model yang selama ini sudah dilaksanakan ada beberapa respon antara lain dari :

Bapak TSS seorang perancang program di PEMDA Bantul pada wawancara , 30 Desember, 2015 jam 10.00 wib) menyampaikan bahwa :

Seluruh potensi yang ada di Desa Wukirsari memang sedang dirancang dan dipersiapkan untuk menumbuhkan kegiatan wirausaha mengingat tidak mungkin lagi membuka lahan, dan wirausaha yang memungkinkan adalah mengembangkan kreatifitas seni sebagai ekspresi budaya. Seperti batik, tatah sunggih, bambu.

Lebih lanjut disampaikan bahwa apa yang dilakukan pemuda wirausaha ini merupakan kecintaannya pada daerah untuk melestarikan kekayaan lokal dengan sekaligus mempromosikan pada daerah lainnya bahkan pada manca negara. Ini merupakan bukti adanya rasa cinta pemuda dengan lingkungannya dan mencoba melestarikan.

Di sampaikan oleh Mas AK seorang aktifis dari HIPMI Bantul (30 Desember, 2015, Jam 11.30 WIB), bahwa :

Pemuda di Bantul Khususnya Desa Wukirsari, memiliki semangat yang tinggi membangun usahanya kembali setelah ditempa musibah bencana yang luar biasa pada 2006, dengan mengembangkan keterampilan yang diperoleh dari keluarga. Pemuda berkeinginan untuk mandiri secara ekonomi dengan melakukan wirausaha yang didukung dari keterampilan keluarga yaitu memproduksi barang seni.

Lebih lanjut disampaikan mas AK,

Mereka para pemuda paham betul bagaimana budaya korea dan produksi cina saat ini membanjiri Yogyakarta, namun mereka tetap bersemangat dengan menciptakan desain-desain baru yang kreatif dan inovatif dengan melihat produk yang ada dipasaran dengan tidak meninggalkan karakter dari budaya lokal.

Harapan dengan kreatifitas ini lebih lanjut disampaikan mas AK adalah kaum muda di Desa Wukirsari, Kabupaten Bantul dan Yogyakarta sendiri menjadi memiliki minat untuk membeli produk tersebut. Jadi selain dibeli sendiri juga dibeli oleh pasar lainnya.

Disampaikan oleh Ar K seorang TNI (wawancara 30 Desember, 2015 Jam 12.00 Wib) bahwa:

Bela negara bukan semata mata tugas TNI dan identik dengan militerisme tetapi bagaimana menjaga NKRI dengan kemampuan dan potensi diri juga profesi yang dijalankan sebaik-baiknya termasuk menjadi pemuda wirausaha. Menjadi seorang wirausahawan diperlukan mental yang tangguh tidak mudah patah semangat dan disiplin untuk dapat bertanggungjawab serta jujur, hal ini juga dapat sebagai perwujudan bela negara, untuk itu TNI yang berasal dari rakyat akan siap apabila pemuda bersedia mendapat pelatihan dan pendampingan program kewirausahaan yang berkaitan dengan mental dan moral pemuda wirausaha.

Lebih lanjut disampaikan, pemikiran inovatif dan kreatif dengan melihat perkembangan produk yang ada karena derasnya produk asing masuk merupakan daya tahan yang tumbuh , ditambah lagi dengan daya beli yang ada oleh masyarakat atau pemuda sendiri ini merupakan belanegara dalam daya beli. Artinya ada bela beli yang merupakan ketahanan ekonomi bagi pemuda wirausaha.

Wawancara selanjutnya bersama seorang pengusaha bapak HP, di Jogjakarta da tanggal 31 desembert , 2015 jam 10.00 Wib) yang menyatakan bahwa :

Kedepan peranan TNI dibutuhkan dalam program pelatihan dan pendampingan program dalam mengembangkan karakter berani, disiplin dan bertanggungjawab, jujur serta paham bagaimana mempertahankan nasionalisme di era globalisasi.

Selain itu seorang wirausaha juga harus pantang menyerah, dan rasanya pendidikan ini dapat diberikan melalui pendidikan bela negara dalam konsep kewirausahaan. Seorang wirausaha harus berani, jujur dan pantang menyerah. Disinilah keterlibatan TNI dalam pembinaan kader dapat dilakukan.

Lebih lanjut disampaikan bapak HP yang juga kader FKPPi,

Pendidikan kewirausahaan dapat dijalankan melalui pendidikan kader pemuda FKPPi yang telah menjadi syarat penjenjangan kader di lembaga FKPPi. Jika ini dapat terwujud FKPPi akan mencetak pemuda kader yang mampu menjadi wirausaha dengan semangat kebangsaan yang tinggi serta memiliki kedisiplinan, keberanian dan tanggungjawab yang baik serta pantang menyerah. Jadi memiliki Jiwa Korsaa

Lebih lanjut di sampaikan bapak HP,

Jika kader kewirausahaan pemuda memiliki jiwa Korsaa yang tinggi maka selanjutnya adalah tugas pemerintah mendukungnya melalui peraturan atau

kebijakan yang menghimbau atau mengharuskan membeli produk sendiri yang telah diproduksi oleh pemuda wirausaha di daerah. Hal ini tentu saja akan menumbuhkan daya beli yang tinggi dari dalam sendiri ditambah dari pembeli luar negeri. Globalisasi menjadi sangat positif karena produk lokal menjadi konsumsi sendiri dan memenuhi kebutuhan internasional. Bukankah dulu telah ada program tersebut yaitu menggalakan produk Aku cinta Indonesia, yang di galakan melalui promosi film ACI di televisi.

Mencintai bangsa dan negara untuk tegangnya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kewirausahaan pemuda sangat baik, untuk itu bagi organisasi kepemudaan untuk mulai memikirkan hal ini dan dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah dan TNI-POLRI dalam kegiatannya.

Mas Ujg pemuda Wirausaha yang sudah pernah dikirim ke Australia menyampaikan (wawancara 5 Januari 2016.)

Jika media masa, informasi dan komunikasi diisi dengan program yang menyarakan kegiatan pemuda yang positif tentu akan memberikan dampak baik bagi kaum muda khususnya di pedesaan. Televisi saat ini jarang sekali menginformasikan hal-hal tersebut.

Jarang sekali adanya pembekalan tentang bagaimana mencintai daerah atau bangsa ini melalui apa –apa yang dapat dilakukan oleh pemuda khususnya, bahkan dewasa ini kita lebih sering disuguhi kegiatan yang membingungkan melalui pemberitaan melalui *Handphone*.

Akibatnya kita hanya sibuk membaca dan membicarakan hal-hal yang kita sendiri kadang tidak mengerti. Sebaiknya pemerintah khususnya yang membidangi kewirausahaan hal-hal kreatif yang merupakan contoh itu juga diinformasikan sehingga kami yang di desa ini bisa mendengar dan itu saya rasa akan memotivasi.

Dalam kesimpulan akhir dari fokus diskusi yang di adakan di Kodim Bantul ini dirumuskan oleh peneliti sebagai berikut :

Membangun kewirausahaan pemuda melalui nilai –nilai kearifan lokal dari hasil fokus diskusi dapat disepakati merupakan bentuk bela negara dalam bentuk

Bela Beli yang dilengkapi dengan regulasi dari pemerintah daerah.

Kewirausahaan dengan mengembangkan potensi yang ada sesungguhnya adalah pelaksanaan sistem pemerintahan desentralisasi yang bertujuan mensejahterakan masyarakatnya.

Era globalisasi yang terjadi harus disikapi positif oleh pemuda wirausaha yang memiliki mental yang tangguh, mandiri dan berdaya saing serta memiliki kemampuan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, dengan berbekal pada budaya kearifan lokal sebagai perisai diri dalam menghadapi globalisasi melalui komitmen moral untuk hidup bersama- sama secara damai dan berbudi dengan menciptakan harmonisasi sosial hal ini karena budaya merupakan ekspresi dari religiusitas, spiritualitas, etika dan estetika yang menjadi pondasi dalam kehidupan sosial.

Pemuda wirausaha bukanlah pilihan tetapi satu keharusan dalam menumbuhkan ketahanan ekonomi yang memperlihatkan arti penting peran pemuda dalam pembangunan khususnya pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat sekitarnya.

Dari hasil penelitian di lapangan dan hasil FGD ada beberapa hal yang harus dicermati untuk ditindaklanjuti yaitu :

1. Membangun Kewirausahaan Pemuda telah memiliki payung hukum yang kuat, tinggal bagaimana pelaksanaan dari setiap kebijakan itu dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat Daerah.
2. Nilai-Nilai Kearifan Lokal memberikan harmonisasi dan pandangan yang mendalam tentang mencintai lingkungan dan negaranya.
3. Kewirausahaan pemuda menjadi begitu penting didalam pembangunan karena merupakan pilar dalam pembangunan ekonomi. Pemuda yang mandiri dan mampu mensejahterakan lingkungannya adalah pemuda yang mencintai negaranya sehingga kewirausahaan pemuda merupakan salah satu wujud dalam bela negara dengan dukungan regulasi Bela beli akan semakin menguatkan kewirausahaan pemuda sebagai ketahanan

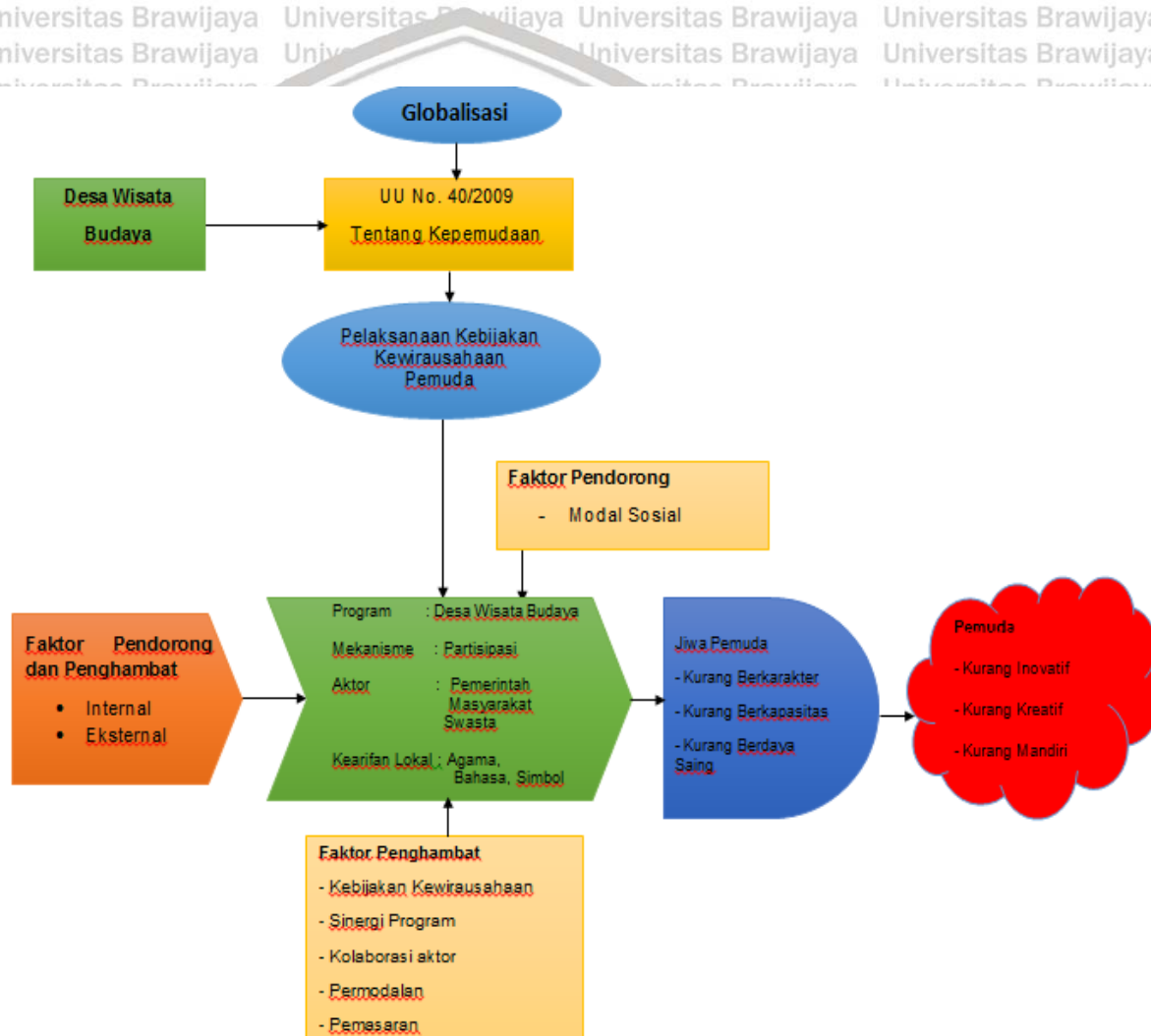
ekonomi. Budaya kearifan lokal akan menuntun pemuda memiliki jatidiri dan filterisasi dari pengaruh budaya asing dalam globalisasi dan justru akan mendorong terjadinya dinamika budaya baru yang heterogen yaitu glokalisasi dimana budaya lokal dan global berkembang untuk kepentingan lokal, nasional dan internasional.

Selanjutnya dalam penelitian terdapat juga beberapa pendapat yang harus dicermati untuk ditindaklanjuti yaitu :

1. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana operational dalam kegiatan kewirausahaan pemuda membutuhkan sinergi bersama dengan instansi atau lembaga lain dalam menjalankan kegiatan kewirausahaan pemuda, melalui adanya koordinasi, komunikasi, komitmen dalam memberikan pelayanan pada pemuda secara terintegrasi.
2. Koordinasi dibutuhkan agar supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan instansi lainnya sehingga kegiatan akan lebih efektif baik dari sisi waktu ataupun anggaran sehingga akan lebih efektif dan efisien bagi pemanfaatan pengembangan kegiatan kepemudaan khususnya kewirausahaan.
3. Diperlukan satu kesepakatan bersama tentang jenjang eselonisasi dalam pemerintahan yang mengurus pemuda wirausaha sehingga terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada pembinaan pemuda wirausaha.
4. Pentingnya disepakati pembentukan satu lembaga independen yang mengatur dan melaksanakan kegiatan dari setiap lembaga yang memiliki program kewirausahaan pemuda.

Selain hal-hal yang selama ini telah mendukung dan menghambat, faktor kearifan lokal memberikan dukungan yang sangat besar dalam membangun

kewirausahaan yang terjadi di Desa Wukirsari. Juga dibutuhkannya rasa cinta negara melalui produksi daerah yang dibeli paling tidak oleh daerah tersebut dan untuk dapat dikembangkan bersama. Sehingga para pemuda merasakan bahwa membangun kewirausahaan merupakan bagian penting dari bela negara dengan kemampuan Bela beli yang didukung oleh pemerintah daerah. Model yang telah dilaksanakan selama ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 5.13 Model Eksisting

Membangun Kewirausahaan Pemuda Di Desa Wukirsari

BAB VI

PEMBAHASAN

6.1. Pelaksanaan Membangun Kewirausahaan Pemuda di Desa Wukirsari, Kabupaten Bantul

Globalisasi adalah sebuah keniscayaan, untuk itu dalam rangka mengantisipasi segala kemungkinan pemerintah Kabupaten Bantul melalui kebijakan Perda No. 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul tahun 2010-2030 mengajak warga nya untuk mengembangkan segala potensi lokal yang ada dalam menumbuhkan ketahanan khususnya masalah budaya dan ekonomi serta lingkungan. Slogan atau semboyan Kabupaten Bantul adalah Bantul *The Harmony of Nature and Cultur* yang dimaksudkan untuk memahami konsep lingkungan alam (fisik, hayati dan budaya) yang semuanya merupakan obyek yang tercipta dari hasil karya Tuhan Yang maha Esa. Sehingga seluruh warga Bantul senantiasa menyadasi itu dengan mensyukuri kekayaan sumberdaya alam melalui kegiatan yang berbudaya dengan pengelolaan sebaik baiknya. Dalam penelitian ini Desa Wukirsari yang merupakan Desa Wisata Budaya menjadi salah satu target pembangunan dengan mengedepankan basis budaya lokal baik dalam pengembangan sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam yang ada.

Kesungguhan pemerintah daerah ini pun mendapat sambutan baik dari pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan dan penyadaran tentang program pengembangan potensi pada generasi muda untuk dapat berperan di daerahnya melalui kegiatan kewirausahaan pemuda yang tercermin dengan adanya Kebijakan kepemudaan yang tertuang dalam Undang-undang

Kepemudaan No.40 Tahun 2009 yang bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dituntut untuk dapat mewujudkan generasi muda (pemuda) yang memiliki sikap mental (karakter) sebagaimana diharapkan. Salah satu sikap mental pemuda yang diharapkan adalah agar pemuda memiliki jiwa kewirausahaan dan kemandirian. Sikap ini sangat penting ditumbuhkan dengan melihat kenyataan kondisi bangsa yang belum mampu menyediakan lapangan kerja sebagaimana yang diharapkan.

Penyadaran dan pelayanan yang baik dalam kewirausahaan pemuda ini didasari dari sikap pemerintah sebagaimana yang disampaikan dalam kebijakan publik dengan sistem administrasi publik yaitu *reinventing government* yaitu bagaimana memberikan mekanisme kompetisi dalam memberikan pelayanan publik, yang didukung dengan cara memberdayakan warganya melalui penguatan kontrol masyarakat terhadap birokrasi. Para pemuda diajak untuk menilai dan melihat kinerja mereka dalam memberikan pelayanan. Para birokrat sudah tidak lagi terlalu melihat aturan akan tetapi pada misinya yaitu menjadikan pemuda sadar akan arti pentingnya menjadi wirausaha yang kreatif, inovatif dan mandiri. Disinilah pemerintah melalui birokrasinya berusaha mencegah permasalahan pada diri pemuda yaitu menjadi pengangguran dan menjadi beban pada masyarakat. Sedangkan pemuda sendiri mestinya memahami arti penting dari desentralisasi dan mengharapkan pemuda melakukan perannya

dengan berpartisipasi untuk berkompetisi dengan pasar. Tentu saja pemuda tidak dapat berdiri sendiri, pemuda harus didukung baik oleh pemerintah maupun sektor private (swasta)..

Kelompok pemuda Desa Wukirsari dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah hendaknya memiliki kesadaran sebagai warga negara yang diperhatikan untuk keluar dari situasi yang akan menjadi beban dengan satu kesadaran dan mau melakukan satu tindakan nyata dalam pembangunan melalui kewirausahaan pemuda, diantaranya dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, mengikuti pelatihan dan memiliki konsistensi dalam menjalankan pilihannya sebagai wirausaha muda. Dengan demikian hal ini merupakan kesempatan terjadinya agen perubahan dalam pembangunan khususnya bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemuda.

Tentu saja hal itu dapat dilakukan jika mereka memiliki idealisme-patriotisme yang didukung oleh kemandirian ekonomi, tidak menggantungkan nasibnya pada negara layaknya pegawai negeri atau mereka yang tergantung pada kekuatan asing. Pernyataan ini jangan dipahami sebagai anti asing atau PNS, karena tidak mungkin sebuah negara tanpa bermitra dengan kekuatan asing dan tanpa PNS, tetapi hanya ingin menekankan bahwa mereka yang lebih mampu menjadi pelopor perubahan sosial adalah yang berjiwa merdeka dan memiliki kemandirian secara ekonomi. Dengan demikian, sebagai agen gerakan perubahan, sikap mental pemuda yang memiliki jiwa kewirausahaan diharapkan dapat mendorong kemandirian generasi muda sehingga ketergantungannya terhadap pemerintah semakin berkurang. Agar kewirausahaan pemuda dapat dikembangkan sesuai dengan harapan, dalam pasal 26 Undang-undang No 40/2009 pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan dan difasilitasi

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan atau organisasi kepemudaan melalui kegiatan-kegiatan: (1). Pelatihan, (2). Pemagangan, (3). Pembimbingan, (4). Pendampingan (5). Kemitraan, (6) Promosi, dan /atau, (7) Bantuan akses permodalan

6.1.1. Program

Pembahasan dalam program membangun kewirausahaan pemuda ini diawali dengan membandingkan dengan 10 penelitian terdahulu, dimana dalam penelitian terdahulu memiliki kesamaan bahwa program membangun kewirausahaan pemuda adalah program yang membutuhkan perhatian dari pemerintah secara lebih mendalam untuk keberhasilannya melalui sebuah kebijakan yang mendukung. Kebijakan yang mendukung ini adalah kebijakan tentang pendidikan kewirausahaan yang menjadi kurikulum sejak dini, adanya dukungan dari faktor-faktor internal pemuda seperti keluarga dan lingkungan masyarakat. Persamaan lain yang masih harus ditindaklanjuti adalah bantuan permodalan baik itu melalui lembaga pemerintah ataupun CSR, status hukum dari kegiatan kewirausahaan pemuda dan peningkatan dalam memberikan penyadaran dan motivasi bagi pemuda untuk berwirausaha.

Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu adalah pada program pendidikan kewirausahaan baru diajarkan di sekolah menengah keterampilan (SMK), dan di Indonesia pemuda melakukan wirausaha karena merupakan kegiatan turunan dari keluarga. Dalam penelitian ini agama dan budaya menyatu dalam menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan bahwa mereka akan berhasil.

Di desa Wukirsari kuat sekali meyakini bahwa dengan *berkah dhaalem* hidup mereka akan makmur yang terpenting adalah merawat, memelihara budaya

dalam nilai, perilaku dan artefak yang ditinggalkan dijaga dengan baik. Sehingga kearifan lokal di Kabupaten Bantul menjadi pendorong yang kuat dalam berwirausaha. Sehingga jangkauan budaya dalam tiga pengertian dapat mengglobal. Namun demikian masih dibutuhkan kerjasama dalam aktor implementasi kegiatan ini. Dalam era globalisasi kekuatan lokal akan menjadi daya rekat bagi masyarakat dan bangsa sehingga nilai-nilai lokal ini perlu digali lebih dalam sehingga kebijakan publik tidak jauh dari nalar publik. Dan dalam perubahan yang begitu cepat ini konsep *Good Governance* melalui paradidma NPM dan NPS tidaklah cukup, di sini dibutuhkan konsep yang mengedepankan kultur atau budaya sebagai fondasi dan juga kapabilitas atau kemampuan diri.

Konsep Dynamic Governance dalam kapabilitas berfikir kedepan, berfikir lagi dan berfikir lintas batas, pemerintah yang dinamis merespon segala perubahan tidak terjadi secara spontan. Begitu juga dalam memberikan penyadaran bagi pemuda Wirausaha disinilah dibutuhkan niat yang kuat dari seorang pemimpin untuk menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat atau pemuda. Pemerintah dan pemuda memiliki keharusan dalam menyikapi program membangun kewirausahaan yang mau tidak mau memang harus dijalankan yaitu dengan terus dinamis berfikir secara berbeda, mengartikulasikan ide-ide sehingga dapat diterima dan mengkonversi sumberdaya ke dalam organisasi baik itu dalam pemerintahan maupun dalam kegiatan kepemudaan untuk mencapai kemampuan yang diinginkan selama periode yang ditetapkan secara berkelanjutan. Disini keberhasilan ditentukan dengan kemampuan melakukan koordinasi.

Dalam usaha kolektif yang dikoordinasikan di Desa Wukirsari dalam membangun kewirausahaan pemuda telah dijabarkan melalui beberapa program, yaitu :

- 1) Program peningkatan produktifitas pertanian jelas sekali bahwa tanah garapan sudah semakin sempit, sehingga pertanian bukan satu-satunya sumber dalam memenuhi kebutuhan untuk itu para petani mulai melakukan inovasi dengan membuka lapangan kerja baru dalam pemanfaatan lahan-lahan di sekitar permukiman dengan menanam tanaman diluar padi yang dapat ditanam di sekitar pekarangan. Usaha ini menunjukan hasil yang baik misalnya tanaman untuk bahan obat herbal. Dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilakukan penyuluhan dan pelatihan terprogram oleh masyarakat desa dan berjalan dengan baik, salah satu tempat pertemuan yang ada, adalah di perpustakaan desa.
- 2) Program peningkatan sumberdaya manusia ini pula dilakukan program pembelajaran sejak usia dini khususnya pembelajaran dalam memahami potensi sumber daya yang ada dan mampu dikembangkan menjadi tempat pariwisata.
- 3) Program pemahaman agama yang menyatu dengan kegiatan budaya, dan pada akhirnya agama ya budaya itu sendiri yang dipelajari oleh generasi muda di Desa Wukirsari.

Sehingga keunikan dari penelitian terdahulu dalam penelitian di Desa Wukirsari ini adalah :

- a. Pemuda Wukirsari memiliki kesadaran penuh akan arti pentingnya kewirausahaan yang didukung oleh kondisi sumber daya alam yang menunjang dan nilai-nilai kearifan lokal
- b. Kesadaran ini tidak berbanding seimbang dengan dukungan dari pendidikan formal yaitu adanya konsep pendidikan kewirausahaan, yang belum terintegrasi dalam kurikulum pendidikan meskipun di Desa Wukirsari
- c. Sementara satu potensi wisata budaya agrowisata dicanangkan sebagai wisata agro pendidikan.
- d. Modal yang mendorong kewirausahaan pemuda Wukirsari adanya kesadaran mental, moral serta spiritual. Sedangkan untuk modal intelektual dan keterampilan perlu adanya peningkatan sehingga dibutuhkan program pengembangan dalam hal pendidikan dan keterampilan wirausaha yang terpadu. Program ini meliputi semua aspek mulai dari keterampilan, produksi sampai pada kemampuan dalam hal manajemen kewirausahaan khususnya pada bidang pariwisata.

Melihat seluruh persoalan yang ada dalam membangun kewirausahaan melalui nilai-nilai kearifan lokal, maka peran penting dalam administrasi publik dalam mewujudkan *Good Governance* dengan kekuatan nilai-nilai kearifan lokal dan partisipasi pemuda sangat tepat dalam membangun kewirausahaan ini dikembangkan melalui konsep *Dynamic Governance*, berfikir terus kedepan dalam dunia yang tidak menentu adalah tentang melibatkan orang-orang dalam konversi strategis (Kees Vsn der Heijden, 2005) sehingga mereka dapat masuk

akal melihat perkembangan masa depan, yang mungkin berbagi dari apa yang telah mereka asumsi. Proses berfikir kedepan ini dapat meliputi :

- a. Mengeksplorasi dan mengantisipasi kecenderungan dan perkembangan masa depan yang mungkin memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan kewirausahaan pemuda di Desa Wukirsari terutama pada tujuan –tujuan kebijakan.
- b. Memahami bagaimana perkembangan dari penetapan desa Wukirsari sebagai Desa Wisata Budaya yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan pada saat ini, dan menguji efektifitas, strategi, kebijakan dan program.
- c. Pemerintah daerah harus memiliki opsi strategi apa yang dapat digunakan untuk mempersiapkan munculnya ancaman dan manfaat peluang baru dalam perkembangan desa Wisata Budaya.
- d. Para aktor dalam program membangun kewirausahaan pemuda diharapkan mampu mempengaruhi pembuatan keputusan dan para pemangku kepentingan utamanya untuk mempertimbangkan munculnya isu-isue serius dan kemungkinan dalam menaggapinya.

Selain itu kita harus terus berfikir, berfikir lagi adalah kemampuan untuk menghadapi realitas, dalam menghadapi kinerja dan program yang sudah ada dari kondisi yang ada di Wukirsari dalam kewirausahaan desain seperti apa yang mungkin sesuai untuk situasi saat ini dan situasi yang akan datang, dengan *inside out* tentang bagaimana membandingkan kebijakan dan program dengan maksud dan tujuan yang diinginkan. Sedangkan dalam berfikir lintas batas dalam membangun kewirausahaan pemuda adalah kemampuan untuk melintasi batas-

batas tradisional dan untuk belajar dari pengalaman orang lain dan disesuaikan dengan kemungkinan bereksperimen melalui kebijakan dan program baru yang tentu saja inovatif. Dalam bab satu pendahuluan disampaikan oleh Ki Hadjar Dewantara dengan 3 N yaitu Niteni, Niroke dan Nambahi.

Inkubator kewirausahaan adalah wadah untuk pemuda melakukan eksplorasi, dan pemerintah dapat mengidentifikasi tingkat keberhasilan pemuda wirausaha tersebut melalui wadah inkubator tersebut. Dari sini dapat terlihat seberapa banyak akan tercipta generasi muda wirausaha dalam mendukung pembangunan ekonomi. Patut di pahami bahwa dalam era globalisasi setiap kemajuan yang ingin dicapai tidak terlepas dari seberapa besar kita memahami perkembangan teknologi dan informasi. Sehingga dalam kegiatan kewirausahaan inipun kunci keberhasilan dari setiap perkembangan baik itu yang berhubungan dengan sumberdaya manusia ataupun produksi tergantung pada seberapa besar dapat melibatkan teknologi dan informasi untuk keberhasilannya. Kreatifitas dan inovasi yang dikembangkan oleh pemuda didukung adanya kemajuan teknologi dan informasi akan memberikan hasil yang lebih kreatif, kekinian tanpa meninggalkan budaya lokal dengan hasil lebih efisien dan efektif.

Disampaikan dalam *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM) yang merupakan konsorsium terkemuka di dunia pada tahun 2009 untuk memahami hubungan antara kewirausahaan dan pembangunan ekonomi nasional. Dalam studinya GEM mengelompokkan ada tiga tahapan pembangunan ekonomi yaitu :

(1) faktor efisiensi, (2) faktor inovasi, (3) pergerakan ekonomi. Dalam pergerakan ekonomi merupakan ekstrasi di alam, sementara ekonomi faktor efisiensi menunjukan skala intensitas pergerakan utama dalam mendorong pembangunan. Sedangkan pada tahap inovasi yang didorong adalah

pembangunan, untuk ekonominya ditandai dengan produksi barang dan jasa yang baru dan unik yang dibuat melalui teknologi canggih.

Untuk memenuhi hal tersebut maka pemerintah dan pemuda yang didukung oleh swasta hendaknya memiliki kesadaran akan pentingnya kemajuan teknologi dan informasi pada era globalisasi sebagaimana disampaikan oleh Ilham, (2016) penemuan baru atau inovasi pada IPTEK, mempunyai peran penting dalam mencapai potensi maksimal bagi bangsa untuk menggapai masa depan. Melalui mata rantai, Sains, (*terapan teknis*), Teknologi, (*kelayakan teknis*), Inovasi, (*kelayakan komersial dan industrialisasi*), dan Kewirausahaan, maka proses produksi akan menghasilkan karya yang unggul. Ketiga pilar inovasi itu adalah Teknologi, Talenta, dan Toleransi Inisiatif merupakan inti dari kewirausahaan, dimana ia selalu mencari peluang dibalik hambatan. Berpikir lintas batas, tanpa kotak (*out of the box*). Dibalik kecerdasan, ia penuh tanggung jawab, tidak cengeng dan tidak semata-mata mencari keuntungan financial / material



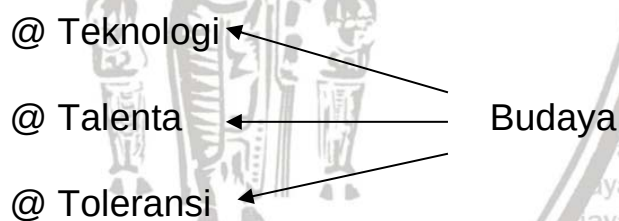
Gambar 6. 1

Mata Rantai yang Menyambungkan Kewirausahaan dan Teknologi
Sumber, Ilham (2016)

Inovasi sebagaimana bagan di atas tidak bisa berdiri sendiri. Ia hanya mata rantai penyambung antara tehnologi dan kewirausahaan. Sebagai

contohnya, apabila hanya inovasi saja maka akan menjadi sesuatu yang belum dicoba kelayakannya. Karena itu untuk mencobanya perlu ada terapan dalam konteks industri, serta bukan hanya di pajang dalam museum. Semua itu terjadi, karena inovasi kemudian digunakan dalam konteks kewirausahaan. Inovasi melimpah sesungguhnya sangat berkembang di Indonesia, namun tidak menjadi industri, hal ini menjadikan mata rantai tersebut menjadi terputus.

Selanjutnya menjadi sangat menarik, karena ternyata pada tiga pilar inovasi yang ada tersebut membentuk sebuah budaya. Budaya inilah yang kemudian menjadi dasar perkembangan dalam berwirausaha yaitu adanya dorongan dan dukungan teknologi, talenta para pemuda dan adanya toleransi dari tatanan masyarakat setempat. Toleransi sangat dibutuhkan dari lingkungan khususnya dalam budaya Jawa. Di mana berdagang bukan menjadi keinginan utama dalam mencari mata pencaharian pada awalnya.



Gambar 6.2 Tiga Pilar Inovasi

Sumber, Ilham (2016)

Budaya lokal yang diinjiner dengan kemajuan teknologi untuk menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien dalam kewirausahaan serta ditunjang dengan bakat atau talenta pemuda wirausaha dalam menumbuhkan industri kreatif. Tentu saja dengan masyarakat yang memiliki toleransi dan memberikan ruang bagi pemuda wirausaha akan tumbuh kewirausahaan pemuda dengan baik di Desa Wukirsari. Secara umum, industri kreatif di

Indonesia menyumbang 7,05% dari PDB dengan pertumbuhan 10% setiap tahun. Industri ini lahir dari inisiatif *bottom-up* dari komunitas kreatif dengan mampu menyerap 11,8 juta tenaga kerja.

Namun sayangnya, kebanyakan industri kreatif di Indonesia bukan berdasarkan teknologi. Sekalipun tidak dapat dikatakan tanpa teknologi sama sekali, namun teknologi tidak menempati peran yang dominan. Berikut adalah 15 gambaran kreatifitas dalam industri kreatif dengan dominasi industri kuliner dan pakaian atau fasion.

15 Creative Industry Products & Services	
Advertising	1%
Architecture	2%
Arts	0%
Handicraft	15%
Design	4%
Fashion	27%
Film, Video & Photography	1%
Interactive Games	1%
Music	1%
Performing Arts	0%
Publishing	9%
IT Service & Software	1%
Radio & Television	3%
Research & Development	2%
Culinary	33%

Gambar 6.3 15 Jenis Industri Kreatif Di Indonesia

Sumber: Ilham (2016)

Keberadaan industri kreatif yang lahir dari inisiatif *bottom-up* dari komunitas kreatif tersebut, sebenarnya dapat dikatakan jika fondasi industri kreatif tersebut adalah budaya. Akan menjadi lebih baik jika industri kreatif yang bukan berdasarkan teknologi tersebut kemudian diintegrasikan dengan teknologi. Dengan berintegrasi pada teknologi, kewirausahaan di Indonesia akan menjadi lebih baik dan juga lebih berkelanjutan. Paradigma baru dalam sinergi

kewirausahaan dan teknologi, selama ini terjadi dua bentuk inovasi yang lazim dikenal. Inovasi tradisional atau tertutup dan inovasi terbuka. Inovasi secara tradisional melakukan penelitian dan pengembangan secara tertutup dengan alasan untuk menjaga kerahasiaan. Semboyan mereka adalah *the lab is our world*. Inovasi kedua adalah inovasi terbuka. Inovasi ini disebut terbuka karena menggunakan pengguna, atau supplier, atau bahkan investor dalam fase inovasi. Semboyan bagi inovasi ini adalah *the world is our lab*.

Inovasi terbuka dapat dikatakan mampu memutarbalikan paradigma yang ada sebelumnya. Pada proses inovasi terbuka terdapat proses yang disebut sebagai *user centric cooperation phase* secara berkala. Dimana didalamnya terdapat interaksi dengan user, serta memperbaiki produk dan tahap lainnya. Dalam realitasnya, inovasi ini sudah mulai terjadi saat menggunakan teknologi. Sebagai contohnya, melaksanakan kompetisi untuk berinovasi bagi semua orang di dunia melalui internet, pemenang yang terbaik yang mendapat hadiah uang.

Terdapat contoh di dunia di mana industri tiba-tiba dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa dengan konsep yang paling terbuka. Ada juga dengan melibatkan tanpa yang bersangkutan mengetahui, atau *determining* dengan cara menggunakan *software* untuk mencari inovasi di internet. Semua itu kini menjadi sebuah kewajaran. Sebab, teknologi dapat digunakan untuk melakukan proses inovasi dan membantu kewirausahaan. Dalam membangun sinergi kewirausahaan dan teknologi dengan paradigma baru terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian, (1), Inovasi itu penting sebagai mata rantai antara teknologi dan kewirausahaan, (2), Dua aspek inovasi yang perlu disukseskan adalah: purwarupa dan industrialisasi, (3), Pelaksanaan inovasi, Teknologi (khususnya Teknologi Informasi & Komunikasi) akan sangat membantu. (4), Budaya adalah

sumber utama untuk SDM berkemampuan, Teknologi dan suasana kerja yang kondusif. Budaya tersebut dapat dimulai dari individu, keluarga, saudara-saudara, komunitas, rakyat dan negara. Berlangsungnya sinergi antara kewirausahaan dan teknologi muaranya harus mampu memberi akselerasi pada kemajuan bangsa. Tujuan akhirnya membuat negara stabil yang mempunyai ekonomi berdasarkan pengetahuan dan inovasi terbaru, serta mampu menyejahterakan seluruh rakyat dengan seadil mungkin.

Untuk dapat mengikuti perkembangan yang ada faktor lingkungan sangat mempengaruhi pemuda hal ini karena kualitas pemuda juga ditentukan oleh lingkungannya, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan non fisik. Dalam kehidupan sehari-hari pemuda harus berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Nimpuno (dalam Ndihara, 1985) menekankan ada empat hal yang perlu di perhatikan yaitu :

1. Kualitas manusia (pemuda) ditentukan oleh karakteristik dan dinamika internal manusia sebagai organisasi psikofisik
2. Kualitas lingkungan ditentukan oleh karakteristik dan proses-proses lingkungan menurut kategori-kategori lingkungan, geografis, bioferis, kognitif-perseptual dan simbolis transedental
3. Kualitas hidup ditentukan oleh perilaku interaksional antara manusia dengan lingkungan total berikut proses-proses pendalamannya.
4. Makna kualitas hidup dan dengan sendirinya makna kualitas manusia, lingkungan dari konteks itu sendiri.

Untuk itu dukungan dari pemerintah dan swasta kepada pemuda wirausaha dalam menghadapi persaingan global sangat dibutuhkan. Pemerintah melalui kebijakannya, swasta melalui keperduliaannya untuk melakukan pembinaan dan arahan lebih dalam lagi termasuk dalam hal penguasaan teknologi dan pengelolaan informasi dan pemuda sendiri ketika seluruh dukungan itu ada maka dibutuhkan sebuah komitmen dan konsistensi untuk menjalankannya. Menurut Ohmae (dalam Martono, 2014) Globalisasi melibatkan

empat kekuatan besar yaitu : *Investment* (investasi modal), *industry* (perkembangan industri), *Information technology* dan *Individual consumers*.

Selanjutnya membagi dua pendekatan dalam membangun pemuda wirausaha yaitu memanfaatkan kemampuan fisik dan intelektual dalam pendidikan serta dukungan perangkat hukum yang dijalankan dengan baik. Hambatan membangun kewirausahaan hampir sama dengan negara lainnya yaitu bahwa terletak pada adanya kurang modal, kurangnya keterampilan, kurangnya dukungan, kurangnya kesempatan pasar dan takut akan resiko kegagalan. Dalam penelitian terdahulu kewirausahaan pemuda adalah untuk mengatasi kemiskinan. Sedangkan kewirausahaan di Desa Wukirsari adalah untuk menjawab kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada tahun 2011 bahwa Desa Wukirsari sebagai Desa Wisata Budaya, sehingga masyarakat Wukirsari seperti mendapatkan jalan keluar dari sempitnya lahan pertanian dan sekaligus ditantang untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif, untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Dalam menjawab tantangan ini dibutuhkan sinergitas dari para aktor kebijakan publik baik itu *state* atau pemerintah sebagai penyelenggara negara, swasta atau *private* dapat menjadi orangtua angkat bagi pengembangan kewirausahaan pemuda sehingga pemuda wirausahaan jelas dalam membuat langkah dan terobosan dan lebih pasti karena ada orang tua angkat, sedangkan pemuda sendiri dituntut untuk meningkatkan kesadarannya dalam menjalankan kewirausahaan dan secara pribadi meningkatkan segala kemampuan dan keterampilannya.

Dan program lain yang sedang dijalankan berusaha mengembangkan kekayaan atau potensi desa menjadi tujuan wisata lainnya selain wisata budaya yaitu desa wisata perkebunan buah dan wisata kerajinan yang merupakan hasil

industri yang dikembangkan di rumah-rumah dengan kemasan pemasaran yang lebih mengglobal misalnya saja promosi melalui internet. Dalam kegiatan ini pemuda telah melibatkan remaja putri atau kamu perempuan untuk ikut aktif mengingat jumlah kaum perempuan muda di Desa Wukirsari cukup banyak. Bagi kaum perempuan muda perlu juga secara intensif melakukan kegiatan penyuluhan dan kursus keterampilan bagi industri yang dilakukan di rumah sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga yang dikelola oleh kaum perempuan.

Dalam tata pemerintahan yang baik program membangun kewirausahaan pemuda dapat berjalan dengan baik apabila ada kesempatan yang baik, kemampuan dan keamanan, dan desa Wukirsari memiliki ketiga tersebut. Persoalannya adalah pada keterlibatan sektor negara sebagai penyelenggara pemerintahan dan kelompok private atau dunia usaha (swasta) dalam satu usaha bersama bagi kemajuan pemuda. Pemerintah memiliki atau memegang peranan penting dalam mewujudkan tata kelola kepemudaan yang baik khususnya pada kewirausahaan pemuda, pemerintah dapat melakukan fasilitasi pada domain masyarakat atau pemuda dengan pihak swasta melalui kebijakannya.

Di Desa Wukirsari norma atau etika tertinggi dalam bermasyarakat adalah adanya rasa saling menghormati sesama dan telah terbangun sebagai fondasi yang kuat, kesadaran ini telah menjadi kesadaran kolektif mereka yaitu asas kebersamaan dan gotong royong sebagai etika sosial, yang semuanya demi terwujudnya pemuda mandiri melalui wirausaha. Tujuan dari desentralisasi dan otonomi desa adalah penguatan lokal serta memberikan ruang pada ide atau kreatifitas lokal menuju mandiri. Hanya saja yang masih kurang dalam program

pelaksanaan kewirausahaan pemuda ini adalah sistem administrasi dimana untuk keberhasilan pengembangan kewirausahaan, menurut paradigma NPM harus didasarkan pada satu manajemen yang baik, terukur dan keberhasilannya dapat diukur melalui efisiensi kinerjanya. Se jauh mana hubungan antara aktor yang terlibat dalam program ini dapat memahami tugas dan perannya masing-masing. Pemuda Wukirsari secara sadar menjalankan kewirausahaan ini karena terpenggil sebagai aset daerah yang harus bergerak demi kemajuan daerahnya.

Pemuda Wukirsari melakukan dengan kesadaran penuh dengan berpartisipasi aktif berkearifan lokal dalam menjalankan program kewirausahaan untuk mewujudkan desa Wukirsari sebagai Desa Wisata Budaya.

Dalam kenyataan lainnya kewirausahaan pemuda adalah kreatifitas pemuda menuju mandiri, ini tidak ditunjang adanya regulasi yang dibutuhkan sehingga menjadi faktor kendala yang sangat menghambat pemuda wirausaha. Kebutuhan akan kebijakan kewirausahaan dan lembaga independen sebagai wadah interaksi kegiatan kewirausahaan pemuda sangat mendesak untuk dapat diwujudkan. Kebijakan yang mengatur kebutuhan pemuda wirausaha akan memberikan dukungan dalam memperlancar kegiatan. Lembaga independen akan mampu menjadi mediator yang baik. Karena dengan adanya lembaga independen pemuda tahu kemana mesti datang untuk bertanya. Birokrat sendiri akan mampu mengatasi adanya tumpang tindih dalam eselonisasi dan kecanggungan dalam berkomunikasi.

Desa merupakan salah satu sasaran ujung tombak pelaksanaan pembangunan khususnya kewirausahaan pemuda. Potensi lokal dengan kearifan lokal sebagai identitas diri pemuda menjadi potensi yang luar biasa dalam

pembangunan. Selanjutnya seberapa jauh peran negara dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat pedesaan dan juga dalam menjaga kearifan lokal.

Dalam penelitian ini terlihat sekali adanya ketidak seimbangan antara semangat pemuda dengan pemerintah hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian dimana membangun kewirausahaan di Desa Wukirsari memiliki kelemahan. Kesemua kelemahan pada hasil penelitian ini seharusnya dapat dijembatani oleh Pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Sedarmayanti (2009:277) dalam satu tata kelola pemerintahan yang baik ada dua hal yang saling berhubungan yaitu : (1). Semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya dan (2). Adanya dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan di antara mereka. Sehingga akan tumbuh konsensus dan sinergi. Konsensus dan sinergi ini tentu saja dengan melibatkan dan mengikut serta kan pemuda, adanya transparansi, efektif, adil, dan terjaminnya pemuda dalam supremasi hukum artinya pemuda wirausaha terlindungi secara hukum, disamping itu juga menjamin prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi yang didasarkan pada konsensus pemuda dan terakhir tentu saja memperhatikan kepentingan yang paling miskin dan minoritas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan tidak adanya kebijakan yang secara khusus mengatur tentang kewirausahaan pemuda, dan lembaga independen sebagai mediator, tentu saja akan mempersulit terciptanya konsensus dan sinergi.

Sementara di tingkat pusat *Grand Desain* dari penjenjangan keberhasilan secara nasional telah diatur. Program membangun kewirausahaan tersebut dibagi menjadi 9 (sembilan) program utama, yaitu:

- 1 Program pengembangan kader kewirausahaan pemuda (WMP)
- 2 Program pengembangan kelembagaan kewirausahaan

- 3 Program pengembangan tenaga kewirausahaan
- 4 Program pengembangan kebijakan kewirausahaan pemuda
- 5 Program sarana dan prasarana kewirausahaan pemuda
- 6 Program standarisasi kewirausahaan pemuda
- 7 Program pengembangan akses permodalan
- 8 Program pengembangan penghargaan
- 9 Program pengembangan komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi (KIEA) kewirausahaan pemuda

Dari Program tersebut untuk mengetahui tingkat keberhasilannya maka disusun jenjang keberhasilan dari setiap program yang dicanangkan sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel. 6.1. Pengukuran Keberhasilan membangun kewirausahaan Pemuda

No	Tahapan Kegiatan	Kriteria Keberhasilan
1	Inventarisasi minat, bakat, dan potensi kewirausahaan pemuda	Teridentifikasinya pemuda yang mempunyai minat, bakat dan potensi pemuda dalam berwirausaha di setiap kabupaten kota setiap tahun
2	Pengembangan Tenaga Kewirausahaan	• Terlatihnya 34 orang pelatih kewirausahaan setiap tahunnya (1 orang per provinsi) • Terlatihnya 34 orang mentor kewirausahaan setiap tahunnya (1 orang per provinsi) • Terlatihnya 34 penggerak kewirausahaan setiap tahunnya (1 orang per provinsi)
3	Pengembangan Akses Permodalan melalui	• Bantuan permodalan (<i>seed capital</i>) terhadap sekurang-kurangnya 1.000 wmp per tahun • Bantuan penguatan modal untuk sekurang-kurangnya 400 wmp per tahun • Terbentuknya LPKP pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
4	Penciptaan Calon-calon WMP (<i>Pre-Start Up</i>)	• Terlatihnya sekurang-kurangnya 5.000 orang calon WMP setiap tahunnya untuk pelatihan dasar kewirausahaan di tingkat

No	Tahapan Kegiatan	Kriteria Keberhasilan
		kabupaten/kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota • Terlatihnya sekurang-kurangnya 1.500 orang calon WMP setiap tahunnya untuk pelatihan dasar kewirausahaan di wilayah strategis provinsi oleh Pemberintah Provinsi • Terlatihnya sekurang-kurangnya 500 orang calon WMP setiap tahunnya untuk pelatihan dasar kewirausahaan di wilayah strategis nasional oleh Pemberintah Pusat
5	Bimtek Pengembangan kebijakan kewirausahaan pemuda di Daerah	• Terbentuknya sekurang-kurangnya 30 Perda Kabupaten/kota setiap tahun dan 30 Perda tingkat Provinsi terkait dengan kewirausahaan pemuda

Sumber *Grand Desain* Pengembangan Kewirausahaan pemuda, Kemenpora, 2014

Terkesan pemerintah di tingkat daerah tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan ini, semestinya terjadi koordinasi yang baik antara tingkat pusat dan daerah sebagai fasilitator dari pemuda wirausaha. Melihat permasalahan dan kendala di atas maka program kewirausahaan pemuda di desa Wukirsari hal utama yang harus disiapkan adalah kebijakan yang khusus mengatur tentang kewirausahaan pemuda dan menetapkan satu lembaga independen sebagai mediator. Dan Kebijakan tersebut harus memiliki keunggulan tersendiri karena program membangun kewirausahaan di Desa Wukirsari para pemudanya memiliki kesadaran penuh untuk mau diajak oleh pemerintahnya dalam pembangunan sehingga mekanisme yang berjalan di sana adalah partisipasi dengan kesadaran yang tinggi.

Kebijakan publik yang bersifat unggul tersebut menurut Nugroho (2014: 327) adalah kebijakan yang :

- Mempunyai nilai kecerdasan, kebijakannya tidak asli tetapi harus pandai dan cerdas, bukan semata mata memecahkan pada

masalahnya namun juga pada suatu nilai yang berorientasi pada tindakan.

b. Memiliki Kearifan, maksudnya disini adalah bahwa kearifan bukan semata mata pada filosofi tetapi berorientasi pada tindakan, kebijakan yang dibuat berorientasi memecahkan masalah tanpa menimbulkan masalah.

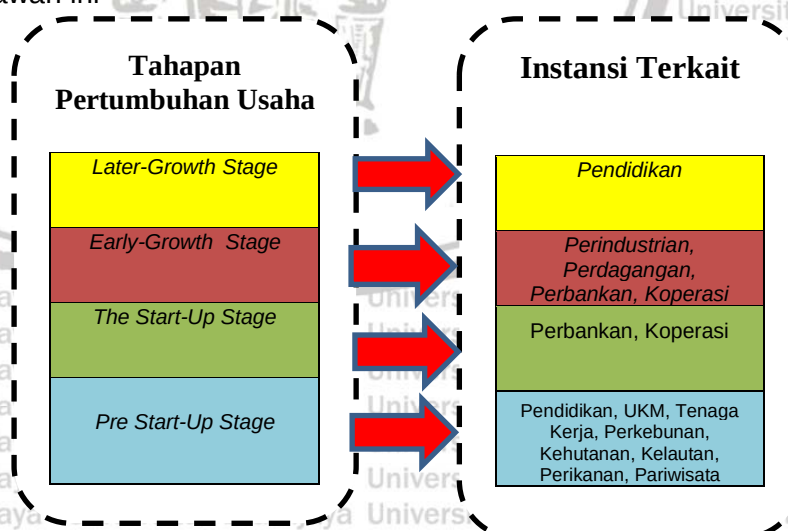
c. Memiliki harapan, kebijakan yang unggul akan memberikan harapan.

Sesuai dengan pendapat Nugroho, peneliti mengusulkan bahwa kebijakan yang dapat dijalankan di desa Wukirsari mestinya memiliki ciri khas tentang kearifan lokal dimana Raja atau pemimpin dianggap memberikan satu keberuntungan, selain itu agama dan budaya telah saling melebur menjadi semangat yang diyakini akan membuat masyarakat sukses apabila patuh menjalankan dan mengelola yang sudah ada dari alam dan mengembangkannya secara kreatif tanpa merusaknya. Dengan merawat menjadi lebih asri atau baik lagi. Dengan kebijakan yang demikian ini akan membawa harapan bagi generasi muda berikutnya, serta kepercayaan diri dalam menjawab tantangan jaman.

Nilai kecerdasan dari kebijakan kewirausahaan pemuda di daerah adalah keterlibatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang ada di Desa Wukirsari, program dibangun bersama-sama antara pihak pemerintah, pemuda sendiri yang berkepentingan dalam program tersebut dan tentu saja masyarakat dan pihak Swasta. Pemuda sendiri sebagai kelompok sasaran dalam kebijakan ini hendaknya terus mengembangkan dirinya dalam rangka meningkatkan kualitas dan potensi dirinya. Dalam penetapan kebijakan yang dihubungkan dengan kebijakan kewirausahaan pemuda agaknya masih jauh dari orientasi tindakan dalam memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam membangun kewirausahaan pemuda untuk memberikan harapan kehidupan yang lebih baik.

Masalah yang timbul dalam membangun kewirausahaan pemuda adalah adanya kegiatan-kegiatan yang kurang mengena pada sasaran program tersebut, antara lain tidak adanya pembinaan dan pembimbingan yang berkesinambungan, mulai dari proses membuka wawasan para pemuda, sehingga pemuda kurang bisa menjalankan konsistensinya dengan apa yang digeluti. Pada pembinaan ini selain pemuda sebagai kelompok sasaran, penting juga keterlibatan instansi atau departemen yang berhubungan dengan kegiatan kewirausahaan ini untuk sama-sama bersinergi. Sehingga proses pembinaan untuk benar-benar menjadi wirausaha baik dari sisi pemikiran ataupun dari aplikasi kegiatannya menjadi nyata terprogram dengan baik dan bukan sebuah mimpi saja bagi para pemuda.

Sinergi antara lembaga yang mengadakan kegiatan serupa agaknya menjadi keharusan sebagaimana yang disampaikan oleh Winarno dalam tahapan pertumbuhan membangun kewirausahaan pemuda seperti pada gambar di bawah ini



Gambar 6.4. Tahapan Pertumbuhan Usaha dan Instansi Terkait

Sumber : Winarno (2015:60)

Dari gambar di atas terlihat sekali peranan pendidikan sebagai yang melatarbelakangi setiap pemuda wirausaha. Pendidikan yang baik dan tepat akan menciptakan generasi yang mengerti betapa pentingnya pemuda melakukan wirausaha. Ketika pemuda sudah menyadari betapa penting dirinya dalam melakukan kewirausahaan supaya menjadi generasi yang produktif maka pada tahapan awal dari kewirausahaan pemuda maka pendidikan dan keterlibatan kementerian terkait atau lembaga terkait menjadi prasyarat utama agar pemuda memiliki kesiapan baik dari sisi sumberdaya manusia yang memiliki kualitas ataupun dari sisi jejaring dengan pembinaan. Jaringan ini dilakukan oleh instansi terkait yang menangani keahlian khusus seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, pariwisata untuk dapat memberikan pelatihan teknis yang berhubungan instansi tersebut. Selanjutnya pada tahap usaha mulai dijalankan (*the star up stage*), wirausahawan membutuhkan kehadiran instansi pemerintah yang menjalankan urusan permodalan yaitu untuk berinvestasi dan sebagai modal kerja. Selanjutnya dalam tahap pertumbuhan awal (*early growth stage*) memerlukan kehadiran institusi pemerintah yang menangani urusan perindustrian dan perdagangan untuk membantu mengembangkan usaha, meningkatkan produksi, atau membuka pasar baru baik di dalam atau di luar negeri. Kehadiran pemerintah dibutuhkan untuk mengindustrialisasikan usahanya. Selanjutnya pada tahap pertumbuhan lanjutan (*later growth stage*), wirausaha muda memerlukan kehadiran pemerintah untuk menangani urusan pendidikan untuk membantu pengembangan manajemen dengan adanya pelatihan-pelatihan yang mendukung perkembangan usaha. Dari setiap tahapan perkembangan membangun wirausaha pemuda dibutuhkan koordinasi yang berkelanjutan antar instansi terkait.

Sedangkan kinerja antar instansi dan pemuda sebagai sasaran dalam kebijakan membangun kewirausahaan pemuda, menurut Van Meter Dan Horn dapat diukur dengan beberapa variabel yang mempengaruhinya (dalam Nugho 2008 : 503) yaitu:

- a. Aktifitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- b. Karakteristik agen pelaksana/implementor
- c. kondisis ekonomi, sosial dan politik
- d. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor

Variabel –variabel yang disampaikan Van Meter Dan Horn jelas sekali bahwa setiap aktivitas dalam implementasi kebijakan tersebut dibutuhkan komunikasi yang terjalin baik antar instansi, sementara yang terjadi saat ini masih tumpang tindih dan tidak terkoordinasi lebih hanya sebagai program bersama para pelatih atau pengajar kegiatan pelatihan. Petugas pelaksana juga harusnya memahami pencapaian yang ingin diraih dalam program tersebut bukan semata-mata hanya menghabiskan kegiatan program pada instansinya

Dalam temuan di lapangan aktifitas para implementor agaknya tidak terjadi saling senengi, dan bahkan komunikasi yang terjadi sekedar komunikasi bantuan tenaga pelatih dan bukan program utuh sampai pada anggaran bersama untuk program yang sama dan berkesinambungan. Dalam karakteristik agen pelaksana program bahkan terjadi perbedaan eselonisasi yang pada akhirnya menghambat kegiatan, karena ada ketidak nyamanan berkoordinasi akibat dari eselonisasi yang tidak sama antar instansi terkait. Selain itu perbedaan ini juga mengakibatkan sulitnya melakukan komunikasi dalam program yang sama tidak dapat terlaksana dengan baik dan lebih cenderung pada tugas lembaga masing –masing. Hal ini mengakibatkan program yang terjadi hampir tidak ada

kesinambungannya atau seperti program putus yang sekedar dilaksanakan memenuhi permintaan pusat tanpa melihat dampak dan kebutuhan dari penerima program yaitu pemuda, disinilah peran lembaga independen sehingga tidak ada ketidak nyamanan komunikasi dan koordinasi karena adanya perbedaan eselonisasi.

Dari program yang dilaksanakan pemuda menghendaki adanya bimbingan yang terarah dan terencana baik tentang peningkatan keterampilan, pengetahuan, permodalan dan akses pasar. Namun program yang telah dilaksanakan tidak sepenuhnya mengena pada sasaran yang benar-benar dibutuhkan oleh pemuda dalam mengembangkan kegiatan kewirausahaan, selain itu program yang diterima pemuda tidak bersifat kontinyu, sehingga kurang memberikan motivasi yang kuat dalam menanamkan pada cara berfikir atau perubahan *mindset* pada pemuda untuk bisa memiliki konsisten dalam menjalankan kegiatan kewirausahaan. Selama ini pengetahuan tentang kewirausahaan didapat dari keluarga untuk sekedar hoby saja , dan tidak dikembangkan sesuai perkembangan yang dibutuhkan. Jika pemuda mendapatkan pembimbingan baik dari sisi manajemen, produksi dan pemasaran tentu akan mengubah cara pandang pemuda terhadap pengembangan kegiatan kewirausahaan yang dilakukan hanya sebagai hobi semata, padahal jika dikembangkan akan menjadi lapangan kerja baru yang menjanjikan.

Dari sisi kondisi ekonomi, sosial dan politik sesungguhnya tidak terlalu menghambat karena Desa Wukirsari melalui kebijakan Pemda Kabupaten Bantul telah mencanangkan Desa Wukirsari sebagai Desa Wisata Budaya. Persoalannya kembali pada, bahwa dalam membina para pemudanya dibutuhkan kebijakan kewirausahaan yang mengatur kegiatan tersebut. Dengan

demikian adanya kebijakan tentang kewirausahaan pemuda menjadi satu keharusan yang akan mengatur seluruh kegiatan, yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh satu lembaga independen yang berisi birokrat yang berasal dari departemen atau dinas yang melaksanakan kegiatan kewirausahaan pemuda dan dari swasta. Swasta dapat memberikan peran penting dalam perkembangan kewirausahaan pemuda, baik sebagai orangtua angkat yang akan membantu dalam pembinaan permasalahan kualitas produk dan pemasaran, juga dapat membantu dalam hal permodalan.

Dengan ditetapkannya Wukirsari sebagai Desa Wisata Budaya tentunya dibutuhkan peran penting masyarakat juga untuk terlibat dalam pengawasan pelaksanaan program. Untuk menjaga program kewirausahaan ini dapat berjalan dengan baik sebaiknya dilaksanakan program pengawasan terhadap aktivitas pemerintah terhadap pemuda wirausaha yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Ikhsan (2009:12.19) sebagai berikut :

Bentuk kontrol sosial dari masyarakat terhadap pemerintah yang telah diberi amanah oleh rakyat untuk mengelola sumber daya negara.

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang tercipta karena adanya pengakuan dan kepatuhan pada norma dan ideologi kelompok yang ada dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi.

Selanjutnya menurut Ikhsan (2009:12.19) pengawasan masyarakat dapat dilakukan dengan tiga jalur yaitu :

1. Pengawasan langsung oleh masyarakat, yang dilakukan secara informal oleh masyarakat sendiri maupun yang dilakukan melalui lembaga atau organisasi yang di bentuk oleh masyarakat (LSM)
2. Pengawasan melalui media

3. Pengawasan masyarakat yang disalurkan secara legal melalui lembaga perwakilan sesuai dengan peraturan perundangan, yaitu DPR atau DPD.

Sehingga dalam program pelaksanaan membangun kewirausahaan pemuda di Desa Wukirsari dapat berlangsung dengan baik apabila program tersebut memiliki komitmen bersama dari seluruh aktor yang terlibat dalam sebuah organisasi pada pemerintah daerah. Komitmen bersama ini merupakan modal dasar yang terus menerus dikembangkan. Selain komitmen pada pelaksanaan program dibutuhkan kepemimpinan yang mampu memberikan atau mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program baik itu secara personal ataupun dalam sebuah organisasi. Selanjutnya adanya keberanian dalam melakukan reformasi peraturan hal ini melihat dari faktor kebiasaan yang terjadi di daerah yang selalu berlandung pada peraturan yang ada serta lain-lain faktor legal-formal-prosedural merupakan hambatan yang serius dalam kesuksesan program membangun kewirausahaan.

Reformasi merupakan satu cara yang perlu dilakukan dalam rangka mensukseskan program. Adapun yang harus direformasi adalah reformasi kelembagaan tentunya dalam hal reformasi peraturan yang merupakan hal penting dalam reformasi kelembagaan. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi pengembangan iklim dan budaya bagi program membangun kewirausahaan pemuda baik secara personal ataupun kelembagaan organisasi pemuda menuju teralisasinya tujuan yang ingin dicapai. Dan reformasi kelembagaan merujuk pada dua aspek penting yaitu struktural dan kultural. Keberanian mengakui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam membangun kewirausahaan pemuda baik secara personal maupun lembaga, merupakan hal yang penting

dalam membentuk karakter yang jujur. Kejujuran adalah syarat utama yang harus dimiliki dalam kewirausahaan pemuda.

Reformasi kelembagaan dalam sektor publik tentu saja berkaitan dengan manajemen pemerintahan yang harus sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, karena perubahan tentu saja tidak semata-mata pada paradigma namun juga pada manajemen. Sebagaimana disampaikan Kartajaya dan Yuswohady (2005), bahwa pemberlakuan AFTA dan pasar bebas telah mempengaruhi sehingga perlu menggeser orientasi dalam pengelolaan kawasan *local orientation* ke global *cosmopolitan orientation*. Setiap daerah memiliki corak pertumbuhan ekonomi yang unik dan tidak selalu identik dengan daerah lainnya, maka perencanaan membangun kewirausahaan pemuda perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk instruksinya dengan daerah lain dalam konteks pertumbuhan ekonomi wilayah.

Perencanaan membangun kewirausahaan pemuda merupakan pangejawantahan dari perumusan kepentingan lokal dalam memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka otonomi daerah. Dengan demikian seluruh kendala harus segera diatasi baik itu yang bersifat internal dalam birokrasi pemerintahan maupun dalam sisi eksternal yaitu faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi merupakan tantangan dalam mewujudkan tata kelola kepemudaan khususnya dalam membangun kewirausahaan pemuda sesuai yang diamanatkan Undang-undang No. 40 tentang Kepemudaan khususnya pada kewirausahaan pemuda.

6.1.2. Mekanisme

Dalam membangun kewirausahaan pemuda tentu saja bertujuan untuk menjadikan pemuda mandiri secara ekonomi, terdapat beberapa hal yang patut dicermati berkaitan dengan budaya kearifan lokal. Hal ini karena desentralisasi dimaksudkan untuk membangun daerah sehingga beban ekonomi dan penduduk dapat tersebar di daerah-daerah dan bukan tersentralisasi di pusat dalam hal ini misalnya Jakarta. Selanjutnya semangat desentralisasi dapat dipahami untuk mengurangi campur tangan pemerintah baik itu pusat ataupun daerah dalam masalah ekonomi, dengan tetap menjalankan fungsi regulasi yang betul-betul dibutuhkan bagi perekonomian masyarakat dalam hal ini pemuda wirausaha.

Selanjutnya otonomi daerah secara implisit mengharapkan adanya partisipasi kegiatan ekonomi yang lebih luas yang dilakukan oleh pemuda sehingga peran pemerintah daerah melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) semakin mengecil. Dan secara eksplisit otonomi daerah memberikan ruang yang besar bagi daerah untuk mendesain kebijakan dan dalam menjalankan program sehingga tidak ada lagi model penyeragaman yang didesain oleh pemerintah pusat tidak terjadi lagi, sehingga kebijakan dan desain tersebut disesuaikan dengan kebutuhan untuk perkembangan pemuda wirausaha sesuai dengan daerahnya.

Ada beberapa prinsip yang harus dijalankan dalam proses perencanaan pembangunan di daerah. Desa Wukirsari dalam program pembangunan dengan mengedepankan membangun kewirausahaan pemuda melalui nilai-nilai kearifan lokal dengan prinsip yang digunakan adalah partisipatif. Mekanisme dalam metode partisipatif ini melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nasib masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam

membangun kewirausahaan pemuda di Desa Wukirsari dibutuhkan para perencana publik di daerah yang benar-benar berpihak kepada pemuda wirausaha. Orientasi pada paradigma *New Public Service* (NPS) sangat diutamakan dalam proses perencanaan program. Sebagaimana disampaikan Robinson melalui bukunya yang berjudul *Why Nations Fail*, (dalam Basri, 2016), menyebutkan jika faktor yang paling dominan yang membuat suatu negara berhasil adalah institusi. Menurut Acemoglu (dalam Basri, 2016) institusi adalah *“the rules of the game in economic, political and social interactions”*. Sedangkan menurut North (1990: 3), *“Institutions are the rules of the game in a society or, more formally, are the humanly devised constraints that shape human interaction.”* Sedangkan menurut MacIntyre (2003:2), institusi adalah *“Institutions are constraints that shape behavior in all sorts of areas of human activity, stretching from social interaction to economic exchange to international cooperation.”*

Menurut Acemoglu (dalam Basri, 2016) kembali, institusi yang baik memiliki 3 karakter yaitu (1). *Enforcements of property rights for a broad cross section of society, so that a variety of individuals have incentives to invest and to take part in economic life.* (2). *Constraints on the actions of elites, politicians, and other powerful groups, so that these people cannot expropriate the incomes and investments of others or create a highly uneven playing field.* (3). *Some degree of equal opportunity for broad segments of society, so that individuals can make investments, especially in human capital, and participate in productive economic activities.*

Melalui keterangan tersebut di atas, maka sebuah negara sekalipun memiliki kesamaan sejarah dan budaya, belum tentu memiliki keberhasilan yang

sama, sebagaimana Korea Utara dan Korea Selatan, jika institusi mereka berbeda. Pada saat ini, diperlukan sebuah institusi yang kuat agar pemerintah dapat berjalan lebih efektif. Lebih lanjut Antariksa (2016), menyampaikan bahwa untuk menuju kemandirian ekonomi maka pemerintah perlu melakukan: (1). Sosialisasi dan edukasi. (2). Optimalisasi layanan Asean *Economy Community Center* untuk masyarakat. (3). Percepat reformasi birokrasi. (4). Ciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif. (5). Sederhanakan aturan dan hilangkan rente ekonomi. (6). Identifikasi potensi daerah. (7). Tingkatkan daya saing UKM. (8). Tingkatkan infrastruktur. (9). Kendalikan kenaikan UMR. (10). Mengenal tindakan pengamanan perdagangan terhadap *unfair trade* dari negara ASEAN.

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan pemuda Desa Wukirsari penting juga melihat dari sisi bagaimana menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi pemuda berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap pemuda, memiliki potensi yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada pemuda yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Hal penting kedua dalam pemberdayaan pemuda wirausaha adalah dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki pemuda (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini juga meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat

masyarakat makin berdaya. Dalam upaya pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah meningkatkan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, dan pasar. Masukan pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sekolah, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan, serta kesediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran.

Selanjutnya pemberdayaan pemuda ini memiliki atau mengandung arti melindungi, dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemeliharaan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat dari upaya untuk mencegah terjadi nya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploritasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan Pemuda wirausaha harus melibatkan segenap potensi yang ada dalam masyarakat. Antara lain, peranan pemerintah teramat penting. Berarti birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi dan visi, selainjnya organisasi-organisasi kemasyarakatan diluar lingkungan masyarakat sendiri. Disini yang mempunyai fungsi dan peran yang besar adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat, (LSM) dalam membantu peran pemerintah, lembaga masyarakat yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri atau yang sering di sebut *local community organization*. Lembaga ini dapat seperti LKMD, PKK, atau

Karang Taruna, yang benar-benar tumbuh dari masyarakat sendiri seperti kelompok arisan, kelompok sinoman, dan sebagainya.

Institusi melalui mekanisme yang sudah bagus tidak dapat secara serta merta menumbuhkan perekonomian khususnya pada pemuda wirausaha hal ini karena daerah masih hanya sebagai penerima desain dari pusat, yang selanjutnya ditelaah sebagai dis-insentif hal ini terlihat jelas pada peranan birokrasi yang harusnya sebagai penyelenggara kewirausahaan di daerah yaitu Dinas PORA. Praktek-praktek partisipasi pemuda yang didukung oleh potensi sumber daya yang ada di desa Wukirsari tidak dapat memberikan jawaban yang lebih baik. Sehingga dalam hal ini peneliti mengusulkan adanya satu lembaga independen sebagai institusi yang menjembadani keberhasilan pelaksanaan membangun kewirausahaan pemuda.

Jika ditelaah lebih mendalam jawaban- jawaban dari apa yang dilakukan daerah tadi tidak bisa memberikan respon yang baik karena masih dibutuhkan kebijakan unggul bukan saja hanya sebagai peredam dalam hal politik yang terkesan dipegang oleh daerah (lokal) namun juga dalam karakter berkeadilan, seimbang dan memiliki proporsional dari kebijakannya sendiri dan pelaksanaan ditingkat daerah sebagai satu pemahaman kemajuan di tingkat lokal. Menurut Grindlee (dalam Suryono, 2012), Dalam membangun kewirausahaan pemuda melalui nilai-nilai kearifan lokal memiliki dimensi untuk mengukur kemampuan yaitu :

- a. Lingkungan, artinya merujuk pada kondisi sosial politik di mana pemerintah aktifitas mereka.
- b. Kelembagaan, yang meliputi aturan prosedur yang dirancang untuk pemerintah dan pejabat publik, sumberdaya keuangan, tanggungjawab keuangan inisiatif serta struktur kebijakan.
- c. Jaringan kerja, yang mengacu pada suatu organisasi di mana tanggungjawab publik secara aktif diselesaikan. Jaringan ini terdiri

dari organisasi masyarakat, *Non Government Organization* (NGO), maupun Swasta dan organisasi pendukung yang menyediakan jasa penting yang memungkinkan tugas dilakukan.

d. Organisasi, adalah membangun kelompok jaringan kerja, struktur, proses, sumberdaya dan gaya manajemen organisasi mempengaruhi bagaimana dalam menetapkan tujuan, struktur kerja dan hubungan otoritas.

e. Sumber daya manusia, yang memisahkan manajerial, bakat teknis menuju jenjang karir dimana dapat mempengaruhi keseluruhan capaian tujuan.

Selanjutnya keberhasilan dari suatu program dengan ketepatan mekanisme dalam membangun kewirausahaan pemuda ini dapat diukur dari kemampuan mengembangkan kelembagaan yang berorientasi pasar, dengan menjamin keamanan dan produktifitas, disamping bagaimana cara meningkatkan pelayanan publik.

Dalam membangun kewirausahaan pemuda di Desa Wukirsari, jelas sekali bahwa kewirausahaan sebagai perspektif privat merupakan tingkah laku seseorang yang selalu berinisiatif, berkemauan dalam menggerakkan mekanisme sosial dan ekonomi untuk mengubah sumber daya atau situasi menjadi lebih berguna. Pasca bencana 2006 tidak menyurutkan para pemuda tetap menjalankan kegiatan berwirausaha, hal ini karena adanya satu dorongan yang kuat untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, berguna dan bernilai tinggi.

Dalam ranah publik disadari bahwa kewirausahaan adalah kemampuan melakukan perubahan, inovasi maupun kemampuan membuat metode atau tata kerja baru. Disini pemuda Desa Wukirsari sadar betul bahwa kegiatan kewirausahaan tidak saja mendatangkan *income*-perkapita, namun juga tumbuhnya satu kegiatan usaha baru yang akan mengubah struktur sosial masyarakat, struktur dalam dunia perekonomian masyarakat.

Perubahan yang terjadi lainnya adalah adanya dorongan kebutuhan pasar baru yang akan menarik bagi investor sehingga akan tumbuh sumber daya manusia yang terus berkembang. Selain itu tentu saja kewirausahaan mendorong tumbuhnya teknologi baru sebagai upaya dalam menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik. Untuk itu diperlukan satu konseptual dan strategi dalam membangun kewirausahaan pemuda yang memiliki daya juang dan sebagai motor penggerak perubahan. Ditambah lagi pentingnya penguatan akan daya saing dapat ditempuh melalui berbagai cara dalam mengembangkan mekanisme jalannya kewirausahaan yaitu :

- a. Penguasaan budaya lokal dengan baik bagi generasi muda
- b. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kreatifitas, inovasi.

Dalam RPJMDes Desa Wukirsari 2014, partisipasi merupakan mekanisme seluruh program dalam membangun desa Wukirsari yaitu :

1. Pemberdayaan, penguatan kemampuan yang telah ada.
2. Kemampuan baru bagi pemuda, penguatan pemuda dilakukan dengan cara mendorong pemuda melaksanakan semua tahap kegiatan dan terus melakukan proses belajar.
3. Mengutamakan yang terabaikan, yaitu memperhatikan kelompok pemuda yang terpinggirkan seperti kelompok pemuda miskin, lemah terabaikan dan minoritas, selain itu juga berpihak pada kelompok perempuan.
4. Pemuda sebagai pelaku utama, dan pihak luar sebagai fasilitator, sehingga pihak luar hanya memfasilitasi, tukar pengalaman, bukan mendominasi dan pada akhirnya peran pihak luar secara bertahap berkurang.

5. Saling menghargai perbedaan, membagi pengetahuan dalam pengalamannya menyelesaikan permasalahan, menghargai, menghormati nilai budaya, mengakui seni tradisional, dan membuka diri untuk belajar dan memahami keterbukaan unsur dari luar.

6. Mengoptimalkan hasil, dengan terus menerus memperbaiki lingkup dan mutu.

7. Orientasi praktis, yaitu bahwa penerapan partisipasi bukan semata untuk menggali informasi, melainkan juga untuk merancang program bersama yang ditekankan pada kemampuan swadaya masyarakat.

Dalam menjalankan mekanisme program membangun kewirausahaan pemuda yang partisipatif dan kesadaran dari pemuda sendiri ada hal-hal yang perlu dicermati untuk ditindaklanjuti yaitu :

a. Pemuda adalah kelompok sasaran dari implementasi kebijakan, mesti memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dari sisi pendidikan ataupun keterampilan sehingga seluruh kreatifitas dan inovasinya akan memicu pemuda wirausaha menjadi mandiri secara ekonomi.

b. Yang perlu dicermati adalah mekanisme pembinaan. Pembinaan selama ini dikeluhkan sebagai kegiatan yang tidak merata atau tidak secara tepat sampai pada kelompok sasaran pemuda yang memiliki keinginan sungguh sungguh menjadi pelaku wirausaha.

c. Pengembangan pemasaran dan permodalan, merupakan mekanisme yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kewirausahaan pemuda.

Dari ketiga hal tersebut mekanisme partisipasi pemuda adalah metode yang paling tepat dalam membangun kewirausahaan pemuda. Bagaimana partisipasi ini dapat berjalan dengan baik, tentunya dibutuhkan juga peran pemerintah dan lingkungan untuk bersama-sama memberikan dukungan dan peluang, sumberdaya pemuda agar memiliki kualitas yang diharapkan maka pendidikan dan pelatihan serta modal dan bantuan jejaring pemasaran diberikan aksesnya. Program kewirausahaan pemuda dalam pendanaan memiliki mekanisme bahwa seluruh program merupakan program dari pusat yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi yaitu Gubernur selaku wakil dari pusat sehingga dana yang diberikan bersifat dekonsentrasi yang hanya dapat digunakan untuk kegiatan non fisik seperti pembinaan, pelatihan, dalam mengembangkan kewirausahaan pemuda. Dalam bidang pemasaran pemuda wirausaha membutuhkan kegiatan yang disarankan atau diarahkan oleh pemerintah pusat dalam membukakan jejaring melalui ajang pameran dan lainnya.

Partisipasi ini akan dapat berjalan dengan baik oleh sebab itu dibutuhkan dukungan pemerintah sebagai komponen utama dalam keberhasilan program kewirausahaan pemuda. Partisipasi pemuda dalam membangun kewirausahaan pemuda perlu mendapat dukungan dari semua pihak khususnya pemerintah daerah dan pemerintah desa antara lain : (a) Pemerintah desa wajib mempersiapkan pembangunan infrastruktur, jalan dan pengembangan pola jalan untuk membentuk pola ruang desa, (b) Fasilitas umum lainnya sangat penting dalam mewujudkan desa wisata (penginapan, air, pengelolaan limbah domestik, makanan dan keamanan).

Adapun prinsip keberhasilan dari mekanisme membangun kewirausahaan pemuda adalah sesuai dengan *grand desain* dari Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada hasil (*outcome oriented*). Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitan dengan pengembangan kewirausahaan pemuda harus dapat mencapai hasil (*outcomes*) yang mengarah pada terbentuknya wirausaha muda pemuda yang berkepribadian kuat.
- b. Terukur. pelaksanaan membangun wirausaha muda yang dirancang berorientasikan pada hasil (*outcomes oriented*) harus dilakukan secara terukur dan jelas target serta waktu pencapaiannya.
- c. Efisien. Pelaksanaan membangun wirausaha muda yang dirancang dengan *outcomes oriented* harus memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan profesional.
- d. Efektif. Membangun kewirausahaan pemuda harus dilaksanakan secara efektif sesuai dengan target pencapaian sasaran Pengembangan kewirausahaan pemuda.
- e. Realistik. *Outputs* dan *outcomes* dari pelaksanaan kegiatan dan program ditentukan secara realistik dan dapat dicapai secara optimal.
- f. Konsisten. Membangun kewirausahaan pemuda harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, dan mencakup seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk kelompok sasaran.
- g. Sinergi. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara sinergi. Satu tahapan kegiatan harus memberikan dampak positif bagi tahapan kegiatan lainnya, satu program harus memberikan dampak positif bagi

program lainnya. Kegiatan yang dilakukan satu pemangku kepentingan harus memperhatikan keterkaitan dengan pemangku kepentingan lainnya, dan harus menghindari adanya tumpang tindih antarkegiatan di setiap instansi.

h. Inovatif. Membangun kewirausahaan pemuda memberikan ruang gerak yang luas bagi K/L dan Pemda dan pemuda untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda, pertukaran pengetahuan, dan best practices untuk menghasilkan wirausaha muda yang berkepribadian kuat.

i. Kepatuhan. Membangun kewirausahaan pemuda harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. Dimonitor. Pelaksanaan membangun kewirausahaan pemuda harus dimonitor secara melembaga untuk memastikan semua tahapan dilalui dengan baik, target dicapai sesuai dengan rencana, dan penyimpangan segera dapat diketahui dan dapat dilakukan perbaikan.

Dukungan dari pemerintah tersebut untuk mensukseskan program pariwisata dan semua faktor yang tumbuh seiring dengan perkembangan kepariwisataan di Wukirsari. Adapun dukungan lain dari pemerintah desa diharapkan terjadi koordinasi yang berkelanjutan dengan instansi atau lembaga yang mendukung kegiatan kewirausahaan pemuda baik dari instansi pemerintah ataupun swasta. Partisipasi pemuda diharapkan menjadi semangat yang konsisten bagi pemuda menuju desa swasembada. Di Desa Wukirsari membangun kewirausahaan pemuda telah menciptakan iklim dan suasana yang dapat menumbuhkan potensi pemuda, hal ini karena adanya dorongan dari dalam diri dan lingkungan mereka bertumbuh, yang mendorong kreatifitas dan

kemampuan untuk berkembang. Sehingga potensi yang telah dimiliki pemuda wirausaha semakin berkembang. Namun sayangnya belum didukung dengan akses pembukaan potensi oleh Pemerintah khususnya pada jaringan permodalan dan pasar, jika potensi ini diberikan dengan baik tentu akan lebih menguatkan kemampuan dan daya pemuda wirausaha.

Secara konseptual dalam kajian tinjauan pustaka seperti yang disampaikan Hamilton (2004) pembangunan pemuda yang dilakukan secara optimal akan memungkinkan pemuda untuk memimpin, produktif, hidup sehat, mampu mencari nafkah sendiri, terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat dan kegiatan budaya. Sehingga pemuda adalah kelompok strategis yang memiliki daya dorong dalam transformasi sosial.

Kewirausahaan sudah menjadi isu penting dunia dalam menumbuhkan iklim perekonomiannya, sebagaimana disampaikan oleh Kodrat (2009:30). Di beberapa negara seperti Amerika, Eropa dan Asia yang terus mencari terobosan dalam pengembangan kewirausahaan pemuda. Terobosan –terobosan yang dilaksanakan di Negara Amerika, adalah dengan adanya kebijakan dalam bidang politik, ekonomi dan budaya yang sangat mendukung terbentuknya perusahaan baru yaitu dengan adanya *National Entrepreneur Week*, sehingga banyak terdapat sekolah *entrepreneur* yang diminati oleh mahasiswa, industri dan pemimpin universitas. Menjadi *entrepreneur* adalah mendapatkan pujian tersendiri. Sedangkan terobosan di Negara Eropa terobosan yang dilakukan adalah dengan kebijakan pemerintahannya dalam memberikan dukungan terhadap pendidikan *entrepreneurship* untuk menyiapkan mahasiswa agar mampu memberikan kontribusi ekonomi kepada masyarakat. Dan pendidikan *entrepreneur* juga banyak dijumpai di luar universitas. Tujuannya adalah

membangun hubungan antara universitas dengan yang kuat untuk mempercepat transfer teknologi. Pendidikan *entrepreneur* di eropa memiliki keinginan kuat untuk melakukan kolaborasi internasional.

Sedangkan untuk Negara Amerika Latin pada awalnya mengkonotasikan *entrepreneur* dihubungkan dengan pencuri. Dengan tingkat pengangguran yang tinggi, terpusatnya kemakmuran, terbatasnya akses modal, tingkat kegagalan yang tinggi, kebijakan yang menghambat akibatnya bisnis diciptakan karena ada kebutuhan bukan karena adanya kesempatan, sehingga *entrepreneur* hanya di perkenalkan pada lingkungan pekerja rendahan, inipun sifatnya juga sukarela.

Entrepreneur mempunyai kredibilitas rendah terhadap pengembangan institusi riset tradisional. Dan pada akhirnya ada upaya keras untuk menciptakan *role model*, *network* dan pendidikan *entrepreneur* sehingga pendidikan *entrepreneur* di Amerika Latin mulai berkembang.

Sedangkan di negara Asia lingkungan ekonomi berkembang dengan cepat, hal ini disebabkan pemerintah mendukung kebijakan pendidikan *entrepreneurship* seperti di Singapura. Di negara Asia lainnya seperti Cina, lingkungan *entrepreneur*nya mendapatkan dukungan keuangan, program dan kebijakan pemerintah, pendidikan dan pelatihan, transfer perkembangan dan penelitian, insfrastruktur profesional dan komersial, serta adanya norma - norma budaya. Dalam bidang pendidikan *entepreneur* program yang ditawarkan adalah inovasi *entrepreneur* dan ekonomi teknologi.

Korea Selatan, semangat *entrepreneur* di Korea Selatan terjadi akibat adanya krisis moneter 1997 yang mengakibatkan banyak perusahaan gulung tikar, dan penduduk pria menjadi gelandangan dan tidur di station hal ini karena di Korea ada budaya jika kaum pria dinafkahi oleh istri adalah suatu kehinaan.

Entrepreneurship merupakan solusi yang dilatarbelakangi bahwa *entrepreneurship* merupakan proses penghancuran yang kreatif. *creative destruction* diperlukan untuk mengintroduksi adanya tiga perubahan yaitu: *political change* (perubahan yang berkaitan dengan alokasi kekuasaan serta issue-isue politis di dalam organisasi), *technical change* (perubahan yang terkait dengan bagaimana menciptakan dan mengimplementasikan arsitektur dan strategi bisnis yang baru), dan *cultural change* (perubahan yang terkait dengan bagaimana membangun dan menanamkan *shared values* maupun *common behavior* yang baru untuk mendatangkan arsitektur dan strategi bisnis). Ketiga perubahan diperlukan dalam memulai proses transformasi untuk menjadi *entrepreneurial organization*, penerapan *entrepreneurship* mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi seperti penurunan pengangguran di OECD (Audretsch & Thurik, 2001), dan perkembangan *entrepreneurship* dipandang mempunyai kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi (Kreft dan Sobel, 2005).

Negara Jepang, pendidikan *entrepreneur* di Jepang memiliki tujuan utama yaitu untuk menghasilkan dan memperluas atmosfer lingkungan *entrepreneurship* serta inovasi. Pengajar dan kurikulum menjadi hal yang sangat penting untuk keberhasilan misi ini dan ditambahkan dengan ekosistem *entrepreneurial* melalui program *outreach*. Di Jepang terdapat laboratorium *entrepreneur* terbesar yang kegiatannya meliputi pendidikan, *outreach* dan penelitian (konsorsium penelitian desa inkubasi SFC, *Incubation Village Research Consortium*) Thailand, dari hasil riset menemukan bahwa 80 orang Thailand bercita-cita membangun bisnisnya sendiri, dan penelitian yang dilakukan GEM (*Global Entrepreneur Monitoring*) membedakan *entrepreneurship* di Thailand menjadi 2 yaitu: (1).

Entrepreneurship untuk mempertahankan hidup dan (2) *entrepreneurship* untuk

memanfaatkan peluang (*opportunity based entrepreneurship*). *Survival based entrepreneurship* terjadi pada keluarga berpenghasilan rendah mereka melakukan kegiatan *entrepreneurship* untuk menambah penghasilan. Keinginan besar masyarakat Thailand untuk menjadi bos bagi dirinya sendiri dan tidak tergantung pada orang lain ini yang menimbulkan iklim menciptakan pasar, namun demikian ada perilaku budaya yang menghalangi timbulnya *entrepreneurship* yaitu menganggap bahwa bekerja pada pemerintah atau perusahaan multinasional lebih penting, kurangnya mentalitas pemenang (*winning spirit*) dan adanya tekanan untuk menjadi anggota tim yang baik (*on being a good team member*) dari pada menjadi seorang pemimpin.

Negara India, *entrepreneurship* di India berkembang sangat baik dengan dukungan ekosistem *entrepreneurship*, hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang yang bekerja sendiri dan bermunculannya usaha kecil-menengah yang berorientasi pada target. Perpaduan antara pemerintah, pengusaha kecil dan menengah serta pengakuan aktifitas usaha berjalan sangat baik dengan adanya beberapa program seperti pengembangan *entrepreneur*, dukungan keuangan, teknologi, konsultasi, *marketing*, bahan mentah dan insentif fiskal dan non fiskal.

Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan *entrepreneur* di India adalah dengan strategi pengembangan dan jaringan struktural yang memiliki hubungan timbal balik berganda pada tahap yang berbeda (*Triple Helix paradigm*) Inovasi adalah proses *networking* dan integrasi sistem *non linier*. Dan keberhasilan ditentukan oleh konsentrasi lokal dari keahlian orang dan teknologi. Universitas memberikan kontribusi langsung pada peningkatan kemakmuran.

Seluruh perkembangan yang terjadi dengan pengembangan kewirausahaan pemuda di negara –negara di atas jelas sekali bahwa peran pemerintah, Swasta dan masyarakat yang harus saling bersinergi untuk mendukung. Segala potensi yang ada dikembangkan dengan dukungan kebijakan baik dari sisi pendidikan, perbankan dan pemasaran. Mekanisme yang tepat disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengembangkannya. Di desa Wukirsari sementara ini yang tumbuh adalah adanya partisipasi dari masyarakat dan pemuda sendiri sehingga perhatian dari pemerintah dan swasta masih sangat dibutuhkan.

6.1.3. Aktor Yang Terkait dan Peranannya Masing-masing Dalam Program

Kebijakan kewirausahaan pemuda merupakan kebijakan berskala nasional dengan kejelasan arah. Secara konstitusi kebijakan pengembangan kewirausahaan memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga wajib dilaksanakan oleh pemerintah, melalui Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai tingkat Kabupaten/Kota dan Desa serta termasuk amanat untuk menjalankan kemitraan dan sinergi dengan pihak lain dalam penyelenggaraan pelayanan pemuda. Adapun penanggungjawab dari program pengembangan kewirausahaan pemuda sesuai yang dirancang pemerintah pusat telah secara jelas siapa-siapa aktor yang bertanggungjawab terhadap kegiatan tersebut.

Long & Long (1992) dan Long & Ploeg (dalam David Booth (ed , 1995), menyatakan bahwa teori orientasi aktor merupakan pendekatan metodologis dalam memahami proses sosial. Penekanan kajiannya lebih mengarah kepada analisis program bukan sebagai intervensi program atau sebuah bentuk manajemen baru dalam pelaksanaan program. Metode yang digunakan

mengacu kepada metode *participatory*, dimana keseluruhan aktor yang terlibat dalam kebijakan publik dikaji keseluruhan, tidak hanya pemuda seperti wirausaha namun juga para pengusaha (swasta) dan pemerintah yang merupakan aktor memiliki orientasi dalam interaksi dalam kegiatan membangun kewirausahaan pemuda. Dalam proses ini orientasi masing-masing aktor menjadi kunci utama yang mewarnai bentuk dan arah kebijakan yang dihasilkan. Termasuk didalamnya, kenyataan bahwa ada aktor yang memiliki kekuasaan berbeda (melebihi aktor lainnya). Hal ini membuat proses kebijakan publik akan lebih banyak diwarnai oleh orientasi dan kepentingan dari aktor yang lebih dominan dari yang lainnya. Analisis kebijakan publik dengan menggunakan pendekatan orientasi aktor ini memiliki asumsi-asumsi dasar sebagai berikut: (1) logika yang mendasarinya adalah setiap individu memperoleh kemampuan dan kesempatan berperan dalam proses kemasyarakatan dan kehidupan. Dalam konteks pembangunan ini bermakna sebagai pembangunan yang partisipatif: (2) pembangunan berarti untuk semua kelompok sasaran dan pembangunan bermakna pemerataan: (3) pembangunan didasarkan pada logika keseimbangan ekologi lingkungan, yang berarti tidak hanya mementingkan generasi sekarang, tetapi juga generasi mendatang; dalam konteks ini berarti bermakna pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pendekatan ini memberikan makna bahwa persoalan bersama termasuk di dalamnya adalah persoalan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan harus merupakan hasil orientasi masing-masing aktor, karena tidak bisa aktor tertentu seperti *State* dengan begitu saja mengatas namakan masyarakat sebagai pihak yang pasti memahami dan menerima perencanaan pembangunan yang dilaksanakan. Long & Ploeg (dalam Booth (ed) 1995) menyatakan bahwa dalam

model orientasi aktor ini pola-pola organisasi sosial dan mekanisme kerja serta hasil-hasilnya merupakan dampak dari interaksi, negosiasi dan perjuangan masing-masing aktor yang terlibat di dalamnya. Orientasi ini tidak hanya sekedar interaksi atau pertemuan tatap muka secara langsung melainkan juga harus didukung oleh situasi atau suasana afeksi yang mampu mendorong aktualisasi dari masing-masing aktor yang terlibat.

Berikut tabel penanggungjawab kegiatan program pengembangan Kewirausahaan Pemuda :

Tabel 6.2. PenanggungJawab Program Pengembangan Kewirausahaan

No	Program/Kegiatan	Penanggung jawab kegiatan
1	Pengembangan Kader Kewirausahaan Pemuda (WMP)	
1.1	Penciptaan Calon-calon WMP (<i>Pre-Start Up</i>): (1 angkatan/tahun @25 orang)	
	a. Pelatihan Dasar Kewirausahaan Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota oleh Dispora Kab/Kota	Dinas yang membidangi pemuda dan olah raga di tingkat kabupaten/kota (selanjutnya disebut dispora kabupaten/kota)
	b. Pelatihan Dasar Kewirausahaan Pemuda pada Wilayah Strategis Provinsi oleh Pemerintah Provinsi	Dinas yang membidangi pemuda dan olah raga di tingkat Provinsi (Dispora Provinsi)
	c. Pelatihan Dasar Kewirausahaan Pemuda pada Wilayah Strategis Nasional oleh Pemerintah Pusat	Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora)
1.2	Penguatan Usaha KWP (<i>Start Up</i>):	
	a. Pelatihan Penguatan Manajemen Usaha	Kemenpora, dispora provinsi, dispora kabupaten/kota
	b. Pemagangan Manajemen Usaha untuk KWP	Kemenpora, dispora provinsi, dispora kabupaten/kota
	c. Fasilitas Penguatan Usaha KWP oleh Penggerak Wirausaha	Kemenpora, dispora provinsi, dispora kabupaten/kota
	d. Pameran Produk WMP:	
	• Tingkat Kabupaten/Kota	Dispora kabupaten/kota
	• Tingkat Provinsi	Dispora Provinsi
	• Tingkat Nasional	Kemenpora
1.3	Pengembangan Usaha KWP (<i>Post-Start Up</i>):	
	a. Pelatihan Pengembangan Usaha	Kemenpora, dispora provinsi,

No	Program/Kegiatan	Penanggung jawab kegiatan
	(tematik: produk, teknologi, pemasaran, dll)	dispورا kabupaten/kota
	b. Pemagangan Usaha untuk KWP (tematik: produk, teknologi, pemasaran, dll)	Kemenpora, dispورا provinsi, dispورا kabupa, Kemenpora, dispورا provinsi, dispورا kabupaten/kota ten/kota
	c. Fasilitas Pengembangan usaha KWP melalui Inkubator Bisnis	Kemenpora, dispورا provinsi, dispورا kabupaten/kota
	d. Pameran Produk WMP:	
	• Dalam Negeri	Kemenpora
	• Luar Negeri	Kemenpora
	e. Fasilitas HAKI	Kemenpora
	f. Temu Usaha WMP:	
	• Tingkat Kabupaten/Kota	Dispورا kabupaten/kota
	• Tingkat Provinsi	Dispورا Provinsi
	• Tingkat Nasional	Kemenpora
	g. Fasilitas WMP <i>Incorporated</i>	
	• Tingkat Kabupaten/Kota	Dispورا kabupaten/kota
	• Tingkat Provinsi	Dispورا Provinsi
	• Tingkat Nasional	Kemenpora
2	Pengembangan Kelembagaan Kewirausahaan	
2.1	Fasilitas Pembentukan KWP	Kemenpora
2.2	Pengembangan Pusat-pusat Kewirausahaan Pemuda	
	a. Pembentukan Pusat-pusat Kewirausahaan Pemuda	Kemenpora, dispورا provinsi, dispورا kabupaten/kota
	b. Penguatan Pusat-pusat Kewirausahaan Pemuda berbasis Komoditi/Bidang Usaha (OVOP)	Kemenpora, dispورا provinsi, dispورا kabupaten/kota
2.3	Penguatan Kapasitas Inkubator Bisnis Kewirausahaan Pemuda	
	a. Berbasis Perguruan Tinggi	Kemenpora, dispورا provinsi, dispورا kabupaten/kota
	b. Berbasis Masyarakat	Kemenpora, dispورا provinsi, dispورا kabupaten/kota
2.4	Penguatan Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP)	
	a. Tingkat Kabupaten/Kota (Even)	Dispورا Kabupaten/Kota
	b. Tingkat Provinsi (even)	Dispورا Provinsi
	c. Tingkat Nasional (even)	Kemenpora
2.5	Bimtek Pengembangan kebijakan kewirausahaan pemuda di Daerah	
	a. Tingkat Kabupaten/Kota	Kemenpora
	b. Tingkat Provinsi	Kemenpora
2.6	Koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan	

No	Program/Kegiatan	Penanggung jawab kegiatan
	dan Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda:	
	a. Tingkat Kabupaten/Kota	Kemenpora, dispora provinsi, dispora kabupaten/kota
	b. Tingkat Provinsi	Kemenpora, dispora provinsi
	c. Tingkat Nasional	Kemenpora
3	Pengembangan Tenaga Kewirausahaan	
3.1	Pelatihan untuk Pelatih (ToT) Kewirausahaan Pemuda	Kemenpora, dispora provinsi, dispora kabupaten/kota
3.2	Pelatihan untuk Mentor (ToT) Kewirausahaan Pemuda	Kemenpora, dispora provinsi, dispora kabupaten/kota
3.3	Pelatihan untuk Penggerak (ToT) Kewirausahaan Pemuda	Kemenpora, dispora provinsi, dispora kabupaten/kota
3.4	Pelatihan untuk Guru (ToT) Pendidik Kewirausahaan di Lembaga Pendidikan Formal, dan Non Formal	Kemenpora, dispora provinsi, dispora kabupaten/kota
4	Pengembangan Kebijakan Kewirausahaan Pemuda	
4.1	Inventarisasi minat, bakat, dan potensi kewirausahaan pemuda (Kab/kota)	dispora kabupaten/kota
4.2	Pengukuran Index Capaian Kewirausahaan Pemuda (ICKP)	Kemenpora
4.3	Penyusunan NSPK	Kemenpora

Grand Desain dari pengembangan kewirausahaan pemuda ini sudah begitu jelas siapa-siapa aktor sebagai penanggungjawabnya, namun persoalan yang timbul di Desa Wukirsari adalah perencanaan pembangunan kewirausahaan yang tidak terjabarkan melalui kebijakan yang khusus mengatur tentang hubungan pelaksanaan kewirausahaan pemuda, yang secara jelas mengatur para aktor yang saling membutuhkan atau saling dapat mendukung dalam kegiatan tersebut. Menurut LP3ES (2016) karakteristik kegiatan perekonomian rakyat dalam hal ini pemuda wirausaha adalah usaha mikro dengan penggambaran sebagai berikut :

- a. Bersifat informalitas, sebagian pelaku usaha bekerja di luar kerangka legal dan peraturan yang ada. Ketidak mampuan atau kelemahan pemerintah dalam mengefektifkan peraturan telah memberi peluang tumbuhnya perekonomian rakyat berkembang, meski begitu para pelaku wirausaha tidak dapat melakukan akses layanan pada lembaga formal.
- b. Mobilitas, Aspek informalitas dari perekonomian rakyat dalam hal ini pemuda wirausaha membawa konsekuensi aktivitas usaha yang tidak berkelanjutan.
- c. Beberapa pekerjaan dilakukan oleh satu keluarga, dalam satu keluarga dapat saja melakukan lebih dari satu kegiatan ekonomi, disini terjadi kerentanan dan keberlanjutan yang sulit diramalkan dan hasil dari kegiatan ini hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- d. Kemandirian, dalam hal ini tidak dapat diwujudkan karena adanya persepsi dari pemerintah atau lembaga permodalan sebagai kegiatan yang non-bankable dan high risk sehingga terjadi pembatasan bantuan atau kerjasama dari pemerintah ataupun lembaga terkait.
- e. Hubungan dengan sektor formal, meskipun selalu disebut sebagai sektor informal namun sesungguhnya memiliki hubungan yang erat dengan sektor formal atau *the dark side of the formal sector*.

Melihat kenyataan seperti ini aktor – aktor yang bertanggungjawab untuk terselenggaranya kewirausahaan pemuda perlu memikirkan suatu pemberdayaan kewirausahaan agar berjalan dengan baik melalui (1). Lembaga mandiri, (2). Pelayanan keuangan mikro, (3). Mengembangkan usaha produksi dan jasa, (4). Jasa konsultasi bagi pemuda wirausaha. Aktor dalam membangun kewirausahaan pemuda di Desa Wukirsari terlihat tidak secara serius menanganinya, lebih terlihat hanya menjalankan tugas dari program yang ada sehingga keterlibatan aktor sebagai pelaku sentral tidak terlihat. Yang semangat hanya pemudanya sendiri tanpa satu bimbingan dan kaderisasi yang berkelanjutan. Inkubator wirausaha pemuda sebagai program pembimbingan dan kaderisasi belum nyata terbentuk di Desa Wukirsari, sehingga sulit untuk melakukan pengukuran dan identifikasi dari keberhasilan pemuda wirausaha, dan juga dalam mengukur keberhasilan pembinaan oleh aktor pemerintah terkait dan lembaga swasta yang mungkin mendampinginya.

Dalam program pendampingan dibutuhkan bantuan teknis untuk pemuda wirausaha agar dapat mencapai dan meningkatkan keberdayaan dan kemandiriannya dalam wirausaha, dalam penelitian ini muncul satu keinginan dari pemuda wirausaha untuk aktor sebagai pendamping yang bertujuan untuk mendidik kedisiplinan dan penguatan karakter sebagai warga negara agar menjadi pemuda pemuda yang mandiri dan memiliki wawasan kebangsaan, mereka menginginkan salah satu unsur pemerintah yaitu peran Tentara Nasional Indonesia dalam pendampingan khususnya pada pembekalan dalam penyadaran tentang mencintai bangsanya. Sehingga pelatihan yang diberikan bukan saja tentang keretampilan tentang wirausaha tetapi juga tentang pembentukan watak kedisiplin bagi pemuda dan tentang bagaimana mencintai bangsanya sesuai budaya yang berkembang pada daerah tersebut.

Kurangnya pendampingan dan bimbingan ini juga memudahkan pemuda tidak konsisten jika tidak berhasil akan mudah bosan dan berpindah pada kegiatan lainnya atau kemudian merantau ke kota. Untuk itu pendidikan disiplin dan konsisten serta memiliki komitmen perlu diberikan sebagai landasan yang kuat. Kewirausahaan itu diciptakan bukan dilahirkan, dengan membentuk pribadi pemuda tangguh, kuat dan disiplin pemuda akan berani menerima segala resiko. Dan inilah pentingnya aktor pendamping dalam suksesnya pemuda wirausaha.

Dalam membangun kewirausahaan pemuda sangat penting terbangunnya sinergitas atau kolaborasi antar aktor yang terlibat. Sinergi ini tentu saja dengan menggabungkan peran-peran penting yang dapat menjadi satu kolaboratif. Dalam kolaborasi ini untuk pemerintah atau State dibutuhkan ketepatan didalam menetapkan sebuah kebijakan kewirausahaan yang

disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di suatu daerah, kebijakan ini juga mengatur peran penting swasta (perusahaan, perbankan, perusahaan daerah dll) dalam mendukung program pemuda wirausaha disini swasta dapat menjadi orang tua angkat yang akan membimbing dan membukakan jalan bagi pemuda untuk mengembangkan kegiatannya. Hal ini akan menjadi kerja yang lebih efisien bagi para pemuda wirausaha. Sedangkan bagi pemuda sendiri setelah mendapatkan seluruh perhatian dari pemerintah dan swasta mestinya memiliki komitmen dan konsistensi dalam menjalankan perannya sebagai pemuda wirausaha, sehingga tumbuhlah pemuda yang memiliki karakter, memiliki kapasitas dan mampu berdaya saing di era globalisasi yang memang harus diterima sebagai motivasi yang positif untuk dapat bersaing.

Konsep sinergi mempunyai kesamaan dengan konsep kolaborasi. Menurut Roz. D. Lasker, Ellisa E. Weiss, dan Rebecca Miller (2001:5), kolaborasi merupakan proses individual dan organisasi independen yang mengkombinasikan sumber daya manusia dan sumber daya material untuk dapat mencapai tujuan mereka, daripada mencapai tujuan tersebut sendirian.

Secara rinci ciri-ciri sinergi dapat dikatakan sebagai berikut :

- 1) Punya tujuan bersama.
- 2) Berorientasi pada hasil bersama.
- 3) Hasil bersama lebih besar daripada penjumlahan hasil masing-masing.
- 4) Proses pengembangan alternatif ketiga.

Kolaborasi antar *State*, *Private*, dan *Civil Society*, menjadi komponen yang populer dalam kehidupan organisasi. Tujuannya untuk memecahkan masalah masalah sosial yang menjadi isu utama, secara bersama sama. Siv

Vangen and Chris Huxham dalam *The Journal of Applied Behavioral Science*

2003; berjudul : “Nurturing Collaborative Relations: Building Trust in Interorganizational Collaboration”, menyatakan :

“Working collaboratively across organizational, sectoral, and even national boundaries is now a popular component of organizational life. Collaborative responses to social problems, for example, are now fairly common throughout the world (e.g., Axinn and Axinn, 1997; Hardy and Phillips, 1998; Mandell, 2001). The aim is usually to deal more effectively with major issues that sit in the organizations’ “interorganizational domain” (Trist, 1983) and that cannot be tackled by any organization acting alone. Increasingly, therefore, the cooperation between public, private, and voluntary sector organizations for the benefit of the public at large is demanded (Glaister, 1999; Hudson, Hardy, Henwood, and Wistow, 1999). Similarly, corporate demands have led to a large number of organizations being engaged in international joint ventures, strategic alliances, or other forms of interorganizational relations (e.g., Fryxell, Dooley, and Vryza, 2002; Inkpen and Li, 1999). (Siv Vangen and Chris Huxham, 2003:5-6).

Kolaborasi keunggulannya pada pembagian sumber daya baik teknologi, keahlian engineering, dan manajemen kualitas. Sharfman et al. (1991 dalam Siv Vangen and Chris Huxham, 2003:26) *argued similarly that “the advantages of sharing resources such as technology, engineering expertise, and quality management outweigh (at least to some extent) the disadvantages stemming from mistrust”*. Dalam pengelolaan urusan-urusan publik juga dikembangkan Collaborative Governance. Pengelolaan pemerintahan kolaboratif di dalamnya mengembangkan kolaborasi dan pemberdayaan. Pengertian Collaborative Governance dikemukakan oleh Roger Sidaway (2005) dalam jurnal yang berjudul *Resolving Environmental Disputes: From Conflict to Consensus* sebagai berikut :

A process and a form of governance in which participants (parties, agencies, stakeholders) representing different interests are collectively empowered to make a policy decision or make recommendations to a final decision-maker who will not substantially change consensus recommendations from the group. Considering that there are different degrees of public consultation and participation ranging from non-participation (the community is unaware of any decisions taken), informing (telling the community what is planned and to understand problems, alternatives and solutions), consultation (to obtain public feedback on

analysis, alternatives and/or decisions), collaboration (to partner with the public to develop alternatives, identify preferred solutions, and make decisions), to empowerment (placing final decision-making into the hands of the public), collaborative governance is governance with characteristics of both collaboration and empowerment.

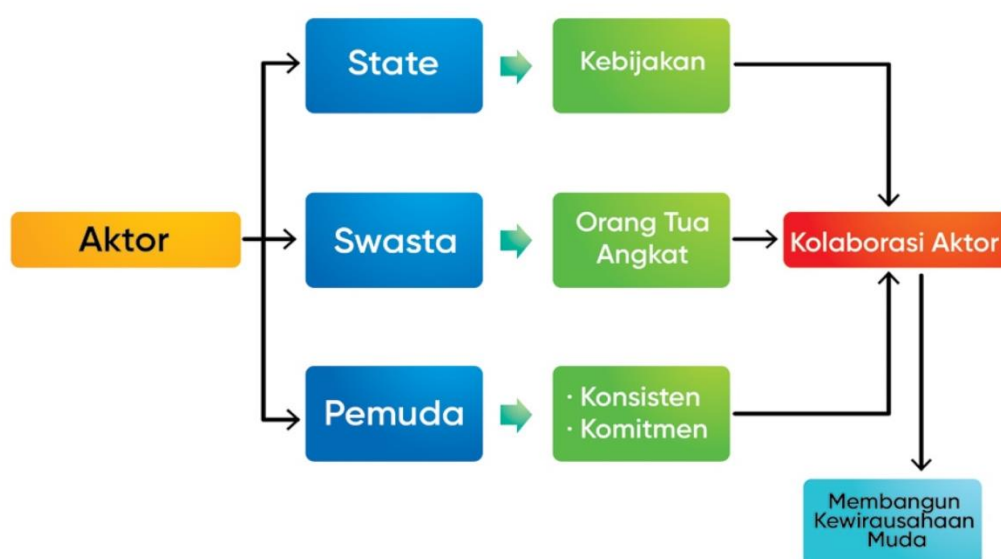
Merujuk konsep yang diajukan Roger Sidaway tersebut, *collaborative governance* (pengelolaan pemerintahan kolaboratif) menekankan sebagai proses dan bentuk pengelolaan pemerintahan di mana partisipan (Kelompok-kelompok, Agen Pemerintah, dan *Stakeholder*) diberdayakan untuk menyusun kebijakan publik. Tingkatan konsultasi publik dan partisipasi : dari non partisipasi, informing, konsultasi, kolaborasi, dan memberdayakan. Kolaborasi pemerintahan mempunyai karakteristik sebagai kolaborasi dan pemberdayaan. Kolaborasi dalam konteks bermitra dengan publik untuk mengembangkan berbagai alternatif, solusi, dan membuat keputusan. Memberdayakan dalam konteks menempatkan pengambilan keputusan kepada publik. Pendapat Chris Ansell and Alison Gash (2007:546) dalam jurnal yang berjudul *Collaborative Governance in Theory and Practise, Published by Oxford University Press on behalf of the Journal of Public Administration Research and Theory, Inc* menyebutkan : *collaboratives* menggambarkan upaya-upaya bersama sebagai jenis pemecahan masalah yang melibatkan instansi pemerintah dan warga masyarakat yang peduli (Reilly, 1998), melibatkan perwakilan oleh kelompok-kelompok kepentingan kunci. (Smith, 1998), termasuk wakil-wakil dari semua kepentingan yang relevan (Connick dan Innes, 2003). Dalam jurnal tersebut juga disebutkan tentang konsep *stakeholders*. Istilah *stakeholder* merujuk baik kepada partisipasi warga negara sebagai individu dan dengan partisipasi kelompok-kelompok terorganisir, para pemangku kepentingan. Kolaborasi menyiratkan komunikasi dua arah dan pengaruh antara lembaga dan para pemangku

kepentingan, bertemu bersama dalam suatu proses deliberatif dan multilateral serta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi juga menyiratkan bahwa stakeholder non-state akan memiliki tanggung jawab nyata untuk hasil-hasil kebijakan. Untuk mengembangkan kolaborasi terkait dengan trust dan beberapa hal lain yaitu : kejelasan tujuan, memperhitungkan kekuatan yang berbeda, kepemimpinan, membangun pemahaman, membagi beban kerja, memutuskan perbedaan komitmen, kepemilikan bersama, dan kemitraan jangka panjang. Kolaborasi antar *State*, *Private*, dan *Civil Society*, menjadi komponen yang populer dalam kehidupan organisasi. Tujuannya untuk memecahkan masalah masalah sosial yang menjadi isu utama, secara bersama sama.

Kolaborasi menekankan pada pertukaran informasi dan pada perubahan aktivitas dan berbagi/ andil sumberdaya untuk mencapai kemanfaatan bersama dan pencapaian tujuan bersama level ini memerlukan komitmen organisasi yang lebih berpengalaman dan perkembangan atas berbagi visi untuk pekerjaan. Kolaborasi merupakan hubungan yang bermanfaat untuk satu sama lain dan lebih baik diantara dua atau lebih organisasi untuk mencapai tujuan bersama, keterlibatan dalam membangun struktur dan berbagi tanggung jawab, kewenangan dan pertanggungjawaban diantara sesama untuk berhasil, pembagian sumber daya dan hasil.

Kolaborasi didefinisikan juga sebagai proses individual dan organisasi independen yang mengkombinasikan sumber daya manusia dan sumber daya material untuk dapat mencapai tujuan mereka, daripada mencapai tujuan tersebut sendirian. Kekuatan untuk mengkombinasikan perspektif, sumber daya, dan keahlian dari kelompok orang-orang atau organisasi-organisasi disebut Sinergi. Bahwa fungsi-fungsi kemitraan dapat dilakukan dengan *Partnership*

Synergy. Sinergi dimanifestasikan dalam pemikiran dan tindakan sebagai hasil dari kolaborasi dan termasuk hubungan-hubungan dalam kemitraan yang luas di komunitas. Kreativitas merupakan salah satu ekspresi yang dihasilkan dari kolaborasi. Bekerja bersama membuka jalan bagi proses yang mendorong eksplorasi perbedaan, mempunyai potensi baru, temuan inovatif untuk solusi masalah. Kolaborasi merupakan pemikiran yang komprehensif, dapat menjadikan praktek semakin baik. Kolaborasi pemikiran digambarkan sebagai transformasi. Kolaborasi dapat membawa perubahan bagi cara komunitas dan penyelesaian masalah. Kolaborasi dimanifestasikan dalam tindakan- tindakan kemitraan. Tipe dari kemitraan ini tidak hanya pemikiran yang komprehensif, tetapi tindakan yang komprehensif, membawa multicabang intervensi yang mengkoordinasi berbagai jenis kekuatan pelayanan, strategi, program, sektor, dan sistem- sistem.



Gambar 6. 5

**Kolaboratif antar Aktor Membangun Kewirausahaan Pemuda
(Herawati, 2017)**

6.1.4. Nilai-nilai Kearifan lokal : sistim Nilai, Institusi dan Artefak

Dalam bab 2 kajian teori seperti apa yang disampaikan oleh Kasim (2015) bahwa masyarakat Jawa memiliki semboyan dalam hidupnya yaitu *Garwo, Wismo, Turonggo, Kukilo* maka akan memiliki strata kehidupan sebagai priyayi hal yang sangat diinginkan bagi masyarakat Jawa jika dalam kesehariannya dapat di panggil dengan sebutan *Doro* (Tuan). Dan untuk menjadi priyayi maka dalam hidupnya harus memiliki istri atau suami, memiliki rumah , memiliki mobil dan juga hobi yang berkelas disini dilambangkan dengan burung. Namun untuk memiliki itu semua orang Jawa juga harus mulat saliro hangroso wani dan bisoo rumongso yang artinya untuk dapat menjadi piyayi ada laku yang tidak mudah yaitu harus selalu kreatif dan inovatif dalam bertindak serta selalu mawas diri dan memahami situasi serta dinamika yang terjadi. Namun setiap laku atau perilaku keseharian dari setiap yang dilakukan harus *sepi ing pamrih , rame ing gawe*. Pengertiannya di sini kearifan lokal dalam mendorong pemuda wirausaha diharapkan menjadi sederajat dengan priyayi meskipun anggapan selama ini priyayi adalah mereka keturunan raja atau mereka yang menjadi pegawai negeri. Melalui setiap upaya *sepi ing pamrih rame ing gawe* diharapkan pemuda sadar untuk terus melawan hawa nafsu dalam rangka mencapai keberhasilan dalam berwirausaha artinya dalam kehidupan duniawi ada keberhasilan namun kehidupan batin juga terjapai melalui pengendalian nafsu. Dalam kewirausahaan harus ramai ing gawe artinya pemuda harus memiliki tanggungjawab yang baik serta terus melakukan inovasi. Sehingga akan terwujud *memayu hayuning bawono*, yang dalam konteks ini tentu saja pemuda menjaga daerahnya karena pemuda bukan beban lagi dalam masyarakat sehingga lingkungan terjaga dengan baik bahkan menyumbangkan keindahan dalam pergerakan ekonomi.

Kearifan lokal tersebut di atas dalam kebijakan publik konsep *Dynamic Governance* merupakan pendorong bagi pembangunan di daerah. Hal ini karena kearifan lokal merupakan internalisasi dari pengalaman hidup yang panjang dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat lokal dengan norma-norma sosialnya. Sehingga nilai-nilai kearifan lokal dalam sistem nilai menjadi penyaring modernisasi yang dapat berdampak negatif bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat, maupun merusak lingkungannya (Topan, 2011). Kearifan lokal berhubungan erat dengan *dynamic Governance*, hal ini karena warisan budaya menjadi satu keyakinan yang mendorong masyarakat untuk berfikir tentang masa depan (*thinking a head*), kearifan lokal juga menjamin kelangsungan (*sustainability*) suatu kebijakan dalam konteks lokal.

Ketika kebudayaan mulai dilembagakan karena manusia adalah makhluk yang berbudi, yang membuat sistem sebagai penataan apa yang diolahnya (baca: sistem adalah *a rational ordering of something*) maka pengertian struktur menjadi tempat 'makna' sistemik kebudayaan. Artinya, kebudayaan tahap ini dibaca sebagai pemantapan makna-nya dalam sistem kemasyarakatan yang memuat (memaktub) pengaturan hidup bersama agar rukun dan saling menghormati, tolong menolong untuk terus melangsungkan kehidupan. Di sini makna mempunyai 'rumah' berjenjang bertahap-tahapan dari sesuatu yang organik menjadi sesuatu yang organisasi. Inilah langkah ketiga dalam membaca kebudayaan dalam rumah maknanya. Yang keempat, tahapan yang menarik kebudayaan dalam seni tari, menyanyikan kehidupan dalam musik. Lihatlah gerak-gerak daya hidup ditarikan dalam rancak dengan gendang. Lihatlah hembus angin, air mengalir ditarikan dalam irama gerak tubuh yang bersyukur, yang memuji deras hujan sebagai berkah dari langit ke bumi. Namun amati pula

gelegar gendang, teriak lengking yang kagum sekaligus gentar karena merasakan berkah subur tanah vulkanik Nusantara, namun sekaligus harus menghormati letusan gelegar magmanya. Kebudayaan ditahapan ini harus dibacakan pula dalam torehan di gua-gua rumah alami ditembok-temboknya yang maknanya terus menerus harus dibaca lagi dan lagi untuk menemukan makna peristiwa syukur atau kisah perburuan dan pergulatan demi kelangsungan hidup. (Muji, 2016)

Di Desa Wukirsari agama dalam perkembangannya, sudah merupakan bagian dari sistem budaya. Kepercayaan agama memberikan seperangkat pedoman bagi tindakan manusia, dan agama dapat mengevaluasi tindakan manusia. Sebagai bagian dalam sistem budaya, agama memberikan arti kehidupan, Parsons (dalam Martono, 2014). Di sinilah agama-budaya telah memberikan dorongan kebatinan dalam membangun kewirausahaan pemuda di Desa Wukirsari. Sehingga momentum yang sangat baik ini telah menjadikan pemuda memiliki nilai spiritual dan religi yang sangat baik. Islam diletakkan sebagai fondasi perjuangan yang berkaitan dengan budaya hal ini terlihat dari adanya kesenian yang merupakan aktifitas yang dilaksanakan secara terus menerus dan terjadwal. Hal ini karena aspek kesenian di Desa Wukirsari memiliki potensi untuk membangkitkan semangat dan moralitas para pemudanya. Agama memiliki peranan positif yaitu sebagai solidaritas sosial sebagaimana disampaikan oleh Durkheim (dalam Martono, 2014), bahwa agama memiliki fungsi untuk menyatukan anggota masyarakat, agama memenuhi kebutuhan masyarakat serta secara berkala menegakkan dan memperkuat perasaan dan ide-ide kolektif.

Perempuan di Jawa terhimpit adanya patriarki yang dilestarikan melalui proses sosialisasi dan reproduksi dalam berbagai bentuk oleh masyarakat.

Sehingga perempuan dalam budaya patriarkal dihantui oleh pesan-pesan yang negatif dan meremehkan keberadaan mereka. Dalam perkembangannya masyarakat sudah mulai sadar bahwa ada pergeseran nilai dimana kaum perempuan memiliki tempat melalui perkumpulan kaum perempuan untuk membantu perekonomian keluarga melalui kegiatan rumahan. Budaya wirausaha pemuda di Desa Wukirsari merupakan kesadaran tentang pentingnya menjadi mandiri dan bukan pengangguran termasuk bagi kaum perempuan di sana, hal ini juga mengubah secara total cara pandang masyarakat desa dimana perempuan desa adalah *konco wingkin* yang hanya mengabdikan kepada suami, hal ini lekat sekali dalam ajaran perempuan Jawa sebagaimana disampaikan WDW (dalam fananie, 2005) sebagai berikut :

- a. *Mantep*, tak berniat pada orang lain kecuali suaminya
- b. *Temen*, tidak palsu terhadap segala hal, tidak berdusta dalam berbicara
- c. *Nrima*, menerima dengan ikhlas apa yang telah menjadi bagiannya (takdir), khususnya yang berasal dari suaminya.
- d. *Sabar*, tidak sering atau cepat marah
- e. *Bakti*, tidak berani kepada suami, menghormati, tidak lancang, tidak menguasai, tidak turut campur tangan urusan suami,
- f. *Gemati*, cekatan melayani suami mengenai apa yang dikehendakinya
- g. *Miyuhu*, taat kepada segala petunjuk suami, menurut dan tidak membantah
- h. *Rumekseng laki*, dapat menjaga dan menyimpan rahasia suami, sayang dan tidak rela jika suami terkena sesuatu yang berbahaya.
- i. *Weweka*, kuat santosa dan dapat menjaga diri.

Dari kesepuluh sikap pengabdian pada suami ini sesungguhnya dapat dijadikan modal bagi perempuan dalam perannya saat ini dalam membangun kewirausahaan pemuda, perempuan juga memiliki peran penting dalam hal ini.

Transformasi budaya ini agaknya sudah mulai berkembang dalam lingkungan generasi perempuan muda saat ini.

Semangat yang memotivasi diri pemuda dan etos kerja yang muncul dari dalam diri untuk berkarya telah diajarkan secara turun temurun didukung oleh lingkungan yang menerima seluruh aktifitas tersebut dengan penghargaan berupa imbalan untuk dapat hidup mandiri dan sejahtera. Penggabungan semangat dari dalam diri dan etos kerja yang diajarkan dalam agama yang dianut telah menumbuhkan satu nilai bahwa tidak akan ada yang memberi atau merubah apapun jika diri pemuda tidak melakukan sendiri dan bahwa nasib akan berubah jika melakukan sesuatu dengan tujuan baik telah menjadi satu rangkaian nilai yang menjelma pada lingkungan sosial-budaya pemuda Wukirsari. Warisan leluhur budaya jawa yang mengatakan “ *Mumpung Anom Ngudiyo Laku Utomo*” yang memiliki petuah agar generasi muda tidak menyia-nyiakan waktu karena ini adalah usia produktif, maka sebaiknya waktu yang ada digunakan untuk hal yang baik merupakan petuah yang turun temurun memberikan pandangan akan satu harapan dari para orangtua untuk anak – anaknya melakukan hal-hal yang berguna. Selain itu pemuda dituntut untuk terus belajar karena hanya dengan belajarlh yang akan membedakan manusia satu dengan yang lainnya seperti dalam pepatah “ *Mulo wong urip iku, den padha akarep marang ngelmu, alo becik ngelmu iku den kawruhi, karana atunggal wujud, mung kacek emel lan batos* “ yang artinya bahwa masyarakat Jawa , setiap orang harus mengetahui semua jenis ilmu pengetahuan. Tidak peduli ilmu itu dianggap baik atau buruk, namun tetap penting mengetahuinya. Petuah ini sebenarnya menekankan sebuah pesan tentang keharusan manusia untuk tidak pernah berhenti belajar. Dan nilai-nilai inilah yang pada akhirnya menjadi satu tata nilai yang berlaku, tidak mau menganggur, memanfaatkan apa yang sudah dipelajari dari keluarga dan berusaha memperbaiki diri sendiri.

Talcot Parsons menggambarkan masyarakat desa sebagai masyarakat tradisional (*Gemeinschaft*) yang mengenal ciri-ciri sebagai berikut seperti yang dikutip oleh Ahmadi (2003) dan masih sangat terlihat pada masyarakat desa Wukirsari:

1. Afektivitas, yang memiliki hubungan dengan perasaan kasih sayang, cinta, kesetiaan dan kemesraan. Perwujudannya dalam sikap dan perbuatan tolong menolong, menyatakan simpati terhadap musibah yang diderita orang lain dan menolongnya tanpa pamrih.
2. Orientasi kolektif, sifat ini merupakan konsekuensi dari afektivitas, yaitu mereka mementingkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri sendiri, tidak suka akan orang yang berbeda pendapat, intinya mereka harus memperlihatkan keseragaman persamaan.
3. Partikularisme, adalah semua hal yang ada hubungannya dengan keberlakuan khusus untuk suatu tempat atau daerah tertentu. Perasaan subyektif, perasaan kebersamaan sesungguhnya yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja (lawannya universalisme)
4. Askripsi, yaitu berhubungan dengan mutu atau sifat khusus yang tidak diperoleh berdasarkan suatu usaha yang tidak disengaja, tetapi merupakan suatu keturunan (lawannya prestasi)
5. Kekabaran (*diffuseness*), sesuatu yang tidak jelas terutama dalam hubungan antara pribadi tanpa ketegasan yang dinyatakan eksplisit. Masyarakat desa menggunakan bahasa tidak langsung, yang menunjukan sesuatu.

Dari kondisi pemuda yang ada di Desa Wukirsari ini, pelaku wirausaha tidak terlepas dari pengaruh motivasi dari dalam diri dan etos kerja sesuai yang diajarkan agama serta pengaruh dari lingkungan yang membentuk karakter warganya yaitu bahwa percaya dengan *Berkah Dalem* (Kerajaan) maka hidup akan sejahtera. *Berkah dalem* ini karena sebuah keyakinan yang telah terbangun sejak jaman masa panembahan Senopati yang muncul berkat ketangguhan dan kemampuan pribadi, yang pada raja-raja selanjutnya telah digeser dan dilambangkan menjadi suatu Tradisi (Marwati dalam Fananie, 2004), konsekwensinya, kharisma seorang raja tidak tergantung kepada kemampuannya, keberaniannya, dan kecakapan pribadi, melainkan lebih kepada

kesadaran tradisi dan mitos. Hal ini dapat dilihat dari tradisi pemakaian gelar raja-raja atau Kasunanan seperti Sayidin Panatagama atau Khalifatullah. Pemakaian gelar tersebut setidaknya secara tidak langsung menempatkan raja sebagai pemuka agama, sehingga segala perkataan dan perbuatannya merupakan hukum yang harus dianut dan dilaksanakan oleh seluruh rakyatnya.

Dan raja sebagai pemuka agama akhirnya memang dipandang sebagai pusat kosmos. Tradisi yang dipercaya dan dilambangkan bahwa raja-raja mataram merupakan keturunan Nabi (*cabang kanan/panhengan*) atau keturunan para Dewa (*cabang kiri/ pangiwa*) adalah dimaksudkan untuk memperkokoh kekuasaan Raja (Fananie, 2004). Dengan memperkuat genealogi, dipercaya bahwa garis magis dalam diri raja akan terpancar kekuatan sesuai dengan garis yang telah ditentukan yang semuanya didasarkan pada wahyu (*pulung ratu*) dan konsep *trahing kusumo rembesing madu* pewaris tahta (Marwati, 1985).

Sehingga usaha yang muncul di Desa Wukirsari ini beragam dengan basis budaya lokal misalnya seni kerajinan kulit (tatah Sungging), seni kerajinan batik tulis, seni kerajinan anyaman bambu dan genting yang dapat bergerak dari dalam rumah tangga sampai pada sentra –sentra industri yang selanjutnya warga Wukirsari disebut sebagai pelaku usaha berskala mikro sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah). Umumnya pemuda Wukirsari memproduksi barang – barang tersebut di rumah masing-masing dengan peralatan tradisional, dilakukan bersama-sama anggota keluarga yang selanjutnya dijual pada sentra-sentra industri ataupun memiliki gerai sendiri. Dalam seni kreatifitas dan inovasi tentu dilakukan dengan tetap mempertahankan budaya lokal yang ada sebagai nilai lebih dari produk yang dibuat, namun juga menciptakan produk-produk sesuai

pesanan dan hal ini tentu mendorong kreatifitas dan inovasi dari pemuda pengrajin dalam menciptakan –model-model baru.

Budaya lokal ini dalam perkembangan menuju globalisasi perlu dilakukan penyiapan diri dan menurut Lie (dalam Martono,2014) membawa empat wacana besar yaitu : delokalisasi dan lokalisasi, inovasi dan teknologi informasi, kebangkitan korporasi multi internasional serta privatisasi dan pembentukan pasar bebas. Hal ini dapat dijelaskan bahwa delokalisasi dan lokalisasi, merupakan transformasi budaya lokal dalam segala aspek sebagai interaksi dengan budaya asing dan dapat diadopsi budaya asing sebagai budaya lokal sebagai sikap positif dalam menjawab globalisasi. Kewirausahaan melalui penyadaran dan pendidikan serta pelatihan dapat dikembangkan sesuai dengan budaya lokal yang ada, dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan hal ini karena dalam era globalisasi kewirausahaan memegang peranan penting dalam perekonomian. Bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia menjadi wacana menarik untuk segera menyadarkan pemuda akan arti penting wirausaha dimana dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Pemuda harus mampu menciptakan persaingan yang elegan untuk itu harus kreatif, inovatif mengelola kekayaan yang sudah ada dengan menciptakan peluangnya sendiri.

Dalam penelitian ini kearifan lokal bukan saja sebagai sekedar sejarah atau dongeng akan tetapi merupakan satu birokrasi dalam membangun kewirausahaan pemuda melalui nilai-nilai kearifan lokal, merupakan keniscayaan yang dapat dilakukan, melalui warisan ajaran budi pekerti luhur dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya wawasan kearifan lokal merupakan pilihan yang rasional (*rational choice*) maka ada beberapa yang patut

diperhatikan sebagaimana disampaikan suryono (2004), yaitu (1). Paradigma pembangunan yang berwawasan kearifan lokal harus bekerja atas dasar logika ekologi manusia, dan bukan atas dasar logika produksi, (2). Dapat mencapai realisasi potensi-potensi kemanusiaan yang utuh, dan bukan sekedar untuk mencapai dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi tinggi (3). Harus dapat melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan peran penting pada masyarakat pemuda sebagai subyek dan aktor pembangunan untuk menentukan tujuan mereka sendiri dengan mengelola potensi-potensi sumber daya untuk kepentingan masyarakat dan bukan mobilisasi sosial untuk menciptakan masyarakat konsumtif, (4). Pembangunan dengan basis nilai kearifan lokal dapat melengkapi struktur-struktur formal dengan teknologi-teknologi organisasi yang lebih adaptif, dan tidak hanya berorientasi pada ketentuan legal formal yang kaku, (5). Selanjutnya mampu memberikan inisiatif perencanaan pembangunan daerah dan pada pengembangan sistem-sistem yang dimiliki untuk mengorganisir diri sendiri melalui satuan-satuan organisasional bernuansa kemanusiaan dalam komunitas-komunitas yang mandiri, (6), menempatkan sistem produksi dibawah subordinasi kepentingan-kepentingan masyarakat lokal yang lebih luas, (7). Pembangunan berwawasan kearifan lokal harus juga didukung oleh sumberdaya intelektual yang profesional, sumberdaya sosial yang memadai dan sumberdaya kearifan lokal yang bijak, (8). Dalam paradigma ini mengakui pentingnya produksi untuk mencapai kesejahteraan namun juga harus memberikan tempat yang sama bagi pentingnya nilai-nilai dalam kualitas berkehidupan yang lebih luas.

Menurut Yani (2016) Penguatan kualitas dan kompetensi pemuda sebagai salah satu soko guru, motivator, inovator, dan aktor perubahan menuju

masa depan yang lebih baik serta memiliki: kemampuan, semangat berprestasi, dan pengabdian kepada nusa dan bangsa, di tengah-tengah perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat atau globalisasi guna mendekatkan segala aspek masalah yang ada, maka nilai kearifan lokal yang dibutuhkan ke depan adalah nilai budaya yang ke depan dapat dilihat dari dua dimensi yaitu dimensi aktual dan dimensi ideal. Dimensi Aktual adalah resultan dari unsur-unsur pembentuk bangsa Indonesia. Dimensi Ideal adalah pengetahuan keyakinan, dan nilai-nilai yang mampu mengelola keragaman masyarakat dan budaya di Indonesia. Dimensi aktual/tindakan diposisikan lebih dahulu dari pada dimensi ideal, karena efek perubahan pemikiran dunia nyata (*Action Is More Worthed Than Words*).

Pemuda Wukirsari memahami budaya yang ada dan mengakomodir budaya asing menjadi budaya baru dengan tidak mengubah cara pandang akan kekayaan budaya lokal dari hasil produksi yang dikembangkan merupakan ketahanan dalam bidang ekonomi, yang membuat pemuda menjadi mandiri. Namun ada hal yang belum dilakukan yaitu budaya bekerjasama dalam pengembangan produk melalui riset bersama Perguruan Tinggi atau lembaga pemerintah terkait. Selain itu globalisasi digerakkan oleh dua faktor yang harus dipahami betul oleh para pemuda dalam berwirausaha yaitu (1) adanya pergeseran pembangunan yang dipimpin oleh pemerintah ke pembangunan yang dipimpin oleh pasar, (2). Adanya kemajuan dibidang teknologi yang memudahkan produksi dan pemasaran pada tingkat global. Dan peran yang sangat cepat harus direspon oleh pemuda adalah kemajuan dalam teknologi, terutama informasi, produksi dan transportasi.

Dalam hal perkembangan teknologi dan komunikasi juga menjadi pemikiran tersendiri bagi pemuda wirausaha yaitu dengan mulai mengenal dan mengaplikasikannya baik dalam disain produk, jasa meskipun masih dalam batas yang sangat sederhana yaitu mulai memasarkan produk melalui internet. Perubahan peradaban dengan adanya globalisasi akibat dari perkembangan informasi dan teknologi dipahami pemuda Wukirsari sebagai dua hal yang berbeda, disatu sisi mereka harus menerima dan disatu sisi bagi mereka adalah ancaman, hal ini karena kegiatan ekonomi yang mereka jalankan adalah kegiatan turun temurun yang masih sangat konvensional dan ini yang memaksa para pemuda untuk terus berlatih dan belajar menerima perubahan yang ada. Hal ini seperti yang di sampaikan Spillane (2003) bahwa dalam menghadapi globalisasi ada tiga pandangan yang mendasar dari kelompok masyarakat yaitu (1) kelompok skeptis yaitu menganggap bahwa globalisasi adalah sebuah kata untuk menjelaskan fenomena yang sebenarnya sudah ada sejak jaman dulu sebagai contoh adalah kisah *jalan sutra* yaitu bahwa Rusia dan Cina sudah saling terhubung sejak abad 14. (2). Kelompok *hyperglobalist*, yang menganggap globalisasi adalah proses yang baru, bagi kelompok ini globalisasi telah mengubah peradaban dunia secara radikal dan menghancurkan kebudayaan-kebudayaan lokal. (3) kelompok transformatif yaitu kelompok yang mengambil posisi tengah, dimana globalisasi memang sudah terjadi dimasa lalu, namun globalisasi saat ini berbeda dengan perdagangan bebas dunia pada masa-masa sebelumnya. Perbedaan ini dapat dilihat dari kecepatan, intensitas, dan eksistensi.

Pada pelaksanaan membangun kewirausahaan pemuda di Desa Wukirsari baik dari program, mekanisme, aktor yang terkait serta kearifan lokal

masih banyak sekali permasalahan sehingga semangat pemuda yang sudah menjalankan kegiatan tersebut tidak dapat menerima bimbingan dan pendampingan dengan lebih baik. Hal utama yang sangat mendasar adalah pada persoalan kelembagaan hal ini karena belum adanya peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan kegiatan dengan lebih jelas.

Sehingga dapat disampaikan dalam proposisi minor adalah sebagai berikut:

Proposisi minor 1.

Kuatnya sinergi antara Pemerintah, masyarakat dan swasta serta dukungan nilai-nilai kearifan lokal dalam sistim nilai, institusi dan artefak akan memperkuat pelaksanaan membangun kewirausahaan kewirausahaan pemuda.

6.2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat membangun kewirausahaan pemuda

6.2.1. Faktor-faktor yang mendukung

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah menjadikan desa Wukirsari sebagai lokasi jalur wisata sehingga secara otomatis ini memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di desa Wukirsari. Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakatnya khususnya pemuda sebagai pilar dalam pembangunan ekonomi. Dilihat dari data kependudukan pemuda Wukirsari yang berusia 15-24 tahun berjumlah 25 % dan ditambah penduduk usia produktif (25-44 tahun) sebesar 25 % (pada presentase ini sesuai undang-undang Kepemudaan No. 40 tahun 2009 sampai usia 30 tahun

masih disebut pemuda) merupakan usia produktif untuk bekerja dan jumlah ini adalah separuh dari total jumlah penduduk desa Wukirsari 17.318 jiwa merupakan potensi dalam pembangunan. Pemerintah mengajak pemuda sebagai potensi dalam pembangunan ekonomi untuk melakukan kerjasama baik dengan swasta maupun dengan perguruan tinggi, hal ini tentu akan memperkuat strukturisasi dalam penyempurnaan lembaga-lembaga Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan perannya sebagai pemberdaya pemuda. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi meningkatnya kemampuan atau prakarsa pemuda melalui kerjasama dengan swasta dan lembaga lainnya dalam membangun pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus senantiasa mampu menciptakan kondisi yang kondusif. Dalam situasi yang kondusif itu Pemerintah Daerah dengan kebijakan yang ada tentunya dapat membantu para pemuda Wirausaha ini dalam hal meningkatkan produk lokal untuk dapat bersaing di pasar internasional dan bantuan permodalan untuk meningkatkan usahanya.

Selain hal-hal tersebut diatas yang dapat mendukung kegiatan kewirausahaan pemuda seperti yang disampaikan dari pendapat ahli tentang eksistensi kelambagaan atau "institusi" dalam berbangsa dan bernegara sangat menentukan kemajuan suatu bangsa dan negara. Efektifitas institusi dalam mendukung penyelenggaraan negara, tergantung pada kualitas masyarakat bangsanya. Terdapat hubungan yang kuat antara sistem kepercayaan, sistem nilai, dan norma pada "budaya bangsa" dengan "institusi". Demikian maka, budaya merupakan representasi internal dari pemahaman individu atau kelompok sosial akan sesuatu hal, sementara "institusi" merupakan bentuk fisiknya. Sehingga, bagaimana institusi bekerja, berfungsi dan berkinerja akan

sangat ditentukan oleh budaya yang ada dan diyakini oleh bangsa. Dengan kata lain tatanan, aturan, prosedur, mekanisme, dan regulasi yang dimiliki oleh “institusi” sangat dipengaruhi oleh “budaya” yang diyakini dan dianut itu oleh elite maupun oleh pengambil keputusan (Firmanzah, 2016).

Dalam kebijakan unggul aktor yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa bersinergi bersama sama masyarakat dan swasta untuk dapat memberikan harapan dan peluang baik dalam membangun kewirausahaan pemuda. Sebuah kebijakan yang unggul, dimana kebijakan ini mampu dijalankan oleh lintas kementerian ataupun departemen dalam satu program yang sama yaitu kewirausahaan pemuda. Tentu saja tidak terjadi tumpang tindih tugas dan tanggungjawab masing-masing implementor kebijakan, sehingga dibutuhkan satu lembaga independen yang menjalankan seluruh kebijakan yang sama dari kementerian, departemen terkait. Lembaga Independen itu sebagai lembaga Membangun kewirausahaan pemuda bersama –sama dan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Dewasa ini, ketika kadar kepercayaan masyarakat pada elite bangsa yang duduk di pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif berada pada titik nadir, kita dihadapkan pada “anomali” moral bangsa.

Bagi mereka arti amanah sebagai pengabdian yang tulus dan jujur dalam menjalankan tugas negara, sudah tidak dikenal lagi. Yang ada hanya semata-mata mencari nafkah dan keuntungan dari kedudukan yang diraihinya.

Penyalahgunaan wewenang dan korupsi adalah konsekuensi logis dari keadaan itu. Oleh karena itu, diperlukan perubahan yang mendasar pada pembangunan manusianya. Nilai budaya amanah merupakan kekuatan sikap yang bersifat spiritual dan religius pada budaya bangsa. Ketika pemimpin bangsa dipercaya

untuk melaksanakan tugas-tugas negara, maka nilai budaya “amanah” merupakan hal yang paling penting diberlakukan

Dalam membangun kewirausahaan pemuda tersebut harus mampu menyesuaikan dengan kearifan lokal setempat, sehingga program besar dalam membentuk pemuda inovatif dan kreatif serta mandiri dapat diterjemahkan sesuai kebiasaan dari budaya setempat yang memiliki nilai adi luhung. Di Bantul budaya adi luhung yang harus dibangun sebagai kekuatan lokal adalah budaya feodal yang meyakini bahwa *Berkah Dalem* adalah sumber kemakmuran, selain itu agama Islam menjadi pegangan kuat dengan berperilaku jujur dan terus berusaha namun memiliki kepasrahan kepada yang membuat kehidupan. Nilai-nilai yang tumbuh dari keluarga dan dijunjung tinggi memberikan kepercayaan yang kuat akan kemampuan dan daya juang, terlebih lagi lingkungan masyarakat yang sangat mendukung. Disinilah tumbuh modal moral dari pemuda yaitu Intelektual, spiritual dan mental yang lebih kuat. Dari perspektif privat, kewirausahaan adalah tingkah laku seseorang yang a) selalu berinisiatif; b) pantang menyerah; c) berkemauan menggerakkan mekanisme sosial dan ekonomi untuk mengubah sumber daya atau situasi asal menjadi lebih berguna, dan d) menyadari akan risiko dan kegagalan. Di balik perilaku di atas, terdapat dorongan kuat untuk mencapai sesuatu yang besar, penting, atau yang bernilai tinggi, dan siap mempertaruhkan waktu, perasaan-perasaannya, karier maupun kekayaannya, demi mencapai tujuannya. Dari perspektif publik, kewirausahaan adalah kemampuan melakukan perubahan, inovasi, maupun kemampuan membuat metoda atau tata kerja baru. Bagi perekonomian suatu negara, kewirausahaan tidak sekedar untuk meningkatkan *income percapita* negara itu, namun juga mendorong tumbuhnya kegiatan usaha baru, yang akan mengubah

struktur sosial, struktur dunia usaha dan perekonomian dalam masyarakat.

Perubahan itu juga akan mendorong tumbuhnya *demand* baru, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang pada gilirannya mendorong arus masuknya modal untuk investasi, tumbuhnya kebutuhan sumber daya manusia (SDM), kebutuhan riset (R&D), dan inovasi lebih lanjut, yang secara sinergis akan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Kewirausahaan senantiasa mendorong tumbuhnya penguasaan teknologi dan penguasaan pasar untuk mampu menghasilkan *out-put* / produk / jasa proses, yang bernilai tinggi. IPTEK dan bisnis merupakan dua sistem dinamis yang saling merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara, bagaikan 2 sisi dari satu mata uang yang sama

Dalam membangun kewirausahaan pemuda penting ditumbuhkan semangat belanegara sebagai pendidikan karakter. Tumbuhnya karakter pemuda yang memiliki komitmen, konsistensi, disiplin akan membentuk karakter dengan perilaku yang sadar bagaimana mencintai negaranya. Dengan demikian tidak akan menjadi beban dan justru memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan melalui kesadarannya. Seorang wirausaha membutuhkan kekuatan keyakinan akan negaranya dengan berkarya yang positif. Jadi belanegara bukanlah dalam militerisme tetapi karya nyata dari kejuangan para pemuda dalam mengembangkan seluruh kemampuannya dalam peran sertanya membangun daerah. Namun dewasa ini *proxy war*, sebuah peperangan non-militer yang dilakukan negara maju terhadap negara berkembang, telah efektif dilaksanakan secara sistematis. Tujuannya adalah melemahkan “ketahanan bangsa” dengan memanfaatkan kemajuan teknologi “media-X”. Sasarannya adalah mindset warga negara dan budaya bangsanya. Disinyalir fenomena ini merupakan bentuk baru dari penjajahan. Untuk mengatisipasinya, tidak lain kita

harus menguatkan rasa kebangsaan dan budaya bangsa Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan sebuah "Strategi Kebudayaan (Wibawarta, 2016)

Kewirausahaan dapat terbangun dengan baik dengan adanya pemuda pemuda yang memiliki jiwa kreatif, inovatif dan mandiri untuk mengekspresikan dirinya dalam pembangunan. Pemuda dengan jiwa kreatif, Inovatif serta mandiri adalah pemuda yang memiliki keinginan kuat dan menjunjung tinggi komitmen dan konsistensinya. Pemuda tersebut memiliki daya juang yang tidak mudah patah atau lentur. Sangat disayangkan dewasa ini kemajuan bangsa telah menghasilkan kelas menengah yang konsumtif dan gemar pada kehidupan hedonistik, sehingga diragukan akan mampu menjadi "motor penggerak" perubahan demi kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi masa depan. Perlu upaya yang bersifat konseptual dan strategis untuk membangun kelas menengah yang tangguh dan memiliki daya juang dan mampu berperan sebagai motor penggerak perubahan menuju Indonesia baru yang seharusnya. Adalah sebuah keniscayaan untuk melakukan hal ini, dalam menghadapi bonus demografi pada waktu dekat ini (Hoed, 2015).

Penguatan daya saing dapat ditempuh melalui : (a) penguasaan budaya bangsa sendiri dengan pendidikan bagi generasi muda, melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal; (b) penguasaan ilmu pengetahuan & teknologi bagi peningkatan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan (*entrepreneurship*), khususnya pada pendidikan tinggi, dan (c) penemuan baru (*inventions*) didorong, khususnya pada dan untuk pengembangan perekonomian Indonesia (Wibawarta, 2016). Kewirausahaan juga dibangun dengan sebuah prakarsa atau inisiatif yang

mendorong seseorang untuk menyalurkan pikiran-pikirannya bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi baik oleh dirinya ataupun oleh kelompok masyarakat. Prakarsa ini sebagai pencetus untuk bergulirnya suatu proses bernalar, berfikir dalam menyelesaikan masalah. Prakarsa merupakan inti dalam kewirausahaan dimana pemuda akan selalu mencari peluang dibalik hambatan. Berfikir lintas batas, dan di balik ini semua memiliki tanggungjawab, tidak canggung dan tidak semena-mena mencari keuntungan sendiri secara material.

Proklamasi Kemerdekaan adalah proklamasi kemandirian untuk melepaskan diri dari keterjajahan. Oleh karena itu harus juga merupakan “Proklamasi Kebudayaan”, yang berarti suatu pernyataan mampu memangku nilai-nilai budaya, berdaulat dan mandiri, melepaskan diri dari ketergantungan, menolak perhambaan dan keterbelengguan sebagai *koeli* di negeri sendiri, sekaligus berketeguhan untuk tidak ragu menjadi “tuan” di negeri sendiri. “Keunggulan” merupakan “tuntutan budaya” yang harus dipenuhi sebagai bangsa yang telah berani menyatakan kemerdekaan. Hanya negara atau bangsa yang kuat, mandiri dan berdaulat yang akan disegani oleh negara-negara lain dalam pergaulan sosial-politik-ekonomi-budaya dan internasional. (Swasono, 2016).

Ada stigma negatif mengenai masyarakat negara dunia ketiga, bahwa mereka tidak tumbuh dari “akar dan rantingnya” sendiri. Mereka akan mencari pupuk dari luar untuk menghidupi dirinya sendiri. Ini merupakan persoalan bangsa Indonesia yang bersifat strategis, yang perlu ditanggulangi melalui pendidikan nasional dalam konteks “mencerdaskan bangsa” sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 (Permanadeli, 2016).

Pemerintah Desa Wukirsari menerapkan hak dan kewajiban masyarakat dalam membuat rencana pembangunan desanya agar tepat sasaran yang

dilakukan melalui komunikasi dalam bentuk musyawarah atau rembug desa dan dilaksanakan melalui gotong royong. Musyawarah atau rembug desa itu dilakukan untuk mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi dan terlibat langsung dalam membuat program berupa: membuat usulan, saran, tanggapan, yang ditujukan pada fasilitator dalam setiap kegiatan, sehingga masyarakat dapat mengembangkan ide menjadi karya ataupun bersosialisasi. Hal ini akan membuat masyarakat tahu dan sadar betul akan potensi desa yang dimiliki serta potensi sumber alam yang dimilikinya, sehingga masyarakat akan bersama-sama melakukan pemecahan permasalahan bersama-sama dengan pihak lain yang akan membantu dalam mewujudkan perencanaan desa yang dituju. Asas kebersamaan melalui musyawarah (rembug desa) dan gotong royong sesuai norma budaya yang ada di desa Wukirsari menjadi satu pegangan yang kuat dalam membangun desanya dan ini masih tetap diajarkan pada generasi muda tanpa menghambat kreatifitas para pemuda desa Wukirsari.

6.2.2. Faktor- faktor yang menghambat

Dalam perspektif *New Public Service* gagasan partisipasi dari masyarakat tentunya akan membawa angin perubahan dalam administrasi publik, hal ini disampaikan Muluk (2007: 37) bahwa perubahan tersebut tentunya pada cara pandang masyarakat terhadap sistem pemerintahan, pandangan tentang yang dimaksud kepentingan masyarakat, cara penyelenggaraan kepentingan tersebut diselenggarakan, dan perubahan dalam bagaimana administrasi publik menjalankan tugas untuk memenuhi kepentingan publik. Perspektif ini mengedepankan posisi masyarakat sebagai warga negara dalam konteks

penyelenggaraan pemerintahan. Lebih lanjut disampaikan Muluk, bahwa ada empat prinsip yang digunakan perlu dilakukan ditingkat daerah yaitu :

1. *The scale principle* yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa fungsi yang lebih tepat diatur dan diurus pada tingkat pemerintah pusat dan beberapa fungsi lain yang lebih tepat diatur dan diurus oleh pemerintah daerah. Jika penyelenggaraan suatu fungsi ingin melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih besar, maka sebaiknya diberikan kepada pemerintah daerah, karena masyarakat di daerah lebih memungkinkan untuk berpartisipasi secara lebih aktif dan efektif.
2. *The democracy principle* yang menjelaskan bahwa pada dasarnya proses pemerintahan seharusnya melibatkan masyarakat. Prinsip ini menekankan perlunya pembahasan kebijakan dan pengambilan keputusan secara terbuka dan bebas.
3. *The accountability principle*, yang menjelaskan bahwa pemerintahan pada dasarnya adalah milik masyarakat. Akuntabilitas publik berarti pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemilik pemerintahan. Dan untuk mencapai akuntabilitas publik dibutuhkan masyarakat dalam proses kebijakan bersama dengan wakilnya dan administrator publik. Akuntabilitas publik menuntut keterkaitan langsung warga antara masyarakat dengan penyusunan dan pelaksanaan program-program publik.
4. *The rationality principle* yang menjelaskan bahwa proses partisipasi publik dalam pemerintahan daerah harus ditanggapi secara rasional. Pengertian rasional disini lebih mengacu pada kesadaran dan pengakuan bahwa proses partisipasi membutuhkan waktu yang memadai, pemikiran yang cermat, kesempatan kepada masyarakat untuk menyatakan pendapat, mendengar beragam pendapat yang muncul serta penghargaan atas perbedaan pendapat.

Secara nasional, kebijakan kewirausahaan pemuda menjadi kebijakan berskala nasional dengan arah yang jelas, namun pada tingkat operational di daerah kebijakan kewirausahaan ini belum mengacu pada kebijakan tingkat nasional hal ini jelas dengan belum ditetapkannya peraturan turunannya sebagai penjabaran operational yang dilakukan di daerah. Sehingga hal ini berdampak pada pelayanan kepemudaan bagi para birokrat yang menjalankan kebijakan tersebut. Perbedaan aktor pelaksana di tingkat pusat dan daerah memperlihatkan tidak ada sinergi dalam program dan kegiatan antar instansi

membangun kewirausahaan pemuda ditingkat pusat dan daerah. Dari Informasi saat diskusi (FGD) jelas bahwa secara kelembagaan, Balai Pemuda dan Olahraga (BPO), merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dari Disdikpora merupakan *leader sector* dalam pembangunan kewirausahaan pemuda. Namun BPO memiliki struktur eselon lebih rendah dibandingkan dengan instansi pelaksana lainnya. Dalam hal ini BPO adalah instansi setingkat Eselon III, sementara instansi lain adalah lembaga eselon II. Akibat perbedaan eselon ini menjadi hambatan dalam melakukan koordinasi dengan instansi lainnya. Sehingga kewenangan BPO sebagai *leading sector* tidak dapat mengembangkan koordinasi dan kemitraan dengan instansi lainnya.

Sinergi program antar instansi juga dirasa sangat minim hal ini karena pembangunan kewirausahaan pemuda masih merupakan program sektoral sehingga sangat terbatas. Hal ini karena tidak adanya payung hukum yang mengatur tentang kemitraan antar dinas. Kerjasama kegiatan yang terjadi hanya pada level pelaksanaan kegiatan seperti pada pelatihan sebagai pemateri (dinas lain diundang sebagai pemateri), kerjasama peserta pelatihan, dan pertukaran informasi mengenai perkembangan kewirausahaan pemuda. Sehingga kerjasama program yang terjadi bersifat parsial dan tidak mengikat sebagai program bersama, keberhasilan dari program hanya diukur dari jumlah peserta. Sehingga menjadi sangat tidak sinergis untuk mewujudkan pemuda wirausaha yang nantinya memiliki keluaran yang mandiri dan berdaya saing. Disinilah dibutuhkan tidak sekedar partisipasi pemuda namun satu kinerja dalam manajemen yang terukur seperti pada pendekatan manajemen publik baru atau NPM (Mindarti, 2007; 155), yang menyatakan bahwa meningkatnya arus globalisasi dan liberalisasi baik disektor ekonomi, politik maupun budaya, hampir

menguatkan nya fenomena *information-based society* dan *knowladge based society*. Hal ini harus disikapi karena perubahan ini juga sudah menjadi tekanan yang luar biasa dengan dunia luar lainnya akibat perkembangan teknologi dan informasi, yang harus mendapatkan perhatian lebih dalam mensukseskan keberhasilan kewirausahaan pemuda.

Sedangkan hambatan dalam permodalan dan pemasaran hampir tidak tersentuh hal ini karena pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan yang bersifat *soft skill* dengan tujuan menyiapkan mental untuk menjadi pemuda wirausaha, sementara menyiapkan pemuda untuk mulai berusaha dalam bentuk permodalan hampir tidak ada begitu juga dengan pasar. Bantuan permodalan yang selama ini ada pun hanya merupakan alat usaha dan tidak ada modal kerja untuk usaha awal dalam mendukung operasional.

Kepemudaan merupakan urusan wajib sesuai Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pemerintah daerah hendaknya menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dalam melakukan pembagian urusan kepemudaan ini pembagian kewenangan yang *concurrent* secara proporsional adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota diperlukan adanya ukuran eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi yang mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintah antar tingkat pemerintah. Eksternalitas memperhatikan kriteria pembagian urusan pemerintah dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan tertentu bagi masyarakat. Dan efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang diperoleh dalam penyelenggaraan suatu urusan.

Dengan prinsip-prinsip eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi seharusnya mampu dilakukan koordinasi lintas institusi atau lembaga dalam penyelenggaraan kewirausahaan pemuda. Pemerintah, Pemerintah Daerah memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan pelayanan pada pemuda melalui program pengembangan kewirausahaan pemuda yang bertujuan untuk pemuda menjadi mandiri dan berdaya saing yang berujung pada kesejahteraan, sehingga dibutuhkan komunikasi, koordinasi, untuk benar-benar mendukung program kewirausahaan pemuda. Ketika peraturan semau ada, tetapi moral birokrat tidak sampai pada tataran memberikan pelayanan yang baik maka segala aturan yang telah tersusun dengan baik tidak akan dapat terimplementasi sebagaimana seharusnya.

Selanjutnya konsistensi dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kewirausahaan pemuda melalui koordinasi yang dibangun dan dilakukan bersama-sama dengan lembaga atau instansi terkait, serta budaya lokal dalam memberikan kesempatan dan mendorong partisipasi pemuda menuju beberapa aspek penting dimana pemuda wirausaha sebagai pilar dalam pembangunan ekonomi yang mensejahterakan masyarakatnya. Melalui aspek tersebut akan tercipta pemuda yang berkarakter, berkapasitas, berdaya saing sehingga menjadi pemuda yang kreatif, inovatif dan mandiri yang menjadi target program kebijakan pemerintah.

Aspek kesejahteraan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dalam penyelenggaraan program kewirausahaan pemuda dapat

melakukan kemitraan bersama dengan swasta dan masyarakat. Kondisi warisan budaya dapat dikembangkan pariwisata sebagai gagasan dalam pengembangan pembangunan pedesaan. Sektor pariwisata akan sangat cepat dalam menggerakkan sektor ekonomi yang terkait, sehingga dapat merangsang tumbuhnya lapangan kerja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan penduduk. Aspek kesejahteraan melalui jalur pariwisata akan mampu mendobrak perekonomian dengan meningkat wisata andalan pada bidang :

1. Industri kerajinan batik di kawasan Giriloyo : Pembangunan Gazebo Batik untuk menampung para pengrajin batik yang diharapkan akan mempermudah pemasaran hasil kerajinan batik serta mempermudah pembinaan baik dari segi keterampilan dan pemasaran.
2. Industri kerajinan kulit : lebih menggiatkan kembali pemasahan kerajinan kulit yang sudah mendominasi baik di dalam maupun di luar negeri, hal ini dapat dilihat dengan adanya showroom disepanjang jalur Karangasem sampai di kawasan Pucung. dan disekitar jalur ini telah banyak *homestay*.
3. Kerajinan bambu: kerajinan ini telah tumbuh subur disekitar kawasan Pucung dan mendaapat perhatian dari LSM sampai terbentuk wadah pengrajin bambu yang memiliki ketrampilan lebih handal baik dari sisi keterampilan dan pemasaran.
4. Wisata air dan pasar burung: sedang dilakukan penataan yang akan menjadi basis kawasan wisata air dan burung di dusun Singosaren.
5. Wisata ceremonial : didaerah tempat peninggalan sejarah makam Sunan Cirebon dan makam Raja-raja mataram.

6. Wisata Gunung Bathok: Lokasi pegunungan perbatasan dusun Singosaren dan dusun Sindet.

Aspek sosial budaya, pemahaman masyarakat desa tentang kewirausahaan mulai berangsur berubah, yang tadinya bekerja sebagai pedagang atau *entrepeneur* sangat tidak lazim dalam budaya masyarakat Jawa berangsur mulai berubah, yaitu lebih mulia mampu menciptakan pekerjaan sendiri di rumah sendiri dari pada menganggur. Kegiatan kewirausahaan juga memberikan arah positif dalam mengembangkan kreatifitas para pemuda dan mengurangi tindakan tindakan berani yang mengarah pada kekerasan. Perubahan ini juga diikuti dengan mulainya berbaur budaya luar daerah masuk melalui kunjungan pada lokasi wisata atau desain /corak dari karya seni juga pola hidup. Di lingkungan Desa Wukirsari mulai dibangun *home stay* artinya siap menerima kedatangan para wisatawan baik dari dalam ataupun dari luar negeri yang mau tidak mau masyarakat yang tinggal di desa Wukirsari akan melakukan adaptasi sebagai tuan rumah yang ramah tanpa meninggalkan nilai-nilai utama dari yang sebelumnya dilakukan, namun pasti terjadi pembauran dan saling memberikan pengaruh perubahan. Pengaruh perubahan ini harus dipersiapkan dengan matang agar tidak terkesan menolak atau menerima mentah –mentah apa adanya, sehingga perlu dilakukan penyaringan. Dan hal ini hanya dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar sebagai hukum setempat dalam berkehidupan bermasyarakat. Dari aspek sosial budaya ini hendaknya dapat terbangun budaya yang dinamis dan berkembang dengan saling memberikan penghargaan. Langkah ini dapat dilakukan dengan melakukan pola interaksi antara penduduk asli dengan pendatang melalui komunikasi, kerjasama dan saling menghormati.

Dalam pandangan Suryono (2012), kearifan Lokal merupakan *culture identity* yaitu identitas atau keperibadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuannya sendiri. Dalam hal ini budaya lokal dianggap sebagai potensial local genius karena teruji kemampuannya untuk bertahan dengan nilai-nilai kedaerahannya (tradisi, hukum, adat dan budayanya) dengan ciri – ciri antara lain : (a). Mampu bertahan terhadap budaya luar, (b). Memiliki kemampuan untuk mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, (c). Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar kedalam budaya asli, (d). Mempunyai kemampuan mengendalikan dan (e). Mampu memberikan arah pada perkembangan budaya. Lebih lanjut disampaikan Suryono bahwa kearifan lokal memiliki makna kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg pada suatu daerah, yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada, kearifan lokal terbentuk dari budaya unggul masyarakat setempat maupun karena kondisi geografis dalam arti luas, selanjutnya kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun dianggap lokal namun terkandung nilai-nilai yang sanat universal.

Aspek kenyamanan, pemuda wirausaha diharapkan mampu menciptakan keyamanan dari seluruh aktifitasnya baik bagi diri sendiri ataupun lingkungan. Kenyamanan ini dapat terukur jika pemuda memiliki penghasilan dan kehidupan yang mapan. Kenyamanan yang dilakukan dengan kreatifitas dan inovasi akan memberikan dorongan melakukan segal sesuatunya dengan senang untuk hal-hal yang positif. Bagi pemerintah daerah sendiri dengan mapannya pemuda akan lebih leluasa mengajak pemuda dalam membangun daerahnya tanpa merasa

terbebani karena harus mengurus pengangguran atau pemuda yang liar dengan kekerasan. Kenyamanan juga akan tercipta karena potensi daerah dapat mengundang pihak luar untuk dapat menikmati potensi daerah melalui wisata yang ada. Dalam konteks membangun komunitas yang nyaman maka pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan sebagai kunci keberhasilan pembangunan masyarakat berkelanjutan. Keterpaduan sosial sebagai jalan menuju keharmonisan komunitas sangat tergantung pada kebahagiaan pemuda dalam perannya dalam pembangunan. Keberhasilan dalam aspek kenyamanan ini tergantung pada keharmonisan pemuda dalam keluarga, keharmonisan komunitas dan keseimbangan sosial. Kebersamaan dalam komunitas yang nyaman adalah mereka yang rata-rata berusia produktif, yang memiliki pendapatan yang masih akan meningkat.

Dalam program membangun kewirausahaan pemuda, apabila Pemerintah Daerah dan pemuda dapat bekerjasama dengan baik apabila fungsi pembinaan dan pengawasan berjalan dengan baik. Dalam hal pengawasan masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan birokrat lainnya demi tercipta kinerja yang efektif dan efisien. Stigma negative tentang pemuda yang lebih bersifat hedonisme dan berfoya – foya serta malas, ketidak perdulian sosial, erosi ikatan kekeluargaan / kekerabatan, dan meluasnya deradikalisasi moral dalam berkehidupan dilingkungan pemuda hal ini karena adanya pemilihan kehidupan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi secara berlebihan. Sebagai akibatnya masyarakat atau pemuda menggantungkan dirinya pada birokrasi – birokrasi yang sentralistik yang memiliki daya absorpsi sumberdaya sangat besar, namun kemampuan dan kepekaannya sangat rendah dalam

menanggapi kebutuhan lokal untuk memecahkan masalah mereka (Suryono, 2012).

Latif (2016), Krisis multidimensional yang kita hadapi sekarang ini makin pelik persoalannya manakala arus globalisasi kontemporer dengan segala konsekuensinya membawa perubahan mendasar dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan berbagai penemuan mutakhir dalam bidang komunikasi dan informatika, dunia mengalami arus globalisasi yang makin luas cakupannya, dalam penetrasinya, dan instan kecepatannya. Yang dimaksud dengan globalisasi dini, seperti kata Giddens (dalam Latif, 2016), "adalah intensifikasi relasi-relasi sosial dunia yang menghubungkan lokalitas yang berjauhan sedemikian rupa sehingga peristiwa-peristiwa lokal dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi jauh di seberang dan begitupun sebaliknya" (*Globalization is the intensification of world-wide social relations Which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa*).

Lebih lanjut disampaikan Latif (2016), revolusi di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi membawa 'distansiasi ruang-waktu' (*time-space distanciation*) sekaligus 'pemadatan ruang-waktu' (*time-space compression*) yang merobohkan batas-batas ruang dan waktu konvensional. Dengan fenomena ini, globalisasi merestrukturisasi cara hidup umat manusia secara mendalam, nyaris pada setiap aspek kehidupan. Dampak yang ditimbulkannya bersifat mendua, yang dikenal dengan istilah '*global paradox*': memberi peluang dan hambatan, positif dan negatif. Pada ranah negara-bangsa (*nation-state*) di satu sisi, globalisasi menarik (*pull away*) sebagian dari kedaulatan negara-bangsa dan komunitas lokal, tunduk pada arus *global interdependence*, yang membuat

negara-bangsa dirasa terlalu kecil untuk bisa mengatasi (secara sendirian) tantangan-tantangan global. Dalam situasi saling ketergantungan, tidak ada negara yang bisa mengisolasi dirinya. Kelemahan suatu elemen negara terhadap penetrasi kekuatan global ini bisa melumpuhkan dirinya. Disisi lain, globalisasi juga menekan (*push down*) negara-bangsa, yang mendorong ledakan ke arah desentralisasi dan otonomisasi. Negara-bangsa dirasa terlalu besar untuk menyelesaikan renik-renik masalah di tingkat lokal, yang menyulut merebaknya *ethno-nasionalisme* dan tuntutan otonomi lokal beriringan dengan revivalisme identitas-identitas kultural.

Bagi Indonesia sendiri, tekanan globalisasi yang bertaut dengan demokratisasi ini mendorong otonomisasi daerah dan pemekaran wilayah disertai kecenderungan *revivalisme etno-religius*. Pada ranah ekonomi, di satu sisi, pergerakan global dari ide-ide, orang, teknologi dan barang memberi peluang baru dalam perekonomian, terutama bagi negara-bangsa dan pelaku ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif. globalisasi berpengaruh besar bagi perdagangan dunia saat ini jauh lebih luas cakupannya dan instan kecepatannya di banding periode mana pun dalam sejarah umat manusia. Di sini lain, dengan posisi awal dan konsekuensinya yang tidak sama, globalisasi membelah dunia ke dalam pihak "yang menang" (*winners*) dan "yang kalah" (*losers*), serta menumbuhkan ketidaksetaraan baik secara internasional maupun dalam negara-bangsa (Hobsbawm, 2007: 3). Selain itu, kecenderungan negara-negara terbelakang untuk terjerat utang luar negeri, korupsi dan lemah dalam kontrol regulasi memudahkan penetrasi korporasi-korporasi internasional (dengan jejak rekam yang buruk dalam soal lingkungan) untuk merelokasi usahanya ke negara-negara tersebut. Akibatnya, globalisasi bukan saja

menimbulkan "global village" (dusun dunia), tetapi juga "global pillage" (perampasan dunia).

Masyarakat yang terus menerus dihidupi dari proses imajiner dalam menggapai kemajuan yang bersifat eksogen, masyarakat yang meracuni dirinya sendiri ketika menghirup udara yang berasal dari lingkungannya sendiri serta masyarakat yang kanibal sejarah peradabannya sendiri (Permanadeli, 2016), harus dibuktikan menjadi satu kemajuan yang positif dalam membangun kewirausahaan pemuda dengan dorongan Pemerintah, dan masyarakat atau swasta untuk kemajuan pemuda yang lebih produktif dan memiliki disiplin sebagai taat pada kaidah, ketentuan dan aturan sehingga akan terlaksananya ketertiban dalam membangun kewirausahaan pemuda dengan mengoptimalkan pencapaian pada tujuan.

Dalam pembangunan berwawasan kearifan lokal ini konsep yang dirasa tepat seperti yang disampaikan Martono (2014) adalah penggabungan strategi pembangunan yang berselera global dan berselera lokal yang disebut sebagai "Glokalisasi" yang menunjuk pada proses heterogenisasi, sinonim dari Glokalisasi adalah kreolisasi yang merupakan ide dalam kreolisasi bahasa yang melibatkan kombinasi sebuah bahasa yang sebelumnya tidak dipahami satu dengan yang lain, dan proses ini menjadi kita pahami ketika produk lokal diadopsi atau dinikmati masyarakat luar namun dalam bentuk yang lain. Bentuk lain ini menunjukkan adanya heterogenisasi produk budaya lokal yang dikonsumsi dunia secara global ditempat lain. Gejala ini tentu saja akan membawa implikasi paling besar akibat dari globalisasi, yaitu perusahaan asing akan digiring untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi kemungkinan-kemungkinan untuk memperoleh keuntungan pada wilayah-wilayah terpencil dan relatif kurang

berkembang. Lebih lanjut disampaikan Suryana (2014) Glokalisasi adalah untuk menggambarkan nuansa *post modernism* yang menggabungkan pembangunan yang berselera global dan lokal dengan sifatnya yang multiverse, relatif, temporer, kenyal, komunal, informatif dan destruktif. Dengan kata lain pembangunan berwawasan kearifan lokal mengandung makna bagaimana cara mengemas atau merumuskan kebijakan pembangunan lokal menjadi bernilai global dengan melibatkan masyarakat setempat. Fenomena perubahan budaya ini tercermin dalam masyarakat dewasa ini sebagaimana disampaikan oleh Siswomihardjo (editor Herawaty, 2012), kita sedang mengalami transisi simultan yaitu : (1). Masa transisinya masyarakat dengan budaya agraris-tradisional menuju masyarakat dengan budaya industri-modern, (2). Masa transisi budaya etnis-kedaerahan menuju budaya nasional kebangsaan dan (3). Masa transisi budaya nasional kebangsaan menuju budaya global-mondial.

Dalam faktor- faktor yang mendukung dan menghambat membangun kewirausahaan pemuda di desa Wukirsari, terlihat jelas bahwa dukungan dari pribadi pemuda dan masyarakat sekitar serta lembaga perguruan tinggi sangat lah baik ada kebersamaan, gotong royong, spiritualitas sebagai budaya lokal yang telah menjadi perilaku masyarakat Wukirsari yang sangat mendukung program membangun kewirausahaan ini. Persoalan yang masih menghambat adalah terletak pada kelembagaan atau institusi sebagai lembaga independen pelaksana program kewirausahaan, sehingga ini menghambat lajunya perkembangan pemuda wirausaha yaitu terletak pada aspek permodalan, akses pasar dan program pendampingan. Untuk itu proposisi minor adalah sebagai berikut :

Proposisi minor 2

Keberadaan lembaga independen yang mampu mewadahi dan mengatur hubungan antar institusi pemerintah daerah yang efektif dan efisien maka akan memperkuat dalam membangun kewirausahaan pemuda melalui nilai-nilai kearifan lokal.

Secara keseluruhan dengan mencermati berbagai analisis pada bagian sebelumnya dan juga mencermati proposisi minor 1 sampai proposisi minor 2, sangatlah jelas bahwa, meskipun Desa Wukirsari telah ditetapkan sebagai desa wisata budaya, namun tidak diikuti dengan kebijakan yang mendukung terhadap kewirausahaan. Kewirausahaan mestinya menjadi primadona atau perhatian utama karena dengan tumbuhnya wirausaha yang dikelola dan didukung dengan kebijakan kewirausahaan yang baik, tentu saja akan mengarahkan pemuda lebih jelas sebagai pelaksana pemula dalam dunia usaha ini. Selain mempermuda pemuda tentu saja bagi pemerintah dan Swasta yang dalam mendukung seluruh upaya baik dalam membangun kewirausahaan pemuda dalam menjalankan kemitraan yang kolaboratif akan lebih mudah karena jelas tujuan bersama akan terumuskan dengan baik. Oleh karena itu dalam proposisi Mayor hal-hal tersebut sangat diharapkan untuk menjadi penyelesaian. Berikut ini adalah proposisi Mayor:

Proposisi mayor :

Kuatnya sinergitas antara Pemerintah, masyarakat dan swasta serta dukungan nilai-nilai kearifan lokal dalam sistim nilai, institusi dan artefak, dan keberadaan lembaga independen yang mampu mewadahi dan mengatur hubungan antar institusi pemerintah daerah yang efektif dan efisien maka akan memperkuat pelaksanaan membangun kewirausahaan kewirausahaan pemuda.



Tabel 6.3. Daftar Matrik Fokus Penelitian, Hasil Penelitian, Pembahasan / Pemaknaan, Proposisi Minor dan Mayor

Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Pembahasan / Pemaknaan	Proposisi Minor	Proposisi Mayor
1	2	3	4	5
1. Pelaksanaan membangun kewirausahaan pemuda Indonesia melalui nilai-nilai budaya kearifan lokal yang meliputi: a. Program b. Mekanisme c. Aktor d. Nilai-nilai kearifan lokal.	1. Pelaksanaan membangun kewirausahaan pemuda 1.1. Program a. Belum adanya kebijakan tentang kewirausahaan yang menjabarkan lebih teknis untuk dapat dilaksanakan. b. Tidak adanya lembaga bersama yang dibentuk untuk menjalankan program yang sama dengan lintas lembaga. c. Materi pelatihan hendaknya sesuai yang dibutuhkan	1. Temuan di lapangan aktifitas para implementor agaknya tidak terjadi saling senergi, komunikasi yang terjadi sekedar komunikasi bantuan tenaga pelatih dan bukan program utuh sampai pada anggaran bersama untuk program yang sama. 2. Persoalannya dalam mekanisme menjalankan program membangun kewirausahaan pemuda ini adalah terletak pada, (1) sumber daya pemuda masih sangat perlu ditingkatkan baik dari	Proposisi minor 1. Kuatnya sinergi antara Pemerintah, masyarakat dan swasta serta dukungan nilai-nilai kearifan lokal dalam sistim nilai, institusi dan artefak, dan keberadaan lembaga independen yang mampu memwadahi dan mengatur hubungan antar institusi pemerintah daerah yang efektif dan efisien maka akan memperkuat pelaksanaan membangun kewirausahaan pemuda.	Kuatnya sinergitas antara Pemerintah, masyarakat dan swasta serta dukungan nilai-nilai kearifan lokal dalam sistim nilai, institusi dan artefak, dan keberadaan lembaga independen yang mampu memwadahi dan mengatur hubungan antar institusi pemerintah daerah yang efektif dan efisien maka akan memperkuat pelaksanaan membangun kewirausahaan pemuda.

Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Pembahasan / Pemaknaan	Proposisi Minor	Proposisi Mayor
	sehingga dapat mendorong perkembangan kewirausahaan pemuda. d. Perlunya peningkatan anggaran untuk pelatihan, pembinaan dan pengembangan kewirausahaan pemuda e. Sumber daya pemuda perlu ditingkatkan sesuai dengan penjejaran dengan kemampuan yang telah dimiliki baik dari sisi pendidikan ataupun keterampilan. f. Dibutuhkan jaringan pada akses permodalan dan pemasaran bagi pemuda wirausaha.	sisi pendidikan dan ketrampilannya, (2) persoalan yang kedua adalah pada tingkat pembinaan yang tidak merata atau tidak secara tepat sampai pada kelompok sasaran (3) Dan permasalahan ke tiga adalah pengembangan pemasaran dan permodalan 3. Kebijakan kewirausahaan pemuda merupakan kebijakan berskala nasional dengan kejelasan arah. Secara konstitusi kebijakan pengembangan kewirausahaan memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga wajib dilaksanakan oleh pemerintah, melalui Pemerintah Pusat,	Proposisi minor 2 Keberadaan lembaga independen yang mampu memwadahi dan mengatur hubungan antar institusi pemerintah daerah yang efektif dan efisien maka akan memperkuat dalam membangun kewirausahaan pemuda melalui nilai-nilai kearifan lokal.	

Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Pembahasan / Pemaknaan	Proposisi Minor	Proposisi Mayor
		Pemerintah Provinsi		
	1.2. Mekanisme Mekanisme partisipatif yang telah tumbuh di desa Wukirsari dengan harapan menjadi desa Swasembada, semestinya akan menjadi lebih produktif manakala program membangun kewirausahaan pemuda yang telah dicanangkan pemerintah ini dapat berjalan dengan baik melalui integrasi program yang didukung oleh pemerintah. Sehingga pusat-pusat kewirausahaan pemuda di daerah dan desa dapat berkembang sangat pesat yang tentu saja ini akan berdampak	sampai tingkat Kabupaten/Kota dan Desa serta termasuk amanat untuk menjalankan kemitraan dan sinergi dengan pihak lain dalam penyelenggaraan pelayanan pemuda. 4. Kearifan lokal melalui bahasa yang dilambangkan melalui simbol mengajarkan pemuda untuk lebih menghormati yang lebih tua dan bersikap baik, ditambah budaya dan agama yang saling menyatu telah memberikan semangat dalam etos kerja bahwa tidak akan ada perubahan apapun kalau tidak berusaha. Dan semangat ini ditambah dengan		

Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Pembahasan / Pemaknaan	Proposisi Minor	Proposisi Mayor
	sangat baik bagi pembangunan perekonomian nasional	keyakinan adanya berkah dalem, sehingga		
	dan pemuda sendiri dalam perannya sebagai subyek pembangunan 1.3. Aktor Dari aktor yang berkaitan dengan program kewirausahaan selain pemudanya sendiri yang harus memiliki komitmen yang konsisten, diperlukan sinergi antar lembaga pemerintah sehingga tidak tumpang tindih dan terjadi pemborosan anggaran. Dan dibutuhkan satu lembaga yang jelas yang mengatur kegiatan pemuda dari setiap departemen	kesejahteraan akan senantiasa ada. 5. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah menjadikan desa Wukirsari sebagai lokasi jalur wisata sehingga secara otomatis ini memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di desa Wukirsari. Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakatnya khususnya pemuda sebagai pilar dalam pembangunan ekonomi. 6. Belum adanya		

Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Pembahasan / Pemaknaan	Proposisi Minor	Proposisi Mayor
	dalam satu lembaga bersama yang bersifat independen.	kebijakan khusus tentang kewirausahaan dan lembaga independen yang dapat menjalankan		
	1.4 Nilai Budaya Nilai budaya lokal termasuk agama didalamnya telah menjadi potensi yang membuat harmonisasi kehidupan bersama dengan alam, yang menjadi semangat dan motivasi sebagai budaya unggul dalam mendorong tingkat kesejahteraan. Nilai kearifan lokal inilah yang menjadi benteng pertahanan bagi pemuda Wukirsari dengan memiliki karakter dan jati dirinya	kewirausahaan pemuda 7. Model eksisting masih terdapat hal-hal yang menghambat sehingga kewirausahaan pemuda tidak dapat berjalan dengan baik. Isu hambatan utama terletak pada perangkat hukum ditingkat daerah dan aktor yang tidak dapat mewujudkan sinergitas. Semendara faktor yang mendukung adalah semangat pemuda dan potensi kearifan lokal.		

Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Pembahasan / Pemaknaan	Proposisi Minor	Proposisi Mayor
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program membangun kewirausahaan pemuda Indonesia melalui nilai-nilai	2.1. Faktor yang mendukung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul kewirausahaan pemuda tumbuh dengan sangat baik karena ada kesadaran			
3. Kearifan lokal, yang meliputi: a. Faktor internal di lingkungan Pemuda b. Faktor eksternal: ekonomi, dan sosial budaya	dari pemuda itu sendiri yang didukung oleh situasi lingkungan yang ada yaitu bahwa Kabupaten Bantul memiliki kekayaan alam yang menjadi obyek wisata dan wisata budaya yang sangat banyak, termasuk pada situs penelitian yang telah dijadikan sebagai jalur wisata. Kewirausahaan pemuda tumbuh karena adanya kesadaran dan			

Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Pembahasan / Pemaknaan	Proposisi Minor	Proposisi Mayor
	kebutuhan dari pemudanya sendiri dalam meningkatkan taraf hidup serta adanya rasa percaya serta keyakinan akan warisan budaya yang memiliki daya magnet bagi wisatawan baik dari dalam maupun dari luar negeri sehingga membuka peluang untuk			
	melakukan kreatifitas dan inovasi. Kewirausahaan pemuda juga memberikan kesadaran pada pemuda untuk berbuat dan tidak menganggur.			
	2.2. Faktor yang menghambat a. Belum adanya kebijakan yang secara khusus mengatur tentang			

Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Pembahasan / Pemaknaan	Proposisi Minor	Proposisi Mayor
	kewirausahaan pemuda b. Sinergi program kewirausahaan pemuda antara Pusat dan Daerah c. Perbedaan aktor pelaksana kegiatan kewirausahaan pemuda di tingkat Pusat dan daerah d. Belum adanya Lembaga Independen yang mengatur kegiatan			
	secara bersama dari seluruh instansi yang memiliki program kewirausahaan pemuda e. Kurang terbukanya akses permodalan dan akses pasar bagi wirausaha muda			

Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Pembahasan / Pemaknaan	Proposisi Minor	Proposisi Mayor
3. Model membangun kewirausahaan pemuda di desa Wukirsari	Model Eksisting a. Pada model eksisting terlihat bahwa dari UU No. 40/2009 tentang Kepemudaan. Belum terjabarkan secara lebih detail di daerah dengan tidak adanya kebijakan tentang kewirausahaan pemuda secara khusus. b. Belum terlihat adanya sistem adminstrasi pemerintahan yang baik dalam mewujudkan tata kelola kepemudaan	Model Rekomendasi Merekomendasikan model dari kerangka pemikiran dan dikembangkan sesuai yang dibutuhkan di lapangan yaitu : Adanya lembaga independen dan Kebijakan bela beli dan kesadaran bela beli dari produk yang diproduksi sendiri.		
	c. Hasil dari kewirausahaan yang berjalan belum mampu menumbuhkan pemuda yang mandiri			

6.3. Model yang direkomendasikan.

Dalam bab pendahuluan telah disampaikan bahwa Globalisasi adalah sebuah perubahan dunia yang tidak dapat dihindari. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Perda tahun 2011 berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan warganya melalui pengembangan potensi kearifan lokal dan salah satunya dengan menetapkan Desa Wisata Budaya untuk desa Wukirsari. Penetapan ini sejalan dengan program Pemerintah Pusat melalui Undang-undang Kepemudaan. Dalam undang-undang tersebut pengembangan kewirausahaan menjadi program penting dalam menumbuhkan semangat berwirausaha bagi pemuda. Semangat ini harus dibangun mengingat akan terjadinya bonus demografi dimana usia produktif penduduk Indonesia akan lebih besar. Kewirausahaan akan mengatasi pengangguran dan faktor negatif sosial lainnya dari penduduk usia produktif. Diharapkan dengan kebijakan pusat dan daerah ini akan mampu mendorong pemuda di daerah menjadi pemuda yang mandiri. Melalui penyadaran aspek ekonomi, pemberdayaan, dan pengembangan kewirausahaan sesuai minat, bakat dan potensi pemuda.

Selanjutnya peneliti menduga penting mengembangkan model yang selama ini sudah dijalankan oleh Kementerian pemuda dan olah raga sebagai model konsep. Dengan mengkaji dari penelitian terdahulu serta disesuaikan dengan nilai lebih dari bangsa Indonesia yang multi etnis sebagai negara yang Berbhinneka Tunggal Eka yang memiliki keragaman budaya yang adi luhung dari masing-masing daerah atau suku bangsa. Pemikiran ini juga diperkuat dengan sistem pemerintahan Indonesia saat ini adalah Desentralisasi yang memiliki

tujuan dalam pengembangan potensi lokal untuk memakmurkan daerah atau wilayahnya sendiri dengan pengelolaan sistem pemerintahan desentralisasi.

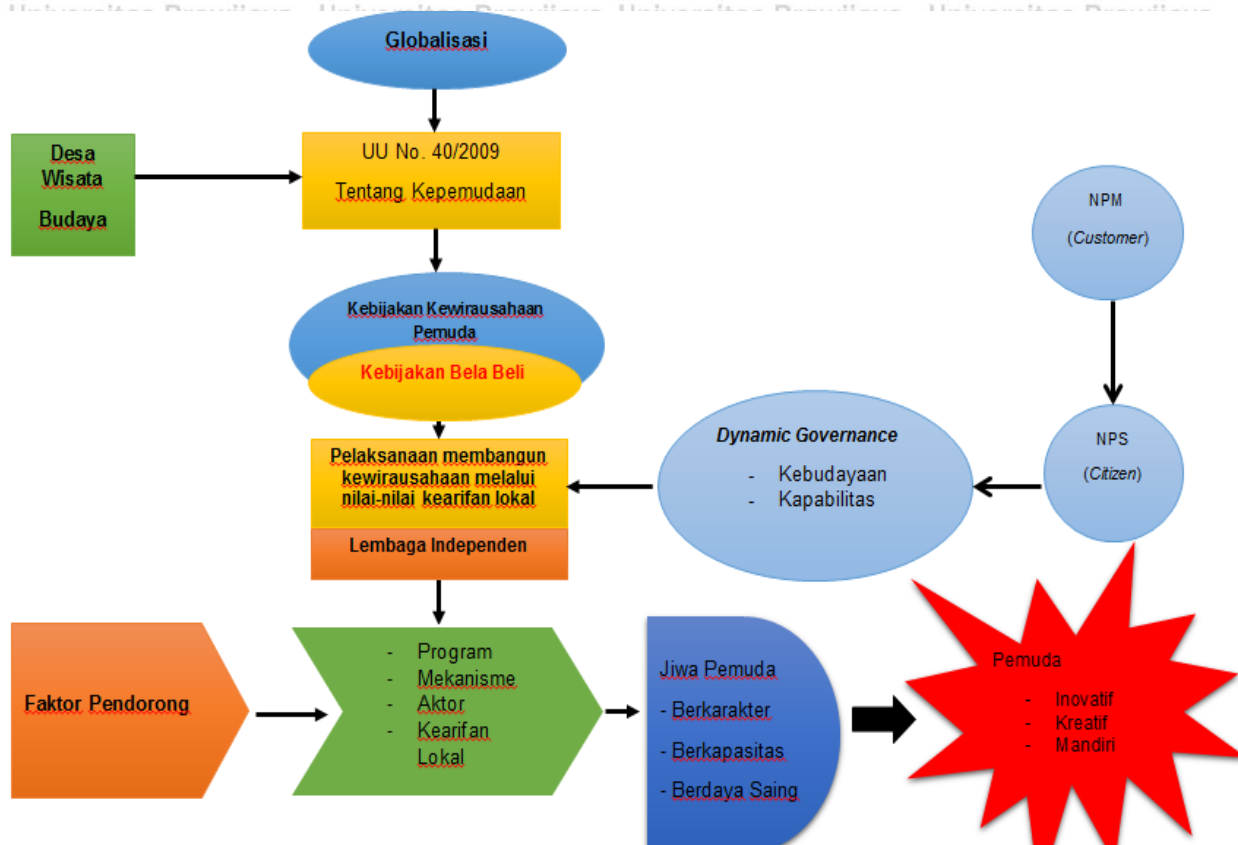
Penguatan pemikiran tersebut dituangkan dalam kerangka pemikiran yang dibuat sebagai pengembangan model dari konsep model Kementerian Pemuda untuk pengembangan Kewirausahaan Pemuda. Sehingga peneliti merasa penting memasukkan aktor dalam penelitian yang bersifat kolaboratif dan kerjasama sesuai tugas dan fungsinya yaitu Pemerintah (*State*), Masyarakat (*Civil Society*) dan Swasta (*Private*) Pada pemerintah satu kondisi yang dilibatkan dalam penelitian selain pemerintah daerah dan pemerintah desa adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia) hal ini menjadi sebuah kebutuhan yang dirasakan oleh peneliti tentang kesadaran belanegara dalam pembentukan karakter pemuda. Untuk menjadi pemuda yang mandiri dibutuhkan karakter yang kuat. Dalam belanegara pembentukan karakter yang kuat ini dapat ditumbuhkan melalui kecintaan pada tanah airnya. Dalam pengertian bela negara ini juga perlu dukungan dari pemerintah dalam mengcanangkan daya beli dari hasil produksi para pemuda wirausaha melalui reformasi perundangan, dimaka ada kebijakan kewajiban membeli produk sendiri. Dengan program bela negara dalam hal produksi melalui kegiatan pemasaran Bela Beli produksi sendiri tentu saja akan meningkatkan daya beli dan pendapatan daerah itu sendiri. Bela beli ini juga dapat mendorong kebutuhan akan produksi semakin meningkat. Sehingga pemuda wirausaha yang mandiri tidak tergantung atau menjadi beban keluarga dan masyarakat bahkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan buat dirinya sesungguhnya telah menjalankan belanegara. Kearifan lokal menjadi nilai yang tumbuh dari dalam diri sejak dilahirkan dan berada dalam lingkungannya.

Dengan kearifan lokal yang tertanam baik akan membentuk moral dan karakter pemuda berkemampuan dalam daya saing globalisasi.

Dari model eksisting masih terdapat hal –hal yang menghambat sehingga jalannya kegiatan kewirausahaan pemuda tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, hambatan itu justru terletak pada perangkat hukum ditingkat daerah namun dalam penelitian juga mendapatkan kenyataan yang baik antara lain bahwa budaya kearifan lokal dalam satu sisi adalah budaya yang telah melekat dalam diri pemuda, namun dalam perkembangannya disadari bahwa budaya itu bersifat dinamis hal ini adalah adanya kesadaran dalam menghadapi globalisasi yang harus diterima dengan lebih cerdas . Sehingga budaya lokal tadi mendasari jiwa pemuda dalam mencintai daerahnya dengan mempertahankan apa yang sudah ada dan mengembangkannya sebagai transformasi perkembangan peradaban, disinilah nilai kesadaran pemuda akan arti pentingnya mempertahankan daerahnya untuk menjadi pemuda mandiri yang mencintai kekayaan budaya dan membela melalui kegiatan yang membuat dirinya mandiri dan selanjutnya tercipta satu ketahanan dalam bidang ekonomi.

Dan berikut adalah model yang direkomendasikan oleh peneliti dengan beranggapan seluruh hambatan yang ada telah diatas yaitu pada regulasi perundang undangan, terbitnya peraturan daerah dan adanya reformasi kelembagaan pada pemerintah daerah , serta terjadinya bukan saja partisipasi masyarakat dan pemuda yang sudah baik tetapi juga sinergi antar lembaga dalam pemerintahan daerah yang menyelenggarakan pelaksanaan program membangun kewirausahaan pemuda sehingga tercipta komitmen bersama melalui komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan program. Selanjutnya hambatan- hambatan dalam budaya lokal tentang persepsi wirausaha adalah

satu kegiatan yang negatif telah berubah menjadi satu kebutuhan bersama di Desa Wukirsari, perempuan juga telah dilibatkan dalam kegiatan ini untuk meningkatkan kesejahteraan dalam berkehidupan. Globalisasi harus disikapi dengan cerdas untuk dapat ikut bersama-sama berada dalam kemajuan peradaban dunia. Sedangkan hal-hal yang sudah mendukung kegiatan kewirausahaan pemuda hendaknya terus dikembangkan untuk menjadi lebih baik lagi. Jika itu semua sudah terbangun dengan baik masukan –masukan dalam penelitian tentang budaya kearifan lokal dapat dikembangkan menjadi budaya unggul yang mendunia sebagai jawaban dari globalisasi yaitu dengan menerima glokalisasi sebagai budaya yang menganut heterogenitas yang tentu saja harus dicermati melalui kebijakan yang mendukung perkembangan masyarakat. Bela negara sebagai bagian penting dalam kewirausahaan adalah melalui kedisiplinan dan semangat pantang menyerah serta komitmen bersama dalam membentuk satu kesadaran kolektif bahwa pemuda memiliki kemampuan dalam perannya membangun ketahanan perekonomian, dan akan menjadi sangat baik jika terjadi reformasi regulasi dalam hal pemasaran yaitu BELA BELI artinya produksi pemuda wirausaha dibeli sendiri oleh pemerintah daerah dan juga oleh pasar bebas yang membutuhkan. Tentu saja pembinaan dalam hal kualitas dan kemampuan produksi serta majemen produksi terus dilakukan pembinaan yang berkelanjutan. Dan berikut adalah model yang direkomendasikan



Gambar 6.6.
Model Rekomendasi Membangun Kewirausahaan Pemuda Indonesia
(Herawati, 2017)

BAB VII

KESIMPULAN

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Membangun Kewirausahaan Pemuda Indonesia melalui Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Desa Wukirsari, Kabupaten Bantul sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan meliputi:

1. Dalam Pelaksanaan membangun kewirausahaan pemuda Indonesia melalui nilai-nilai kearifan lokal, meliputi:

1.1. Untuk dapat melaksanakan program membangun kewirausahaan di Desa Wukirsari dibutuhkan kebijakan unggul sesuai dengan kearifan lokal yang ada dan lembaga independen sebagai institusi yang menjalankan program kewirausahaan, harapannya terjadi sinergi antara aktor pelaksana dan penerima program kewirausahaan pemuda.

1.2. Mekanisme membangun kewirausahaan pemuda di Desa Wukirsari melalui mekanisme partipatif pemuda, Partisipatif ini perlu dikembangkan dengan meningkatkan sumberdaya pemuda melalui pendidikan dan pelatihan, adanya pembinaan yang merata pada pemuda, pada bidang pemasaran dan permodalan,

1.3. Aktor dalam membangun kewirausahaan pemuda di desa Wukirsari perlu adanya sinergi dan membentuk kolaborasi yaitu antara pemerintah, swasta dan pemuda

- 1.4. Sebagai orang Jawa yang menghormati budaya melalui simbol dalam bahasa, serta agama telah menjadi motivasi dan identitas diri yang kuat sebagai pemuda desa yang berkarakter dalam mengembangkan kewirausahaan dengan nilai-nilai kearifan lokal

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat

- 2.1. Faktor-faktor yang mendukung, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul kewirausahaan pemuda tumbuh dengan sangat baik karena ada kesadaran dari pemuda itu sendiri yang didukung oleh situasi dan kondisi yang sangat kondusif.

2.2. Faktor yang menghambat

1. Belum adanya kebijakan yang secara khusus mengatur kewirausahaan pemuda.
2. Belum adanya sinergi program kewirausahaan pemuda antara Pusat dan Daerah serta lintas dinas dari departemen lainnya.
3. Masih minimnya pemahaman tentang permodalan dan akses pasar bagi wirausaha muda

3. Merekomendasikan model kewirausahaan pemuda Indonesia melalui nilai-nilai kearifan lokal:

- a. Pentingnya membangun sinergi antar aktor melalui kolaborasi
- b. Pentingnya mengkonstruksikan konsep *Dynamic Governance* dalam kewirausahaan pemuda sesuai nilai-nilai kearifan lokal
- c. Kebijakan Bela-Beli sebagai kebijakan unggul yang ditetapkan oleh daerah sesuai budaya yang berkembang.

7.2. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka saran yang perlu disampaikan mencakup saran akademis/teoritis dan saran praktis, masing-masing adalah :

7.2.1. Saran akademis / teoritis .

Kearifan lokal dalam *Dynamic Governance* menjadi fondasi yang kuat dalam menghadapi perubahan yang tidak tetap. Kearifan lokal merupakan pengalaman hidup yang menginternalisasi pemuda dalam membangun kewirausahaan yang tergalil dari daerah. Sehingga kearifan lokal perlu digali lebih dalam lagi dalam rangka penguatan karakter pemuda wirausaha.

7.2.2 Saran Praktis.

1. Pemerintah daerah mesti mampu membuat kebijakan yang dibutuhkan dalam membangun kewirausahaan pemuda.
2. Adanya pembentukan lembaga independen sebagai budaya kolaboratif, untuk dapat melaksanakan membangun kewirausahaan pemuda di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

AIPI, (editor, Heraty Tuty), 2012, *Budaya Bagi Bangsa*, Komisi Kebudayaan, Jakarta.

Abbeduto, Leonard. 2004. *Taking Sides: Clashing Views on Controversial Issues in Educational Psychology Third Edition*. McGraw-Hill, Dushkin.

Abdulah, S, 2002, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Swara Pembaharuan, Yogyakarta

Abdullah, Taufik, 1974, *Pemuda dan Perubahan Sosial*, LP3ES, Jakarta

....., 2004, Negara, Bangsa, dan Masyarakat dalam Pendekatan Kebudayaan, Dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya, Nomer 1, Vol Vi

Adedokun, O.M. C.W, Adeyamo, and E.O. Olorunsula. 2010. The Impact of Communication on Community Development. J Communication, 1(2): 101-105.

Ahmadi, A,. 1984, *Sejarah Agama*, CV Ramadhani, Solo

A. Agoes, Irid F. 2016, *Nilai Keindonesiaan, Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

Alma, Buchari, 2002, *Kewirausahaan*, Alvebata, Bandung

Abdullah, Yasin, 1974, *Pemuda dan Perubahan Sosial*, LP3ES, Jakarta

Ahmadi, Ruslam, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta

Alatas, S.H, 1988, *Mitos Pribumi Malas, Citra Orang Jawa, Melayu Dan Filipina Dalam Kapitalisme Kolonial*, LP3ES, Jakarta

Alfian (ed), 1985, *Perspektif Masyarakat tentang Kebudayaan*, Grammedia, Jakarta

Alisyahbana, Sutan Takdir, 1988, *Kebudayaan Sebagai Perjuangan*, PT. Dian Rakyat, Jakarta.

Alwasilah, A. Chaedar, 2003, *Pokoknya Kualitatif, Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, PT. Dunia Pustaka, Jakarta.

Ancok, Djamaludin, 2004, *Psikologi Terapan*, Penerbit Darussalam, Yogyakarta

Anderson, B, 1972, *Java in a Time Of Revolution: Occupation and Resistance*, Cornell University Press, Ithaca.

Ansell, N, 2005, *Children, Youth and Development*, Routttledge, London and New York.

Antariksa, A Yani, 2016, *Nilai Keindonesiaan Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Bahar, Saafrudin, 2009, *Membangun Indonesia*, Verbum Publishing, Jakarta

Bappenas, 2005, *Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Public Governence in Brief)* Jakarta

.....2005, *Indikator Good Public Governance*, Jakarta

Barendregt, B, 2006: "Cyber-Nasyid, *Transnational Soundscapes in Muslim Southeast Asia*", dalam *Media@asia: Communication, Culture, Context*, ed. T. Holden & T Scrase, Routledge, London,

Barker, C. 2008. *Culture Studies: Theory And Practise*, Sage Publication, London

Basri, Faisal, 2015, *Nilai Keindonesiaan, Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

Boon Siong Neo, Geraldine Chen, 2007. *Dynamic Governance, Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore*. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd

Bosma, Levie, 2009, *Excecutive Report Global Entrepreneurship Monitoring, Universidad del Desarrollo*.

Budiman,A. 2000, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta

Budiman, Arif, 1996, *Litbang Kompas dan Pusat Informasi Kompas*, Jakarta.

Busch T, 2002. *Creating a Local Youth Council. Di dalam Golombek S, What Work in Youth Participation : Case Studies From Around the World. Colombia : International Youth Foundation*

Campbell ND, Rogers TM, 2007. *Economic Freedom and Net Business Formation*. CATO Jurnal Vol. 27 No.1

Ciputra, 2009, *Entrepreneurship Mengubah Masa Depan Bangsa Dan Masa Depan Anda*, Gramedia, Jakarta

Chalid, Pheni. 2005. *Otonomi Daerah Masalah, Pemberdayaan dan Konflik*. Penebar Swadaya. Cetakan pertama. Jakarta.

Chambers, Robert, 1983, *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*, LP3ES, Jakarta

.....1985. *Rural Development : Putting The Last First*. London ; New York.

Creswell, John W., 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Dahan, Abdulah, 2016, *Nilai Keindonesiaan, Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Damanhuri, Didin, 2014, *Ekonomi Politik Indonesia Dan AntarBangsa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Damsar, Indriyani, 2016, *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta

Denhardt, Janet V. dan Robert B. Denhardt. 2003. *The New Public Service: Serving, not Steering*. Armonk, New York: M.E Sharpe.

..... "The New Public Service: An Approach to Reform". *International Review of Public Administration* 8 (1).

..... 2000. "The New Public Service: Service Rather than Steering". *Public Administration Review* 60 (6).

Deliaenov, 2006, *Ekonomi Politik*, Erlangga, Jakarta

Depdiknas (Departemen Pendidikan Nasional), 2003, *kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3 Jakarta: Balai Pustaka

Depdiknas (Departemen Pendidikan Nasional) ,2004. *Rencana Strategis Tahun 2000-2004 Pembangunan Bidang Pemuda*.

Dillon, H. S., 2016, *Nilai Keindonesiaan Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

Draker, Peter. 1993. *The Discipline of Innovation*, Harvard Business Riview, November-Desember, hlm. 149-165.

Echdar, Saban, 2013, *Emperical Model study Public Interst Entrepreneurship (Central Market Study in Sungguminasa Kabupaten Gowa)*, *International Jurnal Of Business and Management Invention*, ISSN (online):2319-8028) www.ijbmi.org Volume 2 Issue 9 september 2013.

Edward III, George C, 1980, *Implementing Public Policy*, Washington DC Congress Conal Quartely Press.

Effendy, Khasan, 2010, *Penguatan Pemerintahan Desa*, Cv. Indra Prahasta, Bandung..

Eko, Sutoro, 2002, dalam Cholisin, Pemberdayaan masyarakat, makalah disampaikan pada gladi manajemen pemerintahan desa bagi kepala bagian/kepala urusan hasil penyisihan, tahun 2001 di lingkungan Kab. Sleman, Yogyakarta.

Eko, Sutoro, 2004, Model Sosial, Desentralisasi dan Demokrasi Lokal, Analisis CSIS, Vol. 33.No. 3 hal 299-326

Endraswara, Suwardi, 2016, Falsafah Hidup Jawa, Cakrawala, Yogyakarta

E. Stiglitz, Joseph, 2006, Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang lebih Adil

Fanani, Zainuddin, 2005, *Restrukturisasi Budaya Jawa Perspektif KGPAAN MN I*, Muhammadiyah Press, Surakarta.

Foy, Nancy. 1994. Empowering People at Work, London: Grower Publishing Company

Firmanzah, 2016, Nilai Keindonesiaan Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

Friedman, John. 1992. Empowerment The Politics of Alternative Development. Blackwell Publishers, Cambridge, USA.

Flora CB, Luther v.200, *An Introduction to Building Community Capacity. di Dalam Peter Vs dan Loveridge S, editor. Small Town and Rural economic Development A case Studies Approach. Westport: Praeger Publisher, 88 Post Road West.*

Fukuyama, Francis, 1995, *Trust : The Sicial Virtues and the Creation of Prosperity*, The free Press, New York.

....., 2000, *The Great Depression, Human Nature and the Reconstitution of Sosial Order*, Profile Books, London.

....., 2002, *Trust, Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran, Terjemahan*, Qalam, Yogyakarta

Geertz, Clifford, 2017, Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa, Komunitas Bambu, Depok

Gie, The Liang, 2001, *Administrasi Perkantoran Modern*, Nur Cahaya, Yogyakarta

Global Entrepreneurship Monitor, 2009, Excutive Report, Niels Bosma, Jonathan levie

Guinness, P, 2009, *Kampung, Islam and Statein Urban Java*, KITLV Press, Leiden

Habibie, Ilham, 2016, *Nilai Keindonesiaan Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

Hamungkubuwono X, Sri Sultan, 2008, *Kebangkitan Kembali Pemuda Indonesia 1908-2008* "<http://www.gp-ansor.org>"

Handayani, Suci. 2006. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama)*. Surakarta: Kompip Solo

Hezel, Francis X. SJ., 2009, *The Role of Culture in Economic Development*. Micronesian Counselor - Issue 77

Henry, Nicholas. 1995. *Public Administration and Public Affairs (Sixth Edition)*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall

Hidayat, Bambang, 2016, *Nilai Keindonesiaan Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

Hoed, Benny H, 2016, *Nilai Keindonesiaan Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

Holt, K, David, , *Entrepreneur & Entrepreneurship*, Kencana, Jakarta, 2005

Howkins, John, 2005. *Asia-Pacific Creation Communities : A Strategy for the 21st Century Senior Expert Symposium* Jodhpur, India, 22-26 February 2005

Hughes, helen, 1992, *Keberhasilan Industrialisasi di Asia Timur. (terjemahan Julius A Mulyadi, Achieving Industrialization in East Asia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Isbandi, Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI press

Islamy, Irfan, 2005, Ringkasan diskusi / kuliah Pebandingan Kebijakan Publik Program S3 Administrasi Publik UB Malang 18 September 2005, tidak dipublikasikan

James J, Spillane , 2003, *Neoliberalisme*, terjemahan Wibowo, I & F. Wahono (editor), : *Industri Ringan Kaki: Neo- Leberaisme dan Investasi Global* , Cindelarast Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta.

Jimu, M.I. 2008. *Community Development*. Community Development: A Cross-Examination of Theory and Practice Using Experiences in Rural Malawi. *Africa Development*, Vol. XXXIII, No. 2, 2008, pp. 23-3.

Joesoef, Daoed, 2014, *Studi Strategi, Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*, Kompas, Jakarta

....., 2016, *Nilai Keindonesiaan, Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

Jones, Charles O, 1984, *an Introduction to The Study of Public Policy*, Third Edition California, Brook Publishing.

Jones, G, 2009, *Youth*, Polity Press, Cambridge

Kaban, Yermias T, 2004, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Konsep, Theory dan Issu, Gaya Media , Yogyakarta.

Kasali, Rhenald, 2005, *Change*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta

Kasim, Azhar: Husaein, Martani : Anwar, Rozan : Boon Neo Siong, 2015, *Mengkonstruksi Indonesia Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance*, PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta

Kartasasmita, Ginanjar, 1996, *Power and empowerment, sebuah telaah mengenai konsep pemberdayaan masyarakat*, Jakarta

Karsono (Ed), 2008, *Rekonstruksi Pemuda*. Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta

Kees vsn der Heijden, 2005, *"The Art of Strategic Conversations," 2nd Edition*. John Wiley & Sons Ltd.

Keesing. R, 1974, *Theories of Culture*, *Annual Review of Anthropology*. Palo Alto

King, Cherly Simrell & Kathryn M. Feltey & Bridget O'Neill Susseel, 1998, *The Question of Participation: Toward Authentic Public Participation in Public Aaministration*. *Public Administration Review*, July/Agust, Vol. 58 No. 4

Koentjaraningrat, 1984, *Kebudayaan Jawa*, Balai Pustaka, Jakarta

..... *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia. 1992

..... 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta.

..... 2009: *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. *Djambangan*. Jakarta. Longman

Kodrat, David S, 2009, *Manajemen Strategi : Membangun Keunggulan Bersaing Era Globalisasi Di Indonesia Berbasis Kewirausahaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Koning, J, 2007, *Generations of Change: A Javanese Village in the 1990s*, PhD Thesis, University Of Amsterdam

....., 2004, *Generation of Change: Migration, Family Life and Identity Formation in a Javanese Village During the New Order*, Gajahmada University Press, Yogyakarta

Kunio, Yoshihara, 2000, *Asia Percapita Why National Incomes Differ In East Asia*, Asia –Pacific Press Holding Ltd, London.

Kuhn, Thomas, 1976, *The Logic Of social System, Second Printing*, Jossey-Bass Publisher, USA

Kuntowijoyo, 1985, *Agama dan Seni: Beberapa Masalah Pengkajian Interdisipliner Budaya Islam Di Jawa, dalam pengaruh India, Islam dan Barat dalam Proses Pembentukan Budaya Jawa*, Protek Javanologi, Yogyakarta.

....., 1987, *Budaya Dan Masyarakat*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta

....., 2006, *Budaya Dan Masyarakat, edisi Paripurna*, Tiara Wacana, Yogyakarta

Kwon, Keedon, 2007, *Economic Development in East Asia And A Critique of The Post Confucian Thesis*", *Theory and Society*, Vol 36, No. 1, pp 55-83

Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,

....., 2014, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Bandung, Mizan

..... 2015, *Revolusi Pancasila*, Bandung, Mizan, 2015.

....., 2016, *Yang Laju dan Yang Layu,: Membumikan Agama Dalam Krisis Ruang Publik*, Rekatomatama, Bandung

Laporan Akhir, 2013, *BackGround Study*, RPJM 2015-2019, Bidang Pemuda dan OlahRaga, Badan Perencanaan Pembangunan nasional.

Latif, Yudi, 2016, *Nilai Keindonesiaan, Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

Latifah, Eva, 2016, *Nilai Keindonesiaan, Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

Lawang, Robert M.Z, 2005, *Kapital Sosial dalam Orespektif Sosiologik*, FISIP UI PRESS, Universitas Indonesia

Lie, A, 2004. *Pendidikan dalam Dinamika Globalisasi*, dalam Widiastono, T. D. (ed) *Pendidikan Manusia Indonesia*, Penerbit Kompas Buku, Jakarta

Nuryanti, Wiendu, 2012, *Membangun Indonesia Masa Depan: Kebudayaan sebagai Panglima (Dalam "Kebudayaan Mendesain Masa Depan")*. Jakarta: UST-PRESS.

LIPI, 2010, *Kesiapan Generasi Muda Indonesia Menyongsong Perubahan Kepemimpinan Di Tahun 2015 Mendatang* / Henny Warsilah, Dede Wardiet, Azis Suganda, Endang Turmudi, Kurtubi, LIPI Press, Jakarta.

Long, N. & Long, A. (eds.) (1992) *Battlefield of Knowledge: The Interlocking of Theory and Practice in Social Research and Development*. London: Routledge.

LP3ES, 2016, *Transformasi Kesejahteraan : Pemenuhan Hak Ekonomi Dan Kesehatan Semata*, Pustaka LP3ES, Jakarta

Lupiyoadi, Rambat, 2004, *Entrepreneurship From Mindset to Strategy*, Fakultas Ilmu Ekonomi UI, Jakarta

Lloyd, C. (ed), 2005. *Growing up Global: The Changing Transitions to Adulthood in Developing Countries*, The national Academies press, Washington, DC

Madjid, Nurcholish, 1973, Remaja, Keluarga, & masyarakat Di Kota Besar. Suatu Usaha Pendahuluan untuk Memahami Persoalan Sekitar, " Generation Gap", Prisma, Vol 2 . No. 5 , h. 45-51

Madubrangti,Diah,2016, *Nilai Keindonesiaan, Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Dearah, Yogyakarta, Penerbit Andi.

Martine Clemensson, 2010, *How to Build an enabling environment for youth entrepreneurship and sustainable enterprises*, papaer for the knowledge sharing event on Intergrated Youth Employment Startegis , Moscow , ILO

Martono, Nanang, 2014, *Sosiologi Perubahan Sosial : Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, PT RajaGrafindo Persada, Depok

Matthew B. Miles, A Michael. Huberman, 2007, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Midgley, James, 1986, *Introduction :Social Development, the State and Participation in James Midgley, etal. Community Participation, Social Development and the State*. New York: Methuen

Miftahudin (penerjemahan), 2003, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Miles, Matthew B.; dan A. Michael Huberman; dan Johnny Saldana,2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods of Sourcebook*.Singapore: Sage Publications Inc.

Mindarti, Lely Indah, 2007, *Revolusi Administrasi Publik* , Bayumedia Publishing, Malang

Mulder, Neils, 1984, *Kebatinan Dan Hidup sehari-hari Orang Jawa*, Gramedia, Jakarta.

Moelyono, Mauled, 2010, *Menggerakkan Ekonomi Kreatif Antara Tuntutan Dan Kebutuhan*, Rajawali Press, Jakarta.

Moleong, J.L., 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mubarak, Z., 2010, *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*. Tesis. Program Studi Magister Teknik Pemberdayaan Wilayah Dan Kota. Undip. Semarang.

Muhammad, Abdulkadir, 2011, *Ilmu Sosila Budaya Dasar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulyana, Deddy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Muluk, Khairul, 2007, *Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah, Sebuah Kajian Dalam Pendekatan Berfikir*, Lembaga Penerbitan FIA-UNIBRAW & Bayu Media Publishing, Malang

Mulyanto, Heru & Wulandari, Anna, 2010, *Penelitian Metode & Analisis*, CV Agung, Semarang.

M. Suparmoko, Irawan, 1999, *Ekonomika Pembangunan*, BPFE, Yogyakarta

Nasution, Muslimin, 2000, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Konteks Pembangunan Nasional*, dalam Baihaqi Abd. Majid dan Saifudin A Rasyid, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan System Syariah*, Pinbul, Jakarta.

Naisbitt, Jhon, *Global Paradox*, 1994, *Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil*, Bina Rupa Aksara

Naomi Klein, 2007, *The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism*, New York: Henry Holt and Company

Nawawi, Hadari, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Nazir, Moh., 1999, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu, 1989, *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta

....., 1990, *Pembangunan, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

-, 2003, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan) Jilid I*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
-, 2006, *Kybernologi, Scientific Enterprise*, Sirao Credentia Center, Jakarta
-, 2007, *Kybernologi, Sebuah Pembaharuan*, Sirao Credentia Center, Jakarta
- Nilan, P. 2000a , *The Risky Future of Youth Politics in Indonesia, Review of Indonesiaan and Malaysian Affair*, vol. 38.No. 1, pp 173-94
-, 2004b, *The sosial Meaning of media for Indonesia Youth, dalam Globalization, Cultur and Inequality in Asia*, ed, T. Scrase, T. Holden, & M. Baum, Trans Pacific Press, Melbourne, pp. 168-90.
-,2006, *The reflexive youth culture of devout Muslim Youth in Indonesia, dalam Global Youth ? , Hybrid Identities*, Plural Worlds, ed. P Nilan & C. Feixa, Routledge, London and New York, pp 110-91
-,2009, *Contemporary Masculinities and Youth Men in Indonesia*, Indonesia and the Malay Word, vol 7, no. 109, pp 327-44
- Nugroho, Riant, 2008, *Public Policy*, Elek media Komputindo, Jakarta
-, 2014, *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
-,2015, *Membangun Entrepreneur Indonesia, Tantangan Manajemen Presiden*, Jokowi, PT. Elex Media Komputindo.
- Osborne, David dan Ted Gaebler. 2003. *Reinventing Government (Mewirusaha Birokrasi): Sepuluh Prinsip untuk Mewujudkan Pemerintahan Wirausaha*. Jakarta: PPM.
- Parson, T, 1951, *The Sosial System*, Free Press, New York.
- 1991. *The Social System*. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company
- Paul Hirst & Graham Thompson,1996, *Globalization in Question*, Cambridge: Polity Press.
- Prasojo, Eko, 2005, *Penciptaan Good Governance*, Fisip UI, Depok
- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Profil, 2015, *Selayang Pandang Kabupaten Bantul*

Riyadi, Bratakusumah, D.S., 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah : strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Sun, Jakarta

Ritzerz, George, 2005, *The Globalization of Nothing (Terjemahan)*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Roderick Rhodes. 1996. *The New Governance: Governing without Government*, in *Political Studies*. XLIV. Buckingham: Open University Press.

Roger Sidaway, 2005. *Resolving Environmental Disputes: From Conflict to Consensus*. London: Earthscan

Roz. D. Lasker, Ellisa E. Weiss., and Rebecca Miller. 2001. Jurnal : *"Partnership Synergy : A Practical Framework for Studying and Strengthening the Collaborative Advantage"*. New York Academy of Medicine. Published by Blacwell Publishers. USA.

Robert Kuttner, 2007, *The Squandering of America: How our Politics Undermines Our Prosperity*, New York: Knopf.

Said, M Mas Oed, 2016, *Nilai Keindonesiaan, Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

Samsudin, Azis, 2008, *Kaum Muda Menatap Masa Depan Indonesia*, RM Books, Jakarta

Sagojo dan Pudjiwati, Sagojo. 1996. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Penerbit : Universitas Gajah Mada.

Saifudin, Achmad Fedyani, 2009, *Menjaga Kesatuan dan Persatuan : Pemuda Kita dalam Dunia yang semakin Contesed*. Dalam Zulkifli Akbar, Karsono, Budiyanto (Eds). *Dialog Pemuda dalam Membangun Bangsa*, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta.

Sampurno, 2007, *Knowledge Based Economy, Sumber Keunggulan Data saing Bangsa*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Sen, Hill, 2000, *Media Culture and Politics in Indonesia*, Oxford University Press, Melbourne.

Setiawan, A.B.S, 2006, *Pengaruh Keberadaan Mall Terhadap Subkultur Anak Muda di Solo: Laporan Penelitian*, Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Sebelas maret, Surakarta.

Siagian, P Sondang, 1995, *Etika Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta.

.....2005. *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara

Sjahrir, 1988, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan dalam David C. Korten dan Sjahrir, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Penerjemah: A. Setiawan Abadi, Jakarta : YOI

Slamet, M. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Pres

Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar

Solihin, Ismail, 2012, *Manajemen Strategik*, PT. Erlangga, Jakarta

Solow, Robert M, 2000, *Notes on Social Capital and Economic Performance*. Dalam Dasgupta, Partha (Eds), *Social Capital A Multifaceted Perspective* (hlm. 6-10) Washington DC : *The International Bank for Reconstruction and Development*, The World Bank.

Suharto E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: PT Refika Aditama

Suryana, 2013, *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru Mengubah Ide dan menciptakan Peluang*, Salemba Empat, Jakarta

Sugiyono, 1997, *Metode Penelitian administrasi*, Alfabeta, Bandung

Suryono, Agus, 2001, *Teori Dan Isu Pembangunan*, UM Press, Malang

....., 2006, *Ekonomi Politik Pembangunan Dalam Prespektif Teori Ilmu Sosial*, UM Press, Malang

Suseno, Magniz, 1985, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*, Gramedia, Jakarta

Sutowo, Pontjo, 2013, *Kebangsaan Kita Mengukuhkan Komitmen Kebangsaan Melahirkan Pemimpin Ideal Yang Berkarakter*, Aliansi Kebangsaan, Jakarta.

Sutrisno SJ, Mudji, 2016, *Nilai Keindonesiaan, Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

Stewart, Thomas A, 1998, *Intellectual Capital, Model Intelektual, Kekayaan Baru Organisasi*, Terjemahan, PT. Elek Media Komputindo, Jakarta.

Swasono, Sri Edi, 2010, *Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*, Yayasan Hatta, Jakarta

..... 2015, *Keindonesiaan : Demokrasi Ekonomi, Keberdaulatan, Kemandirian*, Aditya Media, Yogyakarta.

....., 2016, *Nilai Keindonesiaan, Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

Suropati, Mohammad a, 2015, *Kumpulan Mutiara Kearifan Jawa*, Syura Media Utama, Bantul Yogyakarta.

Supriady, Deddy dan Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: SUN

Syahnakri, Kiki, 2015, *Teropong Prajurit TNI*, Penerbit Buku Kompas. Jakarta

Sziraczki, G & Reerink, A. 2004. Report of Survey on the School-to- work Transition in Indonesia, ILO Gender Promotion Program Working Paper No. 14 Geneva.

Tachjan, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik*, Truen, RTH, Bandung

Tim Perencana Desa, 2009-2004, *Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM-DES)*, Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri, Bantul.

Tanudirjo, Daud Aris, 2016, *Nilai Keindonesiaan, Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

Tirtosudarmo, Riwanto, 2016, *Nilai Keindonesiaan, Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

Thoha, Miftah. 2009. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

....., 2012, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *"Perkembangan Mutakhir Ilmu Administrasi Negara". Teori-teori Politik Dewasa Ini*. Penyunting: Miriam Budiardjo dan Tri Nuke Pudjiastuti. Jakarta: Rajawali Pers.

Tjokroamidjojo, B. 1986. *Manajemen Pembangunan*, Haji Masagung, Jakarta

....., 1996, *Perencanaan Pembangunan*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta

....., 2001, *Good Governance, Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, LEN, Jakarta.

Trilaksono Nugroho, Agus Surjana, 2008, *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah*, Bayumedia, Publishing, Malang

Todaro, Michael, P, Smith Stephen, C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Toffler, Alvin, 1981. *The Third Wave*, Pan Books, London

Turner, Bryan S, 2012, *Teori Sosial dari Klasik Sampai Postmodern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Vigado, Eran, (editor), 2002. *The Legecy of Public Administration : Background and Review. Dalam Public Administration : An Interdisiplinary Critical Analysis*, Marcel Dekker, Inc, New York.

Wastiono, Sadu, 2003, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah*, Cv. Fokus Media, Bandung

..... Polyando, Petrus. 2017, *Politik Desentralisasi Di Indonesia*, IPDN Press, Jatinangor

Webber, Max, 1985, *The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism*, Charles Sribners Son, New York.

Wibawarta, Bambang, 2014, *Majalah Wirausaha Dan Keuangan*, Edisi NO. 102, Candra WE Selaras, Jakarta

..... 2016, *Nilai Keindonesiaan, Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

Wigandi, Soesarsono, 2002, *Pengantar Kewirausahaan*, Sinar Baru, Algensindo, Bandung.

Wirawan, Sarlito, 2016, *Nilai Keindonesiaan, Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

White, B& Margiyanti, C.U. 2009, *Teenage Expreience of School, work and life in a Javanese Village: kali Loro (Yogyakarta)*, paper Presened at the Workshop on 'Growing Up In Indonesia, Experience and Diversity in Youth Transitions:', ANU, Canberra, 28-20 September 2009

Yansen, 2013, *Gerakan Desa Membangun*, Danar Wijaya, Malang

Yani, Ahmad, 2004, *Hubungan Keuangan Anatara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

YAPPIKA (Editor), 2004, *The empowerment of Community Based Society*, Publiater FIK-ORNOP, Sulawesi Selatan.

Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. Semarang: Ciyapps Diponegoro Universiti

Perundang-undangan

1. Republik Indonesia Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
2. Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta. 2004.
3. Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025*. Jakarta. 2007.
4. Republik Indonesia Undang-undang Nomer 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil dan Menengah
5. Republik Indonesia Undang-undang Nomer. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
7. Peraturan Pemerintah Nomer. 41/2011 Tentang Pengembangan Dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan sarana Pemuda
8. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
9. Peraturan Presiden Nomer 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator .
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomer 0613 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pelaksanaan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda.
11. Instruksi Presiden Nomer 4 Tahun 1995 Tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudidayakan Kewirausahaan.
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomer 0614 Tahun 2014 Tentang Fungsi dan Tugas Pelaksanaan Permodalan Kewirausahaan Pemuda
13. Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*. Jakarta. 2015.
14. Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor: 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental*. 2016.
15. Surat Keputusan Bersama Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 0034A/ Menpora/1996, 02/ SKB/ VII/ 1996, 0812/U/1996 Tentang Pengembangan Kewirausahaan terdidik.

JURNAL

Olajire Adeola Adegun and Comfort Olufort Olufunke Akomolafe, *Entrepreneurship Education And Youth Empowerment In Contemporary Nigeria.2013*

H. Saban Echdar , *Empirical Model Study Public Interest Entrepreneurship (Central Market Study In Sungguminasa Kabupaten Gowa), 2013*

Jacek Jakubczak & Anna Rakowska, *The Role of Education and culture in the development of Youth Entrepreneurship in European Union, 2013*

Lucio Cassia, Giuseppe Criaco, Tommaso Minola, *Overcoming Barriers In The Entrepreneurial Process Of Youth: The Importance of Support Programs, 2013*

Irene Wangari Mwangi, Kenneth Lawrence Wanjau, *The Role of SACCO in Growth of Youth Entrepreneurship in Kenya: A Case of Nairobi County, 2012*

Hanadi Mubarak Al Mubarak & Michael Busler, *Beyond Incubator: Youth Entrepreneurship Generation, 2012*

Lemhanas , *Peningkatan Daya Saing Industri Indonesia Guna Menghadapi Asean_China Free Trade Agreement (ACFTA) Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional, 2012*

G.E. Ifenkwe, *Mobilizing and Empowering Youths For Sustainable Community and Rural Development in Nigeria, 2012*

Olawale Fatoki , lynety Chindodaga, *An Investigation into the Obstacles To Youth Entrepreneurship In South Africa, 2011*

Saphetha Appie Gwija, Chuks Eresia-Eka, Chux Gervase Iwu, *Assessing The Impact of support Strucures And Initiatives To Youth Entrepreneurship Development in A selected Township in Western Cape Province Of South Africa, 2014*

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 3977 / S3 / 2015

Menunjuk Surat : Dari : Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Nomor : 13699/UN10.3/PG/2015

Mengingat : Tanggal : 29 September 2015 Perihal : Ijin Penelitian

a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama : **SUSETYA HERAWATI, S.T., M. SI**

P. T / Alamat : **Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya**

NIP/NIM/No. KTP : **Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145**

Nomor Telp./HP : **127030200012005**

Tema/Judul Kegiatan : **08176880068**

MEMBANGUN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA INDONESIA MELALUI NILAI-NILAI BUDAYA KEARIFAN LOKAL (STUDI DI KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Lokasi : **Desa Wukirsari Kec. Imogiri**

Waktu : **15 Oktober 2015 s/d 15 Januari 2016**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 15 Oktober 2015

Kepala,
Kepala Bidang Dalitbang,
Tiau Sakti S.S. M.Hum
NIP. 19700105 199903 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Kantor Kantor Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul
4. Camat Imogiri
5. Lurah Desa Wukirsari, Kec. Imogiri
6. Ka. Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
7. Yang Bersangkutan

Lampiran :

1. KOMANDO RESOR MILITER 072/ PAMUNGKAS KOMANDO DISTRIK MILITER 0729

KOMANDO RESOR MILITER 072/ PAMUNGKAS
KOMANDO DISTRIK MILITER 0729

Bantul, November 2015

N o m o r : B / / XI / 2015

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Dokumentasi

Perihal : Laporan pelaksanaan Diskusi Panel

Kepada _____

Yth. Ibu Susetyo Herawati

Di Jakarta

1. Sehubungan telah terlaksananya kegiatan Diskusi Panel kerjasama antara Mahasiswa Program Doktorat Universitas Brawijaya Malang yang sedang meneliti di Kabupaten Bantul pada Situs Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri dengan mengangkat Tema Kewirausahaan Pemuda dan Program Bela Negara, Rasa Cinta Pada NKRI.

2. Sehubungan dasar diatas, dengan ini kirimkan pelaksanaan Diskusi panel di Wilayah Kodim 0729/Bantul TA. 2015 sebagai berikut :

a. Pelaksanaan :

- 1) Hari : Kamis,
- 2) Tanggal : 26 November 2015;
- 3) Pukul : 09.00 s.d selesai;
- 4) Tempat : Aula Makodim 0729/Bantul.

b. Nara Sumber:

- 1) Kasrem 072/Pamungkas
- 2) Kabid Litbang Bapeda Kab Bantul.

3) Ketua Dewan Pembina Hipmi Bantul.

c. Tamu Undangan:

1) TNI : 5 Orang.

2) Budayawan /Seniman : 5 Orang

3) Pemerintah Desa Wukirsari : 2 Orang

4) Kadis Prindakop.

5) Kadisdik Menof Kab Bantul.

6) Kepala Kantor Pora Kab Bantul.

7) Kasi Pemuda Kantor Pora Kab Bantul.

8) Kepala Kantor Pora Provinsi DIY.

9) Kasi Pemuda Kantor Pora Provinsi DIY.

2

d. Peserta Diskusi Panel Pemuda Wirausaha

1) Dari Desa Wukirsari Kec Imogori : 11 orang.

2) Dari Desa Sabdodadi Kec Bantul : 10 orang.

3) Dari Kec Jetis : 2 orang.

4) Dari Kec Pleret : 2 orang.

5) Dari Kec Pandak : 5 orang.

6) Dari Kec Pajangan : 3 orang.

7) Dari Kec Kretek : 4 orang.

8) Dari Kec Sewon : 2orang.

9) Dari Kec Kasihan : 3 orang.

Jumlah : 42 orang.

3. Demikian mohon dimaklumi.

Komandan Kodim 0729/Bantul,

Tembusan :

Tumadi, S.Sos. Letnan Kolonel Kav

NRP 11050011250570

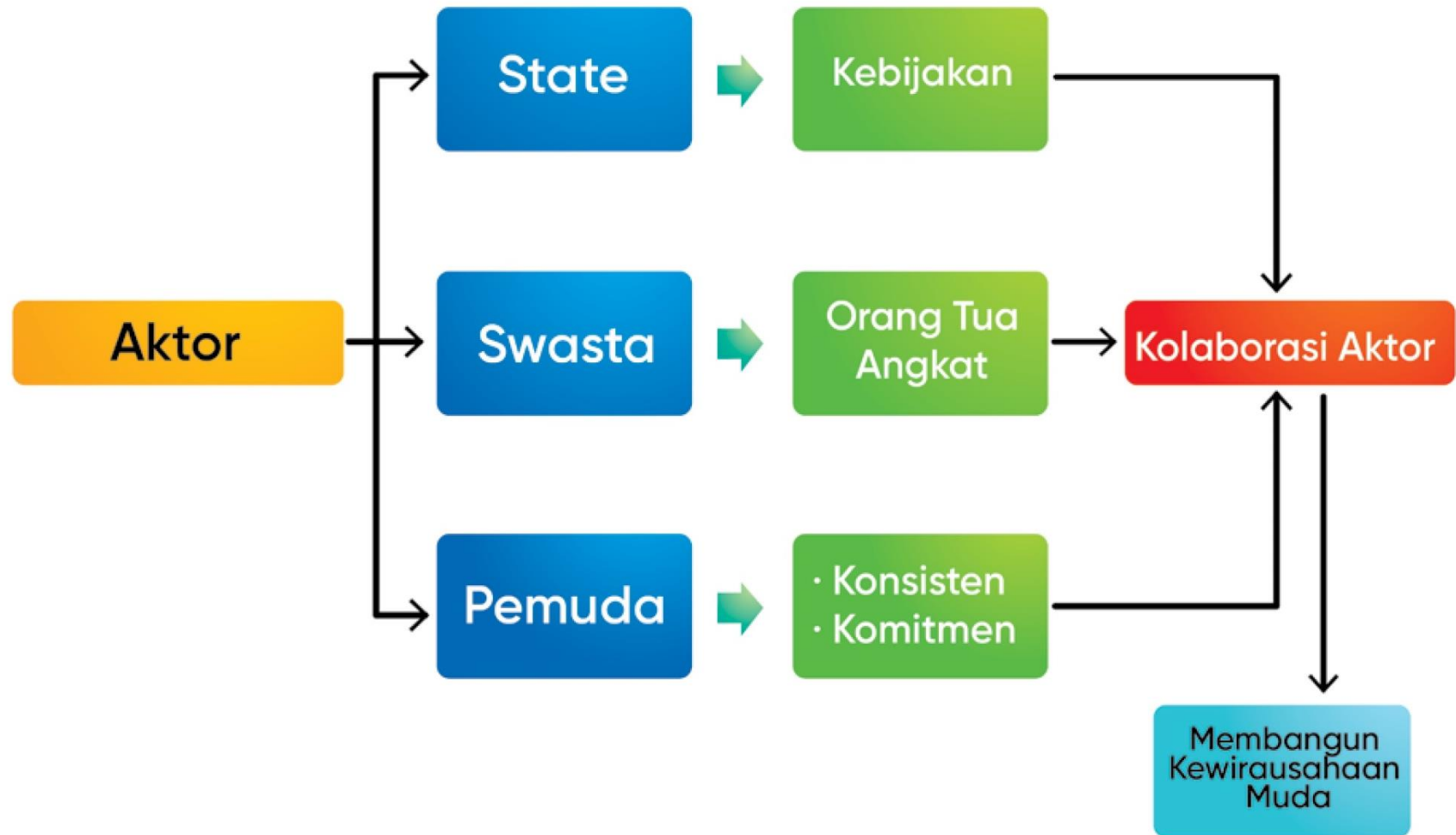
1. Kas Rem 072/Pmk.

PESERTA DISKUSI
KEWIRAUSAHAAN PEMUDA SE-KABUPATEN BANTUL DIY

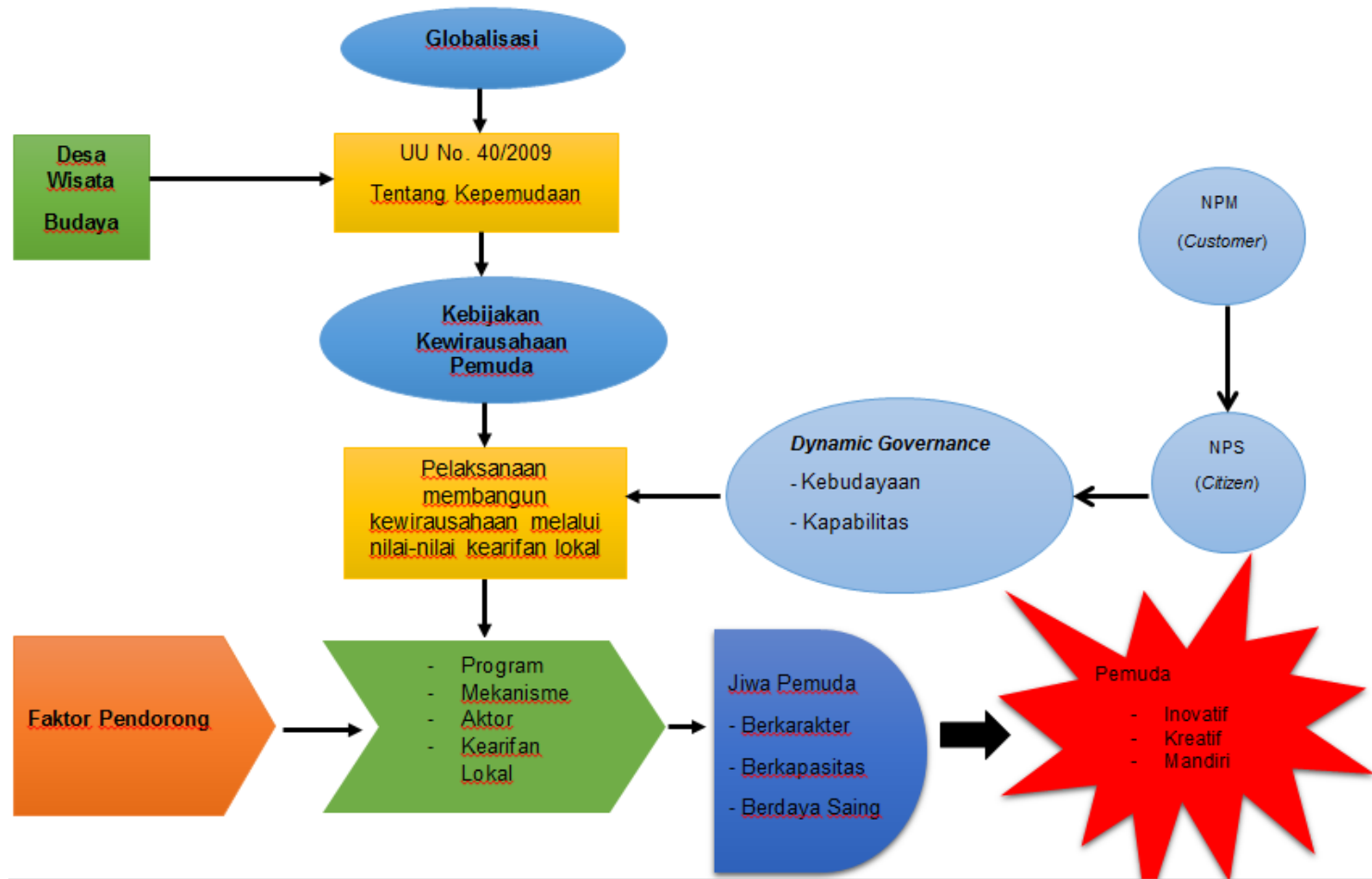
NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	Antoro Bodo Purnomo		Pondok Plumbungan Sida	
2	Murizoro	alem Gajam.	Pondok Baimi	
3	Armynda RP		Pondok Bherdang	
4	Surahder		Negeri Wulisan	
5	Ponidi / Budat			
6	Ayu STefani			
7	Aqus Basuki		GRI Logo uti kisan	
8	Samir		SEWU - Bantul	
9	Giri Triharyadi		Candun Jetis	
10	Ri Eshningah		Kulirsari Imogin	
11	ARIS. Handoko		Seman	
12	Y Z A N N A	FKPI		
13	GATOT		Jl. W. 205 Kalibaycan	
14	Ridwan S	Pondak	Pondak	
15	SEPRIYANTO	PAN DAK	GESIKAN IV WIDING	
16	Riyadi	Imogiri / Pucungcraft	Karangany, Imogiri	
17	Maryanti	DS Wulisan		
18	DINI ESA		Ngabean	
19	Sekar Raka Wangi		Pondak RT 05	
20	MARYAMA	Pesang Samykan	Pesang Samykan Wulisan	
21	SUNARDI	UKM Lumban Craft	Negeri Sebdagati	
22	Inda Rachman		Duren Pongkit, Kotak	
23	Hadi Suryono	Aspenloglog	Jl. Prop Supono	
24	Suportjama	Wulisan	Benda RT 5 Wulisan	
25	Sulratihah		Grandakan Bantul	
26	Tri Wahyuni		Kretek Bante	
27	RIYADI	KIRAUSSA	MURTI BADING SANDEN BTL	
28	Teguh NARIMAH	WIRASWASTA	GRANDAKAN BANTUL	
29	CATOT SAJANGKA		SEBAHAN	
30	Ponjikan	Ponggan	Pondok Bherdang Tugastika Sida	
31	Miyana	Wirausaha	Gras Cemeria	
32	SEWANTO	KORSET, PLEKE BTL	KARYAWAN	
33	Nurindratno	BPO SY	Alun Alun Kidul Yk	
34	Jakani SUSWATI	WIRASWASTA	Manding BTL	
35	Rama Sulistiyan		Manding BTL	
36	PURWANTI		Manding Btl	
37	M-Sigit N	KADANE TARUNA	SEWU BTL	
38	HERMANTO	KARAW TARUNA	Mel. Ica BTL	
39	Hery Ruswanto	Ka FKPI	Bantul	
40	Indy Lesana	Hipmi Rukel		
41	Hadi prabowo	DS Wulisan	KR Asem	
42	Susito Hapoto	KT	Wulisan	
43	Tasir Zamzani	Jahif	Tulung Pandang	

Kolaborasi aktor

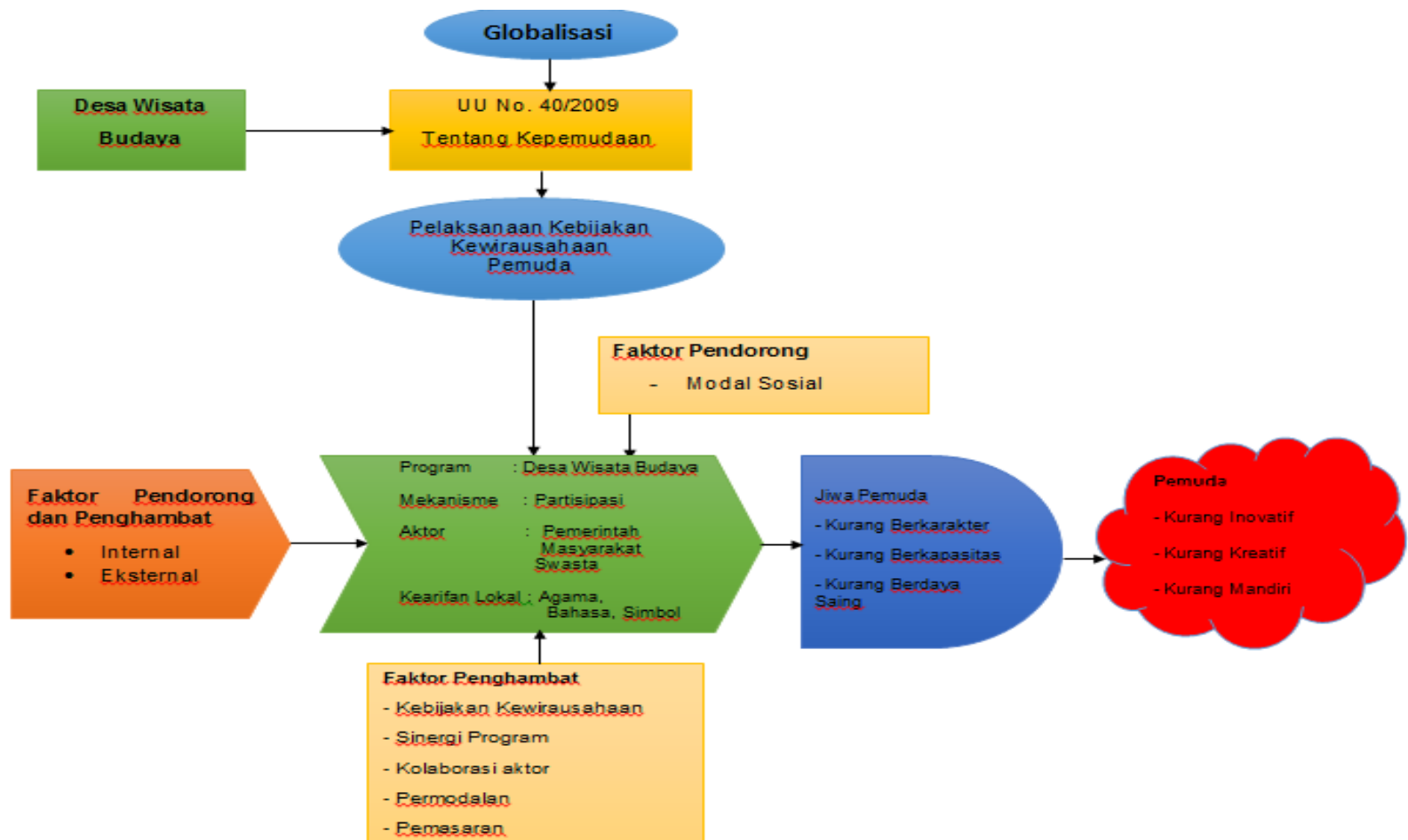
(Herawati, 2017)



Kerangka Pikir



Kondisi eksisting



Rekomendasi (Herawati, 2017)

